

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional,
Suplemen Kesehatan dan Kosmetik
Tahun 2025



20 25



LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional,
Suplemen Kesehatan dan Kosmetik
Tahun 2025



20 25



Kata Pengantar

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Interim Deputy Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik Badan POM untuk Triwulan III Tahun 2025 dapat disusun dan diselesaikan dengan baik.

Laporan ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan kinerja Deputy II BPOM dalam Triwulan III Tahun 2025, serta merupakan implementasi dari prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, transparansi, dan akuntabilitas kinerja sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), serta Pedoman SAKIP Badan POM yang terbaru.

Dalam penyusunan LAKIP Interim ini, kinerja Deputy II BPOM diukur berdasarkan indikator-indikator yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja dan mengacu pada dokumen Rencana Strategis Deputy II BPOM Tahun 2025–2029. Laporan ini memuat capaian indikator kinerja utama, analisis atas hasil yang diperoleh, serta identifikasi kendala dan langkah tindak lanjut untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas ke depan.

Kami menyadari bahwa dalam proses penyelenggaraan kinerja, masih terdapat berbagai tantangan dan ruang untuk perbaikan. Oleh karena itu, melalui laporan ini, kami berkomitmen untuk terus melakukan upaya perbaikan berkelanjutan guna mendukung peningkatan kinerja pengawasan obat tradisional, suplemen kesehatan, dan kosmetik, serta memperkuat kontribusi terhadap perlindungan kesehatan masyarakat.

Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam pelaksanaan program dan kegiatan Deputy II BPOM selama Triwulan III Tahun 2025, serta dalam penyusunan laporan ini. Semoga laporan ini dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai akuntabilitas kinerja Deputy II BPOM dan menjadi dasar perbaikan serta peningkatan kinerja pada periode berikutnya.

Jakarta, Oktober 2025

**Deputy Bidang Pengawasan Obat Tradisional,
Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik**



Mohamad Kashuri

Executive Summary

Tahun 2025 merupakan tahun konsolidasi dan penguatan implementasi Rencana Strategis Deputy II BPOM dalam pengawasan Obat Bahan Alam, Suplemen Kesehatan, Obat Kuasi, dan Kosmetik. Tujuan strategis yang ditetapkan meliputi peningkatan efektivitas pengawasan pre-market dan post-market, peningkatan peran aktif lintas sektor, peningkatan kesadaran masyarakat terhadap produk yang aman dan bermutu, penguatan regulatory assistance untuk mendorong kemandirian industri, serta terwujudnya tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan berintegritas. Sasaran tersebut diukur melalui 24 Indikator Kinerja Sasaran Program yang mencerminkan dimensi outcome, kepatuhan, pelayanan publik, serta tata kelola organisasi.

Secara umum, capaian kinerja menunjukkan hasil yang sangat baik. Dari 24 indikator, 21 indikator dapat diukur, dengan 16 indikator berpredikat sangat baik, 4 indikator berpredikat baik, dan 1 indikator berpredikat cukup, sementara 3 indikator tidak terealisasi akibat pemblokiran anggaran. Nilai Kinerja Organisasi mencapai 101,74 dengan predikat Istimewa. Beberapa indikator strategis menunjukkan capaian kuat, antara lain Nilai Kinerja Anggaran kategori sangat baik, Indeks Pelayanan Publik dengan nilai tinggi di seluruh unit kerja, Indeks Kualitas Kebijakan yang didukung regulasi berbasis *evidence*, serta capaian pengawasan produk, sarana produksi, distribusi, dan iklan yang secara umum menunjukkan tingkat kepatuhan yang baik meskipun masih terdapat variasi pada beberapa sektor.

Dari aspek pengelolaan sumber daya, pagu anggaran Deputy II BPOM Tahun 2025 sebesar Rp51.852.180.000 (termasuk hibah WHO Rp385.441.000), namun terdapat pemblokiran sebesar Rp32.288.665.000 sehingga pagu efektif menjadi Rp19.563.515.000. Realisasi anggaran mencapai Rp19.563.374.229 atau 99,99% dari pagu efektif, yang mencerminkan pengelolaan anggaran yang presisi dan akuntabel. Pengukuran efisiensi menunjukkan bahwa sebagian besar sasaran program menghasilkan output di atas 100% dengan input yang terkontrol, sehingga rasio efisiensi berada pada kategori optimal. Hal ini menunjukkan bahwa keterbatasan anggaran tidak mengurangi efektivitas capaian kinerja.

Meskipun demikian, terdapat kendala yang memengaruhi sebagian capaian, terutama akibat pemblokiran anggaran yang menyebabkan tiga indikator tidak dapat direalisasikan, termasuk program berbasis pemberdayaan daerah. Selain itu, pertumbuhan industri kosmetik dan distribusi yang sangat cepat belum sepenuhnya diimbangi dengan kapasitas pembinaan akibat efisiensi anggaran, serta tantangan pengawasan iklan di era digital yang semakin kompleks. Dari sisi tata kelola, masih terdapat ruang perbaikan pada aspek konsistensi dokumentasi dan penguatan analisis berbasis outcome dalam sistem akuntabilitas kinerja.

Sebagai langkah tindak lanjut dan antisipasi risiko tahun mendatang, Deputy II BPOM melakukan penguatan manajemen risiko terintegrasi dalam perencanaan dan penganggaran, prioritas pengawasan berbasis risiko, serta intensifikasi monitoring dan evaluasi kinerja secara berkala. Transformasi digital melalui pemanfaatan *Artificial Intelligence* dalam sistem perizinan dan regulasi terus dikembangkan untuk meningkatkan efektivitas layanan dan pengawasan. Di samping itu, strategi pembinaan preventif kepada pelaku usaha, penguatan sinergi lintas sektor, serta optimalisasi pemanfaatan informasi kinerja sebagai dasar

penyesuaian kebijakan akan menjadi fokus utama guna memastikan keberlanjutan peningkatan kinerja pada tahun berikutnya.

.

Highlight Kinerja

Pada Tahun 2025, Deputy II BPOM mencatatkan capaian strategis dengan diraihnya predikat Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) oleh Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha OTSKK. Dengan capaian tersebut, seluruh unit kerja di lingkungan Deputy II BPOM kini telah berpredikat WBK. Keberhasilan ini menegaskan komitmen Deputy II dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan transparan melalui penguatan manajemen perubahan, peningkatan kualitas pelayanan publik, optimalisasi pengendalian internal, serta konsistensi penerapan budaya kerja berintegritas. Predikat WBK bukan sekadar pengakuan administratif, tetapi mencerminkan transformasi nyata menuju birokrasi yang profesional dan berorientasi pada kepercayaan publik.

Pada tahun yang sama, Deputy II BPOM juga menunjukkan penguatan pada aspek komunikasi publik dan keterbukaan informasi. Melalui PPID Pelaksana Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha OTSKK, Deputy II berhasil meraih penghargaan *Bronze Winner* dalam ajang Anugerah HUMAS INDONESIA (AHI) ke-7 Tahun 2025 pada kategori PPID Terbaik – Subkategori PPID Pelaksana. Penghargaan ini menjadi bukti peningkatan kualitas pengelolaan informasi yang transparan, responsif, dan akuntabel, sekaligus memperkuat reputasi kelembagaan di tingkat nasional.

Sebagai bagian dari transformasi digital, pada 28 November 2025 Deputy II BPOM meluncurkan layanan berbasis *Artificial Intelligence* (AI) pada sistem perizinan dan regulasi untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan kualitas pelayanan publik di bidang obat bahan alam, suplemen kesehatan, kosmetik, dan obat kuasi. Inovasi ini mencakup pemanfaatan AI pada aplikasi Notifikasi Kosmetik dan *re-engineering* aplikasi ASROT. Sistem tersebut memperoleh Rekor MURI sebagai “Sistem Izin Edar Obat dan Makanan Pertama Berbasis Kecerdasan Buatan” dan sedang dalam proses pengajuan hak kekayaan intelektual. Peluncuran ini menandai komitmen Deputy II dalam modernisasi layanan publik, dengan rencana penguatan dan perluasan penerapan AI secara bertahap pada berbagai layanan komoditas di lingkungan Deputy II BPOM.

Daftar Isi

Isi

Kata Pengantar.....	i
Executive Summary	ii
Highlight Kinerja	iv
Daftar Isi.....	v
Daftar Tabel.....	vi
Daftar Gambar	x
Daftar Grafik.....	xi
BAB I - Pendahuluan	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Gambaran Umum Organisasi	1
1.3 Struktur Organisasi Deputy II.....	4
1.4 Isu Strategis	4
BAB II Perencanaan Kinerja.....	6
2.1 Uraian Singkat Renstra	6
2.2 Rencana Kinerja Tahunan (RKT).....	8
2.3. Perjanjian Kinerja (PK)	9
2.4. Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK)	13
2.5. Metode Pengukuran	24
BAB III Akuntabilitas Kinerja.....	38
3.1 Capaian Kinerja Organisasi	38
3.2 Tindak lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi	125
3.3 Pemanfaatan Informasi Kinerja.....	125
3.4 Realisasi Anggaran	127
BAB IV Penutup	131
Lampiran.....	Kesalahan! Bookmark tidak ditentukan.

Daftar Tabel

Tabel 1 : Sebaran pegawai di Deputy II BPOM	2
Tabel 2 : Komposisi pegawai berdasarkan Jabatan.....	3
Tabel 3 : Rencana Kinerja Tahunan 2025.....	8
Tabel 4 : Perjanjian Kinerja Deputy II Tahun 2025.....	10
Tabel 5 : Perjanjian Kinerja Deputy II BPOM tahun 2025 (Revisi).....	12
Tabel 6 : Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Deputy II BPOM Tahun 2025.....	14
Tabel 7 : Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Deputy II BPOM Tahun 2025 (Revisi)	19
Tabel 8 : Kategori Konversi Nilai Kinerja Anggaran.....	33
Tabel 9 : Kriteria Capaian Indikator Kinerja	35
Tabel 10 : Kriteria Predikat Nilai Kerja Organisasi	36
Tabel 11 : Tingkat Efisiensi	37
Tabel 12 : Nilai Kinerja Organisasi Tahun 2025	39
Tabel 13 : Capaian Kinerja tahun 2025	44
Tabel 14 : Perbandingan realisasi kinerja Persentase Obat Bahan Alam yang Aman dan Bermutu terhadap target 2025.....	46
Tabel 15 : Perbandingan Kinerja Persentase Obat Bahan Alam yang Aman dan Bermutu terhadap kinerja di Tahun sebelumnya	47
Tabel 16 : Perbandingan realisasi kinerja Persentase Obat Bahan Alam yang Aman dan Bermutu terhadap target Jangka Menengah 2025.....	47
Tabel 17 : Perbandingan realisasi kinerja Persentase Suplemen Kesehatan yang aman dan bermutu terhadap target 2025	49
Tabel 18 : Perbandingan Kinerja Persentase Suplemen Kesehatan yang Aman dan Bermutu terhadap kinerja di Tahun sebelumnya	50
Tabel 19 : Perbandingan realisasi kinerja Persentase Suplemen Kesehatan yang aman dan bermutu terhadap target Jangka Menengah 2025	51
Tabel 20 : Perbandingan realisasi kinerja Persentase Kosmetik yang Aman dan Bermutu terhadap target 2025	53
Tabel 21 : Perbandingan Kinerja Persentase Kosmetik yang Aman dan Bermutu terhadap kinerja di Tahun sebelumnya	54
Tabel 22 : Perbandingan realisasi kinerja Persentase Kosmetik yang Aman dan Bermutu terhadap target Jangka Menengah 2025	54
Tabel 23 : Perbandingan realisasi kinerja Indeks Kualitas Kebijakan Pengawasan Obat Bahan Alam, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik terhadap target 2025	56
Tabel 24 : Perbandingan realisasi kinerja Indeks Kualitas Kebijakan Pengawasan Obat Bahan Alam, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik terhadap kinerja di Tahun sebelumnya	57
Tabel 25 : Perbandingan realisasi kinerja Indeks Kualitas Kebijakan Pengawasan Obat Bahan Alam, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik terhadap target Jangka Menengah 2025	58
Tabel 26 : Perbandingan realisasi kinerja Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Obat Bahan Alam, Suplemen Kesehatan, Obat Kuasi, dan Kosmetik yang Ditindaklanjuti oleh Lintas Sektor terhadap target 2025.....	60

Tabel 27 : Perbandingan realisasi kinerja Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Obat Bahan Alam, Suplemen Kesehatan, Obat Kuasi, dan Kosmetik yang Ditindaklanjuti oleh Lintas Sektor terhadap kinerja di Tahun sebelumnya	61
Tabel 28 : Perbandingan realisasi kinerja Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Obat Bahan Alam, Suplemen Kesehatan, Obat Kuasi, dan Kosmetik yang Ditindaklanjuti oleh Lintas Sektor terhadap target Jangka Menengah 2025.....	62
Tabel 29 : Perbandingan realisasi kinerja Persentase Sarana Produksi Obat Bahan Alam yang Memenuhi Ketentuan terhadap target 2025	64
Tabel 30 : Perbandingan realisasi kinerja Persentase Sarana Produksi Obat Bahan Alam yang Memenuhi Ketentuan terhadap Kinerja di tahun sebelumnya.....	65
Tabel 31 : Perbandingan realisasi kinerja Persentase Sarana Produksi Obat Bahan Alam yang Memenuhi Ketentuan terhadap target Jangka Menengah 2025	65
Tabel 32 : Perbandingan realisasi kinerja Sarana Produksi Suplemen Kesehatan yang Memenuhi Ketentuan terhadap target 2025	67
Tabel 33 : Perbandingan realisasi kinerja Sarana Produksi Suplemen Kesehatan yang Memenuhi Ketentuan terhadap kinerja di Tahun sebelumnya.....	68
Tabel 34 : Perbandingan realisasi kinerja Sarana Produksi Suplemen Kesehatan yang Memenuhi Ketentuan terhadap target Jangka Menengah 2025.....	69
Tabel 35 : Perbandingan realisasi kinerja Persentase Sarana Produksi Kosmetik yang Memenuhi Ketentuan terhadap target 2025	71
Tabel 36 : Perbandingan realisasi kinerja Persentase Sarana Produksi Kosmetik yang Memenuhi Ketentuan terhadap kinerja di Tahun sebelumnya.....	72
Tabel 37 : Perbandingan realisasi kinerja Persentase Sarana Produksi Kosmetik yang Memenuhi Ketentuan terhadap target Jangka Menengah 2025.....	72
Tabel 38 : Perbandingan realisasi kinerja Persentase Fasilitas Distribusi Obat Bahan Alam yang Memenuhi Ketentuan terhadap target 2025	74
Tabel 39 : Perbandingan realisasi kinerja Persentase Fasilitas Distribusi Obat Bahan Alam yang Memenuhi Ketentuan terhadap kinerja di Tahun sebelumnya	75
Tabel 40 : Perbandingan realisasi kinerja Persentase Fasilitas Distribusi Obat Bahan Alam yang Memenuhi Ketentuan terhadap target Jangka Menengah 2025	76
Tabel 41 : Perbandingan realisasi kinerja Persentase Fasilitas Distribusi Suplemen Kesehatan yang Memenuhi Ketentuan terhadap target 2025.....	78
Tabel 42 : Perbandingan realisasi kinerja Persentase Fasilitas Distribusi Suplemen Kesehatan yang Memenuhi Ketentuan di Tahun sebelumnya.....	79
Tabel 43 : Perbandingan realisasi kinerja Persentase Fasilitas Distribusi Suplemen Kesehatan yang Memenuhi Ketentuan terhadap target Jangka Menengah 2025.....	79
Tabel 44 : Perbandingan realisasi kinerja Persentase Fasilitas Distribusi Kosmetik yang Memenuhi Ketentuan terhadap target 2025	81
Tabel 45 : Perbandingan realisasi kinerja Persentase Fasilitas Distribusi Kosmetik yang Memenuhi Ketentuan terhadap kinerja di Tahun sebelumnya.....	82
Tabel 46 : Perbandingan realisasi kinerja Persentase Fasilitas Distribusi Kosmetik yang Memenuhi Ketentuan terhadap target Jangka Menengah 2025.....	82
Tabel 47 : Perbandingan realisasi kinerja Persentase Iklan Obat Bahan Alam yang Memenuhi Ketentuan terhadap target 2025	85

Tabel 48 : Perbandingan realisasi kinerja Persentase Iklan Obat Bahan Alam yang Memenuhi Ketentuan terhadap kinerja di Tahun sebelumnya.....	85
Tabel 49 : Perbandingan realisasi kinerja Persentase Iklan Obat Bahan Alam yang Memenuhi Ketentuan terhadap target Jangka Menengah 2025.....	86
Tabel 50 : Perbandingan realisasi kinerja Persentase Iklan Suplemen Kesehatan yang Memenuhi Ketentuan terhadap target 2025.....	89
Tabel 51 : Perbandingan realisasi kinerja Persentase Iklan Suplemen Kesehatan yang Memenuhi Ketentuan terhadap kinerja di Tahun sebelumnya.....	89
Tabel 52 : Perbandingan realisasi kinerja Persentase Iklan Suplemen Kesehatan yang Memenuhi Ketentuan terhadap target Jangka Menengah 2025.....	90
Tabel 53 : Perbandingan realisasi kinerja Persentase iklan Kosmetik yang memenuhi ketentuan terhadap target 2025.....	92
Tabel 54 : Perbandingan Kinerja Persentase iklan Kosmetik yang memenuhi ketentuan terhadap kinerja di Tahun sebelumnya.....	93
Tabel 55 : Perbandingan realisasi kinerja Persentase iklan Kosmetik yang memenuhi ketentuan terhadap target Jangka Menengah 2025.....	93
Tabel 56 : Perbandingan realisasi kinerja Persentase kabupaten/kota yang melaksanakan Program Sadar Jamu Aman terhadap target 2025.....	95
Tabel 57 : Perbandingan realisasi kinerja Indeks Kesadaran Masyarakat terhadap Obat Bahan Alam, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang aman dan bermutu terhadap target 2025.....	97
Tabel 58 : Perbandingan Kinerja Indeks Kesadaran Masyarakat terhadap Obat Bahan Alam, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang aman dan bermutu terhadap kinerja di Tahun sebelumnya.....	98
Tabel 59 : Perbandingan realisasi kinerja Indeks Kesadaran Masyarakat terhadap Obat Bahan Alam, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang aman dan bermutu terhadap target Jangka Menengah 2025.....	98
Tabel 60 : Perbandingan realisasi kinerja Persentase inovasi obat bahan alam yang didampingi sesuai standar terhadap target 2025.....	101
Tabel 61 : Perbandingan realisasi kinerja Persentase inovasi obat bahan alam yang didampingi sesuai standar terhadap kinerja di Tahun sebelumnya.....	Kesalahan! Bookmark tidak ditentukan.
Tabel 62 : Perbandingan realisasi kinerja Persentase inovasi obat bahan alam yang didampingi sesuai standar terhadap target Jangka Menengah 2025.....	Kesalahan! Bookmark tidak ditentukan.
Tabel 63 : Perbandingan realisasi kinerja Persentase UMKM yang menerapkan standar keamanan dan mutu produksi Obat Bahan Alam dan Kosmetik terhadap target 2025.....	102
Tabel 64 : Perbandingan realisasi kinerja Persentase UMKM yang menerapkan standar keamanan dan mutu produksi Obat Bahan Alam dan Kosmetik terhadap kinerja di Tahun sebelumnya.....	103
Tabel 65 : Perbandingan realisasi kinerja Persentase UMKM yang menerapkan standar keamanan dan mutu produksi Obat Bahan Alam dan Kosmetik terhadap target Jangka Menengah 2025.....	103

Tabel 66 : Perbandingan realisasi kinerja Persentase Industri Obat Bahan Alam dan Kosmetik yang mencapai tingkat maturitas terhadap target 2025	105
Tabel 67 : Perbandingan realisasi kinerja Indeks Pelayanan Publik terhadap target 2025 ..	106
Tabel 68 : Perbandingan Kinerja Indeks Pelayanan Publik terhadap kinerja di Tahun sebelumnya	107
Tabel 69 : Perbandingan realisasi kinerja Indeks Pelayanan Publik terhadap target Jangka Menengah 2025	108
Tabel 70 : Perbandingan realisasi kinerja Nilai Pembangunan Zona Integritas terhadap target 2025	110
Tabel 71 : Perbandingan Kinerja Nilai Pembangunan Zona Integritas terhadap kinerja di Tahun sebelumnya	111
Tabel 72 : Perbandingan realisasi kinerja Nilai Pembangunan Zona Integritas terhadap target Jangka Menengah 2025	112
Tabel 73 : Perbandingan realisasi kinerja Nilai Pembangunan Zona Integritas terhadap Kinerja Satuan Kerja Lain	112
Tabel 74 : Perbandingan realisasi kinerja Nilai AKIP terhadap target 2025	114
Tabel 75 : Perbandingan Kinerja Nilai AKIP terhadap kinerja di Tahun sebelumnya	115
Tabel 76 : Perbandingan realisasi kinerja Nilai AKIP terhadap target Jangka Menengah 2025	115
Tabel 77 : Perbandingan realisasi kinerja Nilai AKIP terhadap Kinerja Satuan Kerja Lain ...	116
Tabel 78 : Perbandingan realisasi kinerja Nilai Kinerja Anggaran terhadap target 2025	118
Tabel 79 : Perbandingan Kinerja Nilai Kinerja Anggaran terhadap kinerja di Tahun sebelumnya	119
Tabel 80 : Perbandingan realisasi kinerja Nilai Kinerja Anggaran terhadap target Jangka Menengah 2025	119
Tabel 81 : Perbandingan realisasi kinerja Nilai Kinerja Anggaran terhadap Kinerja Satuan Kerja Lain	120
Tabel 82 : Perbandingan realisasi kinerja Indeks Manajemen Risiko terhadap target 2025	122
Tabel 83 : Perbandingan Kinerja Indeks Manajemen Risiko terhadap kinerja di Tahun sebelumnya	122
Tabel 84 : Perbandingan realisasi kinerja Indeks Manajemen Risiko terhadap target Jangka Menengah 2025	123
Tabel 85 : Perbandingan realisasi kinerja Indeks Manajemen Risiko terhadap Kinerja Satuan Kerja Lain	123
Tabel 86 : Realisasi Anggaran per Sasaran Program	128
Tabel 87 : Pengukuran Tingkat Efisiensi per Sasaran Program	129

Daftar Gambar

Gambar 1 : Struktur Organisasi Deputy II BPOM	4
---	---

Daftar Grafik

Grafik 1 : Perbandingan realisasi kinerja Persentase Obat Bahan Alam yang Aman dan Bermutu terhadap Kinerja Satuan kerja lain	48
Grafik 2 : Perbandingan realisasi kinerja Persentase Suplemen Kesehatan yang Aman dan Bermutu terhadap Kinerja Satuan Kerja Lain	51
Grafik 3 : Perbandingan realisasi kinerja Persentase Kosmetik yang Aman dan Bermutu terhadap Kinerja Satuan Kerja Lain	55
Grafik 4 : Perbandingan realisasi kinerja Indeks Kualitas Kebijakan Pengawasan Obat Bahan Alam, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik terhadap Kinerja Satuan Kerja Lain	58
Grafik 5 : Perbandingan realisasi kinerja Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Obat Bahan Alam, Suplemen Kesehatan, Obat Kuasi, dan Kosmetik yang Ditindaklanjuti oleh Lintas Sektor terhadap Kinerja Satuan Kerja Lain	62
Grafik 6 : Perbandingan realisasi kinerja Persentase Sarana Produksi Obat Bahan Alam yang Memenuhi Ketentuan terhadap Kinerja Satuan Kerja Lain	66
Grafik 7 : Perbandingan realisasi kinerja Sarana Produksi Suplemen Kesehatan yang Memenuhi Ketentuan terhadap Kinerja Satuan Kerja Lain	69
Grafik 8 : Perbandingan realisasi kinerja Persentase Sarana Produksi Kosmetik yang Memenuhi Ketentuan terhadap Kinerja Satuan Kerja Lain	73
Grafik 9 : Perbandingan realisasi kinerja Persentase Fasilitas Distribusi Obat Bahan Alam yang Memenuhi Ketentuan terhadap Kinerja Satuan Kerja Lain	76
Grafik 10 : Perbandingan realisasi kinerja Persentase Fasilitas Distribusi Suplemen Kesehatan yang Memenuhi Ketentuan terhadap Kinerja Satuan Kerja Lain	80
Grafik 11 : Perbandingan realisasi kinerja Persentase Fasilitas Distribusi Kosmetik yang Memenuhi Ketentuan terhadap Kinerja Satuan Kerja Lain	83
Grafik 12 : Perbandingan realisasi kinerja Persentase Iklan Obat Bahan Alam yang Memenuhi Ketentuan terhadap Kinerja Satuan Kerja Lain	87
Grafik 13 : Perbandingan realisasi kinerja Persentase Iklan Suplemen Kesehatan yang Memenuhi Ketentuan terhadap Kinerja Satuan Kerja Lain	90
Grafik 14 : Perbandingan realisasi kinerja Persentase iklan Kosmetik yang memenuhi ketentuan terhadap target Jangka Menengah 2025	94
Grafik 15 : Perbandingan realisasi kinerja Indeks Kesadaran Masyarakat terhadap Kinerja Satuan Kerja Lain	99
Grafik 16 : Perbandingan realisasi kinerja Indeks Pelayanan Publik terhadap Kinerja Satuan Kerja Lain	104
Grafik 17 : Perbandingan realisasi kinerja Indeks Pelayanan Publik terhadap Kinerja Satuan Kerja Lain	108

BAB I

PENDAHULUAN

BAB I - Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Perkembangan industri obat bahan alam, suplemen kesehatan, dan kosmetik di Indonesia terus menunjukkan tren yang positif, baik dari segi pertumbuhan jumlah produk maupun diversifikasi jenisnya. Di tengah peluang tersebut, tantangan yang dihadapi Deputy II BPOM semakin kompleks. Beredarnya produk yang tidak memenuhi standar keamanan dan mutu, penyalahgunaan klaim kesehatan dalam promosi, serta meningkatnya transaksi produk melalui platform digital menuntut pengawasan yang lebih adaptif dan efektif.

Selain itu, tingkat pemahaman dan kepatuhan pelaku usaha terhadap regulasi masih perlu ditingkatkan, begitu pula literasi masyarakat dalam memilih produk yang aman dan bermutu. Deputy II BPOM juga dihadapkan pada kebutuhan untuk mendukung inovasi industri nasional, khususnya dalam memberdayakan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), agar mampu bersaing di pasar domestik maupun global. Di sisi lain, keterbatasan sumber daya menuntut efisiensi dalam pelaksanaan program dan optimalisasi pelayanan publik.

Dalam konteks tersebut, keberadaan Deputy II BPOM memiliki peran yang sangat strategis. Deputy II BPOM bertugas untuk menyelenggarakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pengawasan terhadap obat bahan alam, suplemen kesehatan, dan kosmetik guna memastikan perlindungan kesehatan masyarakat.

Melalui pengawasan yang efektif, edukasi publik, pemberdayaan pelaku usaha, serta transformasi pelayanan berbasis digital, Deputy II BPOM berupaya menciptakan ekosistem pengawasan yang adaptif, transparan, dan berdaya saing. Pelaksanaan tugas ini tidak hanya bertujuan untuk menjaga keamanan dan mutu produk yang beredar, tetapi juga untuk mendukung pertumbuhan industri nasional dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem pengawasan obat dan makanan di Indonesia

1.2 Gambaran Umum Organisasi

Deputy II BPOM merupakan salah satu unsur pelaksana teknis di lingkungan BPOM yang berperan penting dalam menjamin keamanan, mutu, dan manfaat produk obat bahan alam, suplemen kesehatan, dan kosmetik yang beredar di Indonesia. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan, Deputy II BPOM bertugas untuk menyelenggarakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan obat tradisional, suplemen kesehatan, dan kosmetik. Dalam menjalankan tugas tersebut, Deputy II melaksanakan fungsi:

- Penyusunan kebijakan pengawasan sebelum beredar dan selama beredar, meliputi standardisasi, registrasi, pengawasan produksi, dan distribusi obat tradisional, suplemen kesehatan, dan kosmetik;
- Pelaksanaan kebijakan pengawasan sebelum beredar dan selama beredar;
- Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengawasan;
- Pemberian bimbingan teknis dan supervisi;

- Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan;
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala BPOM.

Sumber Daya Manusia

Deputi II BPOM memiliki peran strategis dalam pengawasan obat bahan alam, suplemen kesehatan, dan kosmetik, yang memerlukan dukungan Sumber Daya Manusia (SDM) yang kompeten dan memadai. Namun, berdasarkan Analisis Beban Kerja (ABK) tahun 2024, Deputi II BPOM masih mengalami kekurangan SDM yang cukup signifikan. Saat ini, jumlah pegawai di Deputi II BPOM sebanyak 348 orang, sedangkan kebutuhan idealnya mencapai 476 pegawai, yang berarti terdapat gap kebutuhan SDM sebesar 128 pegawai. Dengan kondisi ini, tingkat pemenuhan pegawai baru mencapai 73,11%, sehingga optimalisasi sumber daya yang ada menjadi tantangan yang harus dihadapi

Rincian jumlah pegawai di tiap unit kerja adalah sebagai berikut:

Tabel 1 : Sebaran pegawai di Deputi II BPOM

NO.	UNIT KERJA	JUMLAH PEGAWAI
1	Direktorat Standardisasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	54
2	Direktorat Registrasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	97
3	Direktorat Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan	73
4	Direktorat Pengawasan Kosmetik	70
5	Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	59
	Deputi II	353

Komposisi Pegawai Deputi II BPOM Berdasarkan Jenis Kelamin dan Tingkat Pendidikan

Komposisi pegawai di lingkungan Deputi II Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) menunjukkan proporsi yang didominasi oleh pegawai perempuan, yaitu sebanyak 293 orang, sedangkan pegawai laki-laki berjumlah 60 orang.

Dari sisi kualifikasi pendidikan, pegawai Deputi II BPOM terdiri atas:

- Lulusan Diploma 1 : 1 orang
- Lulusan Diploma (D3/D4): 40 orang
- Lulusan Sarjana (S1): 128 orang
- Lulusan jenjang Profesi (Apoteker, Dokter, Dokter Hewan): 108 orang
- Lulusan Pascasarjana (S2): 64 orang
- Lulusan Doktoral (S3): 3 orang

Data ini mencerminkan bahwa sebagian besar pegawai Deputy II BPOM memiliki latar belakang pendidikan tinggi, dengan proporsi signifikan berasal dari jenjang sarjana dan profesi, yang sangat relevan untuk mendukung pelaksanaan tugas pengawasan di bidang obat bahan alam, suplemen kesehatan, dan kosmetik.

Komposisi Pegawai Deputy II BPOM Berdasarkan Jabatan

Berdasarkan data kepegawaian Deputy II BPOM, total pegawai terbagi ke dalam beragam jabatan fungsional dan pelaksana dengan dominasi terbesar pada jabatan Pengawas Farmasi dan Makanan (PFM), yang mencapai 260 orang. Jumlah ini mencerminkan peran strategis PFM dalam mendukung pelaksanaan fungsi teknis pengawasan di bidang obat bahan alam, suplemen kesehatan, dan kosmetik.

Selain PFM, jabatan lain yang mendukung fungsi manajerial dan administratif juga tersebar secara proporsional, antara lain:

- Direktur sebanyak 5 orang,
- Penata Layanan Operasional sebanyak 17 orang,
- Arsiparis sebanyak 17 orang,
- Pranata Keuangan APBN sebanyak 13 orang, dan
- Pranata Komputer sebanyak 10 orang.

Sementara itu, terdapat jabatan-jabatan pendukung lainnya yang masing-masing memiliki kurang dari 10 pegawai, seperti Pelaksana (2 orang), Perencana (4 orang), serta Pengolah Data dan Informasi (2 orang). Beberapa jabatan hanya diisi oleh satu atau dua orang, seperti Pengadministrasi Perkantoran (1 orang) dan Penata Kelola Obat dan Makanan (2 orang).

Komposisi ini menggambarkan struktur organisasi yang didominasi oleh jabatan fungsional teknis, namun tetap didukung oleh peran strategis dari jabatan administratif dan manajerial, sehingga pelaksanaan tugas dan fungsi Deputy II BPOM dapat berjalan secara efektif dan terintegrasi.

Tabel 2 : Komposisi pegawai berdasarkan Jabatan

NO.	JABATAN	JUMLAH PEGAWAI
1	Direktur	5
2	PFM	260
3	Penata Layanan Operasional	17
4	Arsiparis	17
5	Pelaksana	7
6	Penata Kelola Obat dan Makanan	2
7	Pranata Komputer	10
8	Pengelola Layanan Operasional	2
9	Analisis SDM Aparatur	5
10	Pranata Keuangan APBN	13
11	Pranata SDM Aparatur	5
12	Perencana	4

13	Penata Laksana Barang	2
14	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN	2
15	Pengadministrasian Perkantoran	1
16	Pengolah Data dan Informasi	2

1.3 Struktur Organisasi Deputy II

Untuk menjalankan tugas dan fungsinya secara optimal, Deputy II BPOM didukung oleh lima direktorat teknis yang memiliki tugas pokok dan fungsi yang saling bersinergi, yaitu:

1. Direktorat Standardisasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik;
2. Direktorat Registrasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik;
3. Direktorat Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan;
4. Direktorat Pengawasan Kosmetik;
5. Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik.

Struktur organisasi Deputy II dirancang untuk memperkuat integrasi antara aspek regulasi, pengawasan, pelayanan publik, pemberdayaan, dan pengembangan daya saing industri. Setiap direktorat bekerja dalam koordinasi yang erat untuk memastikan bahwa seluruh proses pengawasan, mulai dari penyusunan regulasi, pre-market evaluation, pengawasan produksi dan distribusi, hingga pemberdayaan masyarakat dan pelaku usaha, berjalan secara harmonis, efektif, dan selaras dengan tujuan besar BPOM dalam melindungi kesehatan masyarakat dan meningkatkan daya saing nasional.



Gambar 1 : Struktur Organisasi Deputy II BPOM

1.4 Isu Strategis

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Deputy II BPOM menghadapi sejumlah isu strategis yang mempengaruhi pelaksanaan program dan pencapaian kinerja, yaitu:

1. Pengawasan dan Pelayanan Publik Berbasis Digital
Transformasi pengawasan dan pelayanan publik menuju sistem digital menjadi kebutuhan untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan aksesibilitas layanan.

- Deputi II BPOM mendorong pemanfaatan teknologi informasi dalam pengawasan produk dan pelayanan kepada pelaku usaha dan masyarakat.
2. **Pemahaman dan Kepatuhan Pelaku Usaha/Stakeholder terhadap Regulasi**
Masih terdapat pelaku usaha yang belum sepenuhnya memahami ketentuan regulasi yang berlaku. Deputi II BPOM terus meningkatkan edukasi, bimbingan teknis, dan sosialisasi untuk membangun kepatuhan yang lebih tinggi di kalangan pelaku usaha.
 3. **Literasi Konsumen yang Rendah dan Peran Serta Masyarakat**
Tingkat literasi masyarakat mengenai keamanan, mutu, dan klaim produk obat bahan alam, suplemen kesehatan, dan kosmetik masih perlu ditingkatkan. Deputi II BPOM berupaya memperluas kegiatan edukasi publik untuk mendorong peran serta masyarakat dalam pengawasan.
 4. **Kapasitas dan Daya Saing UMKM**
Sebagian besar UMKM di bidang obat bahan alam, dan kosmetik belum memiliki kapasitas produksi dan pemenuhan standar yang optimal. Deputi II BPOM fokus pada program pendampingan dan fasilitasi penerapan standar mutu dan keamanan bagi UMKM.
 5. **Pengembangan dan Pemanfaatan Obat Bahan Alam**
Potensi obat bahan alam di Indonesia sangat besar namun masih belum dimanfaatkan secara maksimal. Deputi II BPOM mendorong inovasi dan pengembangan produk berbasis bahan alam yang memenuhi aspek keamanan, mutu, dan manfaat.
 6. **Pencantuman Promosi/Iklan yang *Overclaim***
Masih ditemukan praktik promosi dan iklan produk yang mengandung klaim berlebihan atau tidak sesuai dengan ketentuan. Deputi II BPOM memperketat pengawasan dan pembinaan terkait ketaatan iklan untuk melindungi konsumen dari informasi yang menyesatkan.
 7. **Peredaran Produk OBA Mengandung Bahan Kimia Obat (BKO) dan Produk Kosmetik Mengandung Bahan Berbahaya/Dilarang**
Produk obat bahan alam yang mengandung BKO dan kosmetik dengan bahan berbahaya masih beredar di pasaran. Deputi II BPOM terus melakukan intensifikasi pengawasan, sampling, dan penindakan terhadap produk-produk tersebut untuk menjaga keselamatan konsumen.
 8. **Pengawasan Peredaran OBA, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik di *E-commerce***
Maraknya transaksi online menimbulkan tantangan baru dalam pengawasan produk ilegal dan tidak memenuhi syarat. Deputi II BPOM memperkuat pengawasan berbasis patroli siber dan bekerja sama dengan platform e-commerce untuk mengendalikan peredaran produk.
 9. **Efisiensi Anggaran**
Dalam menghadapi keterbatasan sumber daya, Deputi II BPOM berupaya mengoptimalkan pelaksanaan program dan kegiatan melalui prinsip efisiensi anggaran tanpa mengurangi capaian kinerja, dengan perencanaan dan eksekusi yang lebih tepat sasaran.

BAB II

PERENCANAAN

KINERJA

BAB II Perencanaan Kinerja

2.1 Uraian Singkat Renstra

Sebagai lembaga yang bertanggung jawab atas pengawasan dan regulasi produk obat dan makanan di Indonesia, BPOM telah merumuskan visi strategis untuk periode 2025-2029. Visi ini merupakan pondasi dalam menavigasi dan mengarahkan seluruh aktivitas dan kebijakan BPOM dalam lima tahun ke depan, dengan tujuan utama adalah melindungi kesehatan masyarakat Indonesia. Dalam Penyusunan Visi, BPOM berpedoman pada Visi Presiden terpilih yang tertuang dalam RPJMN 2025-2029 yaitu: Bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045.

Visi dan Misi

Sejalan dengan Visi Badan POM Tahun 2025-2029, maka Visi Deputy Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik sebagai berikut:

“Terwujudnya Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang aman, bermutu, dan berdaya saing dalam mendukung masyarakat sehat dan sejahtera bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045”

Visi BPOM untuk periode 2025-2029 mengandung beberapa aspek penting yang menjadi fokus dan arah strategis organisasi. Berikut adalah penjelasan dari rumusan visi tersebut:

1. **Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman:** Keamanan sediaan farmasi dan pangan olahan menjadi prioritas utama BPOM. Hal ini mencakup pencegahan peredaran produk ilegal, produk yang tidak memenuhi standar kualitas dan keamanan, serta penanganan cepat terhadap potensi risiko kesehatan publik yang ditimbulkan oleh sediaan farmasi dan pangan olahan.
2. **Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan Bermutu:** BPOM berupaya memastikan bahwa semua produk sediaan farmasi dan pangan olahan yang beredar memiliki kualitas yang tinggi. Hal ini mencakup keefektifan produk, konsistensi kualitas produksi, serta pemenuhan terhadap standar nasional dan internasional.
3. **Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Berdaya Saing:** BPOM mendukung industri sediaan farmasi dan pangan olahan nasional agar dapat bersaing di pasar global. Hal ini melibatkan upaya-upaya seperti peningkatan standar kualitas, dorongan terhadap inovasi produk, serta fasilitasi terhadap akses pasar internasional.
4. **Masyarakat Sehat dan Sejahtera:** Tujuan akhir dari semua upaya BPOM adalah mendukung terwujudnya masyarakat yang sehat dan sejahtera. Hal ini dilakukan dengan memastikan akses masyarakat terhadap produk sediaan farmasi dan pangan olahan yang aman, bermutu, dan berkhasiat/bermanfaat (termasuk bergizi) serta dukungan BPOM terhadap peningkatan daya saing produk sediaan farmasi dan pangan olahan yang dihasilkan oleh Industri (termasuk UMKM) lokal.

Dalam upaya mewujudkan visi, Deputy Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik menetapkan misi organisasi yang sejalan dengan misi BPOM sebagai berikut:

1. Meningkatkan efektivitas pengawasan obat bahan alam, suplemen kesehatan dan kosmetik melalui kolaborasi pemerintah, pelaku usaha, dan Masyarakat
2. Memfasilitasi percepatan pengembangan dunia usaha obat bahan alam, suplemen kesehatan dan kosmetik dengan keberpihakan terhadap UMKM dalam rangka membangun struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing
3. Membangun SDM unggul terkait obat bahan alam, suplemen kesehatan dan kosmetik dengan mengembangkan kemitraan bersama seluruh komponen bangsa
4. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya untuk memberikan pelayanan publik yang prima di bidang obat bahan alam, suplemen kesehatan dan kosmetik

Tujuan

Dalam rangka mewujudkan visi dan mengimplementasikan misi, Deputy II BPOM telah merumuskan serangkaian tujuan strategis untuk periode 2025 – 2029. Tujuan-tujuan ini dirancang untuk menanggapi secara langsung tantangan dan peluang yang ada, sejalan dengan tugas dan fungsi BPOM sebagai lembaga pengawas obat dan makanan di Indonesia. Berikut adalah tujuan Deputy II BPOM untuk periode 2025 - 2029, mencakup aspek keamanan, edukasi konsumen, dukungan terhadap pertumbuhan usaha, perlindungan masyarakat, dan peningkatan kualitas organisasi, yang sejalan dengan Tujuan BPOM:

1. Terwujudnya Obat Bahan Alam, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang Aman dan Bermutu: Tujuan ini menegaskan komitmen Deputy II BPOM dalam memastikan bahwa semua produk obat bahan alam, suplemen kesehatan dan kosmetik yang beredar di pasaran memenuhi standar keamanan dan kualitas yang ketat. Ini merupakan landasan dasar dalam perlindungan kesehatan publik dan penjaminan akses masyarakat terhadap produk yang aman dan berkualitas.
2. Terwujudnya Masyarakat yang Cerdas Memilih Obat Bahan Alam, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang Aman dan Bermutu: Melalui tujuan ini, Deputy II BPOM bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat mengenai pentingnya memilih Obat Bahan Alam, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang aman dan bermutu. Edukasi konsumen menjadi kunci dalam mendorong masyarakat untuk membuat keputusan yang informasi dan bertanggung jawab dalam konsumsi Obat Bahan Alam, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik.
3. Terwujudnya Pertumbuhan Dunia Usaha yang Mendukung Daya Saing Industri Obat Bahan Alam, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik serta Kemandirian Bangsa dengan Keberpihakan pada UMKM: Tujuan ini menggarisbawahi pentingnya dukungan terhadap pertumbuhan ekonomi, khususnya melalui pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di sektor Obat Bahan Alam, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik. Deputy II BPOM berupaya memfasilitasi lingkungan yang kondusif bagi inovasi dan pertumbuhan usaha, yang pada gilirannya akan meningkatkan daya saing industri nasional dan mewujudkan kemandirian bangsa.
4. Terwujudnya Organisasi yang Profesional, Adaptif, Efektif dan Efisien serta Layanan Publik yang Prima: Melalui tujuan ini, Deputy II BPOM berkomitmen untuk

terus memperbaiki dan mengoptimalkan kinerja organisasi, dengan menerapkan prinsip-prinsip tata kelola yang baik, responsif, dan berorientasi pada hasil yang berkualitas. Peningkatan kapasitas organisasi ini diharapkan dapat memperkuat kemampuan BPOM dalam memberikan layanan publik yang prima.

2.2 Rencana Kinerja Tahunan (RKT)

Rencana Kinerja Tahunan Deputy II BPOM merupakan acuan bagi Deputy Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik dalam melakukan penyusunan rencana kerja dan penganggaran tahun 2025. Rencana Kinerja ini telah ditetapkan melalui Surat Keputusan Deputy Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik No. HK.02.02.4.09.24.46 Tahun 2024 pada tanggal 19 September 2024. Terdapat perubahan target kinerja Deputy II BPOM pada tahun 2025, yang ditetapkan melalui Perjanjian Kinerja Deputy II BPOM tahun 2025, sehingga perhitungan kinerja akan menggunakan target sebagaimana terdapat pada Perjanjian Kinerja. Rencana Kinerja Deputy II BPOM Tahun 2025 adalah sebagaimana terdapat pada tabel berikut:

Tabel 3 : Rencana Kinerja Tahunan 2025

No	Sasaran	Indikator	Target
1	Meningkatnya efektivitas pengawasan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	Persentase Obat bahan alam yang aman dan bermutu	65,00
2		Persentase Suplemen Kesehatan yang aman dan bermutu	68,00
3		Persentase Kosmetik yang aman dan bermutu	62,00
4		Indeks Kualitas Kebijakan Pengawasan Obat Bahan Alam, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	86,00
5		Persentase rekomendasi hasil pengawasan Obat Bahan Alam Suplemen Kesehatan, Obat Kuasi dan Kosmetik yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor	83,00
6	Meningkatnya peran aktif lintas sektor dalam pengawasan OBA, SK, Kos	Persentase kabupaten/kota sadar Jamu Aman	20,00%
7	Meningkatnya efektivitas pengawasan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	Persentase sarana produksi Obat Bahan Alam, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang memenuhi ketentuan	84,00
8	Meningkatnya Kesadaran Masyarakat atas Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu	Indeks Kesadaran Masyarakat terhadap Obat Bahan Alam, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang aman dan bermutu	87,50

No	Sasaran	Indikator	Target
9	Meningkatnya efektifitas regulatory assistance dan kemandirian industri dalam pengembangan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	Persentase kemandirian pelaku usaha OBA dalam rangka inovasi obat bahan alam	51,00%
10		Persentase UMKM yang menerapkan standar keamanan dan mutu produksi OBA dan Kos	60,00%
11		Persentase Industri Kosmetik yang mengikuti Program maturitas yang dapat Menerapkan CPKB secara penuh	56,00%
12		Persentase Industri Obat bahan Alam yang meningkat maturitasnya dalam penerapan CPOTB terkini	12,00%
13	Layanan Publik BPOM yang Prima	Indeks Pelayanan Publik di Bidang Pengawasan Obat Bahan Alam, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan	4,69
14	Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	Nilai Pembangunan ZI Deputy Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	91,68
15		Nilai AKIP Deputy Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	81,45
16		Nilai Kinerja Anggaran Deputy Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	95,36
17		Indeks Manajemen Risiko Deputy Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	3,40

2.3. Perjanjian Kinerja (PK)

Perjanjian Kinerja Deputy II BPOM merupakan dokumen formal yang memuat komitmen antara pejabat yang diberi amanah sebagai Deputy Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik (Deputy II) dengan Kepala Badan POM selaku atasan langsung. Dokumen ini berisi pernyataan kesanggupan Deputy II dalam melaksanakan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis dan Rencana Kinerja Tahunan Badan POM, dengan mengacu pada indikator kinerja yang terukur, relevan, dan selaras dengan tujuan pembangunan nasional di bidang kesehatan masyarakat.

Perjanjian Kinerja disusun setiap tahun sebagai bagian dari proses manajemen kinerja berbasis hasil (result-based management), yang bertujuan untuk:

- Menjadi dasar evaluasi kinerja individu pimpinan unit organisasi,
- Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas kinerja unit kerja,
- Mendorong pencapaian sasaran strategis organisasi melalui indikator kinerja utama yang jelas dan terukur,

- Memastikan bahwa seluruh sumber daya digunakan secara efektif dan efisien untuk mencapai hasil yang diharapkan.

Pada Tahun 2025, Deputy II BPOM menetapkan 25 Indikator Kinerja Sasaran Program (IKSP) yang menjadi acuan dalam pelaksanaan dan pengukuran capaian kinerja. Indikator tersebut mencakup aspek pengawasan produk, pelayanan publik, inovasi, koordinasi lintas sektor, serta tata kelola pemerintahan yang baik.

Tabel 4 : Perjanjian Kinerja Deputy II Tahun 2025

SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA		TARGET
Meningkatnya efektivitas pengawasan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	IKSP 1	Persentase Obat bahan alam yang aman dan bermutu	65,00%
	IKSP 2	Persentase Suplemen Kesehatan yang aman dan bermutu	68,00%
	IKSP 3	Persentase Kosmetik yang aman dan bermutu	62,00%
	IKSP 4	Angka Penilaian Mandiri Kualitas Kebijakan Pengawasan Obat Bahan Alam, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	83,00
	IKSP 5	Persentase rekomendasi hasil pengawasan Obat Bahan Alam, Suplemen Kesehatan, Obat Kuasi dan Kosmetik yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor	83,00%
	IKSP 6	Persentase sarana produksi Obat Bahan Alam yang memenuhi ketentuan	86,00%
	IKSP 7	Persentase sarana produksi Suplemen Kesehatan yang memenuhi ketentuan	85,00%
	IKSP 8	Persentase sarana produksi Kosmetik yang memenuhi ketentuan	81,00%
	IKSP 9	Persentase fasilitas distribusi Obat Bahan Alam yang memenuhi ketentuan	70,00%
	IKSP 10	Persentase fasilitas distribusi Suplemen Kesehatan yang memenuhi ketentuan	89,00%
	IKSP 11	Persentase fasilitas distribusi Kosmetik yang memenuhi ketentuan	78,00%
	IKSP 12	Persentase iklan Obat Bahan Alam yang memenuhi ketentuan	78,00%

SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA		TARGET
	IKSP 13	Persentase iklan Suplemen Kesehatan yang memenuhi ketentuan	87,00%
	IKSP 14	Persentase iklan Kosmetik yang memenuhi ketentuan	71,00%
Meningkatnya peran aktif lintas sektor dalam pengawasan OT, SK dan Kos	IKSP 15	Persentase kabupaten/kota sadar Jamu Aman	2,00%
Meningkatnya Kesadaran Masyarakat atas Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu	IKSP 16	Indeks Kesadaran Masyarakat terhadap Obat Bahan Alam, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang aman dan bermutu	86,87
Meningkatnya efektifitas regulatory assistance dan kemandirian industry dalam pengembangan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	IKSP 17	Persentase inovasi obat bahan alam yang didampingi sesuai standar	51,00%
	IKSP 18	Persentase UMKM yang menerapkan standar keamanan dan mutu produksi OBA dan Kos	60,00%
	IKSP 19	Persentase Industri Kosmetik yang mengikti program maturitas yang dapat Menerapkan CPKB secara penuh	56,00%
	IKSP 20	Persentase Industri Obat Bahan Alam yang ditetapkan maturitasnya dalam penerapan CPOTB terkini	12,00%
Layanan Publik BPOM yang Prima	IKSP 21	Indeks Pelayanan Publik di Bidang Pengawasan Obat Bahan Alam, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan	4,70
Terwujudnya Tata Kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	IKSP 22	Nilai Pembangunan ZI Deputy Bidang Pengawasan OT, SK, dan Kos	89.96
	IKSP 23	Nilai AKIP Deputy Bidang Pengawasan OT, SK, dan Kos	81.66
	IKSP 24	Nilai Kinerja Anggaran Deputy Bidang Pengawasan OT, SK, dan Kos	5,00
	IKSP 25	Indeks Manajemen Risiko Deputy Bidang Pengawasan OT, SK dan Kos	2.95

Sehubungan dengan telah ditetapkan Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2025–2029 melalui Peraturan Badan POM Nomor 28 Tahun 2025 tanggal 7 Oktober 2025, maka dilakukan penyesuaian terhadap Perjanjian Kinerja Deputy II BPOM.

Adapun hasil penyesuaian tersebut mencakup perubahan indikator kinerja utama, target capaian, serta fokus program strategis yang diselaraskan dengan arah kebijakan dan prioritas nasional yang tertuang dalam Renstra dimaksud. Perjanjian Kinerja Deputy II BPOM hasil penyesuaian adalah sebagai berikut:

Tabel 5 : Perjanjian Kinerja Deputy II BPOM tahun 2025 (Revisi)

SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA		TARGET
Meningkatnya efektivitas pengawasan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	IKSP 1	Persentase Obat bahan alam yang aman dan bermutu	65,00%
	IKSP 2	Persentase Suplemen Kesehatan yang aman dan bermutu	68,00%
	IKSP 3	Persentase Kosmetik yang aman dan bermutu	62,00%
	IKSP 4	Indeks Kualitas Kebijakan Pengawasan Obat Bahan Alam, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	79,00%
	IKSP 5	Persentase rekomendasi hasil pengawasan Obat Bahan Alam, Suplemen Kesehatan, Obat Kuasi dan Kosmetik yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor	83,00%
	IKSP 6	Persentase sarana produksi Obat Bahan Alam yang memenuhi ketentuan	86,00%
	IKSP 7	Persentase sarana produksi Suplemen Kesehatan yang memenuhi ketentuan	85,00%
	IKSP 8	Persentase sarana produksi Kosmetik yang memenuhi ketentuan	81,00%
	IKSP 9	Persentase fasilitas distribusi Obat Bahan Alam yang memenuhi ketentuan	70,00%
	IKSP 10	Persentase fasilitas distribusi Suplemen Kesehatan yang memenuhi ketentuan	90,00%
	IKSP 11	Persentase fasilitas distribusi Kosmetik yang memenuhi ketentuan	78,00%
	IKSP 12	Persentase iklan Obat Bahan Alam yang memenuhi ketentuan	66,00%
	IKSP 13	Persentase iklan Suplemen Kesehatan yang memenuhi ketentuan	82,00%

SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA		TARGET
	IKSP 14	Persentase iklan Kosmetik yang memenuhi ketentuan	60,00%
Meningkatnya peran aktif lintas sektor dalam pengawasan Obat Bahan Alam, Syplemen Kesehatan dan Kosmetik	IKSP 15	Persentase kabupaten/kota sadar Jamu Aman	2,00%
Meningkatnya Kesadaran Masyarakat atas Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu	IKSP 16	Indeks Kesadaran Masyarakat terhadap Obat Bahan Alam, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang aman dan bermutu	86,87
Meningkatnya efektifitas regulatory assistance dan kemandirian industri dalam pengembangan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	IKSP 17	Persentase inovasi obat bahan alam yang didampingi sesuai standar	82,10%
	IKSP 18	Persentase UMKM yang menerapkan standar keamanan dan mutu produksi Obat Bahan Alam dan Kosmetik	60,00%
	IKSP 19	Persentase Industri Obat Bahan Alam dan Kosmetik yang Mencapai Tingkat Maturitas	34,00%
Terwujudnya Tata Kelola Pemerintah Unit Organisasi yang Optimal	IKSP 20	Indeks Pelayanan Publik di Bidang Pengawasan Obat Bahan Alam, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan	4,70
	IKSP 21	Nilai Pembangunan ZI Deputy Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	89.96
	IKSP 22	Nilai AKIP Deputy Bidang Pengawasan Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	81.66
	IKSP 23	Nilai Kinerja Anggaran Deputy Bidang Pengawasan Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	5,00
	IKSP 24	Indeks Manajemen Risiko Deputy Bidang Pengawasan Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	2.95

2.4. Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK)

Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK) Deputy II BPOM menyajikan target kinerja Triwulan pada tiap indikator kinerja yang ada dalam Perjanjian Kinerja. RAPK Deputy II BPOM tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 6 : Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Deputy II BPOM Tahun 2025

SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA		TARGET												ANGGARAN
			B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B8	B9	B10	B11	B12	
Meningkatnya efektivitas pengawasan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	IKSP 1	Persentase Obat bahan alam yang aman dan bermutu	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	3.582.245.500
	IKSP 2	Persentase Suplemen Kesehatan yang aman dan bermutu	68	68	68	68	68	68	68	68	68	68	68	68	2.569.919.500
	IKSP 3	Persentase Kosmetik yang aman dan bermutu	62	62	62	62	62	62	62	62	62	62	62	62	3.552.695.000
	IKSP 4	Angka Penilaian Mandiri Kualitas Kebijakan Pengawasan Obat Bahan Alam, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik												83	3.598.766.000
	IKSP 5	Persentase rekomendasi hasil pengawasan Obat Bahan Alam, Suplemen Kesehatan, Obat Kuasi dan Kosmetik yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	902.584.000

SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA		TARGET												ANGGARAN
			B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B8	B9	B10	B11	B12	
	IKSP 6	Persentase sarana produksi Obat Bahan Alam yang memenuhi ketentuan	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86	354.341.000
	IKSP 7	Persentase sarana produksi Suplemen Kesehatan yang memenuhi ketentuan	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	354.341.000
	IKSP 8	Persentase sarana produksi Kosmetik yang memenuhi ketentuan	81	81	81	81	81	81	81	81	81	81	81	81	1.694.533.000
	IKSP 9	Persentase fasilitas distribusi Obat Bahan Alam yang memenuhi ketentuan	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	354.341.000
	IKSP 10	Persentase fasilitas distribusi Suplemen Kesehatan yang memenuhi ketentuan	89	89	89	89	89	89	89	89	89	89	89	89	354.341.000
	IKSP 11	Persentase fasilitas distribusi Kosmetik yang memenuhi ketentuan	78	78	78	78	78	78	78	78	78	78	78	78	957.720.000

SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA		TARGET												ANGGARAN
			B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B8	B9	B10	B11	B12	
	IKSP 12	Persentase iklan Obat Bahan Alam yang memenuhi ketentuan	78	78	78	78	78	78	78	78	78	78	78	78	500.130.000
	IKSP 13	Persentase iklan Suplemen Kesehatan yang memenuhi ketentuan	87	87	87	87	87	87	87	87	87	87	87	87	500.130.000
	IKSP 14	Persentase iklan Kosmetik yang memenuhi ketentuan	71	71	71	71	71	71	71	71	71	71	71	71	931.538.000
Meningkatnya peran aktif lintas sektor dalam pengawasan OT, SK dan Kos	IKSP 15	Persentase kabupaten/kota sadar Jamu Aman												2	1.000.000.000
Meningkatnya Kesadaran Masyarakat atas Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu	IKSP 16	Indeks Kesadaran Masyarakat terhadap Obat Bahan Alam, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang aman dan bermutu												86.87	5.226.369.000

SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA		TARGET												ANGGARAN
			B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B8	B9	B10	B11	B12	
Meningkatnya efektifitas regulatory assistance dan kemandirian industry dalam pengembangan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	IKSP 17	Persentase inovasi obat bahan alam yang didampingi sesuai standar	40	40	40	41.5	41.5	41.5	42.5	42.5	42.5	45	45	51	7.028.831.000
	IKSP 18	Persentase UMKM yang menerapkan standar keamanan dan mutu produksi OBA dan Kos						3	10	15	20	35	45	60	4.964.569.000
	IKSP 19	Persentase Industri Kosmetik yang mengikti program maturitas yang dapat Menerapkan CPKB secara penuh												56	1.100.000.000
	IKSP 20	Persentase Industri Obat Bahan Alam yang ditetapkan maturitasnya dalam penerapan CPOTB terkini												12	400.000.0000
Layanan Publik BPOM yang Prima	IKSP 21	Indeks Pelayanan Publik di Bidang Pengawasan Obat Bahan Alam, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan												4.7	8.760.036.000

SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA		TARGET												ANGGARAN
			B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B8	B9	B10	B11	B12	
Terwujudnya Tata Kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	IKSP 22	Nilai Pembangunan ZI Deputy Bidang Pengawasan OT, SK, dan Kos												89.96	1.538.957.950
	IKSP 23	Nilai AKIP Deputy Bidang Pengawasan OT, SK, dan Kos												81.66	304.760.600
	IKSP 24	Nilai Kinerja Anggaran Deputy Bidang Pengawasan OT, SK, dan Kos												5	960.170.500
	IKSP 25	Indeks Manajemen Risiko Deputy Bidang Pengawasan OT, SK dan Kos												2.95	425.419.950

Tabel 7 : Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Deputy II BPOM Tahun 2025 (Revisi)

SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA		TARGET												ANGGARAN
			B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B8	B9	B10	B11	B12	
Meningkatnya efektivitas pengawasan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	IKSP 1	Persentase Obat bahan alam yang aman dan bermutu	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	4.716.203.300
	IKSP 2	Persentase Suplemen Kesehatan yang aman dan bermutu	68	68	68	68	68	68	68	68	68	68	68	68	2.732.177.300
	IKSP 3	Persentase Kosmetik yang aman dan bermutu	62	62	62	62	62	62	62	62	62	62	62	62	2.966.252.000
	IKSP 4	Indeks Kualitas Kebijakan Pengawasan Obat Bahan Alam, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik												79	3.257.766.000
	IKSP 5	Persentase rekomendasi hasil pengawasan Obat Bahan Alam, Suplemen Kesehatan, Obat Kuasi dan Kosmetik yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	902.584.000

SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA		TARGET												ANGGARAN
			B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B8	B9	B10	B11	B12	
	IKSP 6	Persentase sarana produksi Obat Bahan Alam yang memenuhi ketentuan	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86	58.701.900
	IKSP 7	Persentase sarana produksi Suplemen Kesehatan yang memenuhi ketentuan	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	58.701.900
	IKSP 8	Persentase sarana produksi Kosmetik yang memenuhi ketentuan	81	81	81	81	81	81	81	81	81	81	81	81	1.915.196.500
	IKSP 9	Persentase fasilitas distribusi Obat Bahan Alam yang memenuhi ketentuan	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	58.701.900
	IKSP 10	Persentase fasilitas distribusi Suplemen Kesehatan yang memenuhi ketentuan	89	89	89	89	89	89	89	89	90	90	90	90	58.701.900
	IKSP 11	Persentase fasilitas distribusi Kosmetik yang memenuhi ketentuan	78	78	78	78	78	78	78	78	78	78	78	78	892.794.500

SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA		TARGET												ANGGARAN
			B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B8	B9	B10	B11	B12	
	IKSP 12	Persentase iklan Obat Bahan Alam yang memenuhi ketentuan	78	78	78	78	78	78	78	66	66	66	66	66	909.591.900
	IKSP 13	Persentase iklan Suplemen Kesehatan yang memenuhi ketentuan	87	87	87	87	87	87	87	82	82	82	82	82	177.071.900
	IKSP 14	Persentase iklan Kosmetik yang memenuhi ketentuan	71	71	71	71	71	71	71	60	60	60	60	60	932.933.000
Meningkatnya peran aktif lintas sektor dalam pengawasan OT, SK dan Kos	IKSP 15	Persentase kabupaten/kota yang melaksanakan Program Sadar Jamu Aman												2	1.000.000.000
Meningkatnya Kesadaran Masyarakat atas Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu	IKSP 16	Indeks Kesadaran Masyarakat terhadap Obat Bahan Alam, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang aman dan bermutu												86.87	5.226.369.000

SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA		TARGET												ANGGARAN
			B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B8	B9	B10	B11	B12	
Meningkatnya efektifitas regulatory assistance dan kemandirian industri dalam pengembangan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	IKSP 17	Persentase inovasi obat bahan alam yang didampingi sesuai standar	40	40	40	41.5	41.5	41.5	42.5	81	81	81	81	82.1	7.114.319.000
	IKSP 18	Persentase UMKM yang menerapkan standar keamanan dan mutu produksi Obat Bahan Alam dan Kosmetik						3	10	15	20	35	45	60	4.964.569.000
	IKSP 19	Persentase Industri Obat Bahan Alam dan Kosmetik yang mencapai tingkat maturitas												34	1.500.000.000
Terwujudnya Tata Kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	IKSP 20	Indeks Pelayanan Publik di Bidang Pengawasan Obat Bahan, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan												4.7	8.453.795.000
	IKSP 21	Nilai Pembangunan ZI Deputy Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik												89.96	1.403.806.950

SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA		TARGET											ANGGARAN	
			B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B8	B9	B10	B11	B12	
	IKSP 22	Nilai AKIP Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik												81.66	704.550.600
	IKSP 23	Nilai Kinerja Anggaran Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik												5	1.138.083.500
	IKSP 24	Indeks Manajemen Risiko Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik												2.95	323.867.950

2.5. Metode Pengukuran

Metode pengukuran indikator kinerja disusun untuk memastikan bahwa setiap pencapaian dapat diukur secara objektif, terstandar, dan dapat dipertanggungjawabkan. Dokumen metode pengukuran ini memuat definisi operasional indikator, satuan ukur, cara penghitungan, unit penanggung jawab data, serta kriteria keberhasilan capaian.

1. Persentase Obat Bahan Alam yang Aman dan Bermutu

Obat Bahan Alam adalah bahan, ramuan bahan, atau produk yang berasal dari sumber daya alam berupa tumbuhan, hewan, jasad renik, mineral, atau bahan lain dari sumber daya alam, atau campuran dari bahan tersebut yang telah digunakan secara turun temurun, atau sudah dibuktikan berkhasiat, aman, dan bermutu, digunakan untuk pemeliharaan kesehatan, peningkatan kesehatan, pencegahan penyakit, pengobatan, dan/atau pemulihan kesehatan berdasarkan pembuktian secara empiris dan/ atau ilmiah.

Kriteria Obat Bahan Alam aman dan bermutu, meliputi: 1) Memiliki NIE yang berlaku, 2) Tidak kedaluwarsa, 3) Tidak rusak, 4) Memenuhi ketentuan penandaan, dan 5) Memenuhi syarat berdasarkan pengujian.

Alur pemeriksaan hasil sampling obat bahan alam dilakukan secara berjenjang dan berurutan mulai dari kriteria poin 1 hingga poin 5 . dengan ketentuan:

- 1) Yang dinilai memenuhi ketentuan pada kriteria poin 1 akan dilakukan pemeriksaan untuk kriteria poin 2 dan seterusnya dilakukan dengan pola yang sama hingga kriteria poin 5.
- 2) Jika poin 1,2 dan 3 tidak terpenuhi maka tidak dilakukan pengujian.
- 3) Jika poin 4 tidak dipenuhi maka tetap dilakukan pengujian.
- 4) Untuk sampel dengan Klaim risiko tinggi yang tidak memenuhi point 1 maka tetap dilakukan pengujian.

Sampel obat bahan alam tidak aman dan bermutu dihitung berdasarkan satuan bets. Penanggung jawab pengumpulan data yang mendukung pengukuran kinerja Persentase Obat Bahan Alam yang Aman dan Bermutu adalah Direktorat Pengawasan Obat Tradisional, dan Suplemen Kesehatan.

2. Persentase Suplemen Kesehatan yang Aman dan Bermutu

Suplemen Kesehatan adalah produk yang dimaksudkan untuk melengkapi kebutuhan zat gizi, memelihara, meningkatkan dan/atau memperbaiki fungsi kesehatan, mempunyai nilai gizi dan/atau efek fisiologis, mengandung satu atau lebih bahan berupa vitamin, mineral, asam amino dan/atau bahan lain bukan tumbuhan yang dapat dikombinasi dengan tumbuhan.

Kriteria Suplemen Kesehatan aman dan bermutu, meliputi: 1) Memiliki NIE yang berlaku, 2) Tidak kedaluwarsa, 3) Tidak rusak, 4) Memenuhi ketentuan penandaan, dan 5) Memenuhi syarat berdasarkan pengujian

Alur pemeriksaan hasil sampling obat bahan alam dilakukan secara berjenjang dan berurutan mulai dari kriteria poin 1 hingga poin 5 . yang dinilai memenuhi ketentuan pada kriteria poin 1 akan dilakukan pemeriksaan untuk kriteria poin 2 dan seterusnya dilakukan dengan pola yang sama hingga kriteria poin 5.

Sampel suplemen kesehatan tidak aman dan bermutu dihitung berdasarkan satuan bets.

Penanggung jawab pengumpulan data yang mendukung pengukuran kinerja Persentase Suplemen Kesehatan yang Aman dan Bermutu adalah Direktorat Pengawasan Obat Tradisional, dan Suplemen Kesehatan.

3. Persentase Kosmetik yang Aman dan Bermutu

Kosmetik adalah bahan atau sediaan yang dimaksudkan untuk digunakan pada bagian luar tubuh manusia seperti epidermis, rambut, kuku, bibir, dan organ genital bagian luar, atau gigi dan membran mukosa mulut terutama untuk membersihkan, mewangikan, mengubah penampilan, dan/atau memperbaiki bau badan atau melindungi atau memelihara tubuh pada kondisi baik.

Aman dan Bermutu yang dimaksud adalah memenuhi syarat berdasarkan kriteria Pedoman Sampling kosmetik dengan menggunakan sampling targeted/purposive di tahun berjalan. Sampel kosmetik meliputi sampel sesuai dengan pedoman sampling. Sampel kosmetik mencakup sampel UPT.

Kriteria kosmetik aman dan bermutu, meliputi: 1) Memiliki NIE/bukan produk ilegal termasuk palsu, 2) Tidak kedaluwarsa, 3) Tidak rusak, 4) Memenuhi ketentuan penandaan, dan 5) Memenuhi syarat berdasarkan pengujian.

Alur pemeriksaan hasil sampling kosmetik dilakukan secara berjenjang dan berurutan mulai dari kriteria poin c.1 hingga poin c.5 . yang dinilai memenuhi ketentuan pada kriteria poin c.1 akan dilakukan pemeriksaan untuk kriteria poin c.2 dan seterusnya dilakukan dengan pola yang sama hingga kriteria poin 5. Jumlah produk kosmetik TMS dihitung berdasarkan satuan bets.

Jika tidak termasuk poin c.1 atau c.2 atau c.3, maka tidak dilakukan pengujian. Namun, apabila sampel yang diperiksa TMK penandaan (c.4), maka sampel tetap diuji. Jika ditemukan sampel kosmetik yang TMS pengujian dan/atau TMK penandaan maka dihitung 1 sampel TMS.

Penanggung jawab pengumpulan data yang mendukung pengukuran kinerja Persentase Kometik yang Aman dan Bermutu adalah Direktorat Pengawasan Kosmetik.

4. Indeks Kualitas Kebijakan Obat Bahan Alam, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik

Indeks Kualitas Kebijakan (IKK) adalah instrumen untuk mengukur kualitas kebijakan pemerintah terutama terhadap dampak atau hasil bagi pembangunan yang strategis dengan mengedepankan prinsip berbasis bukti (*evidence-based*). IKK bertujuan untuk .

Indeks Kualitas Kebijakan merupakan instrumen yang bertujuan untuk mendorong peningkatan kualitas kebijakan pemerintah melalui metode pengukuran mandiri (*self-assessment*) yang dilakukan oleh Lembaga Administrasi Negara (LAN) Ruang lingkup kebijakan yang disepakati sebagai Objek yang akan dinilai yaitu kebijakan dalam bentuk Peraturan Badan POM yang memenuhi ketentuan:

- a. Memiliki jangka waktu pemberlakuan selama 3 (tiga) tahun terakhir;
- b. Bukan merupakan peraturan perundang-undangan yang hanya memiliki materi muatan pencabutan peraturan perundang-undangan lainnya,
- c. Peraturan perundang-undangan yang berkaitan langsung dengan pelaksanaan teknis tugas dan fungsi Badan POM,
- d. Kualitas kebijakan diukur dengan dimensi penilaian yang terdiri 4 Dimensi dan 1 profil, yaitu: Pelibatan Pejabat Fungsional Analisis Kebijakan dalam Pengukuran kualitas Kebijakan, Perencanaan Kebijakan, Implementasi kebijakan, evaluasi dan keberlanjutan kebijakan, transparansi dan partisipasi publik.
- e. Pengukuran Indeks Kualitas Kebijakan ditetapkan hasilnya oleh Lembaga Administrasi Negara

Cara Perhitungan dan Formula: Berdasarkan instrumen yang dikembangkan oleh LAN.

Kriteria yang digunakan adalah:

- a. 91,00 – 100 : Unggul
- b. 80,00 – 90,99 : Sangat Baik
- c. 65,00 – 79,99 : Baik
- d. 50,00 – 64,99 : Cukup
- e. < 50,00 : Kurang

5. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Obat Bahan Alam Suplemen Kesehatan, Obat Kuasi dan Kosmetik yang Ditindaklanjuti oleh Lintas Sektor

Rekomendasi hasil pengawasan merupakan suatu rekomendasi yang diberikan oleh BPOM melalui UPT ataupun Unit Kerja Pusat kepada lintas sektor yang memiliki kewenangan dan tanggungjawab terhadap sarana produksi/distribusi obat bahan alam, suplemen kesehatan dan kosmetik.

Keputusan/Rekomendasi hasil inspeksi dapat berupa pembinaan, peringatan, peringatan keras atau rekomendasi PSK/Pencabutan Ijin/Pencabutan NIE dan atau tindak lanjut kasus yang berupa hasil pemeriksaan sarana (sarana produksi, sarana distribusi, saryanfar), hasil pengujian sampel, hasil pengawasan iklan (kepada media lokal, KPID), hasil pengawasan label, penanganan kasus, pengaduan konsumen.

Tindak lanjut adalah *feedback*/respon dari lintas sektor terkait terhadap keputusan/rekomendasi hasil pengawasan yang diterbitkan oleh UPT ataupun Unit Kerja Pusat. Lintas sektor meliputi pemerintah daerah, kementerian/lembaga, organisasi profesi, maupun institusi lain yang terkait pengawasan Obat dan Makanan.

Penanggung jawab pengumpulan data yang mendukung pengukuran kinerja Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Obat Bahan Alam Suplemen Kesehatan, Obat Kuasi dan Kosmetik yang Ditindaklanjuti oleh Lintas Sektor adalah Direktorat Pengawasan Obat Tradisional, dan Suplemen Kesehatan dan Direktorat Pengawasan Kosmetik.

6. Persentase Sarana Produksi Obat Bahan Alam, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang Memenuhi Ketentuan

Sarana produksi Obat Bahan alam, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik adalah jumlah sarana produksi Industri Obat Tradisional (IOT), Industri Ekstrak bahan Alam (IEBA), Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT), Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT), Industri Suplemen Kesehatan, dan Industri Kosmetik.

Dasar penetapan sarana produksi MK/TMK mengacu pada peraturan dan/atau pedoman yang berlaku terkait pengawasan Obat Bahan alam, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik.

Cara Perhitungan:

(Jumlah sarana produksi Obat Bahan alam, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang memenuhi ketentuan / Jumlah sarana produksi Obat Bahan alam, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang diperiksa) x 100%

Penanggung jawab pengumpulan data yang mendukung pengukuran indikator kinerja ini yaitu Direktorat Pengawasan Obat Tradisional, dan Suplemen Kesehatan, Direktorat Pengawasan Kosmetik.

7. Persentase Fasilitas Distribusi Obat Bahan Alam, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang Memenuhi Ketentuan

Sarana distribusi adalah sarana distribusi yang melakukan pendistribusian terhadap produk obat bahan alam, suplemen kesehatan dan kosmetik.

Dasar penetapan sarana distribusi MK/TMK mengacu pada peraturan dan/atau pedoman yang berlaku terkait pengawasan Obat Bahan alam

Cara perhitungan

Jumlah sarana distribusi yang memenuhi ketentuan / Jumlah sarana distribusi yang diperiksa

Penanggung jawab pengumpulan data yang mendukung pengukuran indikator kinerja ini yaitu Direktorat Pengawasan Obat Tradisional, dan Suplemen Kesehatan, Direktorat Pengawasan Kosmetik

8. Persentase Iklan Obat Bahan Alam, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang memenuhi ketentuan

Iklan adalah setiap keterangan atau pernyataan mengenai Obat Bahan Alam, Obat Kuasi, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik dalam bentuk visual, audio, audiovisual, untuk pemasaran dan/atau perdagangan Obat Bahan Alam, Obat Kuasi, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik.

Pengawasan iklan dilakukan baik rutin dan insidental terhadap iklan yang dipublikasikan sesuai dengan target dan tanggungjawab UPT berdasarkan Surat Edaran Deputy Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik.

Kesesuaian pelaksanaan pengawasan iklan oleh UPT mengacu pada Surat Edaran Deputy Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik

serta peraturan mengenai periklanan Obat Bahan Alam, Obat Kuasi, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik maupun ketentuan terkait.

Cara perhitungan: Jumlah iklan yang diawasi sesuai ketentuan/jumlah target pengawasan iklan *100%.

Penanggung jawab pengumpulan data yang mendukung pengukuran kinerja Persentase iklan Obat Bahan Alam, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang memenuhi ketentuan adalah Direktorat Pengawasan Obat Tradisional, dan Suplemen Kesehatan dan Direktorat Pengawasan Kosmetik.

9. Persentase Kabupaten/kota sadar Jamu Aman

Program Sadar Jamu Aman merupakan upaya peningkatan pelestarian jamu melalui pengembangan dan pemanfaatan jamu serta kesadaran konsumsi jamu yang aman untuk kesehatan oleh masyarakat. Program Sadar Jamu Aman akan dilaksanakan dengan melibatkan Kabupaten/Kota serta *influencer*.

Perhitungan indikator= Jumlah Kabupaten/Kota yang melaksanakan Program Sadar Jamu Aman .

Cara Perhitungan Jumlah Kabupaten/Kota yang berkomitmen melaksanakan Program Sadar Jamu Aman :

Setiap tahun target nya 10 kabupaten/kota yang berkomitmen melaksanakan program sadar jamu Aman dan tiap tahun kumulatif dari tahun sebelumnya sehingga di akhir RPJMN tahun 2029 jumlah nya 50 kabupaten/kota yang melaksanakan program sadar jamu aman.

Target tahunan (%) dihitung dari capaian kabupaten/kota pertahun dibagi jumlah komulatif kabupaten/kota di akhir RPJMN tahun 2029 (50).

Penanggung jawab pengumpulan data yang mendukung pengukuran kinerja Persentase kabupaten/kota sadar Jamu Aman adalah Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik.

10. Indeks Kesadaran Masyarakat terhadap Obat Bahan Alam, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang aman dan bermutu

Indeks Kesadaran merupakan hasil pengukuran berdasarkan survei kepada masyarakat untuk mendapatkan informasi mengenai kesadaran, ketertarikan, keinginan dan tindakan sebagai pengambilan keputusan dalam memilih Obat Bahan Alam, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang aman dan bermutu. Masyarakat adalah konsumen obat bahan alam, suplemen kesehatan, dan kosmetik yang merupakan produk layanan yang menjadi lingkup pengawasan BPOM.

Kesadaran diukur melalui 3 aspek, yaitu:

- a. Pengetahuan (*Knowledge*) bertujuan untuk menggali sejauh mana pengetahuan dan pemahaman masyarakat dalam memilih, menggunakan atau mengonsumsi sediaan farmasi dan Makanan. Seberapa baik pemahaman masyarakat dalam memilih serta mengonsumsi sediaan farmasi dan Makanan dengan benar. Dari

sini dapat dilihat juga sejauh mana informasi dan atau pengaruh sumber media informasi terhadap pemahaman masyarakat.

- b. Sikap (*Attitude*) untuk menggali sikap masyarakat dalam memilih, menggunakan atau mengonsumsi sediaan farmasi dan makanan yang aman dan bermutu.
- c. Perilaku (*Practices*) untuk mengetahui perilaku masyarakat dalam memilih, menggunakan atau mengonsumsi sediaan farmasi dan Makanan dengan baik.

Indeks kesadaran masyarakat dilakukan melalui survei dengan metode *Computer Assisted Personal Interviewing* (CAPI) berbasis *offline* dan *online*. Desain sampling menggunakan *stratified random sampling* dimana pengembangan desain dan metodologi survei kesadaran masyarakat dilakukan bekerja sama dengan Direktorat Pengembangan Metodologi Sensus dan Survei - Badan Pusat Statistik.

Perhitungan indeks diukur dari rata-rata tertimbang (weighted mean score) indikator kesadaran dengan mempertimbangkan bobot, yaitu bobot penduduk (BPS), bobot pertanyaan per aspek pengetahuan, sikap dan perilaku serta bobot komoditi. Pengukuran kesadaran masyarakat juga dilakukan terhadap 5 (lima) produk yang menjadi lingkup pengawasan BPOM. Kelima produk tersebut memiliki nilai indeks kesadaran masing-masing dan diagregatkan menjadi Indeks kesadaran. Indeks Kesadaran Nasional diperoleh dari penjumlahan atas hasil perkalian indeks kesadaran setiap komoditi dengan bobot masing-masing komoditi.

Penanggung jawab pengumpulan data yang mendukung pengukuran kinerja Indeks Kesadaran Masyarakat terhadap Obat Bahan Alam, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang aman dan bermutu, yaitu Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik.

11. Persentase Inovasi Obat Bahan Alam yang Didampingi Sesuai Standar

Kemandirian bahan baku OBA yaitu:

- 1) Bahan Baku OBA yang bermutu adalah bahan baku yang dihasilkan dari Industri Ekstrak Bahan Alam telah terstandar, baik proses produksi yang distandarisasi maupun bahan baku yang terstandar.
- 2) Industri Ekstrak Bahan Alam adalah Industri yang memproduksi bahan baku alam bentuk ekstrak, dimana bahan baku alam tersebut merupakan bahan baku/raw material bagi industri obat bahan alam, UMK, Industri Kosmetik dan Industri pangan. Proses produksi bahan baku alam dengan menerapkan CPOTB Tahun 2021.
- 3) Bahan Baku Obat Bahan Alam adalah bahan baku yang berasal dari tanaman dan hewan berupa ekstrak yang di diproduksi oleh Industri Ekstrak Bahan Alam (IEBA).

Definisi tahapan pendampingan inovasi obat bahan alam:

- 1) Penyusunan protokol uji praklinik/klinik (80%);
- 2) Pelaksanaan penelitian (15%) mencakup persiapan (5%) dan pelaksanaan (10%);
- 3) Standardisasi produk dan/atau submit dokumen NIE (5%); dan
- 4) Jika hasil sudah selesai atau jika dalam 3 bulan pendaftar tidak merespon surat Tambahan Data dianggap selesai (100%).

Cara Perhitungan: menghitung Rata-rata dari Persentase inovasi obat bahan alam yang didampingi sesuai standar di lingkup registrasi obat bahan alam, Persentase pendampingan di bidang registrasi obat bahan alam, suplemen kesehatan, notifikasi kosmetik, penilaian uji praklinik/klinik obat bahan alam, suplemen kesehatan dan Kosmetik, serta penilaian DIP yang efektif, Persentase peningkatan penelitian uji pra klinik dan uji klinik Jamu yang didampingi sesuai standar, Persentase Industri Ekstrak bahan alam (IEBA) yang menghasilkan bahan Baku OBA yang bermutu.

Penanggung jawab pengumpulan data yang mendukung pengukuran kinerja Persentase Inovasi Obat Bahan Alam yang Didampingi Sesuai Standar, yaitu Direktorat Registrasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik, dan Direktorat Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan.

12. Persentase UMKM yang Menerapkan Standar Keamanan dan Mutu Produksi Obat Bahan Alam dan Kosmetik

Ruang lingkup UMKM mencakup Usaha Mikro dan Kecil:

- a. Usaha Mikro memiliki modal usaha sampai dengan paling banyak Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha dan memiliki hasil penjualan tahunan sampai dengan paling banyak Rp2.000.000.000,- (dua miliar rupiah); dan
- b. Usaha Kecil memiliki modal usaha lebih dari Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha dan memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp15.000.000.000,- (lima belas miliar rupiah).

UMKM yang menerapkan standar keamanan dan mutu produksi Obat Bahan Alam dan Kosmetik adalah UMKM yang memperoleh Sertifikat CPOTB Bertahap/ Sertifikat CPKB / SPA CPKB dan/ atau Nomor Izin Edar (NIE).

Cara Perhitungan : Jumlah UMKM yang memperoleh Sertifikat CPOTB Bertahap/ Sertifikat CPKB / SPA CPKB dan/ atau Nomor Izin Edar (NIE) dibagi jumlah UMKM OBA dan Kos yang didampingi dikali 100%.

Penanggung jawab pengumpulan data yang mendukung pengukuran kinerja Persentase UMKM yang menerapkan standar keamanan dan mutu produksi Obat Bahan Alam dan Kosmetik, yaitu Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik.

13. Persentase Industri Obat Bahan Alam dan Kosmetik yang Mencapai Tingkat maturitas

Industri kosmetik adalah industri yang memproduksi kosmetika yang telah memiliki izin usaha industri atau tanda daftar industri sesuai ketentuan peraturan perundangundangan yang memiliki bukti penerapan CPKB.

Program maturitas adalah program pembinaan/penilaian yang bertujuan mengarahkan industri kosmetik sehingga dapat menerapkan aspek CPKB secara penuh

Industri Obat Bahan Alam adalah Industri yang memproduksi OT, Suplemen kesehatan, Obat Kuasi yang telah memiliki izin usaha industri atau tanda daftar industri sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Industri Obat Bahan Alam

ini wajib menerapkan CPOTB secara penuh/full aspek sesuai pedoman CPOTB terkini yaitu PerBPOM 25 Tahun 2021 tentang Penerapan CPOTB.

Maturitas Industri Obat Bahan Alam perlu dinilai dan ditetapkan dengan tools penilaian maturitas yang mencakup Aspek Pemenuhan CPOTB (indeks cluster berdasarkan data mapping dan track record hasil pemeriksaan rutin CPOTB) dan Aspek Kepatuhan terhadap Regulasi di Bidang Obat Bahan Alam (Track Record Keamanan, Mutu, Penandaan dan Penerapan Pharmacovigilance). Program maturitas ini bertujuan untuk mengelompokkan Industri Obat Bahan Alam ke dalam level maturitas tertentu sehingga pengawasan yang dilakukan dapat lebih efektif dan tepat sasaran.

Industri dengan tingkat maturitas yang tinggi adalah industri telah menerapkan CPOTB secara paripurna dan patuh terhadap regulasi di bidang OTSK, kepada Industri yang seperti ini dapat dilakukan *less inspection* karena dinilai telah mampu menerapkan jaminan mutu dalam melakukan produksi obat bahan alam. Industri yang seperti ini dapat digunakan sebagai mitra Badan POM sebagai orang tua angkat UMKM, mitra dalam peningkatan kompetensi petugas Badan POM misal sebagai tempat PKL, mitra dalam pembuatan konten edukasi Badan POM, dan lain-lain.

Sebagai dampak adanya *less inspection* pada Industri dengan tingkat maturitas tinggi, maka *focused inspection* dapat dilakukan pada Industri dengan tingkat maturitas menengah dan rendah untuk mengarahkan pada peningkatan level maturitas Cara perhitungan Jumlah industri yang berhasil menerapkan CPKB secara penuh setelah menerapkan program dibandingkan sebelum menerapkan program (masih menerapkan CPKB secara bertahap).

Cara perhitungan

- Jumlah industri yang berhasil menerapkan CPKB secara penuh setelah menerapkan program dibandingkan sebelum menerapkan program (masih menerapkan CPKB secara bertahap) (50%)

- Industri Obat bahan Alam yang ditetapkan maturitasnya /Jumlah Seluruh Industri Obat Bahan Alam di Indonesia (50%)

Penanggung jawab pengumpulan data yang mendukung pengukuran kinerja ini yaitu: Direktorat Pengawasan Kosmetik dan Direktorat Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan.

14. Indeks Pelayanan Publik di Bidang Pengawasan Obat Bahan Alam, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan

Indeks Pelayanan Publik (IPP) adalah indeks yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan publik di lingkungan K/L/D berdasarkan 6 (enam) aspek meliputi:

- 1) Kebijakan Pelayanan (bobot 30%);
- 2) Profesionalitas SDM (18%);
- 3) Sarana Prasarana (15%);
- 4) Sistem Informasi Pelayanan Publik (SIPP) (15%);
- 5) Konsultasi dan Pengaduan (15%);
- 6) Inovasi (7%).

Penilaian kinerja UPP mengacu Peraturan Menteri PANRB Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

Cara Perhitungan:

Dilakukan penilaian oleh Tim Penilai UPP BPOM (Biro Hukum dan Organisasi dan Inspektorat Utama)

Kategori nilai:

- a) 0 - 1,00 F Gagal
- b) 1,01 - 1,50 E Sangat Buruk
- c) 1,51 - 2,00 D Buruk
- d) 2,01 - 2,50 C- Cukup (Dengan Catatan)
- e) 2,51 - 3,00 C Cukup
- f) 3,01 - 3,50 B- Baik (Dengan Catatan)
- g) 3,51 - 4,00 B Baik
- h) 4,01 - 4,50 A- Sangat Baik
- i) 4,51 - 5,00 A Pelayanan Prima

15. Nilai Pembangunan ZI Deputy II BPOM

Nilai pembangunan zona integritas merupakan hasil dari implementasi pelaksanaan zona integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di lingkup Unit Organisasi.

Cara Perhitungan:

Nilai dari hasil evaluasi zona integritas Unit Organisasi yang dinilai oleh tim evaluator Zona Integritas BPOM.

Penanggung jawab pengumpulan data yang mendukung pengukuran Nilai Pembangunan ZI Deputy II BPOM adalah Inspektorat Utama.

16. Nilai AKIP Deputy II BPOM

Berdasarkan PP No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Perpres No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) serta PermenPANRB No 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, SAKIP merupakan sistem penerapan manajemen kinerja Deputy II BPOM yang berorientasi pada pencapaian outcomes dan upaya untuk mendapatkan hasil yang lebih baik.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 Tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah terdapat penyesuaian komponen dan bobot penilaian dalam evaluasi SAKIP, serta adanya Surat Edaran Inspektur Utama Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor Pi.04.7.72.01.23.01 Tahun 2023 Tentang Pedoman Pengisian Lembar Kerja Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Di Lingkungan Badan Pengawas Obat Dan Makanan dengan komponen dan bobot sebagai berikut:

Komponen:

- a) Perencanaan Kinerja (bobot 24)
- b) Pengukuran Kinerja (bobot 24)
- c) Pelaporan Kinerja (bobot 12)

- d) Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal (20)
- e) Capaian Kinerja (20)
- f) Sumber Data:
- g) Laporan Hasil Evaluasi AKIP Inspektorat Utama dari Tim Evaluator AKIP BPOM

Penanggung jawab pengumpulan data yang mendukung pengukuran Nilai AKIP Deputy II BPOM adalah Inspektorat Utama.

17. Nilai Kinerja Anggaran Deputy II BPOM

Nilai Kinerja Anggaran merupakan penilaian terhadap kinerja anggaran Deputy II BPOM yang diperoleh dari Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran dan Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran

- 1) Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran
Indikator pembentuk Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran sebagai berikut:
 - a) Efektivitas (75%), yang berisi nilai Capaian RO
 - b) Efisiensi (25%), terdiri dari Penggunaan SBK dan Efisiensi SBK
- 2) Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA), yang terdiri dari:
 - a) Revisi DIPA (10%);
 - b) Deviasi Hal III DIPA (15%);
 - c) Penyerapan Anggaran (20%);
 - d) Belanja kontraktual (10%);
 - e) Penyelesaian Tagihan (10%);
 - f) Pengelolaan UP dan TUP (10%);
 - g) Capaian Output (25%);

Cara Perhitungan Nilai Kinerja Anggaran Deputy II BPOM, yaitu:

$\text{Nilai Kinerja Anggaran} = (\text{NK Perencanaan Anggaran} \times 50\%) + (\text{Nilai IKPA} \times 50\%)$
--

Keterangan:

Kategori Konversi Nilai Kinerja Anggaran, seperti terlihat pada tabel berikut:

Tabel 8 : Kategori Konversi Nilai Kinerja Anggaran

Nilai	Kategori	Konversi Nilai
0 s.d. 50	Sangat Kurang	1
50,01 s.d. 60	Kurang	2
60,01 s.d. 80	Cukup	3
80,01 s.d. 90	Baik	4
90,01 s.d. 100	Sangat Baik	5

Penanggung jawab pengumpulan data yang mendukung pengukuran Nilai Kinerja Anggaran Deputy II BPOM adalah Kementerian Keuangan.

18. Indeks Manajemen Risiko Deputy II BPOM

Manajemen Risiko merupakan pendekatan sistematis yang meliputi budaya, proses, dan struktur untuk menentukan tindakan terbaik terkait risiko yang dihadapi dalam pencapaian tujuan /sasaran organisasi. Tingkat Maturitas adalah suatu kondisi penerapan manajemen risiko yang terbagi dalam 5 (lima) kategori. tingkat maturitas penerapan manajemen risiko menunjukkan tingkat kematangan implementasi manajemen risiko dalam suatu organisasi.

Penilaian tingkat maturitas manajemen risiko bertujuan untuk:

1. Mengetahui kecukupan rancangan dan efektivitas pelaksanaan proses manajemen risiko sebagai salah satu alat manajemen dalam memberikan keyakinan kepada stakeholder bahwa tujuan dan sasaran tercapai sebagaimana diharapkan,
2. Memberikan umpan balik untuk peningkatan pencapaian tujuan dan manfaat penerapan manajemen risiko, dan
3. Menjaga pemenuhan prinsip penerapan manajemen risiko.

Cara Perhitungan:

Nilai maturitas manajemen risiko diperoleh dari hasil evaluasi yang dilakukan oleh Deputy II BPOM yang menggunakan kertas kerja evaluasi maturitas manajemen risiko yang nilainya terbagi dalam kategori sebagai berikut:

Menuju Tingkat Maturitas	Skor Total	Nilai Maturitas	Tingkat Maturitas
<i>Risk Naive</i>	0-16	1	-
<i>Risk Aware</i>	17-32	2	Peningkatan <i>Risk Naive</i> menuju <i>Risk Aware</i>
<i>Risk Defined</i>	33-48	3	Peningkatan <i>Risk Aware</i> menuju <i>Risk Defined</i>
<i>Risk Managed</i>	49-64	4	Peningkatan <i>Risk Defined</i> menuju <i>Risk Managed</i>
<i>Risk Enabled</i>	65-80	5	Peningkatan <i>Risk Managed</i> menuju <i>Risk Enabled</i>

Cara perhitungan level maturitas:

$\text{Skor Maturitas} = (\text{Skor Total})/16$
--

Keterangan:

- Skor maturitas merupakan nilai yang menjadi indeks maturitas manajemen risiko.
- Skor Total merupakan nilai akhir dari pengisian kertas kerja evaluasi berdasarkan evaluasi oleh Inspektorat Utama.

Penanggung jawab pengumpulan data yang mendukung pengukuran Indeks Manajemen Risiko Deputy II BPOM adalah Inpektorat Utama.

Pengukuran indikator kinerja dilakukan dengan cara menghitung realisasi setiap indikator dari setiap sasaran strategis sesuai definisi operasional indikator, yang ditetapkan pada saat perencanaan kinerja. Selanjutnya dihitung persentase capaian kinerja untuk masing-masing indikator, dengan cara membandingkan antara realisasi dan target yang telah ditetapkan pada perjanjian kinerja. Penyajian dapat berupa tabel atau grafik.

Untuk indikator positif/polarisasi maximize (semakin tinggi realisasinya, semakin baik kinerjanya) dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\% \text{ Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Untuk indikator negatif/polarisasi minimize (semakin kecil realisasinya, semakin baik kinerjanya) dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\% \text{ Capaian} = 1 + \frac{(1 - \text{Realisasi})}{\text{Target}} \times 100\%$$

Capaian indikator kinerja dinyatakan dalam kategori sebagai berikut:

Tabel 9 : Kriteria Capaian Indikator Kinerja

Kategori	Capaian	Notifikasi Warna
Tidak dapat disimpulkan	> 110%	
Sangat Baik	$100\% \leq x \leq 110\%$	
Baik	$90\% < x < 100\%$	
Cukup	$60\% \leq x \leq 90\%$	
Kurang	< 60%	

Dengan mempertimbangkan koreksi terhadap anomali capaian kinerja, maka perlu melakukan normalisasi capaian perjanjian kinerja sebagaimana ketentuan berikut:

- (1) Jika capaian kinerja setiap indikator >110% maka akan dinormalisasi menjadi 110%; dan
- (2) Jika capaian kinerja setiap indikator $\leq 110\%$ maka tidak dilakukan normalisasi.

NKO periodik merupakan nilai kinerja unit/satuan kerja secara triwulanan. NKI periodik dihitung dari total capaian indikator perjanjian kinerja periodik tertentu yang telah

dinormalisasi dibagi dengan jumlah indikator kinerja yang memiliki capaian kinerja pada periode tersebut.

Hasil NKO dikelompokkan menjadi 5 (lima) predikat, yaitu 1) Sangat Kurang; 2) Kurang; 3) Butuh Perbaikan; 4) Baik; dan 5) Istimewa, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 10 : Kriteria Predikat Nilai Kerja Organisasi

Predikat NKO	Nilai Kerja Organisasi (NKO)	Notifikasi Warna
Istimewa	> 100%	
Baik	80% < x ≤ 100%	
Butuh Perbaikan	60% < x ≤ 80%	
Kurang	20% < x ≤ 60%	
Sangat Kurang	0% ≤ x ≤ 20%	

Pengukuran efisiensi dari kinerja diukur dengan menghitung kemampuan suatu kegiatan untuk menggunakan input yang lebih sedikit namun menghasilkan output yang sama atau lebih besar atau dengan kata lain bahwa persentase capaian output sama atau lebih tinggi dari capaian input. Diperoleh dengan membagi % capaian output dengan % capaian input:

$$IE = \frac{\% \text{Capaian Output}}{\% \text{Capaian Input}} \quad IE \geq \frac{100\%}{100\%} = 1$$

Efisiensi

diukur dengan membandingkan indeks efisiensi (IE) terhadap standar efisiensi (SE). Apabila $IE \geq SE$ maka kegiatan dianggap efisien, apabila: $IE < SE$ maka kegiatan dianggap tidak efisien. Selanjutnya terhadap kegiatan yang efisien atau tidak efisien diukur tingkat efisiensi (TE) yang menggambarkan seberapa besar efisiensi atau ketidakefisienan yang terjadi pada setiap kegiatan dengan menggunakan persamaan:

$$TE = \frac{IE - SE}{SE}$$

Tingkat Efisiensi dihitung dengan range sebagai berikut:

Tabel 11 : Tingkat Efisiensi

No.	Tingkat Efisiensi	Capaian
1	<0	Tidak Efisien
2	0 – 0,20	100% (efisien)
3	0,21 – 0,40	95% (efisien)
4	0,41 – 0,60	92% (efisien)
5	0,61 – 0,80	90% (efisien)
6	0,81 – 1,00	88% (efisien)
7	1,01 – 1,20	86% (tidak efisien)
8	1,21 – 1,40	84% (tidak efisien)
9	1,41 – 1,60	80% (tidak efisien)
10	1,61 – 1,80	78% (tidak efisien)
11	> 1,81	75% (tidak efisien)

BAB III

AKUNTABILITAS

KINERJA

BAB III Akuntabilitas Kinerja

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

Pada Tahun 2025, kinerja Deputy II BPOM diukur melalui 24 indikator kinerja sasaran program, dengan 3 indikator dikecualikan (exclude) dari perhitungan karena seluruh anggaran pendukungnya mengalami pemblokiran sehingga tidak dapat direalisasikan. Dengan demikian, penilaian Nilai Kinerja Organisasi (NKO) didasarkan pada 21 indikator yang dapat diukur secara valid dan akuntabel. Berdasarkan hasil pengukuran awal, Deputy II BPOM memperoleh NKO sebesar 102,38 dengan predikat Istimewa. Namun demikian, sehubungan dengan hasil evaluasi SAKIP dimana Deputy II BPOM memperoleh predikat “Baik”, maka sesuai mekanisme koreksi, nilai NKO mengalami penyesuaian sebesar 10%, sehingga NKO terkoreksi menjadi 91,65 dengan predikat “Baik.”

Perolehan predikat Baik tersebut tetap menunjukkan efektivitas pelaksanaan program, konsistensi pengawasan dan pembinaan di bidang Obat Bahan Alam, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik, serta penguatan tata kelola organisasi berbasis akuntabilitas dan kinerja. Mayoritas indikator strategis menunjukkan capaian sangat baik dan melampaui target, yang menggambarkan kuatnya implementasi program meskipun terdapat keterbatasan pada beberapa indikator akibat faktor eksternal.

Secara keseluruhan, NKO Tahun 2025 menegaskan bahwa Deputy II BPOM tetap mampu menjaga kualitas dan stabilitas kinerja organisasi dalam kondisi keterbatasan anggaran dan dinamika sektor yang kompleks. Koreksi nilai akibat predikat SAKIP menjadi refleksi penting untuk terus memperkuat sistem perencanaan, pengukuran, dan pelaporan kinerja, sehingga pada periode mendatang capaian kinerja substantif dapat selaras sepenuhnya dengan peningkatan kualitas akuntabilitas organisasi.

Rincian capaian kinerja dari tiap Indikator kinerja pada 2025 adalah sebagaimana tertera pada tabel berikut:

Tabel 12 : Nilai Kinerja Organisasi Tahun 2025

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Normalisasi Capaian Kinerja (%)	Koreksi Normalisasi Capaian PK Berdasarkan Predikat AKIP	Nilai Akhir Capaian PK
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	
1	Meningkatnya efektivitas pengawasan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	Persentase Obat bahan alam yang aman dan bermutu	65,00	70,02	107,74	107,74	90%	96,97
2		Persentase Suplemen Kesehatan yang aman dan bermutu	68,00	82,57	121,44	110,00	90%	99,00
3		Persentase Kosmetik yang aman dan bermutu	62,00	67,25	109,48	109,48	90%	98,53
4		Indeks Kualitas Kebijakan Pengawasan Obat Bahan Alam, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	79,00	97,75	123,73	110,00	90%	99,00
5		Persentase rekomendasi hasil pengawasan Obat Bahan Alam, Suplemen Kesehatan, Obat Kuasi dan Kosmetik yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor	83,00	83,47	100,57	100,57	90%	90,51
6		Persentase sarana produksi Obat Bahan Alam yang memenuhi ketentuan	86,00	70,45	81,92	81,92	90%	73,73

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Normalisasi Capaian Kinerja (%)	Koreksi Normalisasi Capaian PK Berdasarkan Predikat AKIP	Nilai Akhir Capaian PK
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	
7		Persentase sarana produksi suplemen kesehatan yang memenuhi ketentuan	85,00	86,54	101,81	101,81	10,00%	91,63
8		Persentase sarana produksi Kosmetik yang memenuhi ketentuan	81,00	79,81	98,53	98,53	10,00%	88,68
9		Persentase fasilitas distribusi Obat Bahan Alam yang memenuhi ketentuan	70,00	72,41	103,44	103,44	10,00%	93,10
10		Persentase fasilitas distribusi Suplemen Kesehatan yang memenuhi ketentuan	90,00	92,94	103,27	103,27	10,00%	92,94
11		Persentase fasilitas distribusi Kosmetik yang memenuhi ketentuan	78,00	73,92	94,77	94,77	10,00%	85,29
12		Persentase iklan Obat Bahan Alam yang memenuhi ketentuan	66,00	69,75	105,68	105,68	10,00%	95,11
13		Persentase iklan Suplemen Kesehatan yang memenuhi ketentuan	82,00	82,17	100,21	100,21	10,00%	90,19
14		Persentase iklan Kosmetik yang memenuhi ketentuan	60,00	60,02	100,03	100,03	10,00%	90,03

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Normalisasi Capaian Kinerja (%)	Koreksi Normalisasi Capaian PK Berdasarkan Predikat AKIP	Nilai Akhir Capaian PK
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	
15	Meningkatnya Kesadaran Masyarakat atas Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu	Indeks Kesadaran Masyarakat terhadap Obat Bahan Alam, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang aman dan bermutu	86,87	88,89	102,33	102,33	10,00%	92,10
16	Meningkatnya efektifitas regulatory assistance dan kemandirian industry dalam pengembangan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	Persentase UMKM yang menerapkan standar keamanan dan mutu produksi Obat Bahan Alam dan Kosmetik	60,00	64,44	107,40	107,40	10,00%	96,66
17	Terwujudnya tata kelola pemerintah serta	Indeks Pelayanan Publik di Bidang Pengawasan Obat Bahan Alam, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan	4,70	4,91	104,47	104,47	10,00%	94,02
18	pelayanan publik unit organisasi yang prima	Nilai Pembangunan ZI Deputy Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	89,96	90,15	100,21	100,21	10,00%	90,19

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Normalisasi Capaian Kinerja (%)	Koreksi Normalisasi Capaian PK Berdasarkan Predikat AKIP	Nilai Akhir Capaian PK
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	
19		Nilai AKIP Deputy Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	81,66	79,26	97,06	97,06	10,00%	87,35
20		Nilai Kinerja Anggaran Deputy Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	5,00	5,00	100,00	100,00	10,00%	90,00
21		Indeks Manajemen Risiko Deputy Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	2,95	2,94	99,66	99,66	10,00%	89,69
	Total Capaian PK							1924,71
	Nilai Kinerja Organisasi (Rata-rata Capaian PK)							91,65
	Predikat NKO							Baik

Tabel 13 : Capaian Kinerja tahun 2025

No.	Sasaran Program / Indikator Kinerja	Target (% / Nilai)	Realisa si (% / Nilai)	Capaian (%)	Kategori / Notifikasi Warna
SP 1	Meningkatnya efektivitas pengawasan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan			103,76	Sangat baik
IKSP 1	Persentase Obat bahan alam yang aman dan bermutu	65	70,03	107,74	Sangat baik
IKSP 2	Persentase Suplemen Kesehatan yang aman dan bermutu	68	82,58	121,44	Tidak dapat disimpulkan
IKSP 3	Persentase Kosmetik yang aman dan bermutu	62	67,88	109,48	Sangat baik
IKSP 4	Indeks Kualitas Kebijakan Pengawasan Obat Bahan Alam, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	79	97,75	110,00	Sangat baik
IKSP 5	Persentase rekomendasi hasil pengawasan Obat Bahan Alam, Suplemen Kesehatan, Obat Kuasi dan Kosmetik yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor	83	83,47	100,57	Sangat baik
IKSP 6	Persentase sarana produksi Obat Bahan Alam yang memenuhi ketentuan	86	70,45	81,92	Cukup
IKSP 7	Persentase sarana produksi Suplemen Kesehatan yang memenuhi ketentuan	85	86,54	101,81	Sangat baik
IKSP 8	Persentase sarana produksi Kosmetik yang memenuhi ketentuan	81	79,81	98,53	Baik
IKSP 9	Persentase fasilitas distribusi Obat Bahan Alam yang memenuhi ketentuan	70	72,41	103,44	Sangat baik
IKSP 10	Persentase fasilitas distribusi Suplemen Kesehatan yang memenuhi ketentuan	90	92,94	103,27	Sangat baik
IKSP 11	Persentase fasilitas distribusi Kosmetik yang memenuhi ketentuan	78	73,92	94,77	Baik
IKSP 12	Persentase iklan Obat Bahan Alam yang memenuhi ketentuan	66	69,75	105,68	Sangat baik
IKSP 13	Persentase iklan Suplemen Kesehatan yang memenuhi ketentuan	82	82,17	100,21	Sangat baik
IKSP 14	Persentase iklan Kosmetik yang memenuhi ketentuan	60	60,02	100,03	Sangat baik
SP 2	Meningkatnya peran aktif lintas sektor dalam pengawasan Obat Bahan Alam, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik			n/a	n/a
IKSP 15	Persentase kabupaten/kota yang melaksanakan Program Sadar Jamu Aman	2	n/a	n/a	n/a
SP 3	Meningkatnya Kesadaran Masyarakat atas Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu			102,33	Sangat Baik
IKSP 16	Indeks Kesadaran Masyarakat terhadap Obat Bahan Alam, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang aman dan bermutu	86,87	88,89	102,33	Sangat baik
SP 4	Meningkatnya efektifitas regulatory assistance dan kemandirian industri dalam pengembangan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan			107,40	Sangat baik

No.	Sasaran Program / Indikator Kinerja	Target (% / Nilai)	Realisasi (% / Nilai)	Capaian (%)	Kategori / Notifikasi Warna
IKSP 17	Persentase inovasi obat bahan alam yang didampingi sesuai standar	82,10	n/a	n/a	n/a
IKSP 18	Persentase UMKM yang menerapkan standar keamanan dan mutu produksi Obat bahan alam dan kosmetik	60,00	64,44	107,40	Sangat baik
IKSP 19	Persentase Industri Obat Bahan alam dan Kosmetik yang Mencapai Tingkat Maturitas	34,00	n/a	n/a	n/a
SP 5	Terwujudnya Tata Kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal			100,28	Sangat baik
IKSP 20	Indeks Pelayanan Publik di Bidang Pengawasan Obat Bahan Alam, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan	4,70	4,91	104,47	Sangat baik
IKSP 21	Nilai Pembangunan ZI Deputy Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	89,96	90,15	100,21	Sangat baik
IKSP 22	Nilai AKIP Deputy Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	81,66	79,26	97,06	Baik
IKSP 23	Nilai Kinerja Anggaran Deputy Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	5,00	5,00	100,00	Sangat baik
IKSP 24	Indeks Manajemen Risiko Deputy Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	2,95	2,94	99,66	Baik

Kinerja Deputy II BPOM Tahun 2025 diukur melalui 24 Indikator Kinerja Sasaran Program (IKSP) yang menggambarkan capaian pada aspek pengawasan, pembinaan, pelayanan publik, tata kelola, serta penguatan sistem manajemen internal.

Secara umum, capaian kinerja menunjukkan hasil yang sangat positif. Dari 24 indikator yang diukur:

- 14 indikator memperoleh predikat Sangat Baik,
- 5 indikator memperoleh predikat Baik,
- 1 indikator memperoleh predikat Cukup,
- 2 indikator memperoleh predikat Tidak Dapat Disimpulkan,
- dan 3 indikator tidak memiliki realisasi karena seluruh anggaran pendukungnya mengalami pemblokiran, sehingga tidak dapat diukur pada tahun berjalan.

Indikator dengan predikat Sangat Baik mendominasi capaian kinerja Deputy II BPOM, hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar target program strategis berhasil dicapai bahkan melampaui target yang ditetapkan, khususnya pada aspek kualitas kebijakan, keamanan dan mutu produk, pelayanan publik, serta tata kelola organisasi. Indikator dengan predikat Baik dan Cukup menjadi area yang memerlukan penguatan lebih lanjut melalui

peningkatan efektivitas pengawasan berbasis risiko, optimalisasi pembinaan pelaku usaha, serta penguatan monitoring dan evaluasi internal.

Adapun dua indikator yang tidak terealisasi tidak disebabkan oleh kelemahan implementasi, melainkan oleh faktor eksternal berupa pemblokiran anggaran, sehingga kegiatan operasional yang mendukung pencapaian indikator tersebut tidak dapat dilaksanakan.

Secara keseluruhan, kinerja Deputy II BPOM Tahun 2025 menunjukkan tingkat efektivitas dan akuntabilitas yang tinggi, dengan mayoritas indikator berada pada kategori Sangat Baik. Meskipun terdapat keterbatasan pada beberapa indikator, capaian tahun ini tetap menggambarkan komitmen kuat dalam menjaga keamanan, mutu, dan kepatuhan di bidang Obat Bahan Alam, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik, serta penguatan tata kelola organisasi yang berkelanjutan. Berikut adalah analisis capaian kinerja dari tiap indikator:

1. Persentase Obat Bahan Alam yang Aman dan Bermutu

Salah satu indikator utama dalam pengukuran efektivitas pengawasan Deputy II BPOM adalah Persentase Obat Bahan Alam (OBA) yang Aman dan Bermutu. Indikator ini memberikan gambaran mengenai tingkat kepatuhan produk OBA terhadap ketentuan regulasi serta efektivitas sistem pengawasan post-market yang diterapkan. Pengukuran indikator dilakukan berdasarkan hasil sampling terhadap produk OBA yang beredar di pasaran, kemudian dievaluasi berdasarkan lima kriteria mutu dan keamanan yang telah ditetapkan.

Berikut analisis terhadap realisasi kinerja indikator ini, dan perbandingannya terhadap target tahun berjalan, tahun sebelumnya, target akhir tahun Renstra, dan kinerja satuan kerja lain.

Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Tahun Berjalan

Tabel 14 : Perbandingan realisasi kinerja Persentase Obat Bahan Alam yang Aman dan Bermutu terhadap target 2025

IKU	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kriteria / Notifikasi Warna
Persentase Obat bahan alam yang aman dan bermutu	65,00	70,02	107,74	Sangat baik

Indikator Kinerja Utama (IKU) Persentase Obat Bahan Alam yang Aman dan Bermutu pada Tahun 2025 ditetapkan dengan target sebesar 65,00%. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja sampai dengan akhir tahun, realisasi yang dicapai adalah sebesar 70,02%, sehingga tingkat capaian kinerja mencapai 107,74% dan termasuk dalam kategori “Sangat Baik.”

Capaian tersebut menunjukkan bahwa upaya pengawasan pre-market dan post-market terhadap Obat Bahan Alam (OBA) berjalan efektif dan mampu melampaui target yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja. Keberhasilan ini menunjukkan meningkatnya

kepatuhan pelaku usaha terhadap standar keamanan dan mutu, serta optimalnya implementasi regulasi, pembinaan industri, dan penguatan pengawasan berbasis risiko.

Realisasi yang melampaui target juga mengindikasikan adanya peningkatan efektivitas koordinasi lintas direktorat di lingkungan Deputy II, termasuk dalam aspek standardisasi, registrasi, serta pengawasan produk OBA di peredaran. Selain itu, penguatan literasi regulasi kepada pelaku usaha melalui berbagai kegiatan sosialisasi dan konsultasi turut berkontribusi dalam meningkatkan kualitas produk yang beredar di masyarakat.

Dengan capaian sebesar 107,74%, indikator ini tidak hanya menunjukkan keberhasilan dalam mencapai target tahunan, tetapi juga memberikan kontribusi signifikan terhadap perlindungan masyarakat dari risiko produk Obat Bahan Alam yang tidak memenuhi persyaratan keamanan dan mutu. Ke depan, tantangan yang perlu diantisipasi adalah menjaga konsistensi capaian serta memperluas cakupan pengawasan untuk memastikan tren positif ini berkelanjutan sesuai target jangka menengah dalam Renstra.

Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Capaian Tahun Sebelumnya

Perbandingan kinerja Persentase Obat Bahan Alam yang Aman dan Bermutu bila dibandingkan dengan Tahun sebelumnya adalah sebagaimana terlihat pada tabel berikut:

Tabel 15 : Perbandingan Kinerja Persentase Obat Bahan Alam yang Aman dan Bermutu terhadap kinerja di Tahun sebelumnya

IKU	Realisasi 2025	Realisasi 2024	Perbandingan
Persentase Obat bahan alam yang aman dan bermutu	70,02	N/A	Tidak dapat dibandingkan

Indikator Kinerja Utama (IKU) Persentase Obat Bahan Alam yang Aman dan Bermutu pada Tahun 2025 mencapai realisasi sebesar 70,02%. Namun demikian, indikator ini belum memiliki data realisasi Tahun 2024 dalam format pengukuran yang sebanding, sehingga kinerjanya tidak dapat diperbandingkan dengan tahun sebelumnya.

Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah

Sementara perbandingan realisasi kinerja terhadap target tahunan adalah sebagaimana tertera pada tabel berikut:

Tabel 16 : Perbandingan realisasi kinerja Persentase Obat Bahan Alam yang Aman dan Bermutu terhadap target Jangka Menengah 2025

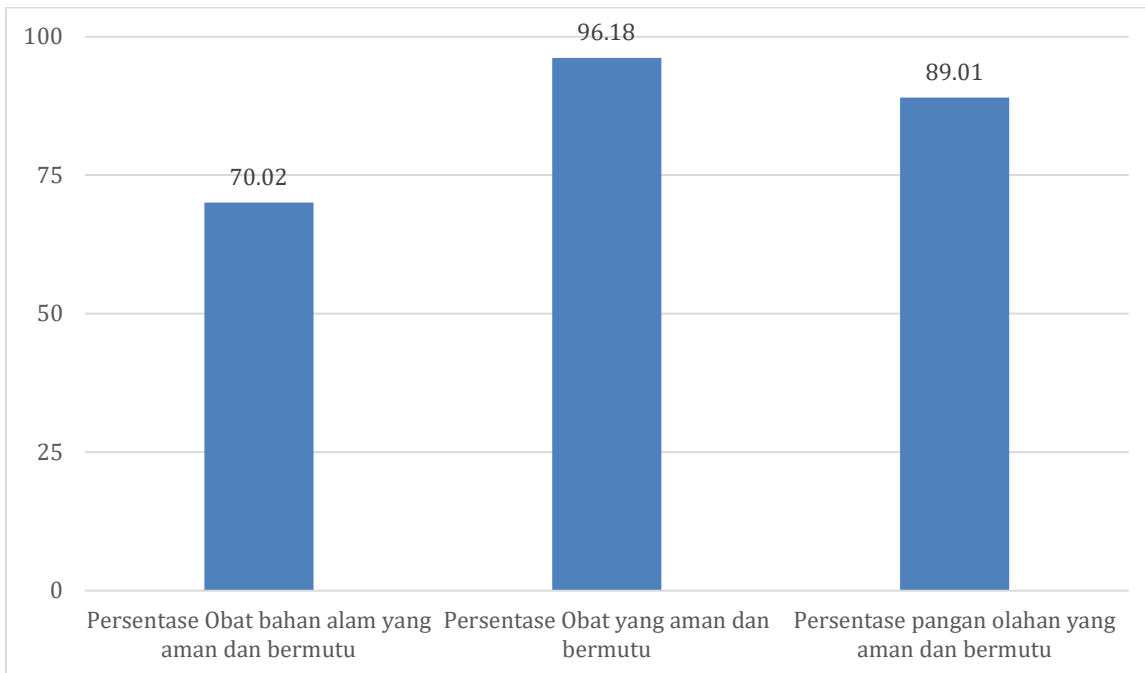
IKU	Target Renstra	Realisasi 2025	Capaian (%)	Kategori / Notifikasi Warna
-----	----------------	----------------	-------------	-----------------------------

Persentase Obat bahan alam yang aman dan bermutu	69.00	70.02	101.48	Tercapai / Melampaui
--	-------	-------	--------	----------------------

Indikator Kinerja Utama (IKU) Persentase Obat Bahan Alam yang Aman dan Bermutu memiliki target Renstra sebesar 69,00%, sedangkan realisasi Tahun 2025 mencapai 70,02%, dengan tingkat capaian sebesar 101,48% dan berada pada kategori “Tercapai/Melampaui.”

Capaian ini menunjukkan bahwa tingkat keamanan dan mutu Obat Bahan Alam yang beredar telah memenuhi bahkan melampaui target jangka menengah yang ditetapkan. Hasil tersebut menunjukkan efektivitas pengawasan dan pembinaan serta meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dalam menjaga standar keamanan dan mutu produk secara berkelanjutan.

Perbandingan dengan Realisasi Kinerja Satuan Kerja Lain



Grafik 1 : Perbandingan realisasi kinerja Persentase Obat Bahan Alam yang Aman dan Bermutu terhadap Kinerja Satuan kerja lain

Indikator Kinerja Utama (IKU) Persentase Obat Bahan Alam yang Aman dan Bermutu pada Tahun 2025 mencapai 70,02%. Jika dibandingkan dengan capaian sektor lain di lingkungan BPOM, Persentase Obat yang Aman dan Bermutu (Deputi I) mencapai 96,18%, dan Persentase Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu (Deputi III) mencapai 89,01%.

Berdasarkan perbandingan tersebut, capaian Deputi II masih berada di bawah Deputi I dan Deputi III. Perbedaan ini dapat dipengaruhi oleh karakteristik dan kompleksitas bahan

baku alami, variasi proses produksi, serta tingkat kesiapan sarana produksi pada sektor Obat Bahan Alam yang relatif lebih beragam.

Analisis penyebab keberhasilan dan upaya yang dilakukan

Keberhasilan pencapaian indikator Persentase Obat Bahan Alam (OBA) yang Aman dan Bermutu didukung oleh penguatan pengawasan berbasis risiko serta konsistensi pelaksanaan pengujian dan pemeriksaan sarana distribusi. Pada tahun 2025, telah dilakukan pemeriksaan terhadap 9.481 produk OBA, dengan hasil 6.639 produk dinyatakan memenuhi kriteria aman dan bermutu. Capaian ini menunjukkan efektivitas sistem pengawasan pre-market dan post-market yang dijalankan secara terintegrasi, termasuk peningkatan ketepatan sampling, pengujian laboratorium, serta penelusuran tindak lanjut terhadap produk yang tidak memenuhi ketentuan.

Secara substantif, keberhasilan ini dipengaruhi oleh beberapa faktor utama, antara lain peningkatan kepatuhan pelaku usaha terhadap standar Cara Pembuatan Obat Tradisional yang Baik (CPOTB), penguatan pembinaan industri melalui regulatory assistance, serta optimalisasi koordinasi antara pusat dan UPT dalam pelaksanaan pengawasan. Selain itu, penerapan pendekatan berbasis risiko dalam penentuan prioritas pengawasan memungkinkan sumber daya difokuskan pada produk dan pelaku usaha dengan tingkat risiko lebih tinggi, sehingga efektivitas intervensi meningkat dan angka kepatuhan produk dapat terjaga.

Upaya yang dilakukan Deputi II BPOM untuk mendukung capaian tersebut meliputi intensifikasi sampling dan pengujian produk OBA di peredaran, peningkatan kapasitas petugas pengawasan melalui pelatihan teknis, penguatan sistem monitoring berbasis data, serta pelaksanaan pembinaan dan sosialisasi regulasi kepada industri. Di samping itu, tindak lanjut cepat terhadap temuan produk tidak memenuhi syarat melalui mekanisme peringatan, penarikan produk, dan sanksi administratif turut berkontribusi dalam menjaga kualitas produk yang beredar. Kombinasi antara pengawasan yang tegas dan pembinaan yang konstruktif menjadi faktor kunci dalam memastikan mayoritas produk OBA yang beredar memenuhi aspek keamanan dan mutu.

2. Persentase Suplemen Kesehatan yang Aman dan Bermutu

Indikator Persentase Suplemen Kesehatan yang Aman dan Bermutu merupakan salah satu tolok ukur penting dalam menilai efektivitas pengawasan produk post-market oleh Deputi II BPOM, khususnya dalam menjamin kualitas dan keamanan suplemen kesehatan yang beredar di masyarakat.

Indikator ini diukur berdasarkan hasil sampling produk suplemen kesehatan dari sarana distribusi dan penjualan, yang kemudian dinilai berdasarkan lima kriteria kelayakan mutu dan keamanan.

Berikut analisis terhadap realisasi kinerja indikator ini, dan perbandingannya terhadap target tahun berjalan, tahun sebelumnya, target akhir tahun Renstra, dan kinerja satuan kerja lain.

Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Tahun Berjalan

Tabel 17 : Perbandingan realisasi kinerja Persentase Suplemen Kesehatan yang aman dan bermutu terhadap target 2025

IKU	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kriteria / Notifikasi Warna
Persentase Suplemen Kesehatan yang aman dan bermutu	68,00	82,57	121,44	Tidak Dapat disimpulkan

Indikator Kinerja Utama (IKU) Persentase Suplemen Kesehatan yang Aman dan Bermutu pada Tahun 2025 ditetapkan dengan target sebesar 68,00%. Sampai dengan akhir tahun pelaporan, realisasi yang dicapai sebesar 82,57%, sehingga tingkat capaian kinerja mencapai 121,44% dari target yang ditetapkan.

Secara kuantitatif, capaian ini menunjukkan bahwa kinerja pengawasan dan pembinaan terhadap produk Suplemen Kesehatan telah melampaui target tahunan. Namun demikian, sesuai dengan ketentuan dalam Pedoman SAKIP BPOM, capaian indikator yang melebihi 110% dinormalisasi menjadi 110%, dan dalam kategori notifikasi warna dinyatakan sebagai “Tidak Dapat Disimpulkan”, karena capaian yang terlalu tinggi berpotensi mengindikasikan adanya anomali target atau perlunya evaluasi atas penetapan baseline dan proyeksi target kinerja.

Tingginya realisasi ini dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain meningkatnya kepatuhan pelaku usaha terhadap standar keamanan dan mutu, efektivitas pengawasan berbasis risiko, serta penguatan kegiatan sosialisasi dan konsultasi regulasi yang mendorong perbaikan mutu produk sebelum dan setelah beredar. Selain itu, optimalisasi koordinasi antara fungsi standardisasi, registrasi, dan pengawasan turut mendukung peningkatan kualitas produk Suplemen Kesehatan di peredaran.

Meskipun capaian secara substantif menunjukkan hasil yang sangat positif, kondisi ini perlu dianalisis lebih lanjut dalam konteks evaluasi target jangka menengah Renstra. Evaluasi terhadap metodologi penetapan target, baseline data, dan dinamika lingkungan strategis perlu dilakukan sebagai bagian dari continuous improvement, agar target kinerja ke depan semakin menantang, realistis, dan menunjukkan peningkatan kualitas pengawasan yang berkelanjutan.

Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Capaian Tahun Sebelumnya

Perbandingan kinerja Persentase Suplemen Kesehatan yang aman dan bermutu bila dibandingkan dengan Tahun sebelumnya adalah sebagaimana terlihat pada tabel berikut:

Tabel 18 : Perbandingan Kinerja Persentase Suplemen Kesehatan yang Aman dan Bermutu terhadap kinerja di Tahun sebelumnya

IKU	Realisasi 2025	Realisasi 2024	Perbandingan
Persentase Suplemen Kesehatan yang Aman dan Bermutu	82,57	N/A	Tidak dapat dibandingkan

Indikator Kinerja Utama (IKU) Persentase Suplemen Kesehatan yang Aman dan Bermutu pada Tahun 2025 mencapai realisasi sebesar 82,57%. Namun demikian, indikator ini belum memiliki data realisasi Tahun 2024 dalam format pengukuran yang sebanding, sehingga kinerjanya tidak dapat diperbandingkan dengan tahun sebelumnya.

Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah

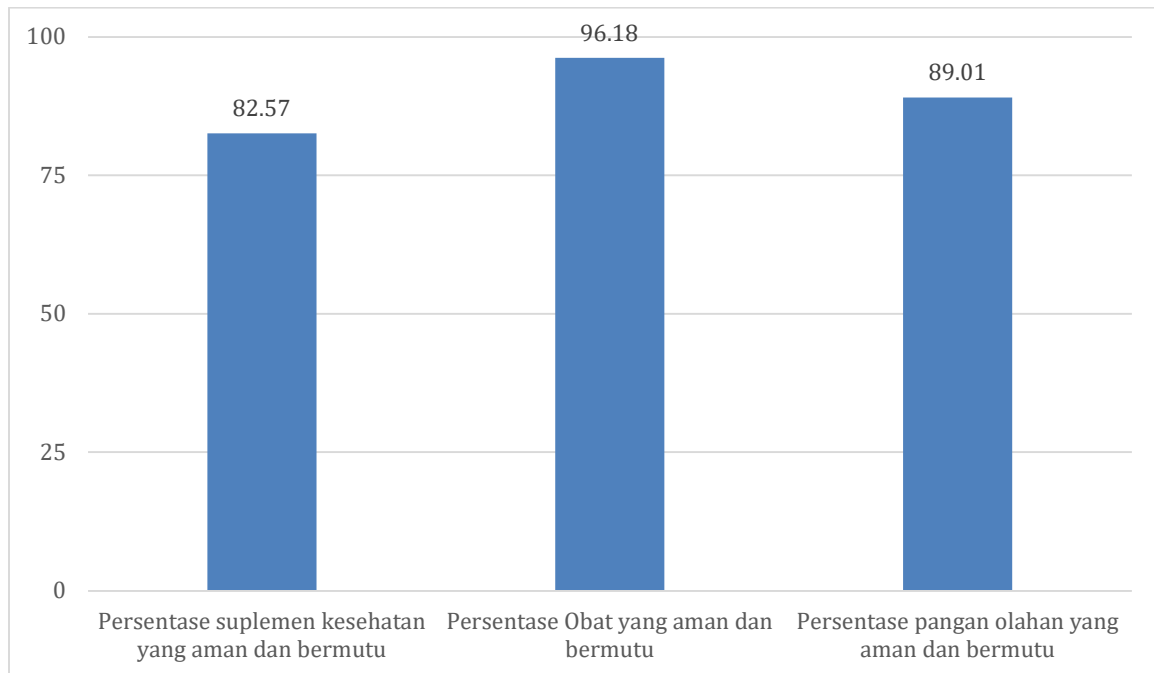
Tabel 19 : Perbandingan realisasi kinerja Persentase Suplemen Kesehatan yang aman dan bermutu terhadap target Jangka Menengah 2025

IKU	Target Renstra	Realisasi 2025	Capaian (%)	Kategori / Notifikasi Warna
Persentase Suplemen Kesehatan yang Aman dan Bermutu	72.00	82.57	114.68	Tercapai / Melampaui

Indikator Kinerja Utama (IKU) Persentase Suplemen Kesehatan yang Aman dan Bermutu memiliki target Renstra sebesar 72,00%, sedangkan realisasi Tahun 2025 mencapai 82,57%, dengan tingkat capaian sebesar 114,68% dan berada pada kategori “Tercapai/Melampaui.”

Capaian ini menunjukkan bahwa tingkat keamanan dan mutu Suplemen Kesehatan yang beredar telah melampaui target jangka menengah yang ditetapkan. Hasil tersebut menunjukkan efektivitas pengawasan berbasis risiko, pembinaan pelaku usaha, serta peningkatan kepatuhan terhadap standar keamanan dan mutu secara berkelanjutan

Perbandingan dengan Realisasi Kinerja Satuan Kerja Lain



Grafik 2 : Perbandingan realisasi kinerja Persentase Suplemen Kesehatan yang Aman dan Bermutu terhadap Kinerja Satuan Kerja Lain

Indikator Kinerja Utama (IKU) Persentase Suplemen Kesehatan yang Aman dan Bermutu pada Tahun 2025 mencapai 82,57%. Jika dibandingkan dengan capaian sektor lain, Persentase Obat yang Aman dan Bermutu (Deputi I) mencapai 96,18%, dan Persentase Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu (Deputi III) mencapai 89,01%.

Berdasarkan perbandingan tersebut, capaian Suplemen Kesehatan berada di bawah sektor Obat dan Pangan Olahan. Perbedaan ini dapat dipengaruhi oleh karakteristik bahan baku, variasi formulasi, serta dinamika industri Suplemen Kesehatan yang cukup beragam, termasuk produk impor dan distribusi lintas wilayah.

Analisis Penyebab Keberhasilan dan upaya yang dilakukan

Keberhasilan pencapaian indikator Persentase Suplemen Kesehatan yang Aman dan Bermutu didukung oleh konsistensi pelaksanaan pengawasan post-market berbasis risiko serta penguatan pembinaan kepada pelaku usaha. Pada tahun 2025 telah dilakukan pemeriksaan terhadap 2.381 sampel suplemen kesehatan, dengan hasil 1.966 sampel dinyatakan memenuhi syarat keamanan dan mutu. Hasil tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar produk yang beredar telah memenuhi ketentuan regulasi, serta menunjukkan meningkatnya kepatuhan industri terhadap standar produksi dan distribusi.

Secara analitis, capaian ini didorong oleh beberapa faktor pendukung, antara lain penentuan prioritas sampling berbasis profil risiko produk dan pelaku usaha, penguatan koordinasi dengan UPT dalam pelaksanaan pengawasan di daerah, serta optimalisasi pengujian laboratorium untuk parameter kritis seperti cemaran, bahan berbahaya, dan

kesesuaian komposisi. Selain itu, pembinaan dan sosialisasi regulasi kepada pelaku usaha, termasuk melalui layanan konsultasi regulasi dan pendampingan pemenuhan standar, turut berkontribusi terhadap peningkatan kualitas produk yang beredar di pasaran.

Upaya yang dilakukan Deputy II BPOM dalam mendukung capaian tersebut meliputi intensifikasi sampling dan pengujian berkala, penguatan sistem monitoring dan analisis data pengawasan, peningkatan kompetensi petugas pengawas, serta tindak lanjut tegas terhadap temuan produk yang tidak memenuhi ketentuan melalui mekanisme peringatan, penarikan, dan sanksi administratif. Pendekatan yang seimbang antara pengawasan yang ketat dan pembinaan yang berkelanjutan menjadi faktor kunci dalam menjaga tingkat keamanan dan mutu suplemen kesehatan yang beredar, sekaligus meningkatkan perlindungan masyarakat.

3. Persentase Kosmetik yang Aman dan Bermutu

Indikator ini bertujuan untuk menilai sejauh mana produk kosmetik yang beredar di pasar memenuhi ketentuan regulasi yang berlaku terkait keamanan dan mutu produk, serta sejauh mana pelaksanaan pengawasan telah berhasil mengurangi peredaran produk yang tidak memenuhi syarat. Pengukuran dilakukan berdasarkan hasil sampling targeted/purposive, sesuai dengan Pedoman Sampling Kosmetik yang berlaku pada tahun berjalan.

Berikut analisis terhadap realisasi kinerja indikator ini, dan perbandingannya terhadap target tahun berjalan, tahun sebelumnya, target akhir tahun Renstra, dan kinerja satuan kerja lain.

Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Tahun Berjalan

Tabel 20 : Perbandingan realisasi kinerja Persentase Kosmetik yang Aman dan Bermutu terhadap target 2025

IKU	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kriteria / Notifikasi Warna
Persentase Kosmetik yang aman dan bermutu	62,00	67,88	109,48	Sangat Baik

Indikator Kinerja Utama (IKU) Persentase Kosmetik yang Aman dan Bermutu pada Tahun 2025 ditetapkan dengan target sebesar 62,00%. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja sampai dengan akhir tahun, realisasi yang dicapai adalah sebesar 67,88%, sehingga tingkat capaian kinerja mencapai 109,48% dan termasuk dalam kategori “Sangat Baik.”

Capaian ini menunjukkan bahwa upaya pengawasan terhadap produk kosmetik, baik pada tahap pre-market maupun post-market, telah berjalan secara efektif dan mampu melampaui target yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja. Keberhasilan tersebut menggambarkan meningkatnya kepatuhan pelaku usaha terhadap persyaratan

keamanan, mutu, dan kemanfaatan kosmetik, serta optimalnya implementasi regulasi dan pengawasan berbasis risiko.

Faktor pendukung capaian ini antara lain penguatan koordinasi lintas fungsi antara standardisasi, notifikasi/registrasi, dan pengawasan kosmetik; intensifikasi penelusuran bahan berbahaya/dilarang; serta peningkatan literasi regulasi melalui kegiatan sosialisasi dan konsultasi kepada pelaku usaha. Upaya tersebut berkontribusi dalam menurunkan potensi peredaran kosmetik yang tidak memenuhi persyaratan dan meningkatkan kualitas produk yang beredar di masyarakat.

Dengan capaian sebesar 109,48%, indikator ini tidak hanya menunjukkan kinerja yang melampaui target tahunan, tetapi juga memberikan kontribusi nyata terhadap perlindungan konsumen dari risiko penggunaan kosmetik yang tidak aman dan tidak bermutu. Ke depan, konsistensi pengawasan dan penguatan pembinaan berbasis risiko perlu terus ditingkatkan agar tren positif ini dapat dipertahankan dan selaras dengan target jangka menengah dalam Renstra.

Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Capaian Tahun Sebelumnya

Tabel 21 : Perbandingan Kinerja Persentase Kosmetik yang Aman dan Bermutu terhadap kinerja di Tahun sebelumnya

IKU	Realisasi 2025	Realisasi 2024	Perbandingan
Persentase Kosmetik yang aman dan bermutu	67,88	N/A	Tidak dapat dibandingkan

Indikator Kinerja Utama (IKU) Persentase Kosmetik yang Aman dan Bermutu pada Tahun 2025 mencapai realisasi sebesar 67,88%. Namun demikian, indikator ini belum memiliki data realisasi Tahun 2024 dalam format pengukuran yang sebanding, sehingga kinerjanya tidak dapat diperbandingkan dengan tahun sebelumnya.

Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah

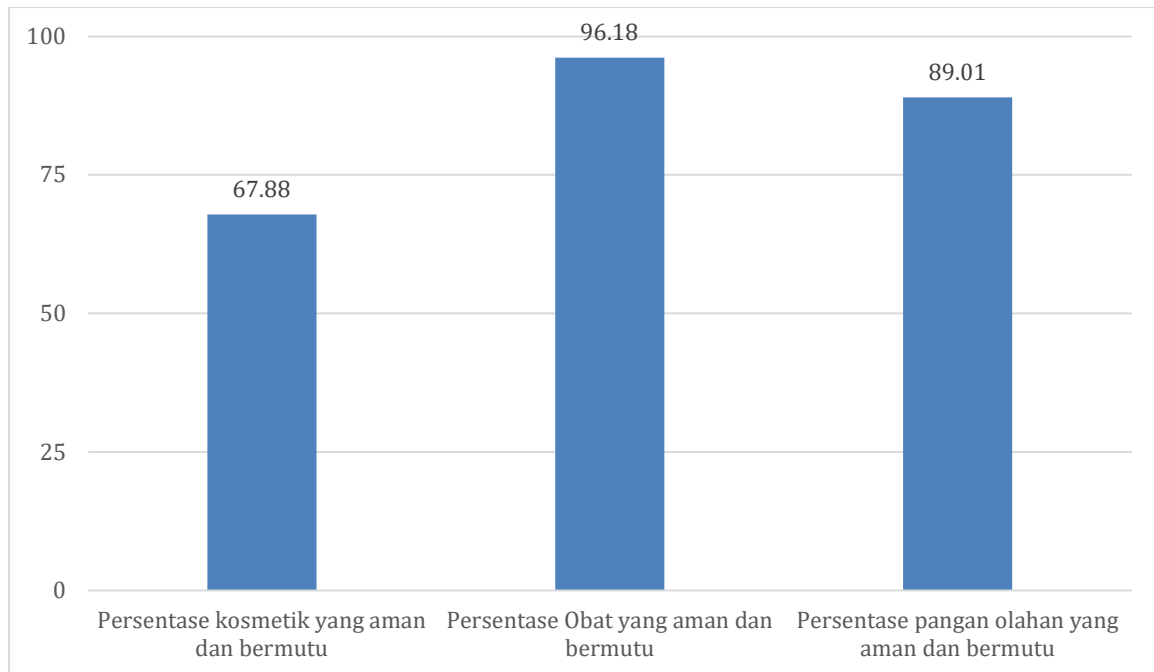
Tabel 22 : Perbandingan realisasi kinerja Persentase Kosmetik yang Aman dan Bermutu terhadap target Jangka Menengah 2025

IKU	Target Renstra	Realisasi 2025	Capaian	Kategori / Notifikasi Warna
Persentase Kosmetik yang aman dan bermutu	64,00	67,88	106,06	Tercapai / Melampaui

Indikator Kinerja Utama (IKU) Persentase Kosmetik yang Aman dan Bermutu memiliki target Renstra sebesar 64,00%, sedangkan realisasi Tahun 2025 mencapai 67,88%, dengan tingkat capaian sebesar 106,06% dan berada pada kategori “Tercapai/Melampaui.”

Capaian ini menunjukkan bahwa tingkat keamanan dan mutu kosmetik yang beredar telah melampaui target jangka menengah yang ditetapkan. Hasil tersebut menunjukkan efektivitas pengawasan dan pembinaan, serta meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dalam memenuhi standar keamanan dan mutu produk secara berkelanjutan.

Perbandingan dengan Realisasi Kinerja Satuan Kerja Lain



Grafik 3 : Perbandingan realisasi kinerja Persentase Kosmetik yang Aman dan Bermutu terhadap Kinerja Satuan Kerja Lain

Indikator Kinerja Utama (IKU) Persentase Kosmetik yang Aman dan Bermutu pada Tahun 2025 mencapai 67,88%. Jika dibandingkan dengan capaian sektor lain, Persentase Obat yang Aman dan Bermutu (Deputi I) mencapai 96,18%, dan Persentase Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu (Deputi III) mencapai 89,01%.

Berdasarkan perbandingan tersebut, capaian sektor Kosmetik masih berada di bawah sektor Obat dan Pangan Olahan. Perbedaan ini dapat dipengaruhi oleh tingginya variasi produk kosmetik yang beredar, dinamika tren pasar, serta kompleksitas pengawasan terhadap produk impor dan penjualan melalui platform digital.

Analisis penyebab keberhasilan dan upaya yang dilakukan

Keberhasilan pencapaian indikator Persentase Kosmetik yang Aman dan Bermutu pada tahun 2025 didukung oleh penguatan pengawasan post-market berbasis risiko serta

strategi pembinaan yang lebih preventif dan terstruktur. Dari 17.379 sampel kosmetik yang diperiksa, sebanyak 11.796 sampel dinyatakan memenuhi syarat keamanan dan mutu. Capaian ini menunjukkan efektivitas pendekatan pengawasan yang lebih tajam dan terarah, terutama dalam mengidentifikasi serta menekan peredaran produk berisiko tinggi di pasaran.

Secara analitis, faktor utama yang mendukung keberhasilan ini adalah penajaman strategi sampling berbasis risiko. Prioritas pengawasan difokuskan pada produk berisiko tinggi, sampel kasus khusus, kosmetik impor—terutama dari Tiongkok—produk dengan riwayat hasil pengujian tidak memenuhi syarat (TMS), serta kosmetik yang diproduksi melalui kontrak produksi dan kausa merek. Fokus pada kategori tersebut dilakukan karena secara historis banyak ditemukan pelanggaran dan temuan TMS pada kelompok produk tersebut. Dengan pendekatan risk-based ini, intervensi pengawasan menjadi lebih efektif dalam meningkatkan tingkat kepatuhan produk yang beredar.

Upaya pendukung lainnya meliputi monitoring dan evaluasi pelaksanaan sampling oleh UPT, serta penyelenggaraan Forum Komunikasi Sampling Kosmetik yang membahas evaluasi sampling tahun berjalan dan rencana prioritas tahun berikutnya. Forum ini berperan penting sebagai sarana koordinasi dan penyamaan persepsi antar UPT terkait prioritas risiko, strategi sampling, serta penyelesaian kendala lapangan. Selain itu, Deputy II BPOM secara konsisten melaksanakan Bimbingan Teknis (Bimtek) dan Desk Penandaan kepada pelaku usaha secara berkala. Kegiatan ini tidak hanya bersifat korektif atas temuan, tetapi juga preventif melalui peningkatan pemahaman ketentuan penandaan, pembahasan kasus TMK yang sering terjadi beserta alternatif solusinya, serta pemanfaatan hasil pengawasan sebagai bahan pembelajaran. Penyebarluasan infografis dan video edukatif terkait penandaan dan klaim kosmetik turut memperkuat upaya pencegahan pelanggaran. Kombinasi pengawasan berbasis risiko dan pembinaan preventif inilah yang menjadi kunci keberhasilan dalam menjaga keamanan dan mutu kosmetik yang beredar di masyarakat.

4. Indeks Kualitas Kebijakan Pengawasan Obat Bahan Alam, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik

Indikator Indeks Kualitas Kebijakan Pengawasan Obat Bahan Alam, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik merupakan parameter strategis yang mengukur mutu proses penyusunan dan substansi kebijakan yang dihasilkan oleh Deputy II BPOM. Indikator ini menunjukkan sejauh mana kebijakan disusun secara sistematis, berbasis data dan bukti ilmiah, partisipatif, selaras dengan peraturan yang lebih tinggi, serta memiliki kejelasan tujuan dan dampak yang terukur.

Realisasi capaian pada indikator ini menjadi tolok ukur efektivitas penerapan prinsip *Good Regulatory Practice* dalam setiap tahapan perumusan regulasi, mulai dari perencanaan, penyusunan naskah akademik, konsultasi publik, harmonisasi, hingga evaluasi implementasi. Nilai yang diperoleh tidak hanya menggambarkan kepatuhan terhadap

standar formal penyusunan regulasi, tetapi juga menunjukkan kualitas kebijakan yang implementatif, adaptif terhadap dinamika sektor, serta mampu mendukung perlindungan masyarakat dan peningkatan kepatuhan pelaku usaha secara berkelanjutan.

Berikut analisis terhadap realisasi kinerja indikator ini, dan perbandingannya terhadap target tahun berjalan, tahun sebelumnya, target akhir tahun Renstra, dan kinerja satuan kerja lain.

Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Tahun Berjalan

Tabel 23 : Perbandingan realisasi kinerja Indeks Kualitas Kebijakan Pengawasan Obat Bahan Alam, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik terhadap target 2025

IKU	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kriteria / Notifikasi Warna
Indeks Kualitas Kebijakan Pengawasan Obat Bahan Alam, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	79,00	97.75	110.00	Sangat baik

Indikator Kinerja Utama (IKU) Indeks Kualitas Kebijakan Pengawasan Obat Bahan Alam, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik pada Tahun 2025 ditetapkan dengan target sebesar 79. Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan, realisasi indeks yang dicapai adalah sebesar 97,75, sehingga tingkat capaian kinerja mencapai 110,00% dari target yang telah ditetapkan.

Secara substansial, nilai indeks sebesar 97,75 menunjukkan bahwa kualitas kebijakan yang disusun dan diimplementasikan berada pada kategori sangat tinggi, menunjukkan pemenuhan aspek perencanaan kebijakan, kualitas substansi regulasi, proses penyusunan yang partisipatif, serta efektivitas implementasi dan evaluasi kebijakan. Capaian ini menggambarkan bahwa proses perumusan kebijakan di lingkungan Deputy II telah dilaksanakan sesuai prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), berbasis bukti (evidence-based policy), serta selaras dengan prinsip Good Regulatory Practice.

Namun demikian, sesuai ketentuan Pedoman SAKIP BPOM, capaian indikator yang melebihi 110% dinyatakan dalam kategori “Tidak Dapat Disimpulkan”, karena capaian yang terlalu tinggi berpotensi mengindikasikan perlunya evaluasi terhadap penetapan baseline dan tingkat ambisi target kinerja. Dalam konteks ini, nilai capaian yang sangat tinggi menunjukkan bahwa target tahun 2025 relatif lebih rendah dibandingkan kapasitas kinerja aktual yang telah dicapai.

Keberhasilan ini didukung oleh berbagai faktor, antara lain penguatan mekanisme harmonisasi regulasi, pelaksanaan konsultasi publik yang inklusif, peningkatan kualitas naskah akademik dan kajian kebijakan, serta integrasi hasil evaluasi dan masukan pemangku kepentingan dalam proses penyusunan regulasi. Selain itu, pemanfaatan

teknologi informasi dalam proses konsultasi dan diseminasi regulasi turut meningkatkan transparansi dan kualitas kebijakan yang dihasilkan.

Ke depan, diperlukan penyesuaian target agar lebih progresif dan menantang, serta penguatan mekanisme monitoring dan evaluasi kebijakan untuk memastikan bahwa kualitas kebijakan tidak hanya tinggi secara administratif, tetapi juga berdampak nyata terhadap peningkatan kepatuhan pelaku usaha dan perlindungan masyarakat.

Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Capaian Tahun Sebelumnya

Tabel 24 : Perbandingan realisasi kinerja Indeks Kualitas Kebijakan Pengawasan Obat Bahan Alam, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik terhadap kinerja di Tahun sebelumnya

IKU	Realisasi 2025	Realisasi 2024	Perbandingan
Indeks Kualitas Kebijakan Pengawasan Obat Bahan Alam, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	97.75	85,38	Lebih tinggi

Indikator Kinerja Utama (IKU) Indeks Kualitas Kebijakan Pengawasan Obat Bahan Alam, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik pada Tahun 2025 mencapai realisasi sebesar 97,75, meningkat dibandingkan realisasi Tahun 2024 sebesar 85,38, atau naik sebesar 12,37 poin.

Peningkatan yang signifikan ini menunjukkan adanya penguatan kualitas proses perumusan dan implementasi kebijakan, termasuk penerapan prinsip *Good Regulatory Practice*, pelibatan pemangku kepentingan, serta pemanfaatan kajian berbasis bukti dalam penyusunan regulasi. Capaian tersebut menunjukkan perbaikan substantif dalam kualitas kebijakan pengawasan yang lebih adaptif, terukur, dan akuntabel dibandingkan tahun sebelumnya.

Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah

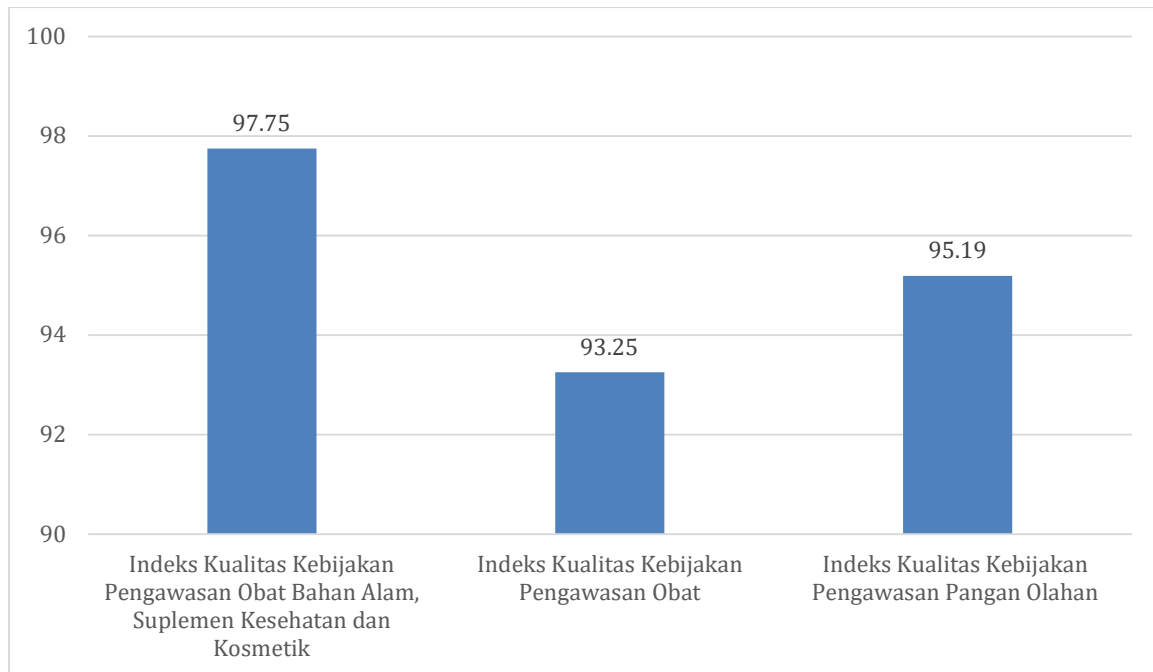
Tabel 25 : Perbandingan realisasi kinerja Indeks Kualitas Kebijakan Pengawasan Obat Bahan Alam, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik terhadap target Jangka Menengah 2025

IKU	Target Renstra	Realisasi 2025	Capaian (%)	Kategori / Notifikasi Warna
Indeks Kualitas Kebijakan Pengawasan Obat Bahan Alam, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	87.00	97.75	112.36	Tercapai / Melampaui

Indikator Kinerja Utama (IKU) Indeks Kualitas Kebijakan Pengawasan Obat Bahan Alam, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik memiliki target Renstra sebesar 87,00, sedangkan realisasi Tahun 2025 mencapai 97,75, dengan tingkat capaian sebesar 112,36% dan berada pada kategori “Tercapai/Melampaui.”

Capaian ini menunjukkan bahwa kualitas kebijakan yang disusun dan diimplementasikan telah melampaui target jangka menengah yang ditetapkan. Hasil tersebut menunjukkan penguatan proses perumusan kebijakan yang partisipatif, berbasis bukti, serta selaras dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dan Good Regulatory Practice.

Perbandingan dengan Realisasi Kinerja Satuan Kerja Lain



Grafik 4 : Perbandingan realisasi kinerja Indeks Kualitas Kebijakan Pengawasan Obat Bahan Alam, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik terhadap Kinerja Satuan Kerja Lain

Indikator Kinerja Utama (IKU) Indeks Kualitas Kebijakan Pengawasan Obat Bahan Alam, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik pada Tahun 2025 mencapai realisasi sebesar 97,75, dan tercatat lebih tinggi dibandingkan capaian satuan kerja lain di lingkungan BPOM.

Sebagai perbandingan, Indeks Kualitas Kebijakan Pengawasan Obat (Deputi I BPOM) mencapai 93,25, dan Indeks Kualitas Kebijakan Pengawasan Pangan Olahan (Deputi III BPOM) mencapai 95,19. Dengan demikian, capaian Deputi II berada pada posisi tertinggi di antara ketiga deputi teknis.

Perbedaan capaian ini menunjukkan bahwa proses perumusan, harmonisasi, dan evaluasi kebijakan di lingkungan Deputi II telah berjalan secara sangat optimal, dengan penerapan prinsip kebijakan berbasis bukti, pelibatan pemangku kepentingan, serta penguatan kualitas regulasi yang adaptif dan akuntabel. Capaian tersebut sekaligus

menunjukkan daya saing dan kualitas tata kelola kebijakan yang unggul dibandingkan satuan kerja sejenis.

Analisis penyebab keberhasilan

Keberhasilan pencapaian target Indeks Kualitas Kebijakan (IKK) pada tahun 2025 didukung oleh kualitas penyusunan dan implementasi kebijakan yang dinilai, yaitu Peraturan BPOM Nomor 3 Tahun 2022 tentang Persyaratan Teknis Klaim Kosmetika. Regulasi ini dinilai memiliki landasan yang kuat karena disusun berbasis data dan kajian ilmiah, dilengkapi dengan naskah akademik serta analisis dampak dan risiko regulasi yang komprehensif. Substansi pengaturannya dinilai jelas, sistematis, dan implementatif dalam memberikan kepastian hukum terkait klaim kosmetika, sehingga mampu meningkatkan kepatuhan pelaku usaha dan memperkuat perlindungan konsumen. Kualitas kebijakan juga meningkat melalui pelibatan aktif pemangku kepentingan dalam forum konsultasi publik dan pembahasan teknis lintas sektor, sehingga norma yang diatur lebih responsif terhadap kebutuhan industri dan dinamika pengawasan. Selain itu, standarisasi proses bisnis penyusunan regulasi, pengendalian mutu internal, serta peningkatan kompetensi SDM perancang turut memperkuat konsistensi, transparansi, dan akuntabilitas kebijakan, yang pada akhirnya mendorong capaian IKK pada kategori sangat tinggi.

Upaya yang Telah Dilakukan

Upaya untuk mencapai target IKK dilakukan melalui penguatan menyeluruh pada tahapan perencanaan, penyusunan, hingga evaluasi kebijakan, khususnya dalam penyempurnaan dan implementasi PerBPOM No. 3 Tahun 2022. Setiap tahapan perumusan kebijakan dilaksanakan berbasis bukti ilmiah dan data pengawasan, dengan memastikan adanya kajian pendukung serta analisis dampak regulasi agar norma yang ditetapkan terukur dan aplikatif. Proses penyusunan mengikuti pedoman perancangan peraturan perundang-undangan untuk menjamin keselarasan struktur, kejelasan norma, dan harmonisasi dengan regulasi yang lebih tinggi maupun kebijakan sektoral lainnya.

Pelibatan pemangku kepentingan dilakukan secara intensif melalui konsultasi publik, focus group discussion, dan pembahasan lintas sektor guna memperoleh masukan substantif dan meningkatkan kualitas serta akseptabilitas kebijakan. Dari sisi tata kelola, dilakukan reviu berjenjang terhadap draft regulasi, penggunaan instrumen penilaian kualitas kebijakan, serta penguatan pengendalian mutu internal. Peningkatan kapasitas SDM perancang juga dilaksanakan melalui pelatihan legislative drafting dan analisis kebijakan. Selain itu, pemanfaatan sistem digital dalam pengelolaan dokumen, koordinasi, dan monitoring progres penyusunan regulasi turut meningkatkan efisiensi dan akuntabilitas. Seluruh langkah tersebut dipadukan dengan monitoring dan evaluasi berkala sebagai dasar perbaikan berkelanjutan dalam menjaga dan meningkatkan kualitas kebijakan.

5. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Obat Bahan Alam, Suplemen Kesehatan, Obat Kuasi, dan Kosmetik yang Ditindaklanjuti oleh Lintas Sektor

Indikator Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Obat Bahan Alam, Suplemen Kesehatan, Obat Kuasi, dan Kosmetik yang Ditindaklanjuti oleh Lintas Sektor merupakan indikator yang menunjukkan efektivitas koordinasi dan sinergi antarinstansi dalam menindaklanjuti hasil pengawasan Badan POM. Semakin tinggi capaian indikator ini, semakin baik keterlibatan dan komitmen lintas sektor dalam mendukung pengawasan dan perlindungan kesehatan masyarakat.

Berikut analisis terhadap realisasi kinerja indikator ini, dan perbandingannya terhadap target tahun berjalan, tahun sebelumnya, target akhir tahun Renstra, dan kinerja satuan kerja lain.

Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Tahun Berjalan

Tabel 26 : Perbandingan realisasi kinerja Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Obat Bahan Alam, Suplemen Kesehatan, Obat Kuasi, dan Kosmetik yang Ditindaklanjuti oleh Lintas Sektor terhadap target 2025

IKU	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kriteria / Notifikasi Warna
Persentase rekomendasi hasil pengawasan Obat Bahan Alam Suplemen Kesehatan, Obat Kuasi dan Kosmetik yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor	83,00	83,47	100,57	Sangat Baik

Realisasi kinerja pada indikator Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Obat Bahan Alam, Suplemen Kesehatan, Obat Kuasi, dan Kosmetik yang Ditindaklanjuti oleh Lintas Sektor menunjukkan capaian yang melampaui target yang telah ditetapkan pada Tahun 2025. Dari target sebesar 83,00%, realisasi mencapai 83,47%, dengan tingkat capaian 100,57% dan kriteria Sangat Baik.

Capaian ini menunjukkan bahwa mekanisme koordinasi dan tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan dengan kementerian/lembaga serta pemangku kepentingan lainnya berjalan efektif dan responsif. Melampauinya target menunjukkan adanya peningkatan komitmen lintas sektor dalam menindaklanjuti temuan pengawasan, termasuk dalam aspek pengawasan iklan, peredaran produk, serta pengendalian distribusi.

Secara substantif, keberhasilan ini menegaskan bahwa sistem pengawasan tidak hanya berhenti pada identifikasi temuan, tetapi juga memastikan adanya tindakan korektif yang terukur dan terdokumentasi. Dengan demikian, indikator ini menggambarkan efektivitas sinergi lintas sektor dalam memperkuat perlindungan masyarakat serta meningkatkan kepatuhan pelaku usaha secara berkelanjutan.

Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Capaian Tahun Sebelumnya

Tabel 27 : Perbandingan realisasi kinerja Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Obat Bahan Alam, Suplemen Kesehatan, Obat Kuasi, dan Kosmetik yang Ditindaklanjuti oleh Lintas Sektor terhadap kinerja di Tahun sebelumnya

IKU	Realisasi 2025	Realisasi 2024	Perbandingan
Persentase rekomendasi hasil pengawasan Obat Bahan Alam Suplemen Kesehatan, Obat Kuasi dan Kosmetik yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor	83,47	83,94	Lebih rendah

Indikator Kinerja Utama (IKU) Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Obat Bahan Alam, Suplemen Kesehatan, Obat Kuasi, dan Kosmetik yang Ditindaklanjuti oleh Lintas Sektor pada Tahun 2025 mencapai realisasi sebesar 83,47%, sedikit lebih rendah dibandingkan realisasi Tahun 2024 sebesar 83,94%, atau turun sebesar 0,47 poin.

Penurunan yang relatif kecil ini menunjukkan bahwa tingkat tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan masih terjaga pada level yang tinggi dan stabil, meskipun belum sepenuhnya menyamai capaian tahun sebelumnya. Kondisi ini menjadi bahan evaluasi untuk memperkuat mekanisme koordinasi lintas sektor, monitoring tindak lanjut, serta percepatan respons terhadap rekomendasi hasil pengawasan, guna memastikan peningkatan kinerja pada periode berikutnya.

Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah

Tabel 28 : Perbandingan realisasi kinerja Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Obat Bahan Alam, Suplemen Kesehatan, Obat Kuasi, dan Kosmetik yang Ditindaklanjuti oleh Lintas Sektor terhadap target Jangka Menengah 2025

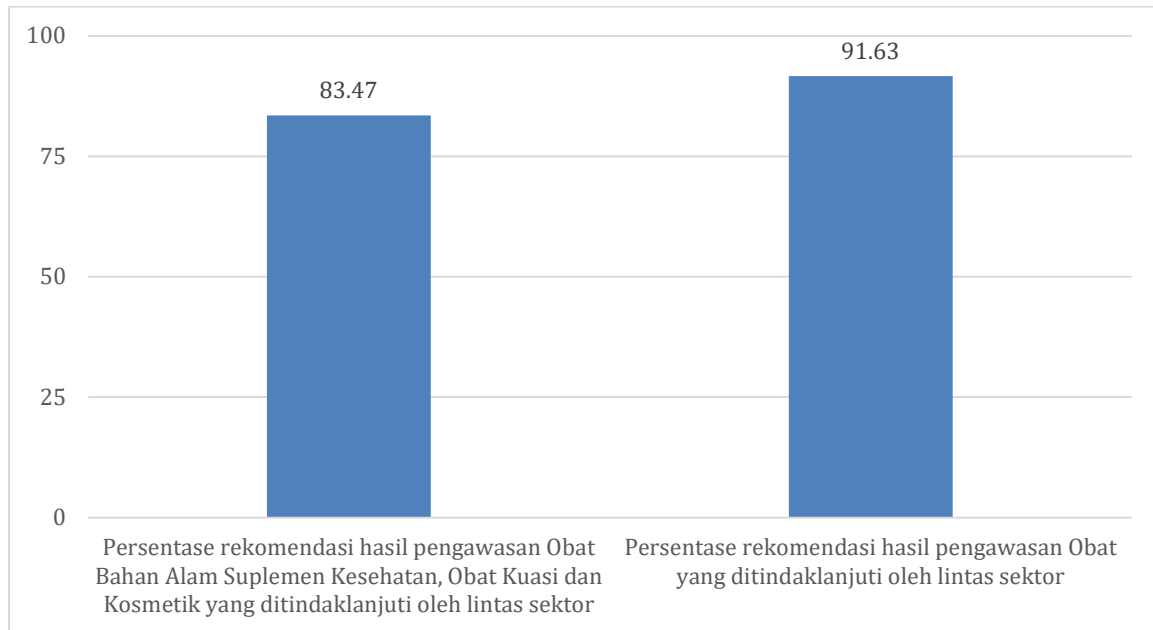
IKU	Target Renstra	Realisasi 2025	Capaian (%)	Kategori / Notifikasi Warna
Persentase rekomendasi hasil pengawasan Obat Bahan Alam Suplemen Kesehatan, Obat Kuasi dan Kosmetik yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor	84.25	83,47	99,07	Akan Tercapai

Indikator Kinerja Utama (IKU) Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Obat Bahan Alam, Suplemen Kesehatan, Obat Kuasi, dan Kosmetik yang Ditindaklanjuti oleh Lintas Sektor memiliki target Renstra sebesar 84,25%, dengan realisasi Tahun 2025 sebesar 83,47% atau capaian 99,07%, sehingga berada pada kategori “Akan Tercapai.”

Capaian ini menunjukkan bahwa sinergi dan koordinasi lintas sektor dalam menindaklanjuti hasil pengawasan telah berjalan efektif dan sangat mendekati target

jangka menengah. Dengan penguatan mekanisme koordinasi, monitoring tindak lanjut, serta komitmen bersama antar instansi, target Renstra diproyeksikan dapat tercapai pada periode berikutnya.

Perbandingan dengan Realisasi Kinerja Satuan Kerja Lain



Grafik 5 : Perbandingan realisasi kinerja Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Obat Bahan Alam, Suplemen Kesehatan, Obat Kuasi, dan Kosmetik yang Ditindaklanjuti oleh Lintas Sektor terhadap Kinerja Satuan Kerja Lain

Indikator Kinerja Utama (IKU) Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Obat Bahan Alam, Suplemen Kesehatan, Obat Kuasi, dan Kosmetik yang Ditindaklanjuti oleh Lintas Sektor pada Tahun 2025 mencapai 83,47%. Jika dibandingkan dengan Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Obat yang Ditindaklanjuti oleh Lintas Sektor (Deputi I BPOM) yang mencapai 91,63%, maka capaian Deputi II masih berada di bawah Deputi I.

Perbedaan capaian ini dapat dipengaruhi oleh kompleksitas koordinasi lintas sektor pada komoditas Obat Bahan Alam, Suplemen Kesehatan, Obat Kuasi, dan Kosmetik yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah daerah dan instansi teknis lainnya.

Analisis penyebab keberhasilan dan upaya yang dilakukan

Keberhasilan pencapaian indikator Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Obat Bahan Alam, Suplemen Kesehatan, Obat Kuasi dan Kosmetik yang Ditindaklanjuti oleh Lintas Sektor didukung oleh penguatan koordinasi dan sinergi antarinstansi dalam menindaklanjuti temuan pengawasan. Pada tahun 2025, Deputi II BPOM menyampaikan 1113 rekomendasi hasil pengawasan, dan sebanyak 929 rekomendasi telah ditindaklanjuti, yang menunjukkan tingkat respons lintas sektor yang tinggi serta efektivitas mekanisme koordinasi yang dibangun. Capaian ini menunjukkan bahwa sistem tindak lanjut tidak hanya berhenti pada penyampaian rekomendasi, tetapi diikuti dengan monitoring dan pengawalan progres implementasinya.

Secara analitis, faktor utama pendukung keberhasilan ini adalah intensifikasi koordinasi dengan kementerian/lembaga dan pemangku kepentingan strategis, khususnya dalam pengawasan iklan dan peredaran produk di ruang digital. Telah dilakukan koordinasi dengan Kementerian Komunikasi dan Digital, IdEA, platform e-commerce, serta lintas sektor lainnya untuk memastikan rekomendasi terkait iklan dan promosi yang tidak memenuhi ketentuan dapat segera ditindaklanjuti. Selain itu, dilakukan kegiatan sharing regulasi dan forum komunikasi pengawasan iklan, antara lain melalui Forum Komunikasi Pengawasan Iklan bersama BBPOM di Palembang dan KPID Provinsi Sumatera Selatan pada 15 Juli 2025, guna meningkatkan pemahaman bersama terhadap kewenangan dan ketentuan masing-masing instansi. Pendekatan ini memperkuat kesamaan persepsi dan mempercepat proses tindak lanjut.

Upaya lain yang signifikan adalah pelaksanaan rapat koordinasi dengan platform e-commerce Shopee pada 22 Juli 2025 dalam rangka menindaklanjuti temuan produk tidak memenuhi ketentuan serta memantau implementasi program INTERAKSI (Input Nomor Izin Edar BPOM Ketika Promosi). Program ini menjadi instrumen preventif untuk meningkatkan kepatuhan pelaku usaha dalam mencantumkan nomor izin edar pada saat promosi di platform digital. Selain koordinasi eksternal, Deputy II juga melakukan monitoring berkala terhadap progres tindak lanjut rekomendasi serta penguatan dokumentasi dan pelaporan agar setiap rekomendasi dapat ditelusuri status penyelesaiannya. Kombinasi antara koordinasi strategis, forum komunikasi lintas sektor, pengawalan progres, dan inovasi pengawasan digital menjadi faktor kunci dalam mendukung tingginya persentase rekomendasi yang berhasil ditindaklanjuti.

6. Persentase Sarana Produksi Obat Bahan Alam yang Memenuhi Ketentuan

Indikator Persentase Sarana Produksi Obat Bahan Alam (OBA) yang Memenuhi Ketentuan merupakan salah satu ukuran efektivitas pengawasan Deputy II BPOM terhadap fasilitas produksi OBA dalam memenuhi persyaratan teknis dan regulasi yang ditetapkan, termasuk penerapan Cara Pembuatan Obat Tradisional yang Baik (CPOTB). Indikator ini menjadi penting karena secara langsung berkaitan dengan jaminan mutu dan keamanan produk OBA yang dikonsumsi masyarakat.

Berikut analisis terhadap realisasi kinerja indikator ini, dan perbandingannya terhadap target tahun berjalan, tahun sebelumnya, target akhir tahun Renstra, dan kinerja satuan kerja lain.

Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Tahun Berjalan

Tabel 29 : Perbandingan realisasi kinerja Persentase Sarana Produksi Obat Bahan Alam yang Memenuhi Ketentuan terhadap target 2025

IKU	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kriteria / Notifikasi Warna
Persentase sarana produksi Obat Bahan Alam yang memenuhi ketentuan	86,00	70,45	81,92	cukup

Indikator Kinerja Utama (IKU) Persentase Sarana Produksi Obat Bahan Alam yang Memenuhi Ketentuan pada Tahun 2025 ditetapkan dengan target sebesar 86%. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja sampai dengan akhir tahun, realisasi yang dicapai adalah sebesar 70,45%, sehingga tingkat capaian kinerja mencapai 81,92% dan berada dalam kategori “Cukup.”

Capaian ini menunjukkan bahwa masih terdapat kesenjangan antara target yang ditetapkan dengan kondisi riil kepatuhan sarana produksi di lapangan. Beberapa faktor yang memengaruhi belum optimalnya capaian antara lain masih ditemukannya ketidaksesuaian terhadap penerapan Cara Pembuatan Obat Tradisional yang Baik (CPOTB), keterbatasan sumber daya pada pelaku usaha tertentu, khususnya skala kecil dan menengah, serta kebutuhan peningkatan pemahaman terhadap standar teknis dan sistem mutu.

Meskipun demikian, capaian sebesar 70,45% tetap menunjukkan bahwa mayoritas sarana produksi telah memenuhi ketentuan yang dipersyaratkan. Upaya pembinaan, bimbingan teknis, serta pendampingan terhadap pelaku usaha terus dilakukan untuk meningkatkan kepatuhan dan mempercepat perbaikan terhadap temuan hasil inspeksi.

Ke depan, diperlukan penguatan strategi pengawasan berbasis risiko, peningkatan intensitas pembinaan teknis, serta sinergi dengan pemerintah daerah dan pemangku kepentingan terkait guna mendorong peningkatan kepatuhan sarana produksi secara bertahap dan berkelanjutan, sehingga target kinerja pada periode berikutnya dapat dicapai secara lebih optimal.

Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Capaian Tahun Sebelumnya

Tabel 30 : Perbandingan realisasi kinerja Persentase Sarana Produksi Obat Bahan Alam yang Memenuhi Ketentuan terhadap Kinerja di tahun sebelumnya

IKU	Realisasi 2025	Realisasi 2024	Perbandingan
Persentase sarana produksi Obat Bahan Alam yang memenuhi ketentuan	70,45	N/A	Tidak dapat dibandingkan

Indikator Kinerja Utama (IKU) Persentase Sarana Produksi Obat Bahan Alam yang Memenuhi Ketentuan pada Tahun 2025 mencapai realisasi sebesar 70,45%. Namun demikian, indikator ini belum memiliki data realisasi Tahun 2024 dalam format pengukuran yang sebanding, sehingga kinerjanya tidak dapat diperbandingkan dengan tahun sebelumnya.

Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah

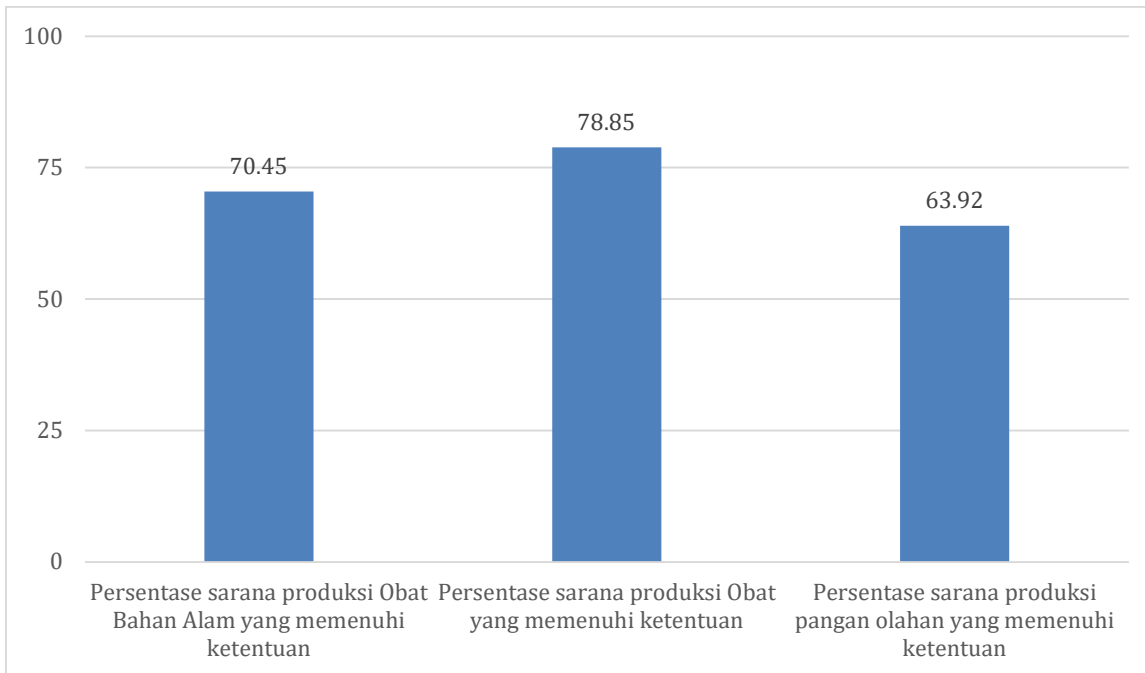
Tabel 31 : Perbandingan realisasi kinerja Persentase Sarana Produksi Obat Bahan Alam yang Memenuhi Ketentuan terhadap target Jangka Menengah 2025

IKU	Target Renstra	Realisasi 2025	Capaian (%)	Kategori / Notifikasi Warna
Persentase sarana produksi Obat Bahan Alam yang memenuhi ketentuan	88.00	70.45	80.06	Akan Tercapai

Indikator Kinerja Utama (IKU) Persentase Sarana Produksi Obat Bahan Alam yang Memenuhi Ketentuan dalam target jangka menengah (Renstra) ditetapkan sebesar 88,00%, sedangkan realisasi Tahun 2025 mencapai 70,45%, dengan tingkat capaian sebesar 80,06% dan berada pada kategori “Akan Tercapai.”

Capaian ini menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan sarana produksi Obat Bahan Alam masih berada di bawah target Renstra dan memerlukan penguatan pembinaan serta pengawasan. Meskipun demikian, melalui intensifikasi penerapan CPOTB, peningkatan kapasitas pelaku usaha, dan pendampingan teknis secara berkelanjutan, target jangka menengah tetap diproyeksikan dapat dicapai pada periode berikutnya.

Perbandingan dengan Realisasi Kinerja Satuan Kerja Lain



Grafik 6 : Perbandingan realisasi kinerja Persentase Sarana Produksi Obat Bahan Alam yang Memenuhi Ketentuan terhadap Kinerja Satuan Kerja Lain

Indikator Kinerja Utama (IKU) Persentase Sarana Produksi Obat Bahan Alam yang Memenuhi Ketentuan pada Tahun 2025 mencapai 70,45%. Jika dibandingkan dengan sektor lain, Persentase Sarana Produksi Obat yang Memenuhi Ketentuan (Deputi I) mencapai 78,85%, sedangkan Persentase Sarana Produksi Pangan Olahan yang Memenuhi Ketentuan (Deputi III) mencapai 63,92%.

Berdasarkan perbandingan tersebut, capaian Deputy II berada di posisi tengah, lebih rendah dibandingkan sektor Obat namun lebih tinggi dibandingkan sektor Pangan Olahan. Perbedaan ini menunjukkan karakteristik dan tingkat kompleksitas masing-masing sektor, termasuk variasi skala industri serta kesiapan penerapan standar produksi.

Capaian tersebut menunjukkan bahwa kepatuhan sarana produksi Obat Bahan Alam telah berada pada tingkat yang cukup baik dan kompetitif. Ke depan, penguatan pembinaan teknis, intensifikasi penerapan CPOTB, serta pengawasan berbasis risiko perlu terus ditingkatkan guna mendorong peningkatan capaian secara lebih optimal.

Analisis penyebab kegagalan dan upaya yang dilakukan

Pencapaian indikator Persentase Sarana Produksi Obat Bahan Alam (OBA) yang Memenuhi Ketentuan pada tahun 2025 belum optimal. Dari 308 sarana produksi yang diperiksa, hanya 217 sarana yang dinyatakan memenuhi ketentuan, sehingga masih terdapat proporsi sarana yang belum memenuhi standar yang dipersyaratkan. Kondisi ini dipengaruhi oleh beberapa faktor utama yang teridentifikasi dari hasil pemeriksaan periode Januari–September 2025. Temuan terbesar adalah sertifikat CPOBAB yang tidak berlaku (43,55%), diikuti oleh ketidaksesuaian pada aspek sanitasi dan higiene (19,35%) serta penerapan CPOBAB (16,13%).

Tingginya persentase sarana dengan sertifikat yang tidak diperpanjang menunjukkan masih lemahnya kepatuhan administratif dan pengawasan internal industri terhadap kewajiban sertifikasi. Selain itu, belum optimalnya pengelompokan temuan inspeksi oleh sebagian UPT BPOM ke dalam kategori mayor, minor, dan kritikal secara sistematis turut memengaruhi penetapan kesimpulan hasil pengawasan (MK/TMK), sehingga berdampak pada konsistensi penilaian. Tercatat pula terdapat 29 UPT dengan capaian hasil pengawasan di bawah 70%, bahkan terdapat UPT dengan capaian 0%, yang menunjukkan adanya disparitas kinerja pengawasan antar wilayah.

Sebagai tindak lanjut atas kondisi tersebut, Deputy II BPOM telah melakukan sejumlah upaya perbaikan. Pertama, dilakukan koordinasi intensif dengan UPT BPOM di wilayah setempat untuk melakukan pendampingan kepada sarana produksi, khususnya dalam percepatan proses sertifikasi dan perpanjangan CPOBAB. Kedua, dilaksanakan pelatihan bagi inspektur terkait penyusunan laporan hasil inspeksi serta pengelompokan temuan ke dalam kategori critical, major, dan minor agar penilaian menjadi lebih objektif dan seragam. Ketiga, dilakukan koordinasi untuk mempercepat realisasi pengawasan sarana produksi OBA dan Suplemen Kesehatan guna meningkatkan cakupan dan kualitas inspeksi.

Selain itu, diselenggarakan forum koordinasi dengan pelaku usaha untuk memperkuat pemahaman terhadap kewajiban pemenuhan standar produksi serta mendorong perbaikan berkelanjutan. Melalui langkah-langkah tersebut, diharapkan tingkat kepatuhan sarana produksi OBA dapat meningkat dan capaian indikator pada tahun berikutnya menjadi lebih optimal.

7. Persentase Sarana Produksi Suplemen Kesehatan yang Memenuhi Ketentuan

Indikator Persentase Sarana Produksi Suplemen Kesehatan yang Memenuhi Ketentuan merupakan salah satu indikator penting dalam menilai efektivitas pengawasan terhadap kepatuhan fasilitas produksi suplemen kesehatan terhadap regulasi yang berlaku,

termasuk penerapan Cara Pembuatan Produk yang Baik (CPPKB). Indikator ini bertujuan untuk menggambarkan sejauh mana pelaku usaha telah memenuhi ketentuan teknis produksi, seperti kesesuaian sarana dan prasarana, dokumentasi mutu, serta pengendalian proses produksi.

Berikut analisis terhadap realisasi kinerja indikator ini, dan perbandingannya terhadap target tahun berjalan, tahun sebelumnya, target akhir tahun Renstra, dan kinerja satuan kerja lain.

Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Tahun Berjalan

Tabel 32 : Perbandingan realisasi kinerja Sarana Produksi Suplemen Kesehatan yang Memenuhi Ketentuan terhadap target 2025

IKU	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kriteria / Notifikasi Warna
Persentase sarana produksi Suplemen Kesehatan yang memenuhi ketentuan	85,00	86,54	101,81	Sangat Baik

Indikator Kinerja Utama (IKU) Persentase Sarana Produksi Suplemen Kesehatan yang Memenuhi Ketentuan pada Tahun 2025 ditetapkan dengan target sebesar 85,00%. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja sampai dengan akhir tahun, realisasi yang dicapai adalah sebesar 86,54%, sehingga tingkat capaian kinerja mencapai 101,81% dan termasuk dalam kategori “Sangat Baik.”

Capaian ini menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan sarana produksi Suplemen Kesehatan terhadap ketentuan yang berlaku telah melampaui target yang ditetapkan. Hasil tersebut menunjukkan efektivitas pelaksanaan pengawasan dan pembinaan, khususnya dalam penerapan standar Cara Pembuatan yang Baik, sistem manajemen mutu, serta pemenuhan aspek sarana dan prasarana produksi.

Keberhasilan ini didukung oleh intensifikasi inspeksi berbasis risiko, pelaksanaan bimbingan teknis dan coaching clinic bagi pelaku usaha, serta penguatan koordinasi antara fungsi standardisasi, registrasi, dan pengawasan. Selain itu, meningkatnya kesadaran dan komitmen pelaku usaha dalam menjaga kualitas produksi turut berkontribusi terhadap pencapaian kinerja yang optimal.

Dengan capaian sebesar 101,81%, indikator ini menunjukkan bahwa sistem pembinaan dan pengawasan telah berjalan efektif dalam mendorong peningkatan kepatuhan sarana produksi. Ke depan, upaya pengawasan preventif dan penguatan kapasitas industri perlu terus dilakukan guna menjaga konsistensi kepatuhan serta memastikan keberlanjutan peningkatan mutu produk Suplemen Kesehatan yang beredar di masyarakat.

Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Capaian Tahun Sebelumnya

Tabel 33 : Perbandingan realisasi kinerja Sarana Produksi Suplemen Kesehatan yang Memenuhi Ketentuan terhadap kinerja di Tahun sebelumnya

IKU	Realisasi 2025	Realisasi 2024	Perbandingan
Persentase sarana produksi Suplemen Kesehatan yang memenuhi ketentuan	86,54	N/A	Tidak dapat dibandingkan

Indikator Kinerja Utama (IKU) Persentase Sarana Produksi Suplemen Kesehatan yang Memenuhi Ketentuan pada Tahun 2025 mencapai realisasi sebesar 86,54%. Namun demikian, indikator ini belum memiliki data realisasi Tahun 2024 dalam format pengukuran yang sebanding, sehingga kinerjanya tidak dapat diperbandingkan dengan tahun sebelumnya.

Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah

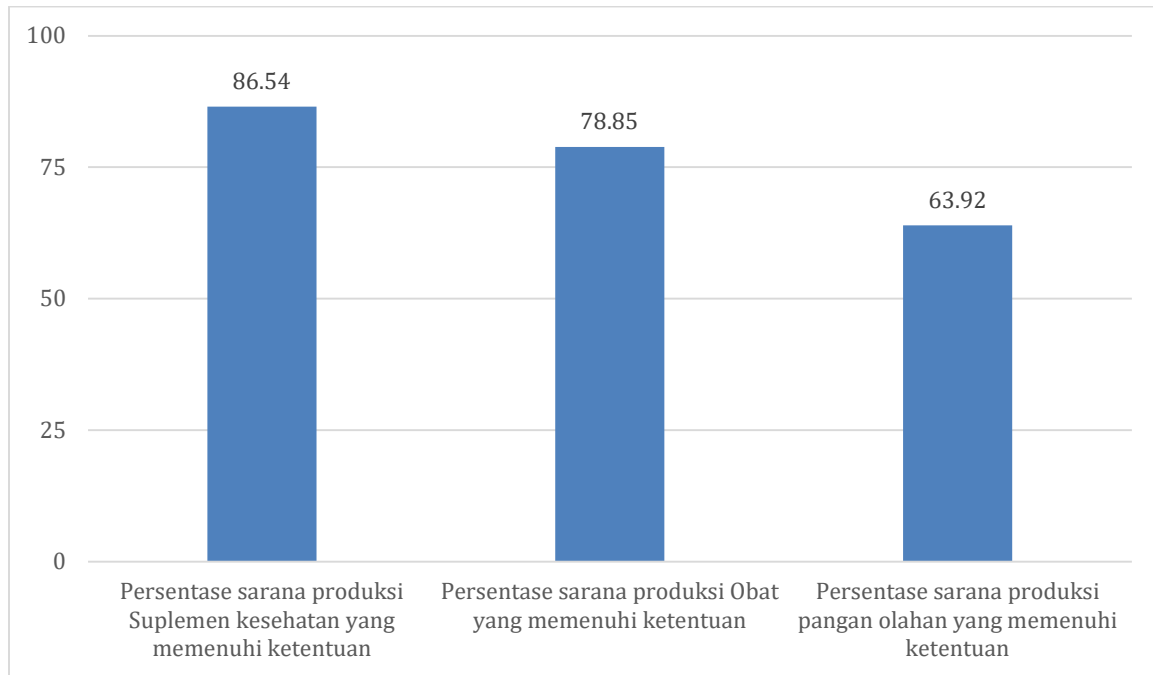
Tabel 34 : Perbandingan realisasi kinerja Sarana Produksi Suplemen Kesehatan yang Memenuhi Ketentuan terhadap target Jangka Menengah 2025

IKU	Target Renstra	Realisasi 2025	Capaian (%)	Kategori / Notifikasi Warna
Persentase sarana produksi Suplemen Kesehatan yang memenuhi ketentuan	92.00	86.54	94.06	Akan Tercapai

Indikator Kinerja Utama (IKU) Persentase Sarana Produksi Suplemen Kesehatan yang Memenuhi Ketentuan dalam target jangka menengah (Renstra) ditetapkan sebesar 92,00%, sedangkan realisasi Tahun 2025 mencapai 86,54%, dengan tingkat capaian sebesar 94,06% dan berada pada kategori “Akan Tercapai.”

Capaian ini menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan sarana produksi Suplemen Kesehatan telah berjalan baik dan mendekati target Renstra. Dengan penguatan pembinaan, peningkatan kualitas penerapan standar produksi yang baik, serta intensifikasi pengawasan berbasis risiko, target jangka menengah diproyeksikan dapat tercapai pada periode berikutnya.

Perbandingan dengan Realisasi Kinerja Satuan Kerja Lain



Grafik 7 : Perbandingan realisasi kinerja Sarana Produksi Suplemen Kesehatan yang Memenuhi Ketentuan terhadap Kinerja Satuan Kerja Lain

Indikator Kinerja Utama (IKU) Persentase Sarana Produksi Suplemen Kesehatan yang Memenuhi Ketentuan pada Tahun 2025 mencapai 86,54%. Jika dibandingkan dengan sektor lain, Persentase Sarana Produksi Obat yang Memenuhi Ketentuan (Deputi I) mencapai 78,85%, dan Persentase Sarana Produksi Pangan Olahan yang Memenuhi Ketentuan (Deputi III) mencapai 63,92%.

Berdasarkan perbandingan tersebut, capaian sektor Suplemen Kesehatan berada pada posisi tertinggi di antara ketiga sektor. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan sarana produksi Suplemen Kesehatan relatif lebih baik dibandingkan sektor Obat dan Pangan Olahan.

Analisis penyebab keberhasilan dan upaya yang dilakukann

Pencapaian indikator Persentase Sarana Produksi Suplemen Kesehatan yang Memenuhi Ketentuan pada tahun 2025 menunjukkan kinerja yang relatif baik. Dari 52 sarana produksi yang diperiksa, sebanyak 45 sarana dinyatakan memenuhi ketentuan, yang menunjukkan tingkat kepatuhan industri terhadap penerapan Cara Pembuatan yang baik semakin meningkat. Capaian ini didukung oleh penguatan pengawasan yang lebih terarah serta peningkatan kualitas inspeksi, sehingga sarana produksi mampu melakukan perbaikan secara tepat dan berkelanjutan sesuai ketentuan yang berlaku.

Keberhasilan ini tidak terlepas dari berbagai upaya strategis yang dilakukan Deputy II BPOM. Monitoring dan evaluasi (monev) kinerja UPT difokuskan pada pengawasan sarana produksi OBA dan Suplemen Kesehatan untuk memastikan tindak lanjut atas permasalahan capaian kinerja dapat dilakukan secara cepat dan terukur. Selain itu, dilakukan intervensi aktif terhadap tindak lanjut temuan pengawasan sarana produksi suplemen kesehatan agar perbaikan oleh pelaku usaha segera direalisasikan dan terdokumentasi dengan baik. Peningkatan kapasitas inspektur juga menjadi faktor penting melalui pelatihan penyusunan laporan hasil inspeksi, termasuk pengelompokan dan pengkategorian temuan (Critical, Major, dan Minor), sehingga penilaian menjadi lebih objektif dan konsisten.

Koordinasi intensif dengan UPT BPOM dilakukan untuk mempercepat realisasi pengawasan serta menjaga kualitas dan keseragaman pelaksanaan inspeksi di seluruh wilayah. Di sisi pembinaan, forum koordinasi dengan pelaku usaha terus dilaksanakan guna meningkatkan pemahaman terhadap kewajiban pemenuhan Cara produksi yang baik dan pentingnya sistem pengendalian mutu yang berkelanjutan. Kombinasi antara pengawasan yang sistematis, peningkatan kompetensi pengawas, serta pembinaan yang konstruktif menjadi faktor pendukung utama dalam menjaga dan meningkatkan kepatuhan sarana produksi suplemen kesehatan.

8. Persentase Sarana Produksi Kosmetik yang Memenuhi Ketentuan

Indikator Persentase Sarana Produksi Kosmetik yang Memenuhi Ketentuan merupakan salah satu indikator yang menggambarkan efektivitas pengawasan terhadap kepatuhan industri kosmetik dalam menerapkan persyaratan teknis produksi, termasuk penerapan Cara Pembuatan Kosmetik yang Baik (CPKB). Capaian indikator ini sangat penting karena berkontribusi langsung terhadap jaminan mutu, keamanan, dan legalitas produk kosmetik yang beredar di masyarakat.

Berikut analisis terhadap realisasi kinerja indikator ini, dan perbandingannya terhadap target tahun berjalan, tahun sebelumnya, target akhir tahun Renstra, dan kinerja satuan kerja lain.

Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Tahun Berjalan

Tabel 35 : Perbandingan realisasi kinerja Persentase Sarana Produksi Kosmetik yang Memenuhi Ketentuan terhadap target 2025

IKU	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kriteria / Notifikasi Warna
Persentase sarana produksi Kosmetik yang memenuhi ketentuan	81,00	79,81	98,53	Baik

Indikator Kinerja Utama (IKU) Persentase Sarana Produksi Kosmetik yang Memenuhi Ketentuan pada Tahun 2025 ditetapkan dengan target sebesar 81,00%. Berdasarkan

hasil pengukuran kinerja sampai dengan akhir tahun, realisasi yang dicapai adalah sebesar 79,81%, sehingga tingkat capaian kinerja mencapai 98,53% dan berada dalam kategori “Baik.”

Capaian ini menunjukkan bahwa sebagian besar sarana produksi kosmetik telah memenuhi ketentuan yang dipersyaratkan, meskipun masih terdapat selisih tipis terhadap target yang ditetapkan. Kondisi ini mengindikasikan bahwa implementasi standar Cara Pembuatan Kosmetik yang Baik (CPKB) telah berjalan cukup efektif, namun masih memerlukan penguatan pada beberapa aspek kepatuhan teknis dan sistem mutu di lapangan.

Beberapa faktor yang memengaruhi capaian antara lain masih ditemukannya ketidaksesuaian minor maupun mayor pada saat inspeksi, keterbatasan kapasitas teknis pada pelaku usaha tertentu, serta perlunya peningkatan konsistensi penerapan sistem dokumentasi dan pengendalian mutu. Meskipun demikian, capaian sebesar 79,81% tetap menunjukkan tren kepatuhan yang positif dan stabil.

Ke depan, diperlukan intensifikasi pembinaan dan pendampingan teknis, khususnya bagi pelaku usaha yang belum sepenuhnya memenuhi ketentuan, serta penguatan pengawasan berbasis risiko untuk memastikan peningkatan kepatuhan yang berkelanjutan. Langkah tersebut diharapkan dapat mendorong tercapainya target yang lebih optimal pada periode berikutnya dan memperkuat perlindungan konsumen terhadap produk kosmetik yang beredar di masyarakat.

Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Capaian Tahun Sebelumnya

Tabel 36 : Perbandingan realisasi kinerja Persentase Sarana Produksi Kosmetik yang Memenuhi Ketentuan terhadap kinerja di Tahun sebelumnya

IKU	Realisasi 2025	Realisasi 2024	Perbandingan
Persentase sarana produksi Kosmetik yang memenuhi ketentuan	79,81	N/A	Tidak dapat dibandingkan

Indikator Kinerja Utama (IKU) Persentase Sarana Produksi Kosmetik yang Memenuhi Ketentuan pada Tahun 2025 mencapai realisasi sebesar 79,81%. Namun demikian, indikator ini belum memiliki data realisasi Tahun 2024 dalam format pengukuran yang sebanding, sehingga kinerjanya tidak dapat diperbandingkan dengan tahun sebelumnya.

Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah

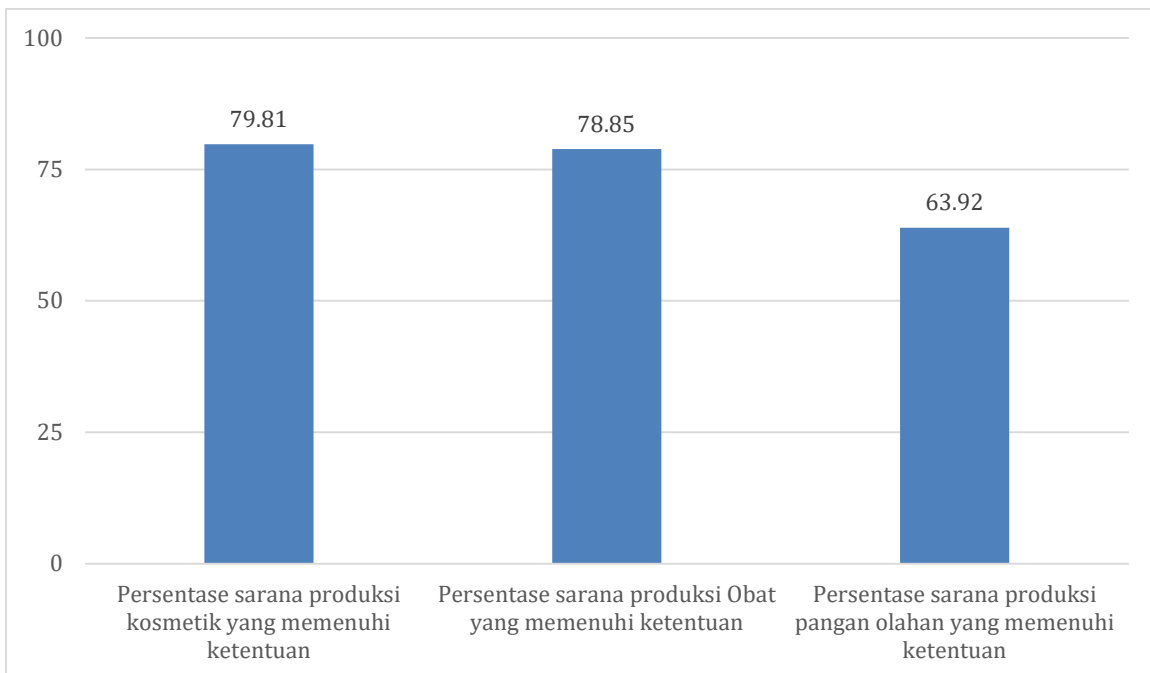
Tabel 37 : Perbandingan realisasi kinerja Persentase Sarana Produksi Kosmetik yang Memenuhi Ketentuan terhadap target Jangka Menengah 2025

IKU	Target Renstra	Realisasi 2025	Capaian (%)	Kategori / Notifikasi Warna
Persentase sarana produksi Kosmetik yang memenuhi ketentuan	83.00	79.81	96.16	Akan Tercapai

Indikator Kinerja Utama (IKU) Persentase Sarana Produksi Kosmetik yang Memenuhi Ketentuan dalam target jangka menengah (Renstra) ditetapkan sebesar 83,00%, sedangkan realisasi Tahun 2025 mencapai 79,81%, dengan tingkat capaian sebesar 96,16% dan berada pada kategori “Akan Tercapai.”

Capaian ini menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan sarana produksi kosmetik telah berjalan baik dan mendekati target Renstra. Dengan penguatan pembinaan teknis, peningkatan kapasitas pelaku usaha, serta konsistensi pengawasan berbasis risiko, target jangka menengah diproyeksikan dapat tercapai pada periode berikutnya.

Perbandingan dengan Realisasi Kinerja Satuan Kerja Lain



Grafik 8 : Perbandingan realisasi kinerja Persentase Sarana Produksi Kosmetik yang Memenuhi Ketentuan terhadap Kinerja Satuan Kerja Lain

Indikator Kinerja Utama (IKU) Persentase Sarana Produksi Kosmetik yang Memenuhi Ketentuan pada Tahun 2025 mencapai 79,81%. Jika dibandingkan dengan sektor lain, Persentase Sarana Produksi Obat yang Memenuhi Ketentuan (Deputi I) mencapai 78,85%, dan Persentase Sarana Produksi Pangan Olahan yang Memenuhi Ketentuan (Deputi III) mencapai 63,92%.

Berdasarkan perbandingan tersebut, capaian sektor Kosmetik sedikit lebih tinggi dibandingkan sektor Obat dan secara signifikan lebih tinggi dibandingkan sektor Pangan Olahan. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan sarana produksi kosmetik relatif kompetitif di antara sektor teknis lainnya.

Capaian tersebut menunjukkan efektivitas penerapan CPKB, pembinaan teknis, serta pengawasan berbasis risiko yang telah dilaksanakan. Ke depan, konsistensi pembinaan dan peningkatan kualitas sistem mutu sarana produksi perlu terus diperkuat guna mempertahankan dan meningkatkan capaian tersebut.

Analisis penyebab kegagalan dan upaya yang dilakukan

Pencapaian indikator Persentase Sarana Produksi Kosmetik yang Memenuhi Ketentuan pada tahun 2025 belum sepenuhnya optimal. Dari 322 sarana produksi kosmetik yang diperiksa, sebanyak 257 sarana dinyatakan memenuhi ketentuan, sementara sisanya belum memenuhi standar yang dipersyaratkan. Salah satu faktor penyebabnya adalah meningkatnya jumlah industri kosmetik, yang tidak seluruhnya diimbangi dengan pemahaman dan konsistensi pelaku usaha terhadap regulasi, khususnya dalam penerapan Cara Pembuatan Kosmetika yang Baik (CPKB).

Selain itu, pada tahun ini dilakukan intensifikasi pengawasan kosmetik dengan cakupan pemeriksaan yang lebih luas serta menyasar sarana berisiko tinggi. Pendekatan ini menyebabkan lebih banyak temuan ketidaksesuaian teridentifikasi, terutama pada sarana dengan riwayat risiko atau kepatuhan rendah. Penajaman analisis risiko oleh UPT juga membuat pengawasan menjadi lebih selektif dan fokus pada aspek kritis, sehingga kualitas temuan meningkat meskipun berdampak pada persentase sarana yang memenuhi ketentuan.

Sebagai tindak lanjut atas kondisi tersebut, Deputi II BPOM melakukan pertemuan pembahasan monitoring dan evaluasi (monev) capaian IKU bersama UPT untuk mengidentifikasi akar masalah dan menyusun strategi perbaikan. Monev lanjutan juga dilakukan terhadap pelaksanaan tindak lanjut temuan pengawasan di masing-masing UPT guna memastikan perbaikan oleh pelaku usaha berjalan sesuai rekomendasi. Selain itu, dilakukan reviu terhadap pengkategorian temuan ketidaksesuaian CPKB (mayor dan minor) pada hasil pemeriksaan yang telah dilaporkan, disertai sosialisasi kepada petugas UPT untuk menyamakan persepsi dalam penerapan kategori temuan.

Langkah ini bertujuan meningkatkan konsistensi dan objektivitas penilaian MK/TMK. Melalui penguatan koordinasi, penajaman analisis risiko, dan penyelarasan metodologi inspeksi, diharapkan tingkat kepatuhan sarana produksi kosmetik dapat meningkat serta target kinerja pada tahun berikutnya dapat tercapai secara lebih optimal.

9. Persentase Fasilitas Distribusi Obat Bahan Alam yang Memenuhi Ketentuan

Indikator Persentase Fasilitas Distribusi Obat Bahan Alam (OBA) yang Memenuhi Ketentuan merupakan indikator penting dalam menilai efektivitas pengawasan Deputi II

BPOM terhadap rantai distribusi produk OBA. Indikator ini menunjukkan tingkat kepatuhan fasilitas distribusi terhadap persyaratan teknis, administratif, dan kualitas yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, termasuk aspek penyimpanan, pengangkutan, pencatatan, dan dokumentasi distribusi.

Berikut analisis terhadap realisasi kinerja indikator ini, dan perbandingannya terhadap target tahun berjalan, tahun sebelumnya, target akhir tahun Renstra, dan kinerja satuan kerja lain.

Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Tahun Berjalan

Tabel 38 : Perbandingan realisasi kinerja Persentase Fasilitas Distribusi Obat Bahan Alam yang Memenuhi Ketentuan terhadap target 2025

IKU	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kriteria / Notifikasi Warna
Persentase fasilitas distribusi Obat Bahan Alam yang memenuhi ketentuan	70,00	72,41	103,44	Sangat Baik

Indikator Kinerja Utama (IKU) Persentase Fasilitas Distribusi Obat Bahan Alam yang Memenuhi Ketentuan pada Tahun 2025 ditetapkan dengan target sebesar 70,00%. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja sampai dengan akhir tahun, realisasi yang dicapai adalah sebesar 72,41%, sehingga tingkat capaian kinerja mencapai 103,44% dan termasuk dalam kategori “Sangat Baik.

Capaian ini menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan fasilitas distribusi terhadap ketentuan Cara Distribusi Obat Tradisional yang Baik (CDOTB) telah melampaui target yang ditetapkan. Kondisi tersebut menunjukkan efektivitas pelaksanaan pengawasan distribusi, termasuk inspeksi rutin, tindak lanjut hasil pengawasan, serta pembinaan kepada pelaku usaha distribusi.

Keberhasilan ini didukung oleh penguatan pengawasan berbasis risiko pada rantai distribusi, peningkatan koordinasi dengan pemerintah daerah dan instansi terkait, serta meningkatnya kesadaran pelaku usaha dalam menerapkan sistem dokumentasi, penyimpanan, dan penyaluran produk sesuai standar yang berlaku. Hal ini berkontribusi pada terjaganya mutu dan keamanan produk Obat Bahan Alam hingga sampai ke konsumen.

Dengan capaian sebesar 103,44%, indikator ini menunjukkan bahwa sistem pengawasan distribusi berjalan efektif dalam menjaga integritas rantai pasok. Ke depan, upaya pengawasan preventif dan penguatan sistem pelacakan distribusi perlu terus ditingkatkan guna mempertahankan tren positif dan memastikan perlindungan masyarakat secara berkelanjutan.

Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Capaian Tahun Sebelumnya

Tabel 39 : Perbandingan realisasi kinerja Persentase Fasilitas Distribusi Obat Bahan Alam yang Memenuhi Ketentuan terhadap kinerja di Tahun sebelumnya

IKU	Realisasi 2025	Realisasi 2024	Perbandingan
Persentase fasilitas distribusi Obat Bahan Alam yang memenuhi ketentuan	72,41	N/A	Tidak dapat dibandingkan

Indikator Kinerja Utama (IKU) Persentase Fasilitas Distribusi Obat Bahan Alam yang Memenuhi Ketentuan pada Tahun 2025 mencapai realisasi sebesar 72,41%. Namun demikian, indikator ini belum memiliki data realisasi Tahun 2024 dalam format pengukuran yang sebanding, sehingga kinerjanya tidak dapat diperbandingkan dengan tahun sebelumnya.

Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah

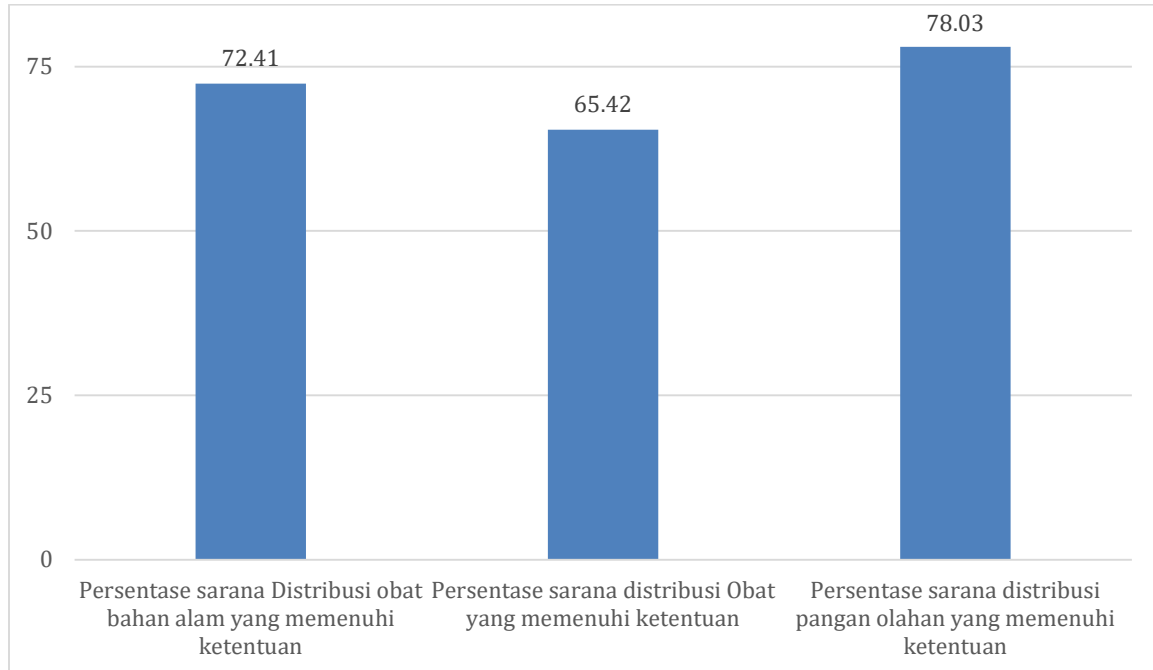
Tabel 40 : Perbandingan realisasi kinerja Persentase Fasilitas Distribusi Obat Bahan Alam yang Memenuhi Ketentuan terhadap target Jangka Menengah 2025

IKU	Target Renstra	Realisasi 2025	Capaian (%)	Kategori / Notifikasi Warna
Persentase fasilitas distribusi Obat Bahan Alam yang memenuhi ketentuan	72.00	72.41	100.57	Tercapai / Melampaui

Indikator Kinerja Utama (IKU) Persentase Fasilitas Distribusi Obat Bahan Alam yang Memenuhi Ketentuan dalam target jangka menengah (Renstra) ditetapkan sebesar 72,00%, sedangkan realisasi Tahun 2025 mencapai 72,41%, dengan tingkat capaian sebesar 100,57% dan berada pada kategori “Tercapai/Melampaui.”

Capaian ini menunjukkan bahwa kepatuhan fasilitas distribusi Obat Bahan Alam telah memenuhi bahkan sedikit melampaui target Renstra. Hal tersebut menunjukkan efektivitas pengawasan distribusi dan konsistensi penerapan standar distribusi yang baik dalam menjaga mutu dan keamanan produk hingga sampai ke masyarakat.

Perbandingan dengan Realisasi Kinerja Satuan Kerja Lain



Grafik 9 : Perbandingan realisasi kinerja Persentase Fasilitas Distribusi Obat Bahan Alam yang Memenuhi Ketentuan terhadap Kinerja Satuan Kerja Lain

Indikator Kinerja Utama (IKU) Persentase Fasilitas Distribusi Obat Bahan Alam yang Memenuhi Ketentuan pada Tahun 2025 mencapai 72,41%. Jika dibandingkan dengan sektor lain, Persentase Fasilitas Distribusi Obat yang Memenuhi Ketentuan (Deputi I) mencapai 65,42%, sedangkan Persentase Fasilitas Distribusi Pangan Olahan yang Memenuhi Ketentuan (Deputi III) mencapai 78,03%.

Berdasarkan perbandingan tersebut, capaian Deputi II berada di posisi tengah, lebih tinggi dibandingkan sektor Obat namun masih di bawah sektor Pangan Olahan. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan fasilitas distribusi Obat Bahan Alam relatif kompetitif, namun masih terdapat ruang peningkatan untuk mencapai capaian yang lebih optimal.

Analisis penyebab keberhasilan dan upaya yang dilakukan

Keberhasilan pencapaian indikator Persentase Fasilitas Distribusi Obat Bahan Alam (OBA) yang Memenuhi Ketentuan pada tahun 2025 didukung oleh penguatan pengawasan distribusi berbasis risiko serta peningkatan pembinaan kepada pelaku usaha distribusi. Dari 1.787 fasilitas distribusi yang diperiksa, sebanyak 1.294 fasilitas dinyatakan memenuhi ketentuan, yang menunjukkan bahwa sebagian besar sarana distribusi telah mendistribusikan obat bahan alam sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan. Capaian ini menunjukkan meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dalam menjaga mutu produk selama proses penyimpanan, pengangkutan, dan penyaluran ke konsumen.

Secara analitis, keberhasilan ini dipengaruhi oleh beberapa faktor pendukung. Pertama, penerapan pendekatan risk-based supervision dalam penentuan prioritas pemeriksaan,

sehingga pengawasan difokuskan pada fasilitas dengan potensi risiko tinggi atau riwayat pelanggaran. Kedua, penguatan koordinasi antara pusat dan UPT dalam pelaksanaan inspeksi serta konsistensi penerapan standar pemeriksaan. Ketiga, meningkatnya kesadaran pelaku usaha terhadap pentingnya proses distribusi sebagai bagian dari rantai jaminan mutu produk OBA. Selain itu, pemanfaatan data hasil pengawasan tahun sebelumnya untuk penentuan strategi intervensi turut meningkatkan efektivitas pengawasan tahun berjalan.

Upaya yang dilakukan Deputy II BPOM dalam mendukung capaian tersebut meliputi intensifikasi pemeriksaan fasilitas distribusi, pelaksanaan pembinaan dan sosialisasi ketentuan distribusi kepada pelaku usaha, serta monitoring tindak lanjut atas temuan hasil inspeksi. Penguatan kapasitas petugas pengawas melalui penyelarasan persepsi dan peningkatan kompetensi teknis (inhouse training) juga dilakukan untuk memastikan konsistensi penilaian di seluruh wilayah. Di samping itu, koordinasi dengan UPT untuk percepatan tindak lanjut terhadap fasilitas yang belum memenuhi ketentuan menjadi langkah penting dalam menjaga tren peningkatan kepatuhan. Kombinasi antara pengawasan yang terarah dan pembinaan yang berkelanjutan menjadi faktor utama dalam mendukung keberhasilan pencapaian indikator ini.

10. Persentase Fasilitas Distribusi Suplemen Kesehatan yang Memenuhi Ketentuan

Indikator Persentase Fasilitas Distribusi Suplemen Kesehatan yang Memenuhi Ketentuan merupakan indikator penting dalam mengukur efektivitas pengawasan post-market Deputy II BPOM, khususnya dalam memastikan bahwa proses distribusi produk suplemen kesehatan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Indikator ini menunjukkan tingkat kepatuhan pelaku usaha distribusi terhadap aspek legalitas, pencatatan, sistem penyimpanan, pelacakan produk, dan pemenuhan standar fasilitas distribusi.

Berikut analisis terhadap realisasi kinerja indikator ini, dan perbandingannya terhadap target tahun berjalan, tahun sebelumnya, target akhir tahun Renstra, dan kinerja satuan kerja lain.

Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Tahun Berjalan

Tabel 41 : Perbandingan realisasi kinerja Persentase Fasilitas Distribusi Suplemen Kesehatan yang Memenuhi Ketentuan terhadap target 2025

IKU	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kriteria / Notifikasi Warna
Persentase fasilitas distribusi Suplemen Kesehatan yang memenuhi ketentuan	90,00	92,94	103,27	Sangat Baik

Indikator Kinerja Utama (IKU) Persentase Fasilitas Distribusi Suplemen Kesehatan yang Memenuhi Ketentuan pada Tahun 2025 ditetapkan dengan target sebesar 90,00%. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja sampai dengan akhir tahun, realisasi yang dicapai adalah sebesar 92,94%, sehingga tingkat capaian kinerja mencapai 103,27% dan termasuk dalam kategori “Sangat Baik.

Capaian ini menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan fasilitas distribusi Suplemen Kesehatan terhadap ketentuan yang berlaku telah melampaui target yang ditetapkan. Hal ini menunjukkan efektivitas pelaksanaan pengawasan distribusi, termasuk inspeksi berkala, verifikasi sistem penyimpanan dan penyaluran, serta tindak lanjut terhadap temuan hasil pengawasan.

Keberhasilan tersebut didukung oleh penguatan penerapan standar distribusi yang baik, peningkatan koordinasi dengan instansi terkait, serta komitmen pelaku usaha dalam menjaga mutu produk sepanjang rantai pasok. Pengawasan berbasis risiko yang difokuskan pada fasilitas dengan potensi risiko tinggi juga turut berkontribusi dalam meningkatkan tingkat kepatuhan.

Dengan capaian sebesar 103,27%, indikator ini menunjukkan bahwa sistem pengawasan distribusi Suplemen Kesehatan telah berjalan secara efektif dan konsisten. Ke depan, penguatan sistem monitoring dan pelacakan distribusi serta peningkatan kapasitas pelaku usaha tetap diperlukan guna menjaga keberlanjutan kepatuhan dan memastikan produk yang beredar tetap aman dan bermutu bagi masyarakat.

Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Capaian Tahun Sebelumnya

Tabel 42 : Perbandingan realisasi kinerja Persentase Fasilitas Distribusi Suplemen Kesehatan yang Memenuhi Ketentuan di Tahun sebelumnya

IKU	Realisasi 2025	Realisasi 2024	Perbandingan
Persentase fasilitas distribusi Suplemen Kesehatan yang memenuhi ketentuan	92,94	N/A	Tidak dapat dibandingkan

Indikator Kinerja Utama (IKU) Persentase Fasilitas Distribusi Suplemen Kesehatan yang Memenuhi Ketentuan pada Tahun 2025 mencapai realisasi sebesar 92,94%. Namun demikian, indikator ini belum memiliki data realisasi Tahun 2024 dalam format pengukuran yang sebanding, sehingga kinerjanya tidak dapat diperbandingkan dengan tahun sebelumnya.

Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah

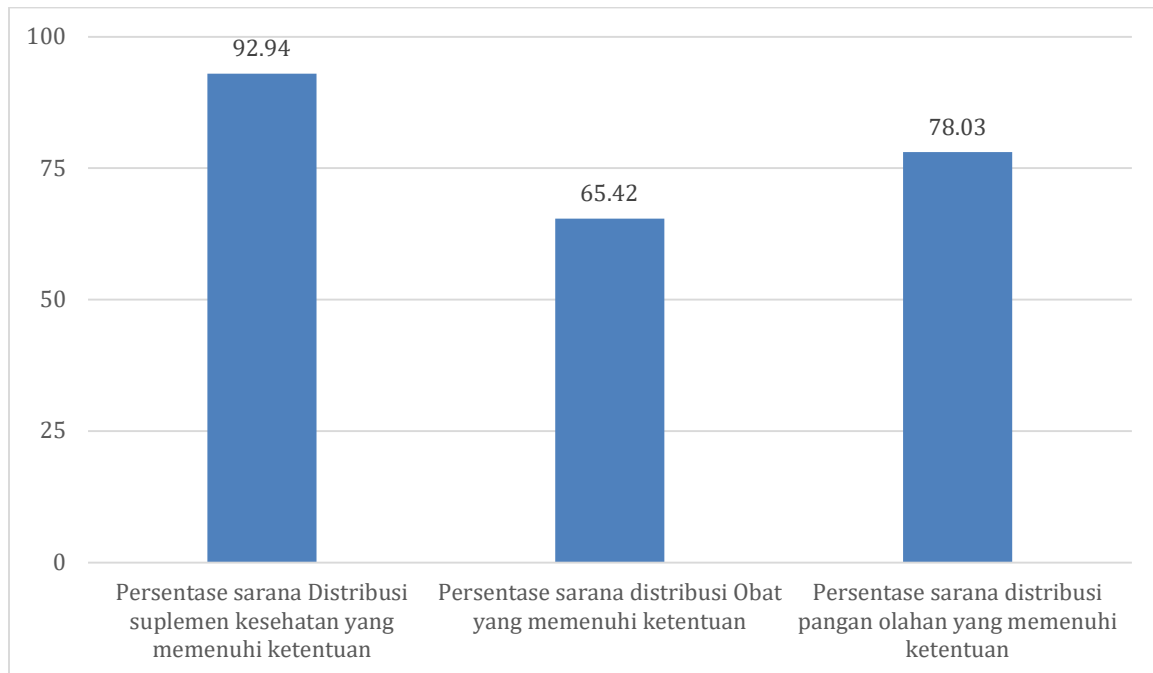
Tabel 43 : Perbandingan realisasi kinerja Persentase Fasilitas Distribusi Suplemen Kesehatan yang Memenuhi Ketentuan terhadap target Jangka Menengah 2025

IKU	Target Renstra	Realisasi 2025	Capaian	Kategori / Notifikasi Warna
Persentase fasilitas distribusi Suplemen Kesehatan yang memenuhi ketentuan	92.00	92.94	101.03	Tercapai / Melampaui

Indikator Kinerja Utama (IKU) Persentase Fasilitas Distribusi Suplemen Kesehatan yang Memenuhi Ketentuan dalam target jangka menengah (Renstra) ditetapkan sebesar 92,00%, sedangkan realisasi Tahun 2025 mencapai 92,94%, dengan tingkat capaian sebesar 101,03% dan berada pada kategori “Tercapai/Melampaui.”

Capaian ini menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan fasilitas distribusi Suplemen Kesehatan telah memenuhi bahkan melampaui target Renstra. Hasil tersebut menunjukkan efektivitas pengawasan dan pembinaan distribusi, serta konsistensi penerapan standar distribusi yang baik dalam menjaga mutu dan keamanan produk sepanjang rantai pasok.

Perbandingan dengan Realisasi Kinerja Satuan Kerja Lain



Grafik 10 : Perbandingan realisasi kinerja Persentase Fasilitas Distribusi Suplemen Kesehatan yang Memenuhi Ketentuan terhadap Kinerja Satuan Kerja Lain

Indikator Kinerja Utama (IKU) Persentase Fasilitas Distribusi Suplemen Kesehatan yang Memenuhi Ketentuan pada Tahun 2025 mencapai 92,94%. Jika dibandingkan dengan sektor lain, Persentase Fasilitas Distribusi Obat yang Memenuhi Ketentuan (Deputi I) mencapai 65,42%, dan Persentase Fasilitas Distribusi Pangan Olahan yang Memenuhi Ketentuan (Deputi III) mencapai 78,03%.

Berdasarkan perbandingan tersebut, capaian sektor Suplemen Kesehatan berada pada posisi tertinggi di antara ketiga sektor. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan fasilitas distribusi Suplemen Kesehatan relatif lebih baik dibandingkan sektor Obat dan Pangan Olahan.

Analisis penyebab keberhasilan dan upaya yang dilakukan

Keberhasilan pencapaian indikator Persentase Fasilitas Distribusi Suplemen Kesehatan yang Memenuhi Ketentuan pada tahun 2025 menunjukkan peningkatan kepatuhan pelaku usaha distribusi dalam menerapkan standar distribusi yang dipersyaratkan. Dari 978 fasilitas distribusi yang diperiksa, sebanyak 909 fasilitas dinyatakan memenuhi ketentuan, yang menunjukkan bahwa mayoritas pelaku usaha telah menerapkan sistem penyimpanan, pencatatan, dan penyaluran produk sesuai prinsip jaminan mutu. Capaian ini menunjukkan efektivitas pengawasan distribusi sebagai bagian penting dari rantai pengendalian mutu suplemen kesehatan hingga ke tingkat peredaran.

Secara analitis, keberhasilan ini didukung oleh penerapan pengawasan berbasis risiko dalam penentuan prioritas pemeriksaan, sehingga intervensi difokuskan pada fasilitas dengan potensi risiko lebih tinggi atau memiliki riwayat ketidaksesuaian. Selain itu, meningkatnya kesadaran pelaku usaha terhadap pentingnya proses distribusi—termasuk pengendalian suhu, sistem pencatatan stok, dan verifikasi izin edar—turut berkontribusi terhadap tingginya tingkat pemenuhan ketentuan. Konsistensi pelaksanaan inspeksi oleh UPT serta penyelarasan metode pemeriksaan juga memperkuat kualitas hasil pengawasan.

Upaya yang dilakukan Deputy II BPOM untuk mendukung capaian tersebut meliputi intensifikasi pemeriksaan fasilitas distribusi, penguatan koordinasi dan monitoring bersama UPT, serta pembinaan dan sosialisasi ketentuan distribusi kepada pelaku usaha. Tindak lanjut terhadap temuan hasil inspeksi dilakukan secara aktif melalui pengawasan perbaikan dan pemantauan progres pemenuhan ketentuan. Peningkatan kapasitas petugas pengawas melalui penyamaan persepsi dan penguatan kompetensi teknis (in house training) juga menjadi faktor pendukung dalam menjaga konsistensi penilaian. Melalui kombinasi pengawasan yang terarah dan pembinaan berkelanjutan, tingkat kepatuhan fasilitas distribusi suplemen kesehatan dapat dipertahankan dan terus ditingkatkan.

11. Persentase Fasilitas Distribusi Kosmetik yang Memenuhi Ketentuan

Indikator Persentase Fasilitas Distribusi Kosmetik yang Memenuhi Ketentuan merupakan indikator yang digunakan untuk menilai efektivitas pengawasan Deputy II BPOM terhadap kepatuhan sarana distribusi kosmetik terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Indikator ini mencakup pemenuhan aspek legalitas, sistem penyimpanan yang sesuai, ketertelusuran produk, pencatatan distribusi, serta kelayakan fasilitas fisik dan manajemen mutu distribusi kosmetik.

Berikut analisis terhadap realisasi kinerja indikator ini, dan perbandingannya terhadap target tahun berjalan, tahun sebelumnya, target akhir tahun Renstra, dan kinerja satuan kerja lain.

Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Tahun Berjalan

Tabel 44 : Perbandingan realisasi kinerja Persentase Fasilitas Distribusi Kosmetik yang Memenuhi Ketentuan terhadap target 2025

IKU	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kriteria / Notifikasi Warna
Persentase fasilitas distribusi Kosmetik yang memenuhi ketentuan	78,00	73,92	94,77	Baik

Indikator Kinerja Utama (IKU) Persentase Fasilitas Distribusi Kosmetik yang Memenuhi Ketentuan pada Tahun 2025 ditetapkan dengan target sebesar 78%. Realisasi yang dicapai sampai dengan akhir tahun adalah sebesar 73,92%, sehingga tingkat capaian kinerja mencapai 94,77% dan berada dalam kategori “Baik.”

Capaian ini menunjukkan bahwa sebagian besar fasilitas distribusi kosmetik telah memenuhi ketentuan yang dipersyaratkan, meskipun realisasi belum sepenuhnya mencapai target yang ditetapkan. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa sistem pengawasan distribusi telah berjalan cukup efektif, namun masih terdapat beberapa fasilitas yang memerlukan perbaikan dalam pemenuhan standar distribusi yang baik.

Beberapa faktor yang memengaruhi capaian antara lain masih ditemukannya ketidaksesuaian dalam aspek dokumentasi, penyimpanan, dan pengendalian mutu pada saat inspeksi, serta perlunya peningkatan pemahaman pelaku usaha terhadap ketentuan teknis distribusi kosmetik. Meskipun demikian, capaian sebesar 94,77% menunjukkan tingkat kepatuhan yang relatif tinggi dan stabil.

Ke depan, diperlukan intensifikasi pembinaan dan pengawasan berbasis risiko, khususnya terhadap fasilitas distribusi dengan tingkat ketidaksesuaian yang berulang, guna meningkatkan kepatuhan secara menyeluruh dan memastikan mutu serta keamanan kosmetik tetap terjaga sepanjang rantai distribusi hingga ke konsumen.

Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Capaian Tahun Sebelumnya

Tabel 45 : Perbandingan realisasi kinerja Persentase Fasilitas Distribusi Kosmetik yang Memenuhi Ketentuan terhadap kinerja di Tahun sebelumnya

IKU	Realisasi 2025	Realisasi 2024	Perbandingan
Persentase fasilitas distribusi Kosmetik yang memenuhi ketentuan	73,92	N/A	Tidak dapat dibandingkan

Indikator Kinerja Utama (IKU) Persentase Fasilitas Distribusi Kosmetik yang Memenuhi Ketentuan pada Tahun 2025 mencapai realisasi sebesar 73,92%. Namun demikian,

indikator ini belum memiliki data realisasi Tahun 2024 dalam format pengukuran yang sebanding, sehingga kinerjanya tidak dapat diperbandingkan dengan tahun sebelumnya.

Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah

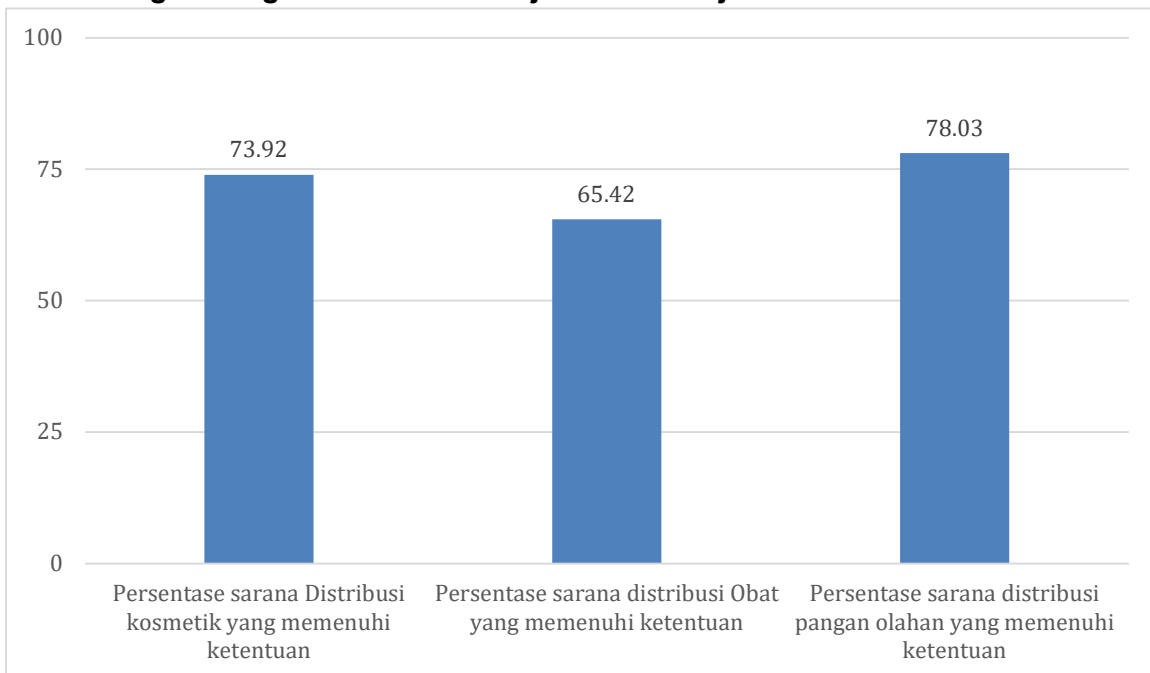
Tabel 46 : Perbandingan realisasi kinerja Persentase Fasilitas Distribusi Kosmetik yang Memenuhi Ketentuan terhadap target Jangka Menengah 2025

IKU	Target Renstra	Realisasi 2025	Capaian (%)	Kategori / Notifikasi Warna
Persentase fasilitas distribusi Kosmetik yang memenuhi ketentuan	80.00	73.92	92.40	Akan Tercapai

Indikator Kinerja Utama (IKU) Persentase Fasilitas Distribusi Kosmetik yang Memenuhi Ketentuan dalam target jangka menengah (Renstra) ditetapkan sebesar 80,00%, sedangkan realisasi Tahun 2025 mencapai 73,92%, dengan tingkat capaian sebesar 92,40% dan berada pada kategori “Akan Tercapai.”

Capaian ini menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan fasilitas distribusi kosmetik telah berjalan cukup baik dan mendekati target Renstra. Dengan penguatan pengawasan berbasis risiko, peningkatan pembinaan teknis, serta konsistensi tindak lanjut atas temuan inspeksi, target jangka menengah diproyeksikan dapat tercapai pada periode berikutnya.

Perbandingan dengan Realisasi Kinerja Satuan Kerja Lain



Grafik 11 : Perbandingan realisasi kinerja Persentase Fasilitas Distribusi Kosmetik yang Memenuhi Ketentuan terhadap Kinerja Satuan Kerja Lain

Indikator Kinerja Utama (IKU) Persentase Fasilitas Distribusi Kosmetik yang Memenuhi Ketentuan pada Tahun 2025 mencapai 73,92%. Jika dibandingkan dengan sektor lain, Persentase Fasilitas Distribusi Obat yang Memenuhi Ketentuan (Deputi I) mencapai 65,42%, sedangkan Persentase Fasilitas Distribusi Pangan Olahan yang Memenuhi Ketentuan (Deputi III) mencapai 78,03%.

Berdasarkan perbandingan tersebut, capaian sektor Kosmetik berada di posisi tengah, lebih tinggi dibandingkan sektor Obat namun masih di bawah sektor Pangan Olahan. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan fasilitas distribusi kosmetik relatif kompetitif, meskipun masih terdapat ruang peningkatan untuk mencapai capaian yang lebih optimal.

Ke depan, penguatan pengawasan distribusi berbasis risiko, peningkatan pembinaan teknis kepada distributor, serta optimalisasi pengendalian mutu dalam rantai pasok perlu terus ditingkatkan guna mendorong peningkatan kepatuhan secara berkelanjutan.

Analisis penyebab kegagalan dan upaya yang dilakukan

Pencapaian indikator Persentase Fasilitas Distribusi Kosmetik yang Memenuhi Ketentuan pada tahun 2025 menunjukkan bahwa dari 4.068 fasilitas distribusi yang diperiksa, sebanyak 3.007 fasilitas dinyatakan memenuhi ketentuan. Meskipun secara kuantitatif jumlah fasilitas yang patuh cukup besar, target kinerja belum tercapai optimal karena masih terdapat proporsi fasilitas yang Tidak Memenuhi Ketentuan (TMK) yang signifikan. Kondisi ini tidak terlepas dari dinamika sektor kosmetik yang pertumbuhannya sangat pesat, sehingga jumlah pelaku usaha distribusi terus meningkat dan tidak seluruhnya diimbangi dengan kesiapan kepatuhan terhadap regulasi.

Secara analitis, salah satu penyebab utama belum optimalnya capaian adalah penajaman analisis risiko oleh petugas UPT dalam menentukan target pemeriksaan, yang menyebabkan pemeriksaan lebih banyak menyasar fasilitas distribusi berisiko tinggi. Pendekatan ini secara strategis tepat dari sisi pengendalian risiko, namun berdampak pada meningkatnya temuan TMK. Di sisi lain, penajaman pengawasan tersebut tidak sepenuhnya diimbangi dengan intensifikasi pembinaan akibat efisiensi dan keterbatasan anggaran, sehingga kapasitas pendampingan kepada pelaku usaha belum optimal. Selain itu, lebih dari 70% fasilitas distribusi kosmetik yang TMK merupakan pengecer skala kecil dengan tingkat kepatuhan rendah, yang menjalankan usaha terutama untuk memenuhi kebutuhan ekonomi sehari-hari sehingga aspek administrasi dan pemenuhan standar distribusi seringkali belum menjadi prioritas.

Sebagai tindak lanjut, Deputi II BPOM telah melakukan monitoring dan evaluasi rutin kepada UPT terkait capaian IKU fasilitas distribusi kosmetik, termasuk pembahasan khusus terhadap wilayah dengan tingkat kepatuhan rendah. Selain itu, dilaksanakan intensifikasi pengawasan kosmetik tematik sebanyak dua kali sebagai bentuk perkuatan pengawasan sektor kosmetik. Meskipun pendekatan ini pada tahun berjalan berdampak pada belum tercapainya target persentase kepatuhan, langkah tersebut diharapkan menjadi instrumen pembinaan jangka menengah dan panjang melalui efek korektif dan preventif kepada pelaku usaha. Ke depan, strategi akan diarahkan pada keseimbangan antara pengawasan berbasis risiko dan peningkatan pembinaan, termasuk penguatan literasi regulasi bagi distributor skala kecil, agar tingkat kepatuhan fasilitas distribusi kosmetik dapat meningkat secara berkelanjutan.

12. Persentase Iklan Obat Bahan Alam yang Memenuhi Ketentuan

Indikator Persentase Iklan Obat Bahan Alam (OBA) yang Memenuhi Ketentuan digunakan untuk mengukur tingkat kepatuhan pelaku usaha terhadap ketentuan periklanan produk OBA yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Pengawasan terhadap iklan OBA bertujuan untuk memastikan bahwa informasi yang disampaikan kepada masyarakat bersifat objektif, tidak menyesatkan, dan tidak mengandung klaim berlebihan yang dapat membahayakan konsumen atau menurunkan kepercayaan terhadap produk legal.

Berikut analisis terhadap realisasi kinerja indikator ini, dan perbandingannya terhadap target tahun berjalan, tahun sebelumnya, target akhir tahun Renstra, dan kinerja satuan kerja lain.

Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Tahun Berjalan

Tabel 47 : Perbandingan realisasi kinerja Persentase Iklan Obat Bahan Alam yang Memenuhi Ketentuan terhadap target 2025

IKU	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kriteria / Notifikasi Warna
Persentase iklan Obat Bahan Alam yang memenuhi ketentuan	66,00	69,75	105,68	Sangat Baik

Indikator Kinerja Utama (IKU) Persentase Iklan Obat Bahan Alam yang Memenuhi Ketentuan pada Tahun 2025 ditetapkan dengan target sebesar 66,00%. Realisasi yang dicapai sampai dengan akhir tahun adalah sebesar 69,75%, sehingga tingkat capaian kinerja mencapai 105,68% dan termasuk dalam kategori “Sangat Baik.”

Capaian ini menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan pelaku usaha dalam menyampaikan informasi dan promosi Obat Bahan Alam sesuai ketentuan regulasi telah melampaui target yang ditetapkan. Hasil tersebut menunjukkan efektivitas pengawasan iklan, baik melalui mekanisme evaluasi pra-tayang maupun pengawasan pasca-tayang, termasuk pada media digital dan platform daring.

Keberhasilan ini didukung oleh penguatan koordinasi lintas sektor dalam pengawasan promosi, peningkatan literasi regulasi kepada pelaku usaha, serta penindakan terhadap iklan yang tidak sesuai ketentuan. Upaya tersebut berkontribusi dalam mencegah klaim berlebihan atau menyesatkan yang berpotensi merugikan masyarakat.

Dengan capaian sebesar 105,68%, indikator ini menunjukkan bahwa sistem pengawasan iklan telah berjalan efektif dalam menjaga agar informasi yang diterima masyarakat akurat dan sesuai ketentuan. Ke depan, pengawasan berbasis risiko pada media digital serta

peningkatan kapasitas pengawasan konten promosi perlu terus diperkuat guna menjaga konsistensi kepatuhan dan perlindungan konsumen.

Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Capaian Tahun Sebelumnya

Tabel 48 : Perbandingan realisasi kinerja Persentase Iklan Obat Bahan Alam yang Memenuhi Ketentuan terhadap kinerja di Tahun sebelumnya

IKU	Realisasi 2025	Realisasi 2024	Perbandingan
Persentase iklan Obat Bahan Alam yang memenuhi ketentuan	69,75	N/A	Tidak dapat dibandingkan

Indikator Kinerja Utama (IKU) Persentase Iklan Obat Bahan Alam yang Memenuhi Ketentuan pada Tahun 2025 mencapai realisasi sebesar 69,75%. Namun demikian, indikator ini belum memiliki data realisasi Tahun 2024 dalam format pengukuran yang sebanding, sehingga kinerjanya tidak dapat diperbandingkan dengan tahun sebelumnya.

Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah

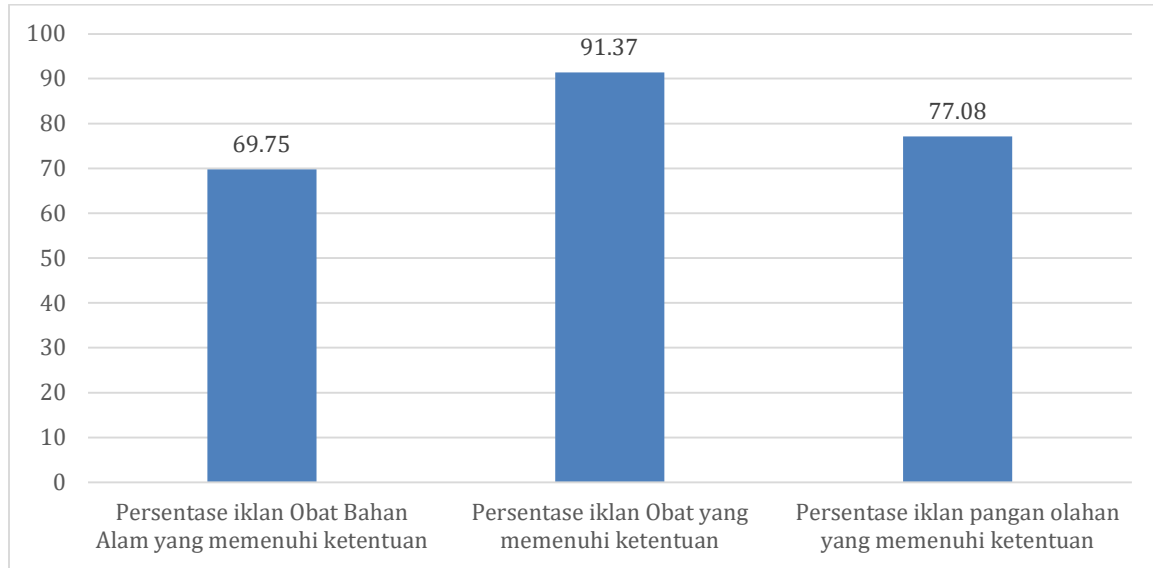
Tabel 49 : Perbandingan realisasi kinerja Persentase Iklan Obat Bahan Alam yang Memenuhi Ketentuan terhadap target Jangka Menengah 2025

IKU	Target Renstra	Realisasi 2025	Capaian (%)	Kategori / Notifikasi Warna
Persentase iklan Obat Bahan Alam yang memenuhi ketentuan	67.00	69.75	104.11	Tercapai / Melampaui

Indikator Kinerja Utama (IKU) Persentase Iklan Obat Bahan Alam yang Memenuhi Ketentuan dalam target jangka menengah (Renstra) ditetapkan sebesar 67,00%, sedangkan realisasi Tahun 2025 mencapai 69,75%, dengan tingkat capaian sebesar 104,11% dan berada pada kategori “Tercapai/Melampaui.”

Capaian ini menunjukkan bahwa pengawasan dan pembinaan terhadap iklan Obat Bahan Alam telah berjalan efektif dan mampu melampaui target Renstra. Hasil tersebut menunjukkan meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dalam menyampaikan informasi promosi yang sesuai ketentuan serta penguatan sistem pengawasan, termasuk pada media digital.

Perbandingan dengan Realisasi Kinerja Satuan Kerja Lain



Grafik 12 : Perbandingan realisasi kinerja Persentase Iklan Obat Bahan Alam yang Memenuhi Ketentuan terhadap Kinerja Satuan Kerja Lain

Indikator Kinerja Utama (IKU) Persentase Iklan Obat Bahan Alam yang Memenuhi Ketentuan pada Tahun 2025 mencapai 69,75%. Jika dibandingkan dengan sektor lain, Persentase Iklan Obat yang Memenuhi Ketentuan (Deputi I) mencapai 91,37%, dan Persentase Iklan Pangan Olahan yang Memenuhi Ketentuan (Deputi III) mencapai 77,08%.

Berdasarkan perbandingan tersebut, capaian iklan Obat Bahan Alam berada di bawah sektor Obat maupun Pangan Olahan. Perbedaan ini dapat dipengaruhi oleh karakteristik promosi produk berbahan alam yang sering menampilkan klaim tradisional atau herbal, serta tingginya dinamika promosi di media digital yang memerlukan pengawasan lebih intensif.

Kondisi ini menjadi dasar untuk memperkuat pembinaan pelaku usaha terkait ketentuan klaim dan promosi, meningkatkan literasi regulasi, serta mengoptimalkan pengawasan berbasis risiko agar tingkat kepatuhan iklan Obat Bahan Alam dapat meningkat dan lebih kompetitif dibandingkan sektor lainnya.

Analisis penyebab keberhasilan

Pencapaian indikator Persentase Iklan Obat Bahan Alam yang Memenuhi Ketentuan pada tahun 2025 menunjukkan bahwa dari 6.262 iklan yang diperiksa, sebanyak 4.369 iklan dinyatakan memenuhi ketentuan. Capaian ini menunjukkan adanya peningkatan kepatuhan pelaku usaha dalam menyampaikan informasi produk sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, khususnya terkait klaim khasiat, informasi komposisi, serta larangan penggunaan klaim yang menyesatkan atau berlebihan. Tingginya jumlah iklan yang memenuhi ketentuan menunjukkan bahwa upaya pengawasan dan pembinaan yang dilakukan telah memberikan dampak positif terhadap perilaku promosi pelaku usaha Obat Bahan Alam (OBA).

Keberhasilan ini didukung oleh penerapan pengawasan iklan berbasis risiko dan berbasis kanal, termasuk pemantauan aktif pada media digital dan platform e-commerce yang menjadi media promosi utama OBA. Selain itu, koordinasi lintas sektor dengan Kementerian Komunikasi dan Digital, platform digital, serta asosiasi pelaku usaha turut mempercepat tindak lanjut terhadap iklan yang tidak memenuhi ketentuan. Pendekatan kolaboratif ini meningkatkan efektivitas koreksi konten promosi dan mendorong kepatuhan secara lebih luas.

Namun demikian, pengawasan iklan OBA menghadapi tantangan yang cukup kompleks. Pertama, sebagian pelaku usaha, khususnya UMKM, masih cenderung melakukan **klaim berlebihan** karena dianggap mampu meningkatkan penjualan, dengan pola pikir “lebih baik meminta maaf daripada izin” yang menyulitkan upaya pencegahan dan penegakan regulasi. Kedua, media penyiaran lokal—terutama radio—sangat bergantung pada pendapatan iklan, termasuk iklan OBA. Kondisi ekonomi penyiaran yang sedang sulit menyebabkan sebagian media cenderung mengabaikan ketentuan demi mempertahankan pendapatan. Tantangan ini menuntut pendekatan pengawasan yang tidak hanya represif, tetapi juga persuasif dan kolaboratif, melalui edukasi berkelanjutan, penguatan literasi regulasi, serta sinergi dengan pemangku kepentingan untuk menciptakan ekosistem promosi OBA yang lebih patuh dan bertanggung jawab.

Upaya yang dilakukan untuk mendukung capaian indikator ini meliputi intensifikasi monitoring iklan secara berkala, pelaksanaan forum komunikasi pengawasan iklan bersama UPT dan pemangku kepentingan, serta pembinaan melalui sosialisasi dan diseminasi ketentuan periklanan OBA kepada pelaku usaha. Selain itu, hasil temuan pengawasan dimanfaatkan sebagai bahan edukasi preventif, termasuk penyampaian contoh kasus pelanggaran dan alternatif perbaikan klaim. Penguatan kapasitas petugas pengawas dalam melakukan penilaian klaim dan interpretasi regulasi juga dilakukan untuk menjaga konsistensi dan kualitas pengawasan. Kombinasi pengawasan aktif, pembinaan preventif, dan koordinasi lintas sektor menjadi faktor pendukung utama dalam keberhasilan pencapaian indikator ini.

13. Persentase Iklan Suplemen Kesehatan yang Memenuhi Ketentuan

Indikator Persentase Iklan Suplemen Kesehatan yang Memenuhi Ketentuan merupakan indikator yang bertujuan untuk mengukur tingkat kepatuhan pelaku usaha dalam memasarkan produk suplemen kesehatan sesuai dengan regulasi yang berlaku. Pengawasan terhadap iklan menjadi krusial karena iklan merupakan sarana utama penyampaian informasi kepada konsumen, dan pelanggaran dalam penyampaian pesan promosi dapat menyesatkan masyarakat serta berdampak pada keselamatan dan kepercayaan publik.

Berikut analisis terhadap realisasi kinerja indikator ini, dan perbandingannya terhadap target tahun berjalan, tahun sebelumnya, target akhir tahun Renstra, dan kinerja satuan kerja lain.

Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Tahun Berjalan

Tabel 50 : Perbandingan realisasi kinerja Persentase Iklan Suplemen Kesehatan yang Memenuhi Ketentuan terhadap target 2025

IKU	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kriteria / Notifikasi Warna
Persentase iklan Suplemen Kesehatan yang memenuhi ketentuan	82,00	82,17	100,21	Sangat Baik

Indikator Kinerja Utama (IKU) Persentase Iklan Suplemen Kesehatan yang Memenuhi Ketentuan pada Tahun 2025 ditetapkan dengan target sebesar 82%. Hingga akhir tahun pelaporan, realisasi yang dicapai sebesar 82,17%, sehingga tingkat capaian kinerja mencapai 100,21% dan berada dalam kategori “Sangat Baik.”

Capaian ini menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan pelaku usaha dalam menyampaikan informasi dan klaim produk Suplemen Kesehatan telah sesuai dengan ketentuan regulasi yang berlaku. Meskipun selisih capaian terhadap target relatif tipis, hasil tersebut menunjukkan konsistensi efektivitas pengawasan iklan, baik melalui mekanisme evaluasi pra-tayang maupun pengawasan pasca-tayang, termasuk pada media digital.

Keberhasilan ini didukung oleh penguatan pengawasan berbasis risiko, peningkatan literasi regulasi kepada pelaku usaha, serta koordinasi lintas sektor dalam pengendalian promosi produk. Ke depan, pengawasan terhadap klaim kesehatan di media daring dan platform digital perlu terus diperkuat guna menjaga akurasi informasi serta memastikan perlindungan konsumen secara berkelanjutan.

Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Capaian Tahun Sebelumnya

Tabel 51 : Perbandingan realisasi kinerja Persentase Iklan Suplemen Kesehatan yang Memenuhi Ketentuan terhadap kinerja di Tahun sebelumnya

IKU	Realisasi 2025	Realisasi 2024	Perbandingan
Persentase iklan Suplemen Kesehatan yang memenuhi ketentuan	82,17	N/A	Tidak dapat dibandingkan

Indikator Kinerja Utama (IKU) Persentase Iklan Suplemen Kesehatan yang Memenuhi Ketentuan pada Tahun 2025 mencapai realisasi sebesar 82,17%. Namun demikian,

indikator ini belum memiliki data realisasi Tahun 2024 dalam format pengukuran yang sebanding, sehingga kinerjanya tidak dapat diperbandingkan dengan tahun sebelumnya..

Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah

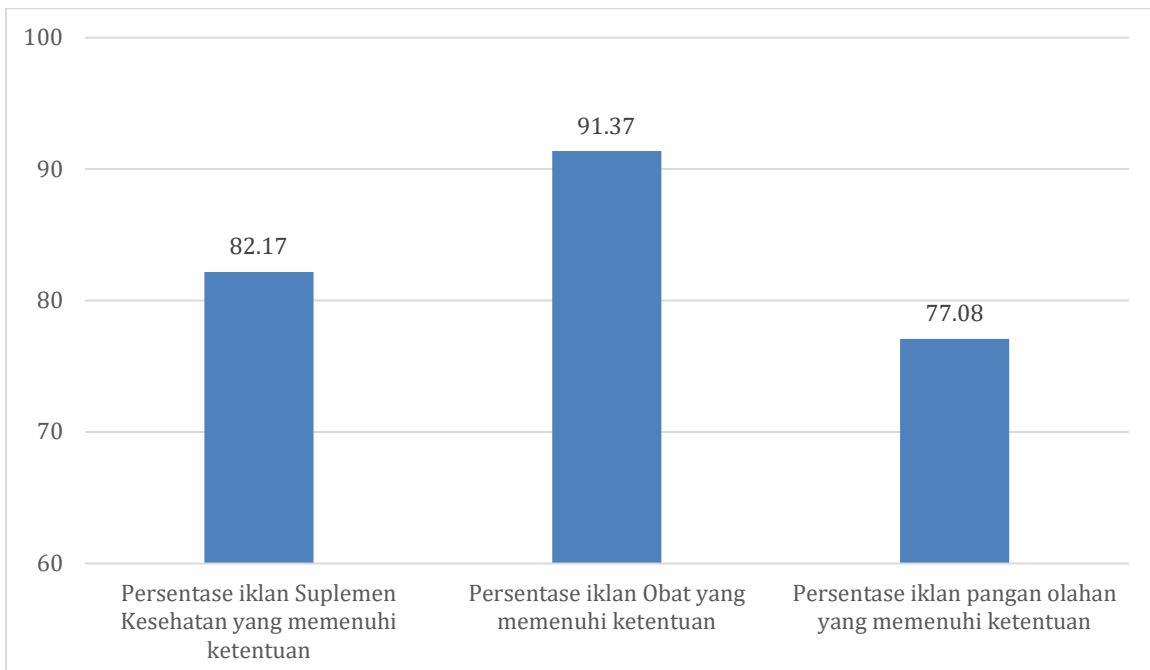
Tabel 52 : Perbandingan realisasi kinerja Persentase Iklan Suplemen Kesehatan yang Memenuhi Ketentuan terhadap target Jangka Menengah 2025

IKU	Target Renstra	Realisasi 2025	Capaian (%)	Kategori / Notifikasi Warna
Persentase iklan Suplemen Kesehatan yang memenuhi ketentuan	83.00	82.17	99.00	Akan Tercapai

Indikator Kinerja Utama (IKU) Persentase Iklan Suplemen Kesehatan yang Memenuhi Ketentuan dalam target jangka menengah (Renstra) ditetapkan sebesar 83,00%, sedangkan realisasi Tahun 2025 mencapai 82,17%, dengan tingkat capaian sebesar 99,00% dan berada pada kategori “Akan Tercapai.”

Capaian ini menunjukkan bahwa pengawasan dan pembinaan terhadap iklan Suplemen Kesehatan telah berjalan efektif dan sangat mendekati target Renstra. Dengan penguatan monitoring promosi, khususnya pada media digital, serta peningkatan literasi regulasi bagi pelaku usaha, target jangka menengah diproyeksikan dapat tercapai secara optimal pada periode berikutnya.

Perbandingan dengan Realisasi Kinerja Satuan Kerja Lain



Grafik 13 : Perbandingan realisasi kinerja Persentase Iklan Suplemen Kesehatan yang Memenuhi Ketentuan terhadap Kinerja Satuan Kerja Lain

Indikator Kinerja Utama (IKU) Persentase Iklan Suplemen Kesehatan yang Memenuhi Ketentuan pada Tahun 2025 mencapai 82,17%. Jika dibandingkan dengan sektor lain, Persentase Iklan Obat yang Memenuhi Ketentuan (Deputi I) mencapai 91,37%, sedangkan Persentase Iklan Pangan Olahan yang Memenuhi Ketentuan (Deputi III) mencapai 77,08%.

Berdasarkan perbandingan tersebut, capaian sektor Suplemen Kesehatan berada di posisi tengah, lebih tinggi dibandingkan sektor Pangan Olahan namun masih di bawah sektor Obat. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan iklan Suplemen Kesehatan relatif baik dan kompetitif, meskipun masih terdapat ruang peningkatan untuk mencapai level kepatuhan seperti pada sektor Obat.

Perbedaan capaian ini dapat dipengaruhi oleh kompleksitas klaim produk dan dinamika promosi di berbagai media. Ke depan, penguatan pembinaan regulasi klaim, intensifikasi monitoring media digital, serta peningkatan literasi pelaku usaha perlu terus ditingkatkan guna mendorong peningkatan tingkat kepatuhan secara berkelanjutan.

Analisis penyebab keberhasilan dan upaya yang dilakukan

Pencapaian indikator Persentase Iklan Suplemen Kesehatan yang Memenuhi Ketentuan pada tahun 2025 menunjukkan hasil yang positif. Dari 2.064 iklan yang diperiksa, sebanyak 1.696 iklan dinyatakan memenuhi ketentuan, yang menggambarkan tingkat kepatuhan yang relatif baik dalam penyampaian informasi promosi suplemen kesehatan. Capaian ini menunjukkan bahwa pelaku usaha semakin memahami batasan klaim, ketentuan pencantuman informasi, serta larangan penggunaan klaim yang bersifat menyesatkan, berlebihan, atau menyerupai klaim obat.

Keberhasilan ini didukung oleh pendekatan pengawasan yang sistematis dan berbasis risiko, terutama pada media digital dan platform e-commerce yang menjadi kanal utama promosi suplemen kesehatan. Selain itu, intensifikasi pemantauan iklan secara berkala dan terstruktur, serta koordinasi lintas sektor dengan Kementerian Komunikasi dan Digital, platform marketplace, dan asosiasi industri, turut mempercepat tindak lanjut terhadap temuan iklan yang tidak memenuhi ketentuan. Respons korektif yang cepat terhadap pelanggaran juga memberikan efek jera sekaligus edukatif bagi pelaku usaha lainnya.

Dalam pengawasan iklan suplemen kesehatan, terdapat sejumlah tantangan yang perlu diantisipasi. Salah satunya adalah praktik promosi oleh industri besar yang menggunakan jasa pihak ketiga, seperti influencer, dalam memasarkan produknya. Dalam banyak kasus, influencer menyampaikan klaim yang berlebihan atau tidak sesuai ketentuan karena keterbatasan literasi terhadap regulasi periklanan suplemen kesehatan. Kondisi ini menyulitkan pengendalian substansi iklan, terutama pada platform digital yang bersifat dinamis dan cepat menyebar.

Selain itu, karakter promosi industri besar yang agresif, intens, dan kreatif juga menjadi tantangan tersendiri. Untuk mengejar momentum pasar, sebagian pelaku usaha tidak selalu mengajukan persetujuan iklan sebelum dipublikasikan, dengan pertimbangan bahwa proses pendaftaran memerlukan waktu. Akibatnya, terdapat iklan yang telah beredar luas namun belum melalui proses evaluasi dan berpotensi tidak memenuhi ketentuan. Situasi ini menuntut pengawasan yang lebih adaptif, responsif, dan kolaboratif guna memastikan kepatuhan tanpa menghambat dinamika industri.

Upaya yang dilakukan untuk mendukung capaian indikator ini meliputi pelaksanaan forum komunikasi pengawasan iklan, sosialisasi dan diseminasi ketentuan klaim suplemen kesehatan, serta pemanfaatan hasil pengawasan sebagai bahan edukasi preventif. Selain itu, dilakukan penguatan kapasitas petugas pengawas dalam melakukan penilaian klaim dan interpretasi regulasi agar konsisten dan objektif. Pembinaan kepada pelaku usaha juga diarahkan untuk meningkatkan kesadaran bahwa kepatuhan terhadap regulasi periklanan bukan hanya kewajiban hukum, tetapi juga bagian dari perlindungan konsumen dan pembangunan reputasi usaha secara berkelanjutan.

14. Persentase Iklan Kosmetik yang Memenuhi Ketentuan

Indikator Persentase Iklan Kosmetik yang Memenuhi Ketentuan merupakan salah satu ukuran penting dalam menilai efektivitas pengawasan promosi produk kosmetik di berbagai kanal, termasuk media cetak, elektronik, dan digital. Indikator ini bertujuan untuk memastikan bahwa informasi yang disampaikan kepada masyarakat terkait produk kosmetik telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, tidak menyesatkan, tidak overclaim, dan tidak menyalahgunakan persepsi publik terhadap fungsi kosmetik.

Berikut analisis terhadap realisasi kinerja indikator ini, dan perbandingannya terhadap target tahun berjalan, tahun sebelumnya, target akhir tahun Renstra, dan kinerja satuan kerja lain.

Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Tahun Berjalan

Tabel 53 : Perbandingan realisasi kinerja Persentase iklan Kosmetik yang memenuhi ketentuan terhadap target 2025

IKU	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kriteria / Notifikasi Warna
Persentase iklan Kosmetik yang memenuhi ketentuan	60,00	60,02	100,03	Sangat Baik

Indikator Kinerja Utama (IKU) Persentase Iklan Kosmetik yang Memenuhi Ketentuan pada Tahun 2025 ditetapkan dengan target sebesar 60%. Realisasi yang dicapai sampai dengan akhir tahun adalah sebesar 60,02%, sehingga tingkat capaian kinerja mencapai 100,03% dan termasuk dalam kategori “Sangat Baik.”

Capaian ini menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan pelaku usaha dalam menyampaikan informasi dan promosi kosmetik sesuai dengan ketentuan regulasi telah tercapai secara optimal. Pengawasan terhadap materi iklan, baik melalui evaluasi sebelum penayangan maupun pengawasan pasca-penayangan, berjalan secara konsisten dan mampu memastikan bahwa klaim yang disampaikan tidak menyesatkan serta sesuai dengan persyaratan keamanan, kemanfaatan, dan mutu.

Meskipun selisih capaian terhadap target relatif tipis, hasil ini menunjukkan stabilitas sistem pengawasan iklan kosmetik dan efektivitas pembinaan kepada pelaku usaha. Ke

depan, penguatan pengawasan pada media digital dan platform daring perlu terus ditingkatkan, mengingat dinamika promosi kosmetik yang semakin berkembang, guna menjaga konsistensi kepatuhan dan perlindungan konsumen secara berkelanjutan.

Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Capaian Tahun Sebelumnya

Tabel 54 : Perbandingan Kinerja Persentase iklan Kosmetik yang memenuhi ketentuan terhadap kinerja di Tahun sebelumnya

IKU	Realisasi 2025	Realisasi 2024	Perbandingan
Persentase iklan Kosmetik yang memenuhi ketentuan	60,02	N/A	Tidak dapat dibandingkan

Indikator Kinerja Utama (IKU) Persentase Iklan Kosmetik yang Memenuhi Ketentuan pada Tahun 2025 mencapai realisasi sebesar 60,02%. Namun demikian, indikator ini belum memiliki data realisasi Tahun 2024 dalam format pengukuran yang sebanding, sehingga tidak dapat dilakukan perbandingan kinerja antar tahun.

Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah

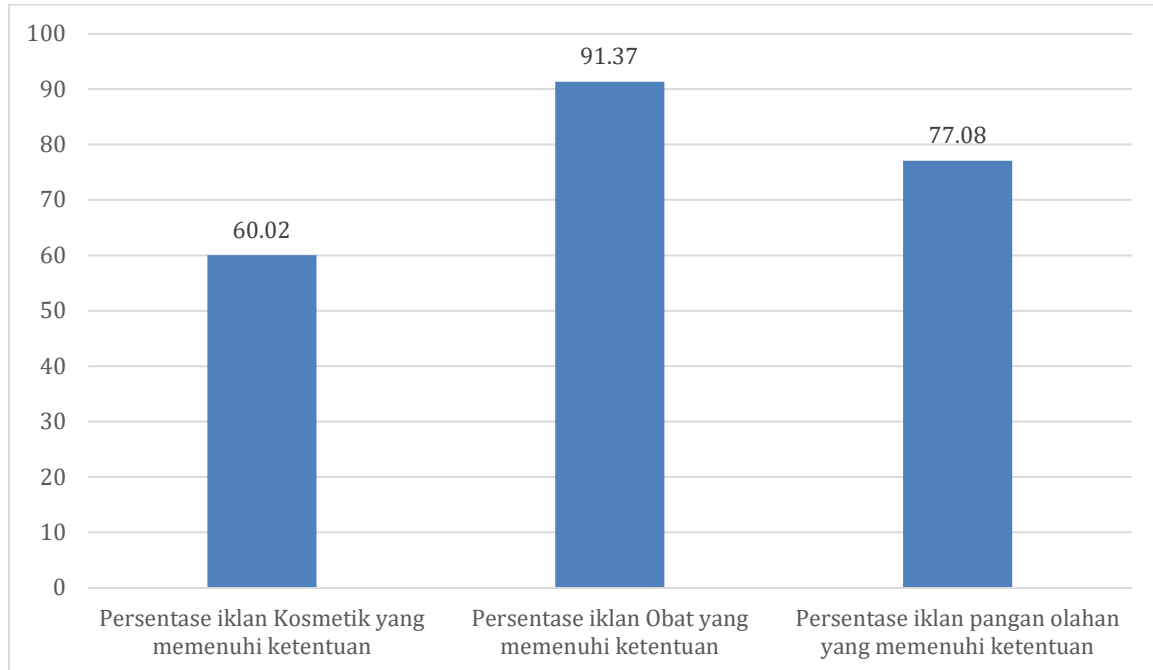
Tabel 55 : Perbandingan realisasi kinerja Persentase iklan Kosmetik yang memenuhi ketentuan terhadap target Jangka Menengah 2025

IKU	Target Renstra	Realisasi 2025	Capaian (%)	Kategori / Notifikasi Warna
Persentase iklan Kosmetik yang memenuhi ketentuan	62.00	60.02	96.81	Akan Tercapai

Indikator Kinerja Utama (IKU) Persentase Iklan Kosmetik yang Memenuhi Ketentuan dalam target jangka menengah (Renstra) ditetapkan sebesar 62,00%, sedangkan realisasi Tahun 2025 mencapai 60,02%, dengan tingkat capaian sebesar 96,81% dan berada pada kategori “Akan Tercapai.”

Capaian ini menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan iklan kosmetik telah berjalan dengan baik dan mendekati target Renstra yang ditetapkan. Dengan penguatan pengawasan iklan, khususnya pada media digital, serta peningkatan pembinaan kepada pelaku usaha terkait ketentuan klaim dan promosi, target jangka menengah diproyeksikan dapat tercapai pada periode berikutnya.

Perbandingan dengan Realisasi Kinerja Satuan Kerja Lain



Grafik 14 : Perbandingan realisasi kinerja Persentase iklan Kosmetik yang memenuhi ketentuan terhadap target jangka Menengah 2025

Indikator Kinerja Utama (IKU) Persentase Iklan Kosmetik yang Memenuhi Ketentuan pada Tahun 2025 mencapai 60,02%. Jika dibandingkan dengan sektor lain, Persentase Iklan Obat yang Memenuhi Ketentuan (Deputi I) mencapai 91,37%, dan Persentase Iklan Pangan Olahan yang Memenuhi Ketentuan (Deputi III) mencapai 77,08%.

Berdasarkan perbandingan tersebut, capaian kepatuhan iklan Kosmetik masih berada di bawah sektor Obat maupun Pangan Olahan. Kondisi ini dapat dipengaruhi oleh tingginya dinamika promosi kosmetik di media digital, penggunaan klaim estetika yang variatif, serta tren pemasaran berbasis influencer yang berkembang pesat.

Hal ini menjadi perhatian untuk memperkuat pengawasan promosi digital, meningkatkan pembinaan terkait klaim kosmetik, serta mendorong literasi regulasi kepada pelaku usaha dan pelaku promosi agar tingkat kepatuhan iklan Kosmetik dapat meningkat secara berkelanjutan.

Analisis penyebab keberhasilan dan upaya yang dilakukan

Pencapaian indikator Persentase Iklan Kosmetik yang Memenuhi Ketentuan pada tahun 2025 menunjukkan bahwa dari 17.062 iklan yang diperiksa, sebanyak 10.241 iklan dinyatakan memenuhi ketentuan. Capaian ini menggambarkan bahwa meskipun dinamika promosi kosmetik sangat tinggi—terutama di media digital dan media sosial—tingkat kepatuhan pelaku usaha terhadap regulasi periklanan menunjukkan tren yang cukup baik. Hal ini menjadi indikator bahwa pengawasan dan pembinaan yang dilakukan telah memberikan dampak positif dalam mendorong periklanan kosmetik yang lebih bertanggung jawab dan sesuai ketentuan.

Keberhasilan ini didukung oleh intensifikasi pengawasan iklan kosmetik berbasis risiko, khususnya terhadap produk dengan klaim sensitif seperti klaim mencerahkan, anti-aging, atau klaim fungsional yang berpotensi menyerempet klaim obat. Pemantauan aktif pada platform e-commerce dan media sosial menjadi strategi utama mengingat sebagian besar promosi kosmetik dilakukan melalui kanal digital. Selain itu, sinergi lintas sektor dengan Kementerian Komunikasi dan Digital, platform marketplace, serta pemangku kepentingan lainnya mempercepat proses penurunan (*take down*) iklan yang tidak memenuhi ketentuan.

Upaya yang dilakukan untuk mendukung pencapaian indikator ini meliputi pelaksanaan forum komunikasi pengawasan iklan bersama UPT, sosialisasi ketentuan klaim dan penandaan kosmetik kepada pelaku usaha, serta penyusunan materi edukasi berupa infografis dan video terkait batasan klaim kosmetik. Hasil temuan pengawasan juga dimanfaatkan sebagai bahan pembelajaran preventif, dengan penyampaian contoh pelanggaran dan alternatif perbaikan klaim. Di samping itu, penguatan kapasitas petugas pengawas dalam melakukan penilaian klaim dan interpretasi regulasi terus dilakukan guna menjaga konsistensi dan kualitas pengawasan. Melalui kombinasi pengawasan aktif, pembinaan preventif, dan koordinasi lintas sektor, tingkat kepatuhan iklan kosmetik dapat terus ditingkatkan secara berkelanjutan.

15. Persentase kabupaten/kota yang melaksanakan Program Sadar Jamu Aman

Indikator Kinerja Utama (IKU) Persentase Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Program Sadar Jamu Aman pada Tahun 2025 ditetapkan dengan target sebesar 2%. Namun demikian, hingga akhir tahun pelaksanaan tidak terdapat realisasi capaian pada indikator ini.

Tidak tercapainya target tersebut disebabkan oleh pemblokiran anggaran pada seluruh kegiatan yang mendukung implementasi Program Sadar Jamu Aman, sehingga kegiatan sosialisasi, pembinaan, dan koordinasi dengan pemerintah daerah tidak dapat dilaksanakan sesuai rencana. Kondisi ini berada di luar kendali teknis pelaksanaan program dan berdampak langsung pada tidak terlaksananya aktivitas pendukung indikator.

Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Tahun Berjalan

Tabel 56 : Perbandingan realisasi kinerja Persentase kabupaten/kota yang melaksanakan Program Sadar Jamu Aman terhadap target 2025

IKU	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kriteria / Notifikasi Warna
Persentase kabupaten/kota yang melaksanakan Program Sadar Jamu Aman	2	N/A	N/A	N/A

Pada Tahun 2025, indikator kinerja Persentase kabupaten/kota yang melaksanakan Program Sadar Jamu Aman tidak memiliki realisasi. Hal ini disebabkan oleh pemblokiran seluruh anggaran yang dialokasikan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan pada indikator tersebut.

Dengan tidak adanya realisasi kinerja pada tahun berjalan, maka capaian indikator ini tidak dapat diperbandingkan dengan capaian tahun sebelumnya, tidak dapat dianalisis terhadap target jangka menengah (Renstra), serta tidak dapat dibandingkan dengan kinerja satuan kerja lainnya.

Analisis Kegagalan Pencapaian Target Kinerja dan Upaya Perbaikan

Indikator Kinerja Utama (IKU) Persentase Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Program Sadar Jamu Aman pada Tahun 2025 tidak mencapai target yang telah ditetapkan. Target sebesar 2% tidak terealisasi sama sekali (0%) karena seluruh kegiatan yang dirancang untuk mendukung implementasi program tersebut mengalami pemblokiran anggaran. Kondisi ini menyebabkan tidak terlaksananya kegiatan sosialisasi, pembinaan, koordinasi lintas sektor, serta fasilitasi daerah yang menjadi prasyarat pencapaian indikator.

Kegagalan pencapaian target ini bukan disebabkan oleh rendahnya komitmen pelaksanaan program, melainkan oleh faktor eksternal berupa keterbatasan anggaran dan kebijakan pemblokiran anggaran yang berada di luar kendali unit pelaksana. Dengan tidak tersedianya dukungan pembiayaan, seluruh tahapan operasional program tidak dapat dijalankan.

Sebagai upaya mitigasi dan perbaikan ke depan, Deputi II BPOM telah melakukan beberapa langkah strategis, antara lain:

1. Mengintegrasikan materi Program Sadar Jamu Aman dalam kegiatan lain yang tetap berjalan (misalnya kegiatan literasi regulasi dan pembinaan UMKM).
2. Mengoptimalkan pemanfaatan media digital dan platform daring untuk penyebarluasan informasi program secara cost-effective.
3. Mendorong sinergi dengan pemerintah daerah dan UPT BPOM agar pelaksanaan program dapat diinisiasi melalui dukungan sumber daya daerah.
4. Mengusulkan kembali penganggaran program pada perencanaan tahun berikutnya dengan skema pembiayaan yang lebih adaptif.

Ke depan, strategi implementasi program akan diarahkan pada pendekatan kolaboratif dan berbasis kemitraan guna meminimalkan ketergantungan pada satu sumber pendanaan serta memastikan keberlanjutan Program Sadar Jamu Aman sebagai bagian dari penguatan literasi dan perlindungan masyarakat.

16. Indeks Kesadaran Masyarakat terhadap Obat Bahan Alam, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang aman dan bermutu

Indikator Indeks Kesadaran Masyarakat terhadap Obat Bahan Alam, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik yang Aman dan Bermutu merupakan salah satu ukuran outcome strategis yang menggambarkan tingkat pemahaman, sikap, dan perilaku masyarakat dalam memilih serta menggunakan produk yang memenuhi persyaratan

keamanan, mutu, dan kemanfaatan. Indikator ini tidak hanya merefleksikan efektivitas kegiatan komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) yang dilaksanakan oleh Deputy II BPOM, tetapi juga menjadi tolok ukur keberhasilan penguatan literasi regulasi dan perlindungan konsumen secara berkelanjutan.

Realisasi capaian pada indikator ini memberikan gambaran mengenai sejauh mana intervensi kebijakan, sosialisasi regulasi, pengawasan, serta kolaborasi lintas sektor mampu meningkatkan kesadaran publik. Dengan meningkatnya indeks kesadaran masyarakat, diharapkan terjadi perubahan perilaku yang lebih kritis dan selektif dalam memilih produk, sehingga risiko penggunaan produk yang tidak memenuhi ketentuan dapat ditekan secara signifikan. Oleh karena itu, capaian indikator ini menjadi refleksi penting atas dampak nyata pelaksanaan program pengawasan dan pemberdayaan masyarakat di bidang Obat Bahan Alam, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik.

Berikut analisis terhadap realisasi kinerja indikator ini, dan perbandingannya terhadap target tahun berjalan, tahun sebelumnya, target akhir tahun Renstra, dan kinerja satuan kerja lain.

Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Tahun Berjalan

Tabel 57 : Perbandingan realisasi kinerja Indeks Kesadaran Masyarakat terhadap Obat Bahan Alam, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang aman dan bermutu terhadap target 2025

IKU	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kriteria / Notifikasi Warna
Indeks Kesadaran Masyarakat terhadap Obat Bahan Alam, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang aman dan bermutu	86.87	88.89	102.33	Sangat baik

Indikator Kinerja Utama (IKU) Indeks Kesadaran Masyarakat terhadap Obat Bahan Alam, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik yang Aman dan Bermutu pada Tahun 2025 ditetapkan dengan target sebesar 86,87. Berdasarkan hasil pengukuran yang dilakukan, realisasi indeks yang dicapai adalah sebesar 88,89, sehingga tingkat capaian kinerja mencapai 102,33% dan termasuk dalam kategori “Sangat Baik.”

Capaian ini menunjukkan bahwa tingkat pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya memilih dan menggunakan produk yang aman dan bermutu mengalami peningkatan dibandingkan target yang ditetapkan. Hasil tersebut menunjukkan efektivitas pelaksanaan kegiatan komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE), sosialisasi regulasi, serta pemanfaatan berbagai media komunikasi, termasuk media digital, dalam menjangkau masyarakat secara lebih luas.

Keberhasilan ini juga didukung oleh sinergi dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah daerah, organisasi masyarakat, pelaku usaha, serta tokoh masyarakat dalam menyampaikan pesan edukatif terkait keamanan dan mutu produk.

Peningkatan literasi masyarakat berkontribusi terhadap perilaku konsumsi yang lebih bijak dan berorientasi pada aspek keamanan.

Dengan capaian sebesar 102,33%, indikator ini menunjukkan bahwa strategi peningkatan kesadaran publik berjalan efektif dan memberikan dampak positif. Ke depan, pendekatan edukasi yang lebih adaptif terhadap perkembangan media dan karakteristik kelompok sasaran perlu terus diperkuat guna menjaga tren peningkatan kesadaran masyarakat secara berkelanjutan.

Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Capaian Tahun Sebelumnya

Tabel 58 : Perbandingan Kinerja Indeks Kesadaran Masyarakat terhadap Obat Bahan Alam, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang aman dan bermutu terhadap kinerja di Tahun sebelumnya

IKU	Realisasi 2025	Realisasi 2024	Perbandingan
Indeks Kesadaran Masyarakat terhadap Obat Bahan Alam, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang aman dan bermutu	88,89	86,71	Lebih tinggi

Indikator Kinerja Utama (IKU) Indeks Kesadaran Masyarakat terhadap Obat Bahan Alam, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik yang Aman dan Bermutu pada Tahun 2025 mencapai 88,89, meningkat dibandingkan realisasi Tahun 2024 sebesar 86,71, atau naik sebesar 2,18 poin.

Peningkatan ini menunjukkan adanya penguatan efektivitas strategi komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE), serta optimalisasi berbagai kanal sosialisasi yang menjangkau masyarakat secara lebih luas. Kenaikan indeks tersebut menunjukkan meningkatnya pemahaman dan kesadaran publik dalam memilih dan menggunakan produk yang aman dan bermutu.

Capaian yang lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya menjadi indikator positif bahwa program literasi dan pengawasan berbasis edukasi memberikan dampak nyata. Ke depan, konsistensi pendekatan edukatif yang adaptif dan berbasis segmentasi sasaran perlu terus diperkuat untuk mempertahankan dan meningkatkan tren kesadaran masyarakat secara berkelanjutan

Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah

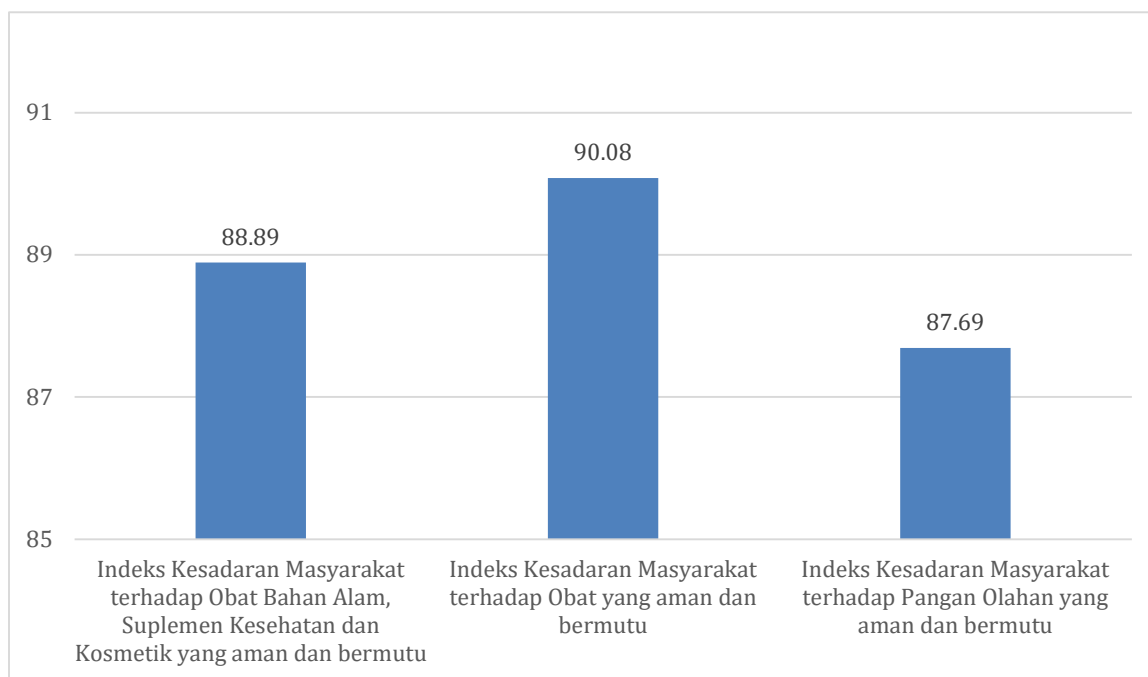
Indikator Kinerja Utama (IKU) Indeks Kesadaran Masyarakat terhadap Obat Bahan Alam, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik yang Aman dan Bermutu dalam target jangka menengah (Renstra) ditetapkan sebesar 87,50, sedangkan realisasi Tahun 2025 mencapai 88,89, dengan tingkat capaian sebesar 101,59% dan berada pada kategori “Tercapai/Melampaui.”

Tabel 59 : Perbandingan realisasi kinerja Indeks Kesadaran Masyarakat terhadap Obat Bahan Alam, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang aman dan bermutu terhadap target Jangka Menengah 2025

IKU	Target Renstra	Realisasi 2025	Capaian (%)	Kategori / Notifikasi Warna
Indeks Kesadaran Masyarakat terhadap Obat Bahan Alam, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang aman dan bermutu	87.50	88.89	101.59	Tercapai / Melampaui

Capaian ini menunjukkan bahwa upaya peningkatan literasi dan edukasi masyarakat telah berjalan efektif dan mampu melampaui target jangka menengah yang ditetapkan. Hasil tersebut menunjukkan meningkatnya kesadaran publik dalam memilih dan menggunakan produk yang aman dan bermutu secara lebih bijak dan bertanggung jawab.

Perbandingan dengan Realisasi Kinerja Satuan Kerja Lain



Grafik 15 : Perbandingan realisasi kinerja Indeks Kesadaran Masyarakat terhadap Kinerja Satuan Kerja Lain

Indikator Kinerja Utama (IKU) Indeks Kesadaran Masyarakat terhadap Obat Bahan Alam, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik yang Aman dan Bermutu pada Tahun 2025 menunjukkan bahwa Deputi II BPOM memperoleh nilai 88,89. Jika dibandingkan dengan

satuan kerja lain, Deputy I BPOM memperoleh nilai 90,08, sedangkan Deputy III BPOM memperoleh nilai 87,69.

Berdasarkan perbandingan tersebut, capaian Deputy II berada di posisi tengah, lebih tinggi dibandingkan Deputy III dan sedikit di bawah Deputy I. Selisih nilai antar deputy relatif kecil, yang menunjukkan bahwa tingkat kesadaran masyarakat terhadap produk yang diawasi BPOM secara umum berada pada level yang baik dan relatif merata.

Analisis penyebab keberhasilan dan upaya yang dilakukan

Keberhasilan pencapaian Indeks Kesadaran Masyarakat pada lingkup Deputy II BPOM, khususnya terhadap Obat Bahan Alam, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik yang mencapai nilai 88,89 (kategori Baik) dan melampaui target, didukung oleh konsistensi pelaksanaan strategi Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) yang terarah dan terintegrasi. Peningkatan capaian pada dimensi pengetahuan yang berada pada kategori sangat baik menunjukkan efektivitas penyampaian informasi regulasi dan aspek keamanan produk kepada masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa pendekatan edukatif yang dilakukan Deputy II telah mampu memperluas pemahaman publik mengenai pentingnya memastikan kemasan, label, izin edar, dan kedaluwarsa (Cek KLIK) sebelum menggunakan produk.

Dari sisi implementasi, Deputy II BPOM secara aktif melaksanakan berbagai kegiatan KIE berbasis segmentasi sasaran, baik melalui sosialisasi tatap muka, webinar, kolaborasi lintas sektor, maupun optimalisasi kanal digital dan media sosial resmi. Penguatan literasi regulasi juga dilakukan melalui pengembangan konten edukatif yang lebih komunikatif, pemanfaatan subsite layanan informasi, serta integrasi pesan pengawasan dalam setiap kegiatan pemberdayaan masyarakat dan pelaku usaha. Selain itu, sinergi dengan UPT BPOM di daerah turut memperluas jangkauan edukasi hingga tingkat kabupaten/kota, sehingga pesan keamanan dan mutu produk dapat diterima secara lebih merata.

Upaya lain yang mendukung keberhasilan ini adalah penguatan tata kelola program KIE melalui penetapan indikator kinerja yang terukur, monitoring dan evaluasi berkala, serta pemanfaatan hasil survei sebagai dasar perbaikan strategi komunikasi. Deputy II juga mendorong transformasi digital edukasi publik melalui pemanfaatan platform daring dan aplikasi pendukung, sehingga akses informasi menjadi lebih mudah, cepat, dan responsif. Dengan pendekatan yang sistematis, kolaboratif, dan adaptif tersebut, Deputy II BPOM berhasil menjaga tren peningkatan kesadaran masyarakat serta memperkuat peran masyarakat sebagai lini pertama dalam pengawasan produk obat bahan alam, suplemen kesehatan, dan kosmetik yang aman dan bermutu.

17. Persentase inovasi obat bahan alam yang didampingi sesuai standar

Capaian kinerja pada indikator Persentase Inovasi Obat Bahan Alam yang Didampingi Sesuai Standar pada Tahun 2025 tidak dapat direalisasikan dan disajikan. Kondisi ini disebabkan oleh pemblokiran anggaran pada seluruh kegiatan yang dilaksanakan oleh Direktorat Pengawasan Obat Tradisional dan Kosmetik (Ditwas OTSK), yang merupakan salah satu unit utama penopang indikator tersebut. Secara desain kinerja, pencapaian indikator ini seharusnya didukung secara sinergis oleh dua unit kerja, yaitu Direktorat Registrasi OTSKK dan Direktorat Pengawasan OTSK, sehingga hasil pendampingan inovasi dapat terukur secara komprehensif dari hulu hingga hilir.

Meskipun Direktorat Registrasi OTSKK tetap melaksanakan sebagian fungsi pendampingan sesuai kewenangannya, capaian yang dihasilkan tidak dapat digunakan sebagai representasi utuh kinerja Deputy II BPOM pada indikator ini. Hal tersebut karena komponen pengawalan teknis, verifikasi pemenuhan standar, serta monitoring implementasi inovasi yang menjadi domain Ditwas OTSK tidak dapat berjalan akibat blokir anggaran. Dengan tidak berfungsinya salah satu pilar utama pendukung indikator, maka pengukuran capaian menjadi tidak valid dan tidak memenuhi prinsip akuntabilitas pengukuran kinerja.

Oleh karena itu, pada Tahun 2025 indikator ini dinyatakan tidak dapat disajikan (*not measurable*) bukan karena kegagalan substansi pendampingan inovasi, melainkan akibat faktor eksternal berupa keterbatasan anggaran yang berdampak langsung pada tidak terlaksananya kegiatan pengawasan dan pendampingan terintegrasi. Ke depan, diperlukan penguatan perencanaan dan mitigasi risiko penganggaran, termasuk skema prioritas atau alternatif pendanaan, agar indikator strategis yang bersifat lintas unit tidak terdampak secara signifikan oleh kebijakan pemblokiran anggaran.

Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Tahun Berjalan

Tabel 60 : Perbandingan realisasi kinerja Persentase inovasi obat bahan alam yang didampingi sesuai standar terhadap target 2025

IKU	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kriteria / Notifikasi Warna
Persentase inovasi obat bahan alam yang didampingi sesuai standar	82,1	N/A	N/A	N/A

Analisis penyebab kegagalan dan upaya yang dilakukan

Pelaksanaan indikator Persentase Inovasi Obat Bahan Alam yang Didampingi Sesuai Standar pada Tahun 2025 menghadapi dinamika pelaksanaan akibat pemblokiran seluruh anggaran kegiatan penopang pada Direktorat Pengawasan OTSK. Kondisi ini menyebabkan sebagian tahapan pengawalan yang seharusnya dilaksanakan secara terintegrasi tidak dapat berjalan optimal. Namun demikian, Direktorat Registrasi OTSKK

masih memiliki ketersediaan anggaran sehingga tetap dapat melaksanakan kegiatan pendampingan dalam ruang lingkup kewenangannya, khususnya pada aspek regulatori dan kesiapan dokumen menuju tahapan registrasi.

Pendampingan yang tetap berjalan difokuskan pada penguatan penyusunan protokol, konsultasi teknis, serta pembinaan terkait pemenuhan ketentuan uji praklinik dan uji klinik. Kegiatan dilakukan melalui program PEDULI Riset (PENdampingan Uji Praklinik dan uji kLINik kepada industRI serta peneliTi) dan ProAKSI BERPADU, baik secara luring maupun daring dengan memanfaatkan platform yang stabil untuk memperluas jangkauan peneliti dan pelaku usaha. Layanan konsultasi juga tetap dioptimalkan melalui kanal email, Zoom, dan WhatsApp, sehingga dukungan teknis dapat diberikan secara responsif meskipun terdapat keterbatasan pada aspek pengawasan lapangan.

Monitoring dan evaluasi tetap dilakukan secara berkala untuk memastikan bahwa proses pendampingan yang dapat dijalankan tetap memenuhi standar dan terdokumentasi dengan baik. Meskipun capaian indikator tidak sepenuhnya merepresentasikan dukungan dua unit kerja sebagaimana desain awal, keberlanjutan pendampingan oleh Direktorat Registrasi OTSKK menunjukkan komitmen Deputy II BPOM dalam menjaga ekosistem inovasi Obat Bahan Alam tetap berjalan. Ke depan, diperlukan penguatan sinergi lintas unit dan mitigasi risiko penganggaran agar pendampingan inovasi dapat kembali dilaksanakan secara komprehensif dari hulu hingga hilir sesuai standar keamanan, mutu, dan kemanfaatan.

18. Persentase Persentase UMKM yang menerapkan standar keamanan dan mutu produksi Obat Bahan Alam dan Kosmetik

Indikator Persentase UMKM yang Menerapkan Standar Keamanan dan Mutu Produksi Obat Bahan Alam dan Kosmetik merupakan indikator strategis yang menggambarkan tingkat kepatuhan serta kapasitas pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah dalam memenuhi ketentuan Cara Pembuatan Obat Tradisional yang Baik (CPOTB) dan Cara Pembuatan Kosmetika yang Baik (CPKB). Indikator ini menjadi tolok ukur penting dalam menilai efektivitas program pembinaan, pendampingan teknis, serta fasilitasi regulasi yang dilaksanakan oleh Deputy II BPOM dalam mendorong peningkatan kualitas produksi di tingkat UMKM.

Realisasi capaian pada indikator ini tidak hanya menunjukkan tingkat kepatuhan administratif, tetapi juga menunjukkan adanya perbaikan sistem manajemen mutu, pengendalian proses produksi, serta komitmen UMKM dalam menjamin keamanan dan mutu produk yang beredar. Dengan meningkatnya jumlah UMKM yang menerapkan standar, diharapkan tercipta ekosistem industri Obat Bahan Alam dan Kosmetik yang lebih kompetitif, berdaya saing, dan berorientasi pada perlindungan konsumen. Oleh karena itu, capaian indikator ini menjadi bagian penting dalam mengukur dampak nyata intervensi pengawasan dan pemberdayaan yang dilakukan sepanjang tahun berjalan.

Berikut analisis terhadap realisasi kinerja indikator ini, dan perbandingannya terhadap target tahun berjalan, tahun sebelumnya, target akhir tahun Renstra, dan kinerja satuan kerja lain.

Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Tahun Berjalan

Tabel 61 : Perbandingan realisasi kinerja Persentase UMKM yang menerapkan standar keamanan dan mutu produksi Obat Bahan Alam dan Kosmetik terhadap target 2025

IKU	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kriteria / Notifikasi Warna
Persentase UMKM yang menerapkan standar keamanan dan mutu produksi Obat Bahan Alam dan Kosmetik	60	64.44	107.40	Sangat baik

Indikator Kinerja Utama (IKU) Persentase UMKM yang Menerapkan Standar Keamanan dan Mutu Produksi Obat Bahan Alam dan Kosmetik pada Tahun 2025 ditetapkan dengan target sebesar 60%. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja sampai dengan akhir tahun, realisasi yang dicapai adalah sebesar 64,44%, sehingga tingkat capaian kinerja mencapai 107,40% dan termasuk dalam kategori “Sangat Baik.”

Capaian ini menunjukkan bahwa upaya pembinaan dan pemberdayaan UMKM dalam penerapan standar keamanan dan mutu produksi berjalan secara efektif dan mampu melampaui target yang ditetapkan. Hasil tersebut menunjukkan meningkatnya kesadaran dan komitmen UMKM dalam memenuhi ketentuan teknis, termasuk penerapan Cara Pembuatan Obat Tradisional yang Baik (CPOTB) dan Cara Pembuatan Kosmetik yang Baik (CPKB).

Keberhasilan ini didukung oleh pelaksanaan bimbingan teknis, coaching clinic, pendampingan regulasi, serta fasilitasi sertifikasi yang dilakukan secara berkelanjutan. Pendekatan berbasis pembinaan dan asistensi teknis kepada UMKM terbukti mampu meningkatkan kapasitas pelaku usaha dalam menerapkan sistem mutu yang sesuai standar.

Dengan capaian sebesar 107,40%, indikator ini menunjukkan kemajuan signifikan dalam penguatan industri UMKM yang berdaya saing dan patuh regulasi. Ke depan, penguatan ekosistem pembinaan, peningkatan akses informasi regulasi, serta sinergi dengan pemerintah daerah dan lembaga pendukung UMKM perlu terus ditingkatkan guna menjaga keberlanjutan peningkatan standar keamanan dan mutu produksi.

Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Capaian Tahun Sebelumnya

Tabel 62 : Perbandingan realisasi kinerja Persentase UMKM yang menerapkan standar keamanan dan mutu produksi Obat Bahan Alam dan Kosmetik terhadap kinerja di Tahun sebelumnya

IKU	Realisasi 2025	Realisasi 2024	Perbandingan
Persentase UMKM yang menerapkan standar keamanan dan mutu produksi Obat Bahan Alam dan Kosmetik	64.44	N/A	Tidak dapat dibandingkan

Indikator Kinerja Utama (IKU) Persentase UMKM yang Menerapkan Standar Keamanan dan Mutu Produksi Obat Bahan Alam dan Kosmetik pada Tahun 2025 mencapai realisasi sebesar 64,44%. Namun demikian, indikator ini belum memiliki data realisasi pada Tahun 2024 dalam format pengukuran yang sebanding, sehingga tidak dapat dilakukan perbandingan kinerja antar tahun.

Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah

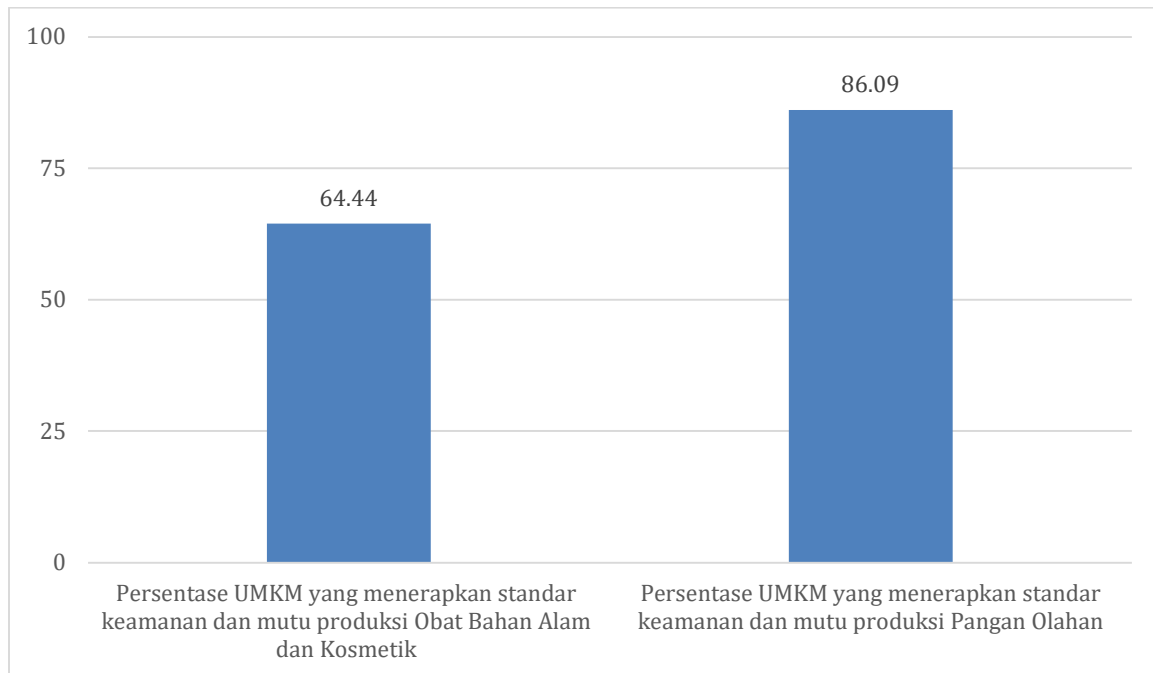
Tabel 63 : Perbandingan realisasi kinerja Persentase UMKM yang menerapkan standar keamanan dan mutu produksi Obat Bahan Alam dan Kosmetik terhadap target Jangka Menengah 2025

IKU	Target Renstra	Realisasi 2025	Capaian (%)	Kategori / Notifikasi Warna
Persentase UMKM yang menerapkan standar keamanan dan mutu produksi Obat Bahan Alam dan Kosmetik	64.00	64.44	100.69	Tercapai / Melampaui

Indikator Kinerja Utama (IKU) Persentase UMKM yang Menerapkan Standar Keamanan dan Mutu Produksi Obat Bahan Alam dan Kosmetik dalam target jangka menengah (Renstra) ditetapkan sebesar 64,00%, sedangkan realisasi Tahun 2025 mencapai 64,44%, dengan tingkat capaian sebesar 100,69% dan berada pada kategori "Tercapai/Melampaui."

Capaian ini menunjukkan bahwa program pembinaan dan pendampingan UMKM telah berjalan efektif dan mampu memenuhi bahkan melampaui target jangka menengah yang ditetapkan. Hasil tersebut menunjukkan meningkatnya kapasitas dan kepatuhan UMKM dalam menerapkan standar keamanan dan mutu produksi secara berkelanjutan.

Perbandingan dengan Realisasi Kinerja Satuan Kerja Lain



Grafik 16 : Perbandingan realisasi kinerja Indeks Pelayanan Publik terhadap Kinerja Satuan Kerja Lain

Indikator Kinerja Utama (IKU) Persentase UMKM yang Menerapkan Standar Keamanan dan Mutu Produksi Obat Bahan Alam dan Kosmetik pada Tahun 2025 mencapai 64,44%. Sementara itu, untuk komoditas Pangan Olahan, persentase UMKM yang menerapkan standar keamanan dan mutu produksi mencapai 86,09%.

Perbandingan ini menunjukkan bahwa tingkat penerapan standar keamanan dan mutu pada UMKM di sektor Obat Bahan Alam dan Kosmetik masih berada di bawah sektor Pangan Olahan. Perbedaan capaian tersebut dapat dipengaruhi oleh kompleksitas persyaratan teknis, kesiapan sarana produksi, serta tingkat kematangan sistem mutu pada masing-masing sektor.

Analisis penyebab keberhasilan

Pencapaian indikator **Persentase UMKM yang Menerapkan Standar Keamanan dan Mutu Produksi Obat Bahan Alam dan Kosmetik** menunjukkan adanya peningkatan komitmen pelaku usaha skala mikro, kecil, dan menengah dalam memenuhi ketentuan Cara Pembuatan Obat Tradisional yang Baik (CPOTB) dan Cara Pembuatan Kosmetika yang Baik (CPKB). Keberhasilan ini didukung oleh pendekatan pembinaan yang lebih terarah dan berbasis kebutuhan, sehingga UMKM tidak hanya memahami kewajiban regulasi, tetapi juga mampu mengimplementasikannya secara bertahap sesuai kapasitas usaha.

Secara analitis, faktor pendukung utama keberhasilan adalah penguatan pendampingan teknis melalui coaching clinic, bimbingan teknis, serta fasilitasi konsultasi regulasi yang dilakukan secara langsung maupun melalui platform digital. Skema kemudahan bagi UMKM, termasuk kebijakan afirmatif dalam proses sertifikasi dan pembiayaan bertahap, turut mendorong peningkatan kepatuhan. Selain itu, sinergi antara pusat dan UPT dalam

melakukan monitoring serta pembinaan lapangan mempercepat penyelesaian tindak lanjut atas temuan ketidaksesuaian.

Upaya yang dilakukan mencakup sosialisasi intensif standar keamanan dan mutu produksi, pelaksanaan desk konsultasi dan pendampingan penyusunan dokumen mutu, serta penguatan kapasitas SDM pelaku UMKM melalui pelatihan penerapan CPOTB dan CPKB. Monitoring dan evaluasi berkala terhadap capaian UMKM binaan juga dilaksanakan untuk memastikan keberlanjutan implementasi standar. Dengan strategi pembinaan yang persuasif, adaptif, dan berkelanjutan, UMKM di sektor Obat Bahan Alam dan Kosmetik semakin terdorong untuk meningkatkan kualitas produksi sekaligus memperkuat daya saing usaha secara berkelanjutan.

19. Persentase Industri Obat Bahan Alam dan Kosmetik yang mencapai tingkat maturitas

Indikator Kinerja Utama (IKU) Persentase Industri Obat Bahan Alam dan Kosmetik yang Mencapai Tingkat Maturitas pada Tahun 2025 tidak terdapat realisasi (realisasi 0%). Hal ini karena seluruh anggaran yang mendukung pelaksanaan kegiatan peningkatan maturitas industri mengalami pemblokiran.

Dengan tidak tersedianya dukungan anggaran, tahapan operasional untuk melakukan penilaian dan pembinaan industri tidak dapat dilaksanakan. Akibatnya, tidak terdapat industri yang dapat diverifikasi mencapai tingkat maturitas pada tahun berjalan. Ketiadaan realisasi ini bukan disebabkan oleh rendahnya komitmen pelaksanaan, melainkan oleh faktor eksternal berupa keterbatasan anggaran yang berada di luar kendali unit pelaksana.

Sebagai langkah mitigasi, Deputy II BPOM tetap melakukan upaya non-anggaran, antara lain melalui integrasi materi peningkatan maturitas dalam kegiatan konsultasi regulasi dan pembinaan daring, optimalisasi pemanfaatan platform digital untuk penyebaran panduan teknis, serta koordinasi dengan UPT dan pemangku kepentingan guna menjaga kesiapan industri. Ke depan, diperlukan penguatan perencanaan dan pengusulan kembali dukungan anggaran agar program peningkatan maturitas industri dapat berjalan secara terstruktur dan berkelanjutan.

Berikut analisis terhadap realisasi kinerja indikator ini, dan perbandingannya terhadap target tahun berjalan, tahun sebelumnya, target akhir tahun Renstra, dan kinerja satuan kerja lain.

Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Tahun Berjalan

Tabel 64 : Perbandingan realisasi kinerja Persentase Industri Obat Bahan Alam dan Kosmetik yang mencapai tingkat maturitas terhadap target 2025

IKU	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kriteria / Notifikasi Warna
Persentase Industri Obat Bahan Alam dan Kosmetik yang mencapai tingkat maturitas	34	N/A	N/A	N/A

Pada Tahun 2025 tidak terdapat realisasi pada indikator kinerja Persentase Industri Obat Bahan Alam dan Kosmetik yang Mencapai Tingkat Maturitas karena seluruh anggaran yang mendukung pelaksanaan kegiatan peningkatan dan asesmen maturitas industri mengalami pemblokiran. Akibatnya, tidak ada kegiatan operasional yang dapat menghasilkan capaian kinerja pada indikator tersebut.

Dengan kondisi tersebut, kinerja indikator ini tidak dapat diperbandingkan dengan capaian tahun sebelumnya, target jangka menengah (Renstra), maupun dengan kinerja satuan kerja lainnya.

20. Indeks Pelayanan Publik di Bidang Pengawasan Obat Bahan Alam, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan

Indikator Indeks Pelayanan Publik (IPP) di Bidang Pengawasan Obat Bahan Alam, Kosmetik, dan Suplemen Kesehatan merupakan ukuran strategis yang menggambarkan kualitas penyelenggaraan layanan publik yang diberikan oleh Deputy II BPOM kepada pelaku usaha dan masyarakat. Indikator ini menunjukkan tingkat profesionalisme, responsivitas, transparansi, serta kemudahan akses layanan dalam mendukung proses perizinan, konsultasi regulasi, dan pengawasan.

Realisasi capaian pada indikator ini menjadi tolok ukur efektivitas reformasi birokrasi dan transformasi layanan yang telah dilakukan, termasuk penguatan standar pelayanan, peningkatan kompetensi SDM, pemanfaatan sistem informasi, serta pengelolaan pengaduan dan konsultasi secara terintegrasi. Dengan capaian IPP yang tinggi, Deputy II BPOM menunjukkan komitmen dalam menghadirkan layanan publik yang prima, akuntabel, dan berorientasi pada kepuasan pengguna layanan, sekaligus mendukung peningkatan kepatuhan dan daya saing pelaku usaha di bidang Obat Bahan Alam, Kosmetik, dan Suplemen Kesehatan.

Berikut analisis terhadap realisasi kinerja indikator ini, dan perbandingannya terhadap target tahun berjalan, tahun sebelumnya, target akhir tahun Renstra, dan kinerja satuan kerja lain.

Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Tahun Berjalan

Tabel 65 : Perbandingan realisasi kinerja Indeks Pelayanan Publik terhadap target 2025

IKU	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kriteria / Notifikasi Warna
Indeks Pelayanan Publik di Bidang Pengawasan Obat Bahan Alam, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan	4,70	4,91	104,47	Sangat Baik

Indikator Kinerja Utama (IKU) Indeks Pelayanan Publik di Bidang Pengawasan Obat Bahan Alam, Kosmetik, dan Suplemen Kesehatan pada Tahun 2025 ditetapkan dengan target sebesar 4,70 (skala 5). Berdasarkan hasil pengukuran, realisasi yang dicapai

adalah sebesar 4,91, sehingga tingkat capaian kinerja mencapai 104,47% dan termasuk dalam kategori “Sangat Baik.”

Capaian ini menunjukkan bahwa kualitas pelayanan publik yang diberikan kepada pelaku usaha dan pemangku kepentingan telah melampaui target yang ditetapkan. Nilai indeks yang tinggi menunjukkan peningkatan pada aspek kecepatan layanan, kejelasan informasi, responsivitas petugas, kemudahan akses layanan, serta kepastian prosedur dan standar pelayanan.

Keberhasilan ini didukung oleh berbagai inovasi layanan, optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi, peningkatan kompetensi frontliner, serta penguatan mekanisme evaluasi dan survei kepuasan pelanggan secara berkala. Transformasi layanan yang semakin adaptif dan berbasis digital turut berkontribusi dalam meningkatkan pengalaman pengguna layanan.

Dengan capaian sebesar 104,47%, indikator ini menegaskan komitmen Deputy II dalam mewujudkan pelayanan publik yang profesional, transparan, dan berorientasi pada kebutuhan pengguna layanan. Ke depan, upaya peningkatan kualitas layanan perlu terus dilakukan secara berkelanjutan guna menjaga kepercayaan publik serta mendukung tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan berorientasi hasil.

Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Capaian Tahun Sebelumnya

Tabel 66 : Perbandingan Kinerja Indeks Pelayanan Publik terhadap kinerja di Tahun sebelumnya

IKU	Realisasi 2025	Realisasi 2024	Perbandingan
Indeks Pelayanan Publik di Bidang Pengawasan Obat Bahan Alam, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan	4,91	4,91	Sama

Indikator Kinerja Utama (IKU) Indeks Pelayanan Publik di Bidang Pengawasan Obat Bahan Alam, Kosmetik, dan Suplemen Kesehatan pada Tahun 2025 mencapai nilai 4,91, sama dengan capaian Tahun 2024 yang juga sebesar 4,91.

Kondisi ini menunjukkan bahwa kualitas pelayanan publik tetap terjaga secara konsisten pada level yang sangat baik. Stabilitas nilai tersebut menunjukkan keberlanjutan standar pelayanan, responsivitas petugas, serta efektivitas inovasi layanan yang telah diimplementasikan.

Meskipun tidak terjadi peningkatan nilai, capaian yang konsisten pada tingkat tinggi menunjukkan bahwa sistem pelayanan telah berjalan optimal. Ke depan, diperlukan inovasi berkelanjutan dan peningkatan kualitas pengalaman pengguna layanan untuk mendorong perbaikan yang lebih progresif serta menciptakan nilai tambah dalam pelayanan publik.

Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah

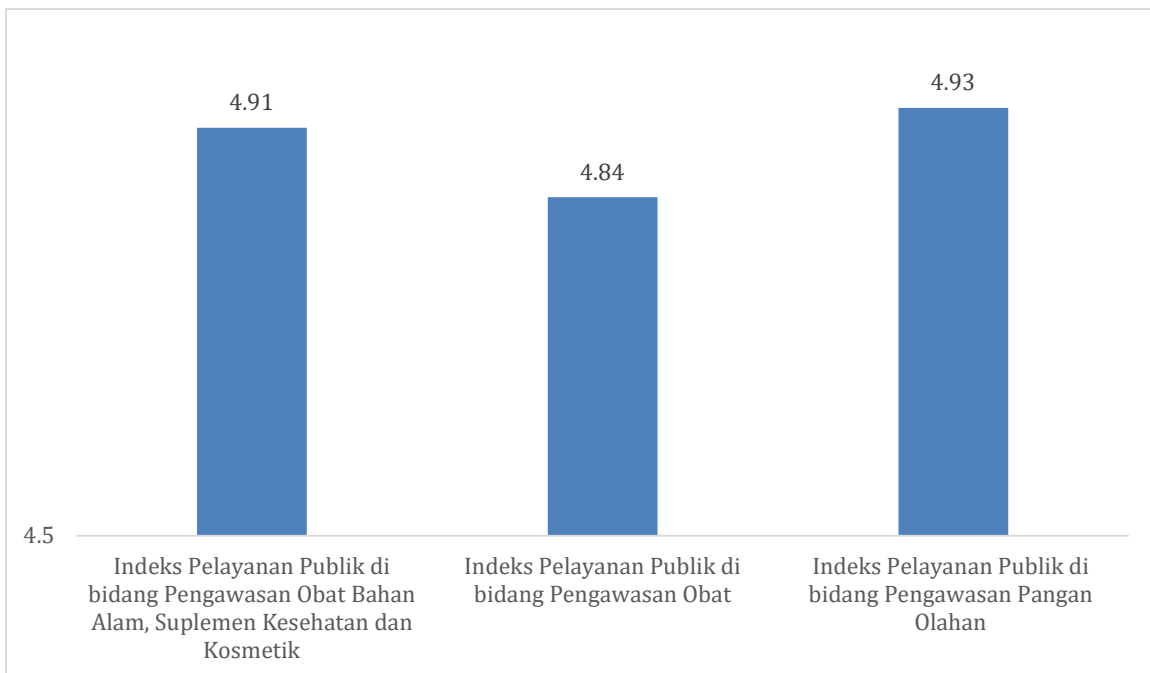
Tabel 67 : Perbandingan realisasi kinerja Indeks Pelayanan Publik terhadap target Jangka Menengah 2025

IKU	Target Renstra	Realisasi 2025	Capaian	Kategori / Notifikasi Warna
Indeks Pelayanan Publik di Bidang Pengawasan Obat Bahan Alam, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan	4.80	4.91	102.25	Tercapai / Melampaui

Indikator Kinerja Utama (IKU) Indeks Pelayanan Publik di Bidang Pengawasan Obat Bahan Alam, Kosmetik, dan Suplemen Kesehatan dalam target jangka menengah (Renstra) ditetapkan sebesar 4,80, sedangkan realisasi Tahun 2025 mencapai 4,91, dengan tingkat capaian sebesar 102,25% dan berada pada kategori “Tercapai/Melampaui.”

Capaian ini menunjukkan bahwa kualitas pelayanan publik tidak hanya memenuhi, tetapi juga melampaui target jangka menengah yang telah ditetapkan. Hal ini menunjukkan efektivitas inovasi layanan, peningkatan responsivitas, serta penguatan standar pelayanan yang berorientasi pada kepuasan pengguna layanan dan perbaikan berkelanjutan.

Perbandingan dengan Realisasi Kinerja Satuan Kerja Lain



Grafik 17 : Perbandingan realisasi kinerja Indeks Pelayanan Publik terhadap Kinerja Satuan Kerja Lain

Indikator Kinerja Utama (IKU) Indeks Pelayanan Publik pada Tahun 2025 menunjukkan bahwa Deputy II BPOM memperoleh nilai 4,91. Jika dibandingkan dengan satuan kerja lain, Deputy I BPOM memperoleh nilai 4,84, sedangkan Deputy III BPOM memperoleh nilai 4,93.

Berdasarkan perbandingan tersebut, capaian Deputy II berada lebih tinggi dibandingkan Deputy I, dan sedikit di bawah Deputy III dengan selisih yang sangat tipis (0,02 poin). Hal ini menunjukkan bahwa kualitas pelayanan publik di lingkungan Deputy II telah berada pada level sangat baik dan kompetitif di antara deputy teknis lainnya.

Posisi capaian yang relatif seimbang antar deputy menunjukkan standar pelayanan yang telah terjaga secara konsisten di lingkungan BPOM. Ke depan, penguatan inovasi layanan, peningkatan responsivitas, serta optimalisasi kanal digital dapat menjadi strategi untuk terus meningkatkan nilai Indeks Pelayanan Publik dan mempertahankan daya saing antar satuan kerja.

Analisis penyebab keberhasilan

Keberhasilan pencapaian Indeks Pelayanan Publik (IPP) di lingkungan Deputy II BPOM menunjukkan komitmen yang kuat dan konsisten dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dan pelaku usaha. Seluruh unit kerja di bawah Deputy II berhasil memperoleh nilai IPP yang tinggi, yang menunjukkan tata kelola pelayanan yang semakin profesional, transparan, dan berorientasi pada kepuasan pengguna layanan. Direktorat Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan memperoleh nilai 4,93; Direktorat Pengawasan Kosmetik 4,83; Direktorat Registrasi 4,95; Direktorat Standardisasi 4,95; serta Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha (PMPU) 4,88. Capaian tersebut menunjukkan bahwa peningkatan kualitas pelayanan telah berlangsung secara merata di seluruh unit, bukan hanya pada satu atau dua direktorat tertentu.

Tingginya nilai IPP tersebut merupakan hasil dari berbagai upaya perbaikan berkelanjutan, antara lain penguatan komitmen pimpinan terhadap budaya pelayanan prima, penyederhanaan dan digitalisasi proses layanan, peningkatan kompetensi petugas pelayanan, serta perluasan akses konsultasi dan informasi regulasi secara hybrid maupun daring. Selain itu, mekanisme pengaduan dan tindak lanjutnya terus diperbaiki agar lebih responsif dan akuntabel, serta inovasi layanan terus dikembangkan untuk menjawab kebutuhan stakeholder yang dinamis. Dengan capaian yang relatif merata dan tinggi di seluruh direktorat, Deputy II menunjukkan bahwa transformasi pelayanan publik telah terintegrasi secara sistemik dan menjadi bagian dari budaya kerja organisasi.

Upaya yang telah dilakukan

Dalam rangka mencapai target indikator Indeks Pelayanan Publik (IPP), Deputy II BPOM telah melaksanakan berbagai upaya strategis yang terintegrasi dan berorientasi pada peningkatan kualitas layanan secara menyeluruh. Penguatan dimulai dari aspek kebijakan pelayanan melalui penyusunan dan pemutakhiran standar pelayanan, maklumat pelayanan, serta penyederhanaan prosedur agar lebih jelas, transparan, dan mudah dipahami oleh masyarakat dan pelaku usaha. Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) dilaksanakan secara berkala dan hasilnya dimanfaatkan sebagai dasar perbaikan

layanan. Komitmen pimpinan juga diperkuat melalui monitoring rutin, evaluasi capaian layanan, serta penetapan tindak lanjut terhadap setiap rekomendasi perbaikan.

Dari sisi profesionalitas SDM, dilakukan peningkatan kompetensi petugas layanan melalui pelatihan pelayanan prima, penguatan etika pelayanan, dan internalisasi nilai BerAKHLAK agar tercipta pelayanan yang responsif, solutif, dan berintegritas. Sarana dan prasarana layanan terus ditingkatkan, baik secara fisik maupun digital, termasuk penyediaan ruang layanan yang representatif, sistem antrean yang tertata, serta aksesibilitas bagi kelompok rentan.

Penguatan Sistem Informasi Pelayanan Publik dilakukan melalui optimalisasi subsite layanan, digitalisasi konsultasi regulasi, serta penyediaan informasi yang transparan terkait persyaratan, prosedur, dan waktu penyelesaian layanan. Selain itu, mekanisme konsultasi dan pengaduan diperluas melalui kanal daring dan hybrid, dengan tindak lanjut yang terdokumentasi dan dimonitor secara berkala. Berbagai inovasi pelayanan berbasis teknologi dan penyederhanaan proses bisnis juga terus dikembangkan untuk meningkatkan efisiensi dan kemudahan akses layanan. Seluruh upaya tersebut dilaksanakan secara konsisten dan berkesinambungan sehingga mendukung tercapainya target IPP yang tinggi dan merata di seluruh unit kerja Deputy II.

21. Nilai Pembangunan Zona Integritas Deputy Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik

Indikator Nilai Pembangunan Zona Integritas (ZI) Deputy Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik merupakan parameter strategis dalam mengukur tingkat kematangan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel. Indikator ini menunjukkan keberhasilan implementasi reformasi birokrasi melalui penguatan manajemen perubahan, penataan tata laksana, penguatan sistem pengawasan, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta penguatan akuntabilitas kinerja.

Realisasi capaian pada indikator ini menunjukkan sejauh mana komitmen dan konsistensi Deputy II BPOM dalam membangun budaya kerja berintegritas serta mencegah praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Nilai yang diperoleh tidak hanya menggambarkan kepatuhan administratif terhadap kriteria penilaian Zona Integritas, tetapi juga menunjukkan transformasi berkelanjutan dalam sistem kerja dan pelayanan yang berorientasi pada kepercayaan publik. Dengan capaian tersebut, pembangunan Zona Integritas menjadi fondasi penting dalam memperkuat legitimasi kelembagaan dan meningkatkan kualitas layanan pengawasan di bidang Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik.

Berikut analisis terhadap realisasi kinerja indikator ini, dan perbandingannya terhadap target tahun berjalan, tahun sebelumnya, target akhir tahun Renstra, dan kinerja satuan kerja lain.

Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Tahun Berjalan

Tabel 68 : Perbandingan realisasi kinerja Nilai Pembangunan Zona Integritas terhadap target 2025

IKU	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kriteria / Notifikasi Warna
Nilai Pembangunan Zona Integritas	89,96	90,15	100,21	Sangat baik

Indikator Kinerja Utama (IKU) Nilai Pembangunan Zona Integritas pada Tahun 2025 ditetapkan dengan target sebesar 89,96%. Berdasarkan hasil evaluasi, realisasi yang dicapai adalah sebesar 90,15%, sehingga tingkat capaian kinerja mencapai 100,21% dan termasuk dalam kategori “Sangat Baik.”

Capaian ini menunjukkan bahwa upaya pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) telah dilaksanakan secara konsisten dan efektif. Peningkatan nilai tersebut menunjukkan penguatan pada komponen pengungkit dan hasil, termasuk manajemen perubahan, penataan tata laksana, penguatan sistem manajemen SDM, penguatan akuntabilitas kinerja, penguatan pengawasan, serta peningkatan kualitas pelayanan publik.

Keberhasilan ini didukung oleh komitmen pimpinan dan seluruh pegawai dalam menerapkan nilai-nilai integritas, transparansi, dan akuntabilitas dalam pelaksanaan tugas. Selain itu, optimalisasi sistem pengendalian intern, pengelolaan risiko, serta implementasi berbagai inovasi layanan turut berkontribusi dalam meningkatkan kualitas tata kelola organisasi.

Dengan capaian sebesar 100,21%, indikator ini menunjukkan bahwa pembangunan Zona Integritas berada pada jalur yang tepat dan berkelanjutan. Ke depan, penguatan budaya integritas dan peningkatan kualitas pelayanan publik perlu terus dijaga untuk memastikan konsistensi capaian serta mendukung terwujudnya birokrasi yang bersih, efektif, dan melayani.

Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Capaian Tahun Sebelumnya

Tabel 69 : Perbandingan Kinerja Nilai Pembangunan Zona Integritas terhadap kinerja di Tahun sebelumnya

IKU	Realisasi 2025	Realisasi 2024	Perbandingan
Nilai Pembangunan Zona Integritas	90,15	89,54	Lebih tinggi

Indikator Kinerja Utama (IKU) Nilai Pembangunan Zona Integritas pada Tahun 2025 mencapai 90,15, meningkat dibandingkan realisasi Tahun 2024 sebesar 89,54, atau naik sebesar 0,61 poin.

Peningkatan ini menunjukkan adanya penguatan implementasi program pembangunan Zona Integritas secara konsisten, baik pada aspek pengungkit maupun hasil. Perbaikan tata kelola, penguatan pengawasan internal, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta internalisasi nilai integritas di lingkungan kerja turut berkontribusi terhadap kenaikan nilai tersebut.

Kondisi ini menunjukkan komitmen berkelanjutan dalam mewujudkan birokrasi yang bersih dan melayani. Ke depan, konsistensi pengendalian, inovasi layanan, serta penguatan budaya integritas perlu terus dijaga agar tren peningkatan nilai Zona Integritas dapat dipertahankan dan ditingkatkan

Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah

Tabel 70 : Perbandingan realisasi kinerja Nilai Pembangunan Zona Integritas terhadap target Jangka Menengah 2025

IKU	Target Renstra	Realisasi 2025	Capaian (%)	Kategori / Notifikasi Warna
Nilai Pembangunan Zona Integritas	90.61	90.15	99.50	Akan Tercapai

Indikator Kinerja Utama (IKU) Nilai Pembangunan Zona Integritas dalam target jangka menengah (Renstra) ditetapkan sebesar 90,61, sedangkan realisasi Tahun 2025 mencapai 90,15, dengan tingkat capaian sebesar 99,50% dan berada pada kategori “Akan Tercapai.”

Capaian ini menunjukkan bahwa pembangunan Zona Integritas telah berjalan secara konsisten dan sangat mendekati target jangka menengah yang ditetapkan. Dengan penguatan komitmen integritas, peningkatan kualitas tata kelola, serta konsistensi

implementasi program reformasi birokrasi, target Renstra diproyeksikan dapat tercapai secara optimal pada periode berikutnya

Perbandingan dengan Realisasi Kinerja Satuan Kerja Lain

Tabel 71 : Perbandingan realisasi kinerja Nilai Pembangunan Zona Integritas terhadap Kinerja Satuan Kerja Lain

IKU	Deputi II BPOM	Deputi I BPOM	Deputi III BPOM
Indeks Pembangunan Zona Integritas	90,15	91,36	90,90

Indikator Kinerja Utama (IKU) Nilai Pembangunan Zona Integritas pada Tahun 2025 menunjukkan bahwa Deputi II BPOM memperoleh nilai 90,15. Jika dibandingkan dengan satuan kerja lain, Deputi I BPOM memperoleh nilai 91,36, sedangkan Deputi III BPOM memperoleh nilai 90,90.

Berdasarkan perbandingan tersebut, capaian Deputi II berada sedikit di bawah Deputi I dan Deputi III. Meskipun demikian, selisih nilai relatif kecil dan seluruh deputi berada pada kategori yang sama, yaitu sangat baik. Hal ini menunjukkan bahwa pembangunan Zona Integritas di lingkungan BPOM secara umum telah berjalan konsisten dan kompetitif antar satuan kerja.

Ke depan, penguatan budaya integritas, peningkatan kualitas pengawasan internal, serta inovasi dalam pelayanan publik perlu terus ditingkatkan agar nilai Zona Integritas Deputi II dapat semakin kompetitif.

Analisis Penyebab Keberhasilan

Keberhasilan pencapaian target Nilai Pembangunan Zona Integritas pada Deputi II BPOM tidak terlepas dari komitmen kuat pimpinan dan seluruh unit kerja dalam mengimplementasikan Reformasi Birokrasi secara terstruktur dan berkelanjutan. Penguatan enam area perubahan ZI — manajemen perubahan, penataan tata laksana, penataan manajemen SDM, penguatan akuntabilitas kinerja, penguatan pengawasan, dan peningkatan kualitas pelayanan publik — telah dijalankan melalui pembentukan tim kerja yang aktif, monitoring berkala, serta pemenuhan eviden yang terdokumentasi dengan baik. Upaya digitalisasi layanan publik, peningkatan transparansi proses bisnis, serta penyederhanaan prosedur pelayanan turut meningkatkan kualitas tata kelola dan kepuasan stakeholder. Hasil konkret dari upaya tersebut terlihat pada capaian Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha (Dit. PMPU) yang berhasil meraih predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) pada tahun ini, yang menjadi indikator kuat keberhasilan internalisasi budaya integritas dan perbaikan sistem kerja.

Selain itu, Direktorat Pengawasan Kosmetik (Ditwas Kosmetik) telah menunjukkan kematangan sistem dan kualitas pelayanan dengan dinyatakan lolos penilaian oleh Tim Penilai Instansi (TPI) untuk memperoleh predikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani

(WBBM). Meskipun pada tahap akhir belum berhasil memperoleh predikat WBBM dari hasil penilaian oleh Tim Kementerian PANRB, capaian tersebut tetap menggambarkan peningkatan signifikan dalam tata kelola pengawasan dan kualitas pelayanan publik. Kegagalan pada tahap akhir lebih disebabkan oleh aspek pemenuhan detail eviden dan konsistensi implementasi yang dinilai masih perlu penguatan pada beberapa indikator penilaian WBBM.

Sebagai tindak lanjut, telah dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap catatan Tim Penilai KemenPANRB, penguatan area pelayanan prima dan survei kepuasan masyarakat, peningkatan budaya anti-gratifikasi, serta penajaman inovasi pelayanan berbasis digital. Secara keseluruhan, capaian WBK dan progres menuju WBBM menunjukkan bahwa pembangunan ZI di lingkungan Deputy II telah berada pada jalur yang tepat dan memiliki fondasi kuat untuk peningkatan predikat pada tahun mendatang.

Upaya-upaya yang dilakukan

Dalam rangka mencapai target Nilai Pembangunan Zona Integritas (ZI) di lingkungan Deputy II BPOM, berbagai upaya strategis telah dilaksanakan secara terencana, sistematis, dan berkelanjutan oleh seluruh unit kerja di Deputy II BPOM. Penguatan komitmen pimpinan menjadi langkah awal melalui penandatanganan pakta integritas, penancangan pembangunan ZI, serta monitoring dan evaluasi rutin terhadap progres pemenuhan enam area perubahan.

Pada aspek manajemen perubahan, dilakukan internalisasi nilai BerAKHLAK, penguatan peran Agen Perubahan, serta kampanye budaya kerja anti-gratifikasi dan anti-korupsi. Pada area penataan tata laksana, Deputy II melakukan penyempurnaan SOP, simplifikasi proses bisnis, serta digitalisasi layanan untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi. Penguatan manajemen SDM dilaksanakan melalui penerapan sistem merit, peningkatan kompetensi pegawai, serta penegakan disiplin berbasis kinerja.

Pada area penguatan akuntabilitas, dilakukan penyelarasan perencanaan dan pelaporan kinerja berbasis SAKIP, optimalisasi monitoring capaian indikator secara triwulanan, serta penguatan revidu berjenjang untuk memastikan konsistensi data dan kualitas pelaporan. Dalam aspek pengawasan, Deputy II memperkuat pengendalian internal melalui pengelolaan risiko, pelaporan LHKPN/LHKASN secara tertib, pengendalian gratifikasi, serta penanganan pengaduan masyarakat secara responsif dan terdokumentasi.

Sementara itu, pada peningkatan kualitas pelayanan publik, dilakukan inovasi layanan berbasis digital, penyediaan sarana prasarana pelayanan yang lebih representatif, penyederhanaan prosedur konsultasi regulasi, serta pelaksanaan survei kepuasan masyarakat sebagai dasar perbaikan berkelanjutan. Seluruh upaya tersebut dilengkapi dengan penyusunan dan pemenuhan eviden yang terdokumentasi secara sistematis, sehingga mendukung peningkatan nilai pembangunan ZI dan memperkuat fondasi menuju predikat WBK/WBBM secara berkelanjutan.

22. Nilai AKIP Deputy Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik

Indikator Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Deputy Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik merupakan ukuran strategis yang menggambarkan tingkat kematangan sistem manajemen kinerja organisasi, mulai dari perencanaan, pengukuran, pelaporan, hingga evaluasi kinerja. Nilai

AKIP menunjukkan sejauh mana prinsip akuntabilitas, efektivitas, dan orientasi hasil telah terintegrasi dalam penyelenggaraan program dan kegiatan Deputy II BPOM.

Realisasi capaian pada indikator ini menjadi tolok ukur kualitas implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), termasuk konsistensi cascading kinerja, keterukuran indikator, pemanfaatan informasi kinerja dalam pengambilan keputusan, serta tindak lanjut atas rekomendasi evaluasi. Dengan capaian Nilai AKIP yang diperoleh, Deputy II BPOM menunjukkan komitmen dalam memperkuat tata kelola berbasis kinerja dan meningkatkan transparansi serta pertanggungjawaban publik dalam pelaksanaan tugas pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik.

Berikut analisis terhadap realisasi kinerja indikator ini, dan perbandingannya terhadap target tahun berjalan, tahun sebelumnya, target akhir tahun Renstra, dan kinerja satuan kerja lain.

Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Tahun Berjalan

Tabel 72 : Perbandingan realisasi kinerja Nilai AKIP terhadap target 2025

IKU	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kriteria / Notifikasi Warna
Nilai AKIP	81,66	79,26	97,06	Baik

Indikator Kinerja Utama (IKU) Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) pada Tahun 2025 ditetapkan dengan target sebesar 81,66%. Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan, realisasi nilai AKIP yang diperoleh adalah sebesar 79,26%, sehingga tingkat capaian kinerja mencapai 97,06% dan berada dalam kategori “Baik.”

Capaian ini menunjukkan bahwa implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) telah berjalan secara cukup efektif, meskipun belum sepenuhnya mencapai target yang ditetapkan. Nilai tersebut menunjukkan bahwa proses perencanaan kinerja, pengukuran, pelaporan, serta evaluasi kinerja telah dilaksanakan sesuai pedoman, namun masih terdapat ruang perbaikan pada aspek kualitas cascading kinerja, konsistensi pengukuran indikator, serta pemanfaatan hasil evaluasi untuk perbaikan berkelanjutan.

Beberapa faktor yang memengaruhi capaian antara lain perlunya penguatan integrasi antara perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja, peningkatan kualitas analisis dalam laporan kinerja, serta optimalisasi pemanfaatan data kinerja sebagai dasar pengambilan keputusan manajerial. Selain itu, konsistensi pelaporan dan ketepatan waktu penyampaian data juga menjadi aspek yang perlu terus diperkuat.

Ke depan, diperlukan penguatan kapasitas pengelola kinerja, peningkatan kualitas monitoring dan evaluasi internal, serta pemanfaatan hasil revidu dan evaluasi sebagai dasar perbaikan sistemik. Langkah tersebut diharapkan dapat meningkatkan kualitas

implementasi SAKIP dan mendorong pencapaian nilai AKIP yang lebih optimal pada periode berikutnya.

Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Capaian Tahun Sebelumnya

Tabel 73 : Perbandingan Kinerja Nilai AKIP terhadap kinerja di Tahun sebelumnya

IKU	Realisasi 2025	Realisasi 2024	Perbandingan
Nilai AKIP	79,26	80,66	Lebih rendah

Indikator Kinerja Utama (IKU) Nilai AKIP pada Tahun 2025 mencapai 79,26, sedangkan pada Tahun 2024 sebesar 80,66, sehingga terjadi penurunan sebesar 1,40 poin dibandingkan tahun sebelumnya.

Penurunan ini terutama dipengaruhi oleh turunnya komponen Capaian Kinerja, sebagaimana tercermin dalam hasil evaluasi SAKIP, meskipun komponen perencanaan dan pengukuran kinerja relatif stabil. Hal ini menunjukkan bahwa secara sistem perencanaan dan pengukuran telah berjalan cukup baik, namun masih terdapat ruang perbaikan pada kualitas analisis capaian, konsistensi data, serta pemanfaatan hasil evaluasi untuk perbaikan kinerja.

Kondisi ini menjadi bahan evaluasi strategis bagi Deputy II untuk memperkuat kualitas analisis dalam pelaporan kinerja, meningkatkan konsistensi integrasi data antar sistem, serta memastikan setiap indikator kinerja memiliki justifikasi target dan tindak lanjut yang terdokumentasi dengan baik. Dengan penguatan tersebut, diharapkan nilai AKIP pada periode berikutnya dapat kembali meningkat dan melampaui capaian tahun sebelumnya.

Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah

Tabel 74 : Perbandingan realisasi kinerja Nilai AKIP terhadap target Jangka Menengah 2025

IKU	Target Renstra	Realisasi 2025	Capaian (%)	Kategori / Notifikasi Warna
Nilai AKIP	83.03	79.26	95.46	Akan Tercapai

Indikator Kinerja Utama (IKU) Nilai AKIP dalam target jangka menengah (Renstra) ditetapkan sebesar 83,03, sedangkan realisasi Tahun 2025 mencapai 79,26, dengan tingkat capaian sebesar 95,46% dan berada pada kategori “Akan Tercapai.”

Capaian ini menunjukkan bahwa implementasi SAKIP telah berjalan dengan baik dan mendekati target jangka menengah yang ditetapkan. Meskipun belum sepenuhnya mencapai target Renstra, tren capaian yang positif mengindikasikan bahwa dengan penguatan kualitas perencanaan, pengukuran, dan pelaporan kinerja secara konsisten, target Nilai AKIP jangka menengah diproyeksikan dapat tercapai pada periode berikutnya

Perbandingan dengan Realisasi Kinerja Satuan Kerja Lain

Tabel 75 : Perbandingan realisasi kinerja Nilai AKIP terhadap Kinerja Satuan Kerja Lain

IKU	Deputi II BPOM	Deputi I BPOM	Deputi III BPOM
Nilai AKIP	79,26	78,23	79,61

Indikator Kinerja Utama (IKU) Nilai AKIP pada Tahun 2025 menunjukkan bahwa Deputi II BPOM memperoleh nilai 79,26. Jika dibandingkan dengan satuan kerja lain, Deputi I BPOM memperoleh nilai 78,23, sedangkan Deputi III BPOM memperoleh nilai 79,61.

Berdasarkan perbandingan tersebut, capaian Deputi II berada lebih tinggi dibandingkan Deputi I dan sedikit di bawah Deputi III dengan selisih yang relatif tipis. Hal ini menunjukkan bahwa implementasi SAKIP di lingkungan Deputi II telah berjalan dengan baik dan kompetitif di antara deputi teknis lainnya.

Analisis Penyebab Kegagalan Pencapaian Target Nilai AKIP

Nilai AKIP Deputi II Tahun 2025 sebesar 79,26 (Predikat BB) mengalami penurunan dibandingkan Tahun 2024 sebesar 80,66 dan belum mencapai target peningkatan nilai yang telah ditetapkan. Penurunan nilai terutama dipengaruhi oleh turunnya komponen Capaian Kinerja serta masih adanya kelemahan pada aspek integrasi sistem manajemen kinerja

Kegagalan pencapaian target Nilai AKIP dipengaruhi oleh beberapa faktor yang saling berkaitan dalam siklus manajemen kinerja. Dari aspek perencanaan, Renstra 2025–2029 belum diformalkan sehingga belum dapat dimanfaatkan secara optimal sebagai dasar penyusunan dokumen kinerja berkelanjutan. Selain itu, kertas kerja penetapan target indikator belum sepenuhnya dilengkapi dengan justifikasi dan analisis yang memadai, sehingga kualitas penetapan target belum sepenuhnya berbasis evidence. Masih terdapat pula indikator pada SK IKU yang belum sepenuhnya selaras dengan PK dan RAPK, yang berpotensi memengaruhi konsistensi cascading kinerja. Pada aspek pengukuran, meskipun SOP pengumpulan data telah tersedia, mekanisme usulan perubahan data dan persetujuan berjenjang belum diatur secara komprehensif. Ketidakkonsistenan penyajian data realisasi antara dokumen pelaporan dan Aplikasi SIMETRIS juga berdampak pada kualitas analisis capaian kinerja, diperparah dengan belum seluruhnya notulen evaluasi internal memuat arahan pimpinan secara spesifik terhadap indikator yang tidak tercapai (<100%) maupun yang melampaui target (>120%).

Dari sisi pelaporan, Laporan Kinerja belum sepenuhnya dilengkapi lampiran dokumen perencanaan seperti PK dan RAPK serta matriks capaian unit kerja, sementara analisis efisiensi dan pemanfaatan informasi kinerja belum disajikan secara konsisten per indikator, khususnya pada Laporan Kinerja Interim. Penyajian tindak lanjut rekomendasi juga belum seluruhnya spesifik per indikator sehingga menyulitkan monitoring efektivitas perbaikan. Pada aspek evaluasi internal dan pengendalian kinerja, pengisian kendala dan rencana tindak lanjut pada SIMETRIS belum tertib untuk seluruh indikator, dan terdapat beberapa indikator yang tidak tercapai secara berturut-turut pada Triwulan I–II 2025. Kondisi ini menunjukkan bahwa proses identifikasi akar masalah, penetapan strategi, serta monitoring rencana tindak lanjut belum sepenuhnya optimal. Selain itu, pada dimensi outcome, sebagian indikator belum menunjukkan capaian yang lebih baik dibanding tahun sebelumnya, yang secara langsung memengaruhi komponen nilai capaian kinerja dalam evaluasi AKIP.

Upaya yang Telah Dilakukan

Sebagai respons atas hasil evaluasi AKIP dan dalam rangka meningkatkan nilai AKIP pada periode berikutnya, Deputy II telah melakukan langkah-langkah perbaikan sebagai berikut:

1. Penguatan Perencanaan Kinerja

- Melakukan finalisasi dan proses pengesahan Renstra 2025–2029 agar menjadi dasar formal penyusunan dokumen kinerja berkelanjutan.
- Menyempurnakan kertas kerja target indikator dengan melengkapi justifikasi, dasar perhitungan, serta dokumentasi pembahasan target bersama pimpinan.
- Mengoptimalkan peran Tim Penyelenggaraan SAKIP dalam memastikan keselarasan antar dokumen perencanaan dan pelaporan.

2. Penyempurnaan Sistem Pengukuran Kinerja

- Menyempurnakan SOP pengumpulan data kinerja termasuk mekanisme perubahan data dan persetujuan berjenjang dengan Biro Perencanaan dan Keuangan.
- Memperkuat mekanisme review berjenjang sebelum finalisasi data pada SIMETRIS dan dokumen pelaporan.
- Mewajibkan setiap notulen evaluasi internal memuat analisis kendala, arahan pimpinan, serta rencana tindak lanjut spesifik per indikator.

3. Perbaikan Pelaporan dan Pemanfaatan Informasi Kinerja

- Melengkapi laporan kinerja dengan lampiran PK, RAPK, matriks capaian unit kerja, serta matriks tindak lanjut rekomendasi per indikator.
- Menyajikan analisis efisiensi penggunaan anggaran dan pemanfaatan informasi kinerja secara lebih komprehensif.
- Melakukan penyesuaian aktivitas/kegiatan dan alokasi sumber daya berdasarkan hasil evaluasi capaian kinerja.

4. Penguatan Evaluasi Internal dan Monitoring RTL

- Mewajibkan pengisian kendala dan rencana tindak lanjut pada SIMETRIS secara tertib dan berkala.
- Melaksanakan monitoring RTL secara triwulanan dengan pelibatan pimpinan sebagai decision maker.
- Memperkuat fungsi pengendalian melalui rapat monitoring dan evaluasi berkala berbasis data kinerja.

23. Nilai Kinerja Anggaran Deputy Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik

Indikator Nilai Kinerja Anggaran merupakan ukuran strategis yang menggambarkan kualitas perencanaan dan pelaksanaan anggaran dalam mendukung pencapaian kinerja Deputy II BPOM. Indikator ini tidak hanya menilai tingkat penyerapan anggaran, tetapi juga menunjukkan efektivitas, efisiensi, ketepatan perencanaan, serta kepatuhan terhadap ketentuan pengelolaan keuangan negara. Dengan demikian, Nilai Kinerja Anggaran menjadi representasi integrasi antara kinerja program dan akuntabilitas pengelolaan sumber daya.

Realisasi capaian pada indikator ini menunjukkan sejauh mana perencanaan anggaran telah disusun secara realistis dan berbasis kebutuhan, serta bagaimana pelaksanaannya mampu menghasilkan output dan outcome yang optimal. Nilai yang diperoleh menjadi cerminan konsistensi Deputy II BPOM dalam menjaga tata kelola keuangan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada hasil, sekaligus memastikan bahwa setiap rupiah yang digunakan memberikan kontribusi nyata terhadap perlindungan masyarakat dan peningkatan kepatuhan pelaku usaha di bidang Obat Bahan Alam, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik.

Berikut analisis terhadap realisasi kinerja indikator ini, dan perbandingannya terhadap target tahun berjalan, tahun sebelumnya, target akhir tahun Renstra, dan kinerja satuan kerja lain.

Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Tahun Berjalan

Indikator Kinerja Utama (IKU) Nilai Kinerja Anggaran pada Tahun 2025 ditetapkan dengan target sebesar 5%. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja anggaran, realisasi yang dicapai adalah sebesar 5%, sehingga tingkat capaian kinerja mencapai 100% dan termasuk dalam kategori “Sangat Baik.”

Tabel 76 : Perbandingan realisasi kinerja Nilai Kinerja Anggaran terhadap target 2025

IKU	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kriteria / Notifikasi Warna
Nilai Kinerja Anggaran	5,00	5,00	100,00	Sangat baik

Capaian ini menunjukkan bahwa pengelolaan anggaran telah dilaksanakan secara efektif dan sesuai dengan target yang ditetapkan. Nilai Kinerja Anggaran menunjukkan kualitas perencanaan, pelaksanaan, serta capaian output yang dihasilkan dari penggunaan anggaran. Dengan tercapainya target secara optimal, dapat disimpulkan bahwa terdapat keselarasan antara perencanaan program, realisasi belanja, dan pencapaian kinerja yang dihasilkan.

Keberhasilan ini didukung oleh penguatan perencanaan berbasis kinerja, monitoring dan evaluasi realisasi anggaran secara berkala, serta pengendalian internal yang memadai dalam proses pelaksanaan kegiatan. Sinergi antara fungsi perencanaan, keuangan, dan pelaksana teknis turut memastikan bahwa anggaran dimanfaatkan secara efisien dan tepat sasaran.

Dengan capaian sebesar 100%, indikator ini menunjukkan tata kelola anggaran yang akuntabel dan berorientasi hasil. Ke depan, konsistensi dalam menjaga kualitas perencanaan dan pengendalian pelaksanaan anggaran perlu terus dipertahankan guna mendukung efektivitas pencapaian target kinerja organisasi secara berkelanjutan.

Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Capaian Tahun Sebelumnya

Tabel 77 : Perbandingan Kinerja Nilai Kinerja Anggaran terhadap kinerja di Tahun sebelumnya

IKU	Realisasi 2025	Realisasi 2024	Perbandingan
Nilai Kinerja Anggaran	5	N/A	Tidak dapat dibandingkan

Indikator Kinerja Utama (IKU) Nilai Kinerja Anggaran (NKA) pada Tahun 2025 mencapai realisasi sebesar 5. Namun demikian, pada Tahun 2024 nilai NKA belum dikonversi ke dalam bentuk skor yang setara dengan metode pengukuran Tahun 2025, sehingga tidak dapat dilakukan perbandingan kinerja secara langsung antar tahun.

Perbedaan metode penyajian dan pengukuran tersebut menyebabkan data Tahun 2024 tidak sepenuhnya comparable dengan Tahun 2025. Oleh karena itu, capaian Tahun 2025 dapat dijadikan sebagai baseline baru dalam format pengukuran yang telah

distandardisasi, sehingga pada periode berikutnya analisis tren kinerja anggaran dapat dilakukan secara lebih akurat dan konsisten

Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah

Tabel 78 : Perbandingan realisasi kinerja Nilai Kinerja Anggaran terhadap target Jangka Menengah 2025

IKU	Target Renstra	Realisasi 2025	Capaian (%)	Kategori / Notifikasi Warna
Nilai Kinerja Anggaran	5,00	5,00	100,00	Tercapai / Melampaui

Indikator Kinerja Utama (IKU) Nilai Kinerja Anggaran dalam target jangka menengah (Renstra) ditetapkan sebesar 5%. Pada Tahun 2025, realisasi yang dicapai adalah sebesar 5%, sehingga tingkat capaian mencapai 100% dan berada pada kategori “Tercapai/Melampaui.”

Capaian ini menunjukkan bahwa pengelolaan anggaran telah dilaksanakan secara konsisten dan selaras dengan target jangka menengah yang ditetapkan dalam Renstra. Nilai tersebut menunjukkan kesesuaian antara perencanaan, pelaksanaan, dan capaian output kegiatan, serta efektivitas penggunaan sumber daya dalam mendukung pencapaian sasaran strategis organisasi.

Dengan tercapainya target jangka menengah secara penuh, indikator ini memperlihatkan bahwa tata kelola anggaran di lingkungan Deputy II telah berjalan akuntabel dan berorientasi hasil. Ke depan, konsistensi dalam menjaga kualitas perencanaan dan pengendalian pelaksanaan anggaran perlu terus dipertahankan guna mendukung keberlanjutan kinerja yang optimal.

Perbandingan dengan Realisasi Kinerja Satuan Kerja Lain

Tabel 79 : Perbandingan realisasi kinerja Nilai Kinerja Anggaran terhadap Kinerja Satuan Kerja Lain

IKU	Deputi II BPOM	Deputi I BPOM	Deputi III BPOM
Nilai Kinerja Anggaran	5,00	5,00	5,00

Indikator Kinerja Utama (IKU) Nilai Kinerja Anggaran pada Tahun 2025 menunjukkan bahwa Deputy II BPOM memperoleh nilai 5, yang sama dengan capaian Deputy I BPOM dan Deputy III BPOM, yang masing-masing juga memperoleh nilai 5.

Kesetaraan nilai tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan anggaran di seluruh deputy teknis telah dilaksanakan secara optimal dan memenuhi standar kinerja yang ditetapkan. Hal ini menunjukkan keselarasan antara perencanaan, pelaksanaan, dan capaian output kegiatan, serta efektivitas pengendalian internal dalam pemanfaatan anggaran.

Analisis Penunjang Keberhasilan

Pada Tahun 2025, Deputy II BPOM berhasil memperoleh Nilai Kinerja Anggaran (NKA) sebesar 96,75, yang berada pada kategori Sangat Baik dengan nilai konversi 5. Capaian ini menunjukkan bahwa pengelolaan anggaran tidak hanya optimal dari sisi serapan, tetapi juga berkualitas dari aspek perencanaan dan pelaksanaan anggaran secara menyeluruh.

Nilai Kinerja Anggaran dihitung berdasarkan komponen Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (50%) dan Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran/IKPA (50%). Pada Tahun 2025, Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran Deputy II BPOM mencapai 96,65, dengan IKPA sebesar 96,70, yang menunjukkan kinerja sangat baik pada indikator revisi DIPA, deviasi Hal III DIPA, penyerapan anggaran, belanja kontraktual, penyelesaian tagihan, pengelolaan UP/TUP, serta capaian output. Tingginya capaian ini menunjukkan konsistensi pelaksanaan anggaran yang tertib, tepat waktu, dan selaras dengan target output.

Dari sisi perencanaan anggaran, keberhasilan juga ditopang oleh capaian efektivitas (75%) yang merefleksikan kesesuaian realisasi output (RO) dengan target, serta efisiensi (25%) yang diukur melalui penggunaan dan efisiensi Standar Biaya Keluaran (SBK). Hal ini menunjukkan bahwa kegiatan dirancang secara realistis dan dilaksanakan secara hemat tanpa mengurangi kualitas output.

Keberhasilan ini menjadi lebih signifikan mengingat adanya pemblokiran anggaran sebesar Rp32.288.665.000 dari pagu awal Rp51.852.180.000, sehingga pagu efektif menjadi Rp19.563.515.000 dengan realisasi sebesar Rp19.563.374.229. Dalam kondisi anggaran yang terbatas tersebut, Deputy II tetap mampu menjaga stabilitas pelaksanaan program serta memastikan keselarasan antara perencanaan, penganggaran, dan pencapaian kinerja.

Upaya yang Telah Dilakukan

Capaian NKA yang sangat baik tersebut didukung oleh berbagai upaya strategis, antara lain:

1. Perencanaan Anggaran Berbasis Kinerja dan pemanfaatan RO SBK, Penyusunan RKA-K/L yang selaras dengan target indikator kinerja dan berorientasi pada capaian output yang terukur.

2. Pengendalian Revisi dan Deviasi Anggaran, Pengendalian revisi DIPA secara selektif serta pengawasan terhadap deviasi Hal III DIPA untuk menjaga konsistensi realisasi anggaran sesuai dengan perencanaan yang telah dibuat.
3. Monitoring Penyerapan dan pelaporan Capaian Output Secara Berkala, evaluasi bulanan terhadap realisasi anggaran dan output guna memastikan tidak terjadi keterlambatan pelaksanaan kegiatan diikuti dengan pelaporan capaian output secara tepat waktu sesuai jadwal ditentukan.
4. Pengelolaan Belanja dan Tagihan yang Tertib, penguatan tata kelola administrasi kontraktual, percepatan penyelesaian tagihan, serta pengelolaan UP/TUP sesuai ketentuan yang berlaku.

Melalui upaya upaya tersebut, Deputy II BPOM mampu menunjukkan bahwa pengelolaan anggaran tidak sekadar berorientasi pada tingkat serapan, tetapi juga pada kualitas perencanaan, efisiensi penggunaan sumber daya, dan konsistensi pencapaian output yang mendukung kinerja organisasi secara keseluruhan.

24. Indeks Manajemen Risiko Deputy Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik

Indikator Indeks Manajemen Risiko merupakan ukuran strategis yang menggambarkan tingkat kematangan penerapan manajemen risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Deputy II BPOM. Indeks ini menunjukkan sejauh mana proses identifikasi, analisis, mitigasi, serta pemantauan risiko telah terintegrasi dalam perencanaan, pelaksanaan program, dan pengambilan keputusan organisasi.

Realisasi capaian pada indikator ini menjadi tolok ukur efektivitas implementasi kerangka manajemen risiko, termasuk konsistensi penyusunan peta risiko, kualitas rencana tindak pengendalian, serta monitoring atas risiko-risiko strategis yang dapat memengaruhi pencapaian sasaran program. Dengan capaian Indeks Manajemen Risiko yang diperoleh, Deputy II BPOM menunjukkan komitmen dalam memperkuat tata kelola berbasis pengendalian internal dan memastikan bahwa setiap potensi risiko dikelola secara sistematis untuk menjaga stabilitas, keberlanjutan, dan kualitas kinerja organisasi.

Berikut analisis terhadap realisasi kinerja indikator ini, dan perbandingannya terhadap target tahun berjalan, tahun sebelumnya, target akhir tahun Renstra, dan kinerja satuan kerja lain.

Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Tahun Berjalan

Tabel 80 : Perbandingan realisasi kinerja Indeks Manajemen Risiko terhadap target 2025

IKU	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kriteria / Notifikasi Warna
Indeks Manajemen Risiko	2,95	2,94	99,66	Baik

Indikator Kinerja Utama (IKU) Indeks Manajemen Risiko pada Tahun 2025 ditetapkan dengan target sebesar 2,95. Berdasarkan hasil pengukuran, realisasi yang dicapai adalah sebesar 2,94, sehingga tingkat capaian kinerja mencapai 99,66% dan berada dalam kategori “Baik.”

Capaian ini menunjukkan bahwa implementasi manajemen risiko di lingkungan Deputy II telah berjalan secara efektif dan hampir sepenuhnya mencapai target yang ditetapkan. Nilai indeks tersebut menunjukkan bahwa proses identifikasi, analisis, mitigasi, serta pemantauan risiko telah dilaksanakan secara sistematis dan terdokumentasi sesuai dengan pedoman yang berlaku.

Meskipun capaian sedikit di bawah target, selisih yang sangat tipis menunjukkan bahwa sistem pengelolaan risiko telah terintegrasi dalam proses perencanaan dan pelaksanaan kegiatan. Beberapa aspek yang masih perlu diperkuat antara lain konsistensi pemutakhiran register risiko, kualitas analisis dampak risiko, serta optimalisasi tindak lanjut atas rencana mitigasi yang telah ditetapkan.

Ke depan, penguatan budaya sadar risiko, peningkatan kapasitas pengelola risiko pada setiap unit kerja, serta integrasi manajemen risiko dengan pengambilan keputusan strategis perlu terus ditingkatkan guna memastikan efektivitas pengendalian risiko dan mendukung pencapaian kinerja organisasi secara berkelanjutan.

Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Capaian Tahun Sebelumnya

Tabel 81 : Perbandingan Kinerja Indeks Manajemen Risiko terhadap kinerja di Tahun sebelumnya

IKU	Realisasi 2025	Realisasi 2024	Perbandingan
Indeks Manajemen Risiko	2,94	N/A	Tidak dapat dibandingkan

Indikator Kinerja Utama (IKU) Indeks Manajemen Risiko pada Tahun 2025 mencapai realisasi sebesar 2,94. Namun demikian, indikator ini belum memiliki data realisasi pada Tahun 2024, sehingga tidak dapat dilakukan perbandingan kinerja antar tahun.

Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah

Tabel 82 : Perbandingan realisasi kinerja Indeks Manajemen Risiko terhadap target Jangka Menengah 2025

IKU	Target Renstra	Realisasi 2025	Capaian (%)	Kategori / Notifikasi Warna
Indeks Manajemen Risiko	3.04	2.94	96.64	Akan Tercapai

Indikator Kinerja Utama (IKU) Indeks Manajemen Risiko dalam target jangka menengah (Renstra) ditetapkan sebesar 3,04, sedangkan realisasi Tahun 2025 mencapai 2,94, dengan tingkat capaian sebesar 96,64% dan berada pada kategori “Akan Tercapai.”

Capaian ini menunjukkan bahwa implementasi manajemen risiko telah berjalan dengan baik dan mendekati target Renstra yang ditetapkan. Meskipun belum sepenuhnya mencapai target jangka menengah, selisih yang relatif kecil mengindikasikan bahwa sistem manajemen risiko telah terintegrasi dalam proses perencanaan dan pelaksanaan kegiatan. Dengan penguatan konsistensi pemutakhiran risiko, peningkatan kualitas mitigasi, serta pengawasan berkala, target jangka menengah sebesar 3,04 diproyeksikan dapat tercapai secara optimal pada periode selanjutnya.

Perbandingan dengan Realisasi Kinerja Satuan Kerja Lain

Tabel 83 : Perbandingan realisasi kinerja Indeks Manajemen Risiko terhadap Kinerja Satuan Kerja Lain

IKU	Deputi II BPOM	Deputi I BPOM	Deputi III BPOM
Indeks Manajemen Risiko	2,94	2,94	3,38

Indikator Kinerja Utama (IKU) Indeks Manajemen Risiko pada Tahun 2025 menunjukkan bahwa Deputi II BPOM memperoleh nilai 2,94, sama dengan capaian Deputi I BPOM yang juga sebesar 2,94, dan berada di bawah Deputi III BPOM yang memperoleh nilai 3,38.

Perbandingan ini menunjukkan bahwa tingkat maturitas manajemen risiko di Deputi II telah berada pada level yang setara dengan Deputi I, namun masih terdapat ruang peningkatan dibandingkan Deputi III. Selisih nilai tersebut mengindikasikan perlunya penguatan implementasi manajemen risiko, khususnya dalam aspek integrasi risiko ke dalam perencanaan strategis, kualitas mitigasi, serta pemantauan dan pelaporan risiko secara berkelanjutan.

Analisis Penyebab Kegagalan

Pada Tahun 2025, capaian Indeks Manajemen Risiko belum mencapai target yang ditetapkan. Meskipun sistem manajemen risiko telah berjalan dan terdokumentasi, terdapat beberapa faktor yang memengaruhi belum optimalnya nilai indeks tersebut.

1. Pemahaman dan internalisasi manajemen risiko di seluruh unit kerja belum merata. Sebagian unit masih memandang manajemen risiko sebagai kewajiban administratif, belum sepenuhnya sebagai instrumen pengambilan keputusan strategis. Hal ini berdampak pada kualitas identifikasi risiko, kedalaman analisis dampak dan kemungkinan, serta konsistensi pemantauan risiko secara berkala.
2. Integrasi manajemen risiko dengan perencanaan dan penganggaran belum sepenuhnya sistematis. Beberapa risiko strategis belum dikaitkan secara langsung dengan mitigasi berbasis kegiatan prioritas, terutama dalam kondisi keterbatasan anggaran akibat pemblokiran yang signifikan pada Tahun 2025. Situasi ini menyebabkan beberapa rencana mitigasi tidak dapat diimplementasikan secara optimal.
3. Dokumentasi dan pelaporan pemantauan risiko belum sepenuhnya berbasis sistem digital terintegrasi, sehingga proses monitoring dan evaluasi risiko masih bersifat parsial dan belum real-time. Hal ini memengaruhi penilaian maturitas manajemen risiko secara keseluruhan.

Upaya yang Telah Dilakukan

Sebagai respons atas kondisi tersebut, Deputy II BPOM telah melakukan berbagai langkah perbaikan, antara lain:

1. Melaksanakan revidi dan pembaruan risk register pada tingkat unit kerja dan organisasi, termasuk penajaman risiko strategis yang berdampak langsung pada pencapaian indikator kinerja.
2. Melakukan sosialisasi dan bimbingan teknis penguatan budaya risiko kepada pejabat struktural dan fungsional untuk meningkatkan pemahaman risk-based thinking.
3. Mengintegrasikan pembahasan risiko dalam forum monitoring kinerja dan rapat manajemen secara berkala.
4. Menyelaraskan rencana mitigasi risiko dengan prioritas program dan ketersediaan anggaran efektif.
5. Menyusun rencana pengembangan sistem monitoring risiko berbasis dashboard untuk meningkatkan kualitas pelaporan dan pengawasan.

Langkah-langkah tersebut diharapkan dapat meningkatkan maturitas penerapan manajemen risiko pada Tahun 2026, sehingga manajemen risiko tidak hanya bersifat administratif, tetapi menjadi bagian integral dari proses perencanaan, penganggaran, dan pengambilan keputusan strategis dalam mendukung pencapaian kinerja Deputy II BPOM.

3.2 Tindak lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi

Matriks tindak lanjut rekomendasi dan hasil Evaluasi pada tahun 2025 adalah sebagaimana pada lampiran

3.3 Pemanfaatan Informasi Kinerja

Pemanfaatan informasi kinerja pada Deputy II BPOM Tahun 2025 dilakukan secara sistematis melalui analisis capaian indikator, evaluasi efektivitas kegiatan, serta review realisasi anggaran. Informasi yang diperoleh dari laporan kinerja tidak hanya digunakan sebagai dokumen pertanggungjawaban, tetapi menjadi dasar dalam pengambilan keputusan strategis, penyesuaian kebijakan, serta perbaikan tata kelola pada periode berikutnya. Pendekatan ini memastikan bahwa siklus perencanaan–pelaksanaan–evaluasi berjalan secara berkelanjutan dan berbasis data.

1. Penyesuaian Aktivitas/Kegiatan untuk Mencapai Target Kinerja

Hasil analisis kinerja menunjukkan bahwa beberapa indikator, seperti kepatuhan sarana produksi, distribusi, serta pengawasan iklan, belum mencapai predikat sangat baik. Informasi tersebut dimanfaatkan untuk:

- Mengintensifkan pengawasan berbasis risiko pada sarana dengan kategori risiko tinggi.
- Memperluas pembinaan UMKM melalui coaching clinic dan regulatory assistance yang lebih tersegmentasi.
- Mengintegrasikan pendekatan digital monitoring terhadap promosi dan distribusi daring.
- Mengoptimalkan pelaksanaan kegiatan secara hybrid/daring pada program yang berdampak keterbatasan anggaran, seperti Program Sadar Jamu Aman.

Penyesuaian aktivitas ini bertujuan meningkatkan efektivitas intervensi sehingga kegiatan lebih tepat sasaran dan berdampak langsung terhadap peningkatan kepatuhan.

2. Penyesuaian Penggunaan Anggaran untuk Mencapai Target Kinerja

Informasi realisasi anggaran menunjukkan bahwa dari pagu awal sebesar Rp51.852.180.000 terjadi pemblokiran sebesar Rp32.288.665.000, sehingga pagu efektif menjadi Rp19.563.515.000 dengan realisasi Rp19.563.374.229 (hampir 100%). Analisis tersebut dimanfaatkan untuk:

- Melakukan prioritas program yang berdampak langsung terhadap indikator strategis.
- Mengalihkan pelaksanaan kegiatan dari tatap muka (daring) ke luring atau hybrid untuk efisiensi biaya.
- Mengintegrasikan beberapa kegiatan pembinaan dalam satu forum guna mengurangi duplikasi anggaran.

- Menyusun skenario kontinjensi anggaran apabila terjadi penyesuaian anggaran pada tahun berikutnya.

Dengan demikian, penggunaan anggaran menjadi lebih adaptif dan berbasis kinerja.

3. Evaluasi Pencapaian Keberhasilan Kinerja dan Tindak Lanjut Rekomendasi

Informasi kinerja digunakan untuk mengevaluasi efektivitas program serta menindaklanjuti rekomendasi internal maupun eksternal. Beberapa pemanfaatannya antara lain:

- Penguatan kualitas kebijakan melalui perbaikan naskah akademik, konsultasi publik, dan penerapan Good Regulatory Practice (GRP) yang berdampak pada peningkatan Indeks Kualitas Kebijakan menjadi 97,75.
- Reviu manajemen risiko dan penguatan sistem pengendalian internal untuk menjaga stabilitas capaian indikator tata kelola.
- Monitoring tindak lanjut rekomendasi lintas sektor untuk meningkatkan persentase rekomendasi pengawasan yang ditindaklanjuti.
- Penyusunan rencana aksi korektif terhadap indikator yang belum optimal serta indikator yang tidak terealisasi akibat pemblokiran anggaran.

Evaluasi ini memastikan bahwa setiap capaian maupun kendala menjadi pembelajaran organisasi.

4. Penyesuaian Perencanaan Kinerja untuk Periode Berikutnya

Informasi kinerja Tahun 2025 menjadi dasar dalam penyempurnaan perencanaan Tahun 2026, antara lain melalui:

- Reviu dan penajaman indikator kinerja agar lebih *outcome-oriented* dan terukur.
- Penyesuaian target kinerja pada beberapa indikator kinerja yang capaiannya pada tahun ini telah melampaui target Renstra, antara lain pada indikator Indeks Kualitas Kebijakan Pengawasan Obat Bahan Alam, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik.
- Penyempurnaan Manual IKU untuk memperjelas definisi operasional dan metode pengukuran.
- Penyusunan strategi mitigasi risiko untuk indikator yang memiliki ketergantungan eksternal atau berisiko terdampak kebijakan anggaran.

Selain itu laporan kinerja juga menjadi dasar dalam penyesuaian terhadap indikator dan kinerja pada tahun berjalan, antara lain:

1. Penyesuaian indikator kinerja Angka Penilaian Mandiri Kualitas Kebijakan Pengawasan Obat Bahan Alam, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik dengan target 83,00 menjadi Indeks Kualitas Kebijakan Pengawasan Obat Bahan Alam, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik dengan target 79,00
2. Penyesuaian target pada indikator persentase iklan obat bahan alam yang memenuhi ketentuan, dari 78,00% menjadi 66,00%
3. Penyesuaian target pada indikator persentase iklan suplemen kesehatan yang memenuhi ketentuan, dari 87,00% menjadi 82,00%
4. Penyesuaian target pada indikator persentase iklan kosmetik yang memenuhi ketentuan, dari 71,00% menjadi 60,00%
5. Penggabungan indikator kinerja Persentase Industri Kosmetik yang mengikuti program maturitas yang dapat Menerapkan CPKB secara penuh dengan target 56,00% dengan indikator kinerja Persentase Industri Obat Bahan Alam yang ditetapkan maturitasnya dalam penerapan CPOTB terkini dengan target 12,00% menjadi Persentase Industri Obat Bahan Alam dan Kosmetik yang Mencapai Tingkat Maturitas dengan target 34,00%.

3.4 Realisasi Anggaran

Pada Tahun 2025, Deputy II BPOM memperoleh pagu anggaran sebesar Rp51.852.180.000, yang di dalamnya termasuk hibah dari WHO sebesar Rp385.441.000. Namun demikian, dalam pelaksanaannya terdapat pemblokiran anggaran sebesar Rp32.288.665.000, sehingga pagu efektif yang dapat digunakan untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan adalah sebesar Rp19.563.515.000. Dari pagu efektif tersebut, realisasi anggaran mencapai Rp19.563.374.229, atau mendekati 100% dari pagu yang tersedia.

Secara analitis, kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun secara nominal terjadi pengurangan signifikan akibat pemblokiran anggaran (lebih dari 60% dari pagu awal), Deputy II BPOM tetap mampu mengoptimalkan pagu efektif yang tersedia secara maksimal. Tingkat serapan yang hampir sempurna menunjukkan perencanaan yang adaptif, pengendalian pelaksanaan anggaran yang ketat, serta kemampuan melakukan reprioritisasi program secara cepat dan terukur. Strategi penyesuaian melalui digitalisasi layanan, pelaksanaan kegiatan secara daring atau hybrid, serta penguatan efisiensi operasional memungkinkan output kinerja tetap tercapai meskipun dalam keterbatasan anggaran.

Dengan demikian, pengelolaan anggaran Tahun 2025 tidak hanya menunjukkan tingkat serapan yang tinggi, tetapi juga menggambarkan kapasitas organisasi dalam menjaga efektivitas program di tengah pembatasan anggaran. Hal ini sekaligus memperkuat akuntabilitas kinerja Deputy II BPOM, di mana pencapaian indikator kinerja tetap optimal meskipun anggaran mengalami penyesuaian signifikan.

Realisasi anggaran per Sasaran Program

Realisasi anggaran Deputy II BPOM Tahun 2025 per sasaran program menunjukkan tingkat serapan yang sangat optimal dan terkendali. Pada Sasaran Program Meningkatnya efektivitas pengawasan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan, dari pagu sebesar Rp6.614.552.000 terealisasi Rp6.614.500.159 atau 100,00%. Sasaran Meningkatnya Kesadaran Masyarakat atas Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu juga menunjukkan kinerja serapan yang sangat baik, dengan realisasi Rp1.984.610.203 dari pagu Rp1.984.616.000 (100,00%). Demikian pula pada Sasaran Meningkatnya efektivitas regulatory assistance dan kemandirian industri, terealisasi Rp3.372.928.222 dari pagu Rp3.372.954.000 (100,00%).

Pada Sasaran Terwujudnya tata kelola pemerintahan Unit Organisasi yang optimal, realisasi mencapai Rp7.591.335.645 dari pagu Rp7.591.393.000 atau 100,00%, menunjukkan pengelolaan anggaran yang presisi dan akurat. Sementara itu, Sasaran Meningkatnya peran aktif lintas sektor dalam pengawasan OBA, SK, dan Kosmetik tidak memiliki data pagu dan realisasi (n/a), sehingga tidak dilakukan pengukuran serapan anggaran pada sasaran tersebut.

Secara keseluruhan, dari total pagu anggaran sebesar Rp19.563.515.000, terealisasi Rp19.563.374.229 atau 100,00%. Tingkat serapan ini menunjukkan perencanaan yang matang, pengendalian pelaksanaan yang efektif, serta konsistensi dalam menjaga keseimbangan antara pencapaian output dan ketepatan penggunaan anggaran, sehingga mendukung kinerja organisasi yang optimal dan akuntabel.

Tabel 84 : Realisasi Anggaran per Sasaran Program

No.	Sasaran Program	Pagu Anggaran Input	Realisasi	% ase
1	Meningkatnya efektivitas pengawasan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	6,614,552,000	6,614,500,159	100.00%
2	Meningkatnya peran aktif lintas sektor dalam pengawasan OBA, SK, Kos	n/a	n/a	n/a
3	Meningkatnya Kesadaran Masyarakat atas Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu	1,984,616,000	1,984,610,203	100.00%
4	Meningkatnya efektifitas regulatory assistance dan kemandirian industri dalam pengembangan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	3,372,954,000	3,372,928,222	100.00%
5	Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	7,591,393,000	7,591,335,645	100.00%
	Total Anggggaran	19,563,515,000	19,563,374,229	100.00%

Efisiensi dan efektivitas atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja per sasaran.

Tabel 85 : Pengukuran Tingkat Efisiensi per Sasaran Program

No.	Sasaran Program	Input	Output	Tingkat Efisiensi
1	Meningkatnya efektivitas pengawasan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	100,00	103,76	0,04
2	Meningkatnya peran aktif lintas sektor dalam pengawasan OBA, SK, Kos	n/a	n/a	n/a
3	Meningkatnya Kesadaran Masyarakat atas Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu	100,00	102,33	0,02
4	Meningkatnya efektifitas regulatory assistance dan kemandirian industri dalam pengembangan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	100,00	107,41	0,07
5	Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	100,00	100,28	0,00

Pengukuran tingkat efisiensi per sasaran program Tahun 2025 menunjukkan bahwa pelaksanaan program Deputy II BPOM telah berjalan secara optimal dengan pemanfaatan input yang efektif dalam menghasilkan output yang melebihi target. Pada Sasaran Program Meningkatkan efektivitas pengawasan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan, capaian output sebesar 103,76 dengan input 100,00 menghasilkan tingkat efisiensi 0,04, yang menunjukkan bahwa peningkatan kinerja dicapai tanpa penambahan sumber daya secara signifikan. Hal serupa terlihat pada Sasaran Meningkatkan efektivitas regulatory assistance dan kemandirian industri, dengan output 103,54 dan tingkat efisiensi 0,04, serta pada Sasaran Meningkatkan Kesadaran Masyarakat atas Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu dengan output 102,33 dan tingkat efisiensi 0,02.

Sementara itu, pada Sasaran Terwujudnya tata kelola pemerintahan Unit Organisasi yang optimal, capaian output sebesar 100,26 dengan tingkat efisiensi 0,00 menunjukkan bahwa target kinerja tercapai secara proporsional dengan penggunaan input yang seimbang. Adapun Sasaran Meningkatkan peran aktif lintas sektor dalam pengawasan OBA, SK, dan Kosmetik tidak dapat dilakukan pengukuran efisiensi karena tidak input (anggaran yang teralokasi) sehingga tidak menghasilkan output.

Secara umum, dari hasil pengukuran ini terlihat bahwa sebagian besar sasaran program telah dilaksanakan secara efisien, dengan output yang melampaui target dan pemanfaatan sumber daya yang terkelola secara optimal, sehingga mendukung pencapaian kinerja organisasi secara efektif dan akuntabel

Deputy II BPOM menerapkan prinsip value for money dalam pengelolaan anggaran dengan menekankan keseimbangan antara ekonomi, efisiensi, dan efektivitas. Efisiensi

dilakukan tanpa mengurangi kualitas output maupun capaian kinerja, yang tercermin dari mayoritas indikator kinerja yang mencapai dan melampaui target serta Nilai Kinerja Organisasi (NKO) sebesar 91,65 dengan predikat Baik.

Beberapa langkah konkret efisiensi yang dilakukan antara lain melalui Digitalisasi layanan dan proses kerja (pemanfaatan Artificial Intelligence (AI) pada sistem Notifikasi Kosmetik dan re-engineering aplikasi ASROT, optimalisasi layanan konsultasi regulasi berbasis AI, pemanfaatan platform daring (Zoom, subsite, aplikasi internal) untuk rapat, sosialisasi, dan asistensi teknis. Selain itu juga melalui rasionalisasi kegiatan dan belanja operasional (penggabungan kegiatan yang memiliki irisan substansi, prioritas kegiatan berbasis risiko dan dampak kinerja, dan pengendalian belanja perjalanan dinas melalui pendekatan hybrid meeting). Deputy II BPOM juga melakukan optimalisasi sumber daya internal dengan peningkatan peran tim internal sebagai narasumber kegiatan, penguatan koordinasi lintas direktorat untuk menghindari duplikasi program, dan Integrasi perencanaan kinerja dan anggaran melalui monitoring bulanan.

Upaya lain yang dilakukan yaitu dengan melakukan refocusing dan pengendalian akibat pemblokiran anggaran dengan menyesuaikan strategi pelaksanaan program, pengalihan metode pelaksanaan dari luring ke daring, serta reprioritisasi output prioritas agar kinerja tetap tercapai meskipun terdapat keterbatasan anggaran.

Secara kuantitatif, efisiensi tercermin dari:

- Rata-rata tingkat efisiensi per sasaran program berkisar antara 0,00–0,04, yang menunjukkan bahwa dengan input 100, output yang dihasilkan mencapai 102–104.
- Capaian output yang melampaui 100% pada beberapa sasaran tanpa penambahan input anggaran.
- Optimalisasi kegiatan berbasis digital yang secara signifikan menurunkan komponen biaya perjalanan dinas, konsumsi, dan sewa tempat.
- Realisasi Nilai Kinerja Anggaran yang mencapai skor maksimal (5), menunjukkan kualitas pelaksanaan anggaran yang efektif dan tepat sasaran.

Dengan pendekatan tersebut, Deputy II BPOM mampu mempertahankan kinerja yang tinggi meskipun terdapat pembatasan dan pemblokiran anggaran pada beberapa indikator. Hal ini menunjukkan bahwa efisiensi yang dilakukan bukan sekadar penghematan, melainkan optimalisasi penggunaan sumber daya untuk menghasilkan output yang lebih besar dengan biaya yang terkendali.

BAB IV

PENUTUP

BAB IV Penutup

A. Kesimpulan Umum Capaian Kinerja

Secara keseluruhan, kinerja Deputy II BPOM Tahun 2025 menunjukkan capaian yang sangat positif dan berada pada kategori istimewa. Dari 24 Indikator Kinerja Sasaran Program yang ditetapkan, sebanyak 16 indikator memperoleh predikat sangat baik, 5 indikator dengan predikat baik, dan 1 indikator dengan predikat cukup. Terdapat 2 indikator yang tidak dapat direalisasikan atau diukur karena seluruh anggaran pendukungnya diblokir. Dengan mengeluarkan (*exclude*) dua indikator tersebut dari perhitungan, Nilai Kinerja Organisasi (NKO) Deputy II BPOM mencapai 101,74 dengan predikat istimewa. Capaian ini menunjukkan bahwa secara umum pelaksanaan program dan kegiatan telah berjalan efektif, efisien, dan akuntabel.

Keberhasilan tersebut didukung oleh optimalisasi transformasi digital layanan, penguatan tata kelola, peningkatan kualitas kebijakan, serta pengendalian pelaksanaan anggaran yang presisi. Pada Tahun 2025, Deputy II BPOM memperoleh pagu anggaran sebesar Rp51.852.180.000, termasuk hibah WHO sebesar Rp385.441.000. Namun, terdapat pemblokiran anggaran sebesar Rp32.288.665.000, sehingga pagu efektif yang dapat dimanfaatkan menjadi Rp19.563.515.000. Dari pagu efektif tersebut, realisasi anggaran mencapai Rp19.563.374.229, atau hampir 100% dari anggaran yang tersedia. Meskipun ruang fiskal berkurang secara signifikan akibat pemblokiran lebih dari 60% pagu awal, Deputy II tetap mampu mempertahankan mayoritas capaian indikator di atas target. Kondisi ini mencerminkan kapasitas adaptif organisasi dalam melakukan reprioritisasi program, efisiensi operasional, dan penyesuaian strategi pelaksanaan tanpa menurunkan kualitas maupun akuntabilitas kinerja.

Namun demikian, masih terdapat beberapa indikator yang belum mencapai predikat optimal dan memerlukan penguatan pada periode berikutnya. Indikator dengan predikat baik dan cukup antara lain Persentase Inovasi Obat Bahan Alam yang Didampingi Sesuai Standar, Persentase Iklan Kosmetik yang Memenuhi Ketentuan, Persentase Iklan Suplemen Kesehatan yang Memenuhi Ketentuan, Persentase Fasilitas Distribusi Kosmetik yang Memenuhi Ketentuan, Persentase Sarana Produksi Kosmetik yang Memenuhi Ketentuan, Persentase Sarana Produksi Suplemen Kesehatan yang Memenuhi Ketentuan, serta Persentase Sarana Produksi Obat Bahan Alam yang Memenuhi Ketentuan yang masih berada pada kategori cukup. Selain itu, terdapat dua indikator yang tidak terealisasi karena seluruh anggaran pendukungnya diblokir, yaitu Persentase Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Program Sadar Jamu Aman dan Persentase Industri Obat Bahan Alam dan Kosmetik yang Mencapai Tingkat Maturitas. Kondisi ini menjadi catatan penting untuk perbaikan perencanaan berbasis risiko, penguatan strategi pembinaan dan pengawasan, serta mitigasi terhadap potensi pembatasan fiskal pada periode mendatang agar kesinambungan pencapaian kinerja tetap terjaga.

B. Permasalahan dan Kendala Utama

Beberapa permasalahan dan kendala utama yang mempengaruhi kinerja Tahun 2025 antara lain:

1. Pemblokiran anggaran dalam jumlah signifikan, yang berdampak pada tidak terlaksananya beberapa kegiatan strategis, khususnya pada indikator yang memerlukan dukungan operasional lapangan dan pembinaan langsung.
2. Ketergantungan pada dukungan lintas sektor, terutama dalam indikator yang mengukur tindak lanjut rekomendasi pengawasan, sehingga capaian sangat dipengaruhi oleh komitmen dan kapasitas pihak eksternal.
3. Variasi tingkat kepatuhan pelaku usaha, khususnya pada indikator terkait sarana produksi, distribusi, dan pengawasan iklan, yang masih memerlukan penguatan edukasi dan pengawasan berbasis risiko.
4. Keterbatasan sumber daya manusia dan beban kerja yang meningkat, seiring dengan perluasan cakupan pengawasan dan pengembangan inovasi layanan berbasis digital.

C. Strategi Pemecahan dan Arah Kebijakan Tahun Mendatang

Untuk menjawab tantangan tersebut, Deputy II BPOM akan melaksanakan beberapa strategi perbaikan pada tahun mendatang, yaitu:

1. Penguatan perencanaan berbasis risiko dan skenario anggaran, termasuk penyusunan prioritas kegiatan esensial agar tetap berjalan meskipun terjadi pemblokiran anggaran.
2. Optimalisasi digitalisasi dan integrasi sistem layanan, termasuk pengembangan lebih lanjut pemanfaatan *Artificial Intelligence* (AI) dalam sistem registrasi dan pengawasan untuk meningkatkan efisiensi dalam rangka mensiasati rendahnya anggaran yang tersedia sebagai dampak dari penyesuaian anggaran.
3. Penguatan kolaborasi lintas sektor, melalui forum koordinasi rutin, penyusunan mekanisme tindak lanjut yang lebih terstruktur, serta pemanfaatan *dashboard* monitoring bersama.
4. Peningkatan literasi dan kepatuhan pelaku usaha, melalui pendekatan *regulatory assistance*, *coaching clinic*, serta pengawasan berbasis risiko yang lebih terarah.
5. Peningkatan Kapasitas SDM dan Budaya Risiko, melalui Pelatihan teknis lanjutan, penguatan manajemen risiko, serta internalisasi budaya kerja berbasis integritas dan kinerja.

D. Rekomendasi untuk Peningkatan Kinerja

Dalam rangka meningkatkan kinerja di masa mendatang, beberapa rekomendasi yang perlu diperhatikan antara lain:

1. Menjaga stabilitas dan kepastian alokasi anggaran untuk indikator strategis agar kesinambungan program terjaga.
2. Mengembangkan mekanisme *early warning system* terhadap potensi risiko pencapaian kinerja.

3. Melanjutkan transformasi digital dan inovasi layanan sebagai instrumen utama peningkatan efisiensi dan kualitas pelayanan publik.

Dengan strategi dan rekomendasi tersebut, Deputy II BPOM optimis dapat mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja pada tahun-tahun mendatang, sekaligus memperkuat peran strategis dalam pengawasan Obat Bahan Alam, Suplemen Kesehatan, Obat Kuasi, dan Kosmetik secara profesional, adaptif, dan berintegritas.

LAMPIRAN



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DEPUTI BIDANG PENGAWASAN OBAT TRADISIONAL, SUPLEMEN KESEHATAN, DAN
KOSMETIK
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : MOHAMAD KASHURI

Jabatan : Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : TARUNA IKRAR

Jabatan : Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan RI

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Dalam penggunaan anggaran dilaksanakan sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 11 Februari 2025

Pihak Pertama
Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional,
Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik

MOHAMAD KASHURI

Pihak Kedua
Kepala Badan Pengawas
Obat dan Makanan RI

TARUNA IKRAR

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DEPUTI BIDANG PENGAWASAN OBAT TRADISIONAL, SUPLEMEN KESEHATAN, DAN
KOSMETIK

NO.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET
1.	01 - Meningkatnya efektivitas pengawasan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	01 - Persentase Obat bahan alam yang aman dan bermutu	65 Persen
		02 - Persentase Suplemen Kesehatan yang aman dan bermutu	68 Persen
		03 - Persentase Kosmetik yang aman dan bermutu	62 Persen
		04 - Angka Penilaian Mandiri Kualitas Kebijakan Pengawasan Obat Bahan Alam, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	83 Persen
		05 - Persentase rekomendasi hasil pengawasan Obat Bahan Alam Suplemen Kesehatan, Obat Kuasi dan Kosmetik yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor	83 Persen
		06 - Persentase sarana produksi Obat Bahan Alam yang memenuhi ketentuan	86 Persen
		07 - Persentase sarana produksi Suplemen Kesehatan yang memenuhi ketentuan	85 Persen
		08 - Persentase sarana produksi Kosmetik yang memenuhi ketentuan	81 Persen
		09 - Persentase fasilitas distribusi Obat Bahan Alam yang memenuhi ketentuan	70 Persen
		10 - Persentase fasilitas distribusi Suplemen Kesehatan yang memenuhi ketentuan	89 Persen
		11 - Persentase fasilitas distribusi Kosmetik yang memenuhi ketentuan	78 Persen
		12 - Persentase iklan Obat Bahan Alam yang memenuhi ketentuan	78 Persen

NO.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET
		13 - Persentase iklan Suplemen Kesehatan yang memenuhi ketentuan	87 Persen
		14 - Persentase iklan Kosmetik yang memenuhi ketentuan	71 Persen
2.	02 - Meningkatnya peran aktif lintas sektor dalam pengawasan OT, SK, Kos	01 - Persentase kabupaten/kota sadar Jamu Aman	2 Jamu
3.	05 - Meningkatnya Kesadaran Masyarakat atas Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu	01 - Indeks Kesadaran Masyarakat terhadap Obat Bahan Alam, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang aman dan bermutu	86.87 Indeks
4.	06 - Meningkatnya efektifitas regulatory assistance dan kemandirian industri dalam pengembangan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	01 - Persentase inovasi obat bahan alam yang didampingi sesuai standar	51 Persen
		02 - Persentase UMKM yang menerapkan standar keamanan dan mutu produksi OBA dan Kos	60 Persen
		03 - Persentase Industri Kosmetik yang mengikuti Program maturitas yang dapat Menerapkan CPKB secara penuh	56 Persen
		04 - Persentase Industri Obat bahan Alam yang ditetapkan maturitasnya dalam penerapan CPOTB terkini	12 Persen
5.	09 - Layanan Publik BPOM yang Prima	01 - Indeks Pelayanan Publik di Bidang Pengawasan Obat Bahan Alam, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan	4.7 Indeks
6.	10 - Terwujudnya Tata Kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	01 - Nilai Pembangunan ZI Deputy Bidang Pengawasan OT, SK, dan Kos	89.96 persen
		02 - Nilai AKIP Deputy Bidang Pengawasan OT, SK, dan Kos	81.66 Nilai
		03 - Nilai Kinerja Anggaran Deputy Bidang Pengawasan OT, SK, dan Kos	5 Nilai
		04 - Indeks Manajemen Risiko Deputy Bidang Pengawasan OT, SK, dan Kos	2.95 Indeks

Alokasi anggaran tahun 2025 sebesar Rp. 51,916,739,000 (Lima Puluh Satu Miliar Sembilan Ratus Enam Belas Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Rupiah)

NO.	KEGIATAN	ANGGARAN
1.	DR.3165 - Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia	5,263,879,000
2.	DR.4119 - Pengawasan Obat Tradisional, dan Suplemen Kesehatan	9,810,472,000
3.	DR.4121 - Pengawasan Kosmetik	8,054,681,000
4.	DR.4129 - Standardisasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	4,900,007,000
5.	DR.4128 - Registrasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	15,661,332,000
6.	DR.6385 - Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha OT, SK, Kos	8,226,368,000

Jakarta, 11 Februari 2025

Pihak Pertama
Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional,
Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik

MOHAMAD KASHURI

Pihak Kedua
Kepala Badan Pengawas
Obat dan Makanan RI

TARUNA IKRAR



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DEPUTI BIDANG PENGAWASAN OBAT TRADISIONAL, SUPLEMEN KESEHATAN, DAN KOSMETIK
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : MOHAMAD KASHURI

Jabatan : Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan,
dan Kosmetik

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : TARUNA IKRAR

Jabatan : Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan RI

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Dalam penggunaan anggaran dilaksanakan sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 28 Agustus 2025

Pihak Pertama
Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional,
Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik

MOHAMAD KASHURI

Pihak Kedua
Kepala Badan Pengawas
Obat dan Makanan RI

TARUNA IKRAR

Lampiran

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DEPUTI BIDANG PENGAWASAN OBAT TRADISIONAL, SUPLEMEN KESEHATAN, DAN KOSMETIK

NO.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET
1.	01 - Meningkatnya efektivitas pengawasan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	01 - Persentase Obat bahan alam yang aman dan bermutu	65 Persen
		02 - Persentase Suplemen Kesehatan yang aman dan bermutu	68 Persen
		03 - Persentase Kosmetik yang aman dan bermutu	62 Persen
		04 - Indeks Kualitas Kebijakan Pengawasan Obat Bahan Alam, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	79 Persen
		05 - Persentase rekomendasi hasil pengawasan Obat Bahan Alam, Suplemen Kesehatan, Obat Kuasi dan Kosmetik yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor	83 Persen
		06 - Persentase sarana produksi Obat Bahan Alam yang memenuhi ketentuan	86 Persen
		07 - Persentase sarana produksi Suplemen Kesehatan yang memenuhi ketentuan	85 Persen
		08 - Persentase sarana produksi Kosmetik yang memenuhi ketentuan	81 Persen
		09 - Persentase fasilitas distribusi Obat Bahan Alam yang memenuhi ketentuan	70 Persen
		10 - Persentase fasilitas distribusi Suplemen Kesehatan yang memenuhi ketentuan	90 Persen
		11 - Persentase fasilitas distribusi Kosmetik yang memenuhi ketentuan	78 Persen
		12 - Persentase iklan Obat Bahan Alam yang memenuhi ketentuan	66 Persen
		13 - Persentase iklan Suplemen Kesehatan yang memenuhi ketentuan	82 Persen

NO.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET
		14 - Persentase iklan Kosmetik yang memenuhi ketentuan	60 Persen
2.	02 - Meningkatnya peran aktif lintas sektor dalam pengawasan OBA, SK, Kos	01 - Persentase kabupaten/kota yang melaksanakan Program Sadar Jamu Aman	2 Persen
3.	05 - Meningkatnya Kesadaran Masyarakat atas Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu	01 - Indeks Kesadaran Masyarakat terhadap Obat Bahan Alam, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang aman dan bermutu	86.87 Indeks
4.	06 - Meningkatnya efektifitas regulatory assistance dan kemandirian industri dalam pengembangan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	01 - Persentase inovasi obat bahan alam yang didampingi sesuai standar	82.1 Persen
		02 - Persentase UMKM yang menerapkan standar keamanan dan mutu produksi OBA dan Kos	60 Persen
		03 - Persentase Industri Obat Bahan alam dan Kosmetik yang Mencapai Tingkat Maturitas	34 Persen
5.	10 - Terwujudnya Tata Kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	01 - Indeks Pelayanan Publik di Bidang Pengawasan Obat Bahan Alam, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan	4.7 Indeks
		02 - Nilai Pembangunan ZI Deputy Bidang Pengawasan OT, SK, dan Kos	89.96 persen
		03 - Nilai AKIP Deputy Bidang Pengawasan OT, SK, dan Kos	81.66 Nilai
		04 - Nilai Kinerja Anggaran Deputy Bidang Pengawasan OT, SK, dan Kos	5 Nilai
		05 - Indeks Manajemen Risiko Deputy Bidang Pengawasan OT, SK, dan Kos	2.95 Indeks

Alokasi anggaran tahun 2025 sebesar Rp. 51,466,739,000 (Lima Puluh Satu Miliar Empat Ratus Enam Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Rupiah)

NO.	KEGIATAN	ANGGARAN
1.	DR.3165 - Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia	5,263,879,000
2.	DR.4119 - Pengawasan Obat Tradisional, dan Suplemen Kesehatan	9,685,472,000
3.	DR.4121 - Pengawasan Kosmetik	7,929,681,000

NO.	KEGIATAN	ANGGARAN
4.	DR.4129 - Standardisasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	4,800,007,000
5.	DR.4128 - Registrasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	15,561,332,000
6.	DR.6385 - Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha OT, SK, Kos	8,226,368,000

Jakarta, 28 Agustus 2025

Pihak Pertama
Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional,
Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik



MOHAMAD KASHURI

Pihak Kedua
Kepala Badan Pengawas
Obat dan Makanan RI



TARUNA IKRAR

NO.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
		NO	RO			KOMPONEN			SUB KOMPONEN			ANGGARAN			KONTRIBUSI
		6.	DR.4128.PCA.001 - Keputusan Registrasi Obat Bahan Alam dan Suplemen Kesehatan, serta Notifikasi Kosmetika yang Diselesaikan Sesuai Ketentuan			051 - Registrasi Obat Bahan Alam			E - Rapat Evaluasi Obat Bahan Alam dan Suplemen Kesehatan Resiko Tinggi			130,602,000			130,602,000
		7.	DR.4128.PCA.001 - Keputusan Registrasi Obat Bahan Alam dan Suplemen Kesehatan, serta Notifikasi Kosmetika yang Diselesaikan Sesuai Ketentuan			051 - Registrasi Obat Bahan Alam			F - Forum Komunikasi Fasilitator Registrasi dalam Rangka Perkuatan Pendampingan UMKM Start Up Obat Tradisional dan Obat Kuasi			174,100,000			174,100,000
		8.	DR.4128.PCA.001 - Keputusan Registrasi Obat Bahan Alam dan Suplemen Kesehatan, serta Notifikasi Kosmetika yang Diselesaikan Sesuai Ketentuan			051 - Registrasi Obat Bahan Alam			A - Intensifikasi dan Desk Registrasi Permasalahan Registrasi Produk dan Iklan Dalam Rangka Percepatan Izin Edar Obat Bahan Alam			426,487,000			426,487,000
		9.	DR.4128.PCA.001 - Keputusan Registrasi Obat Bahan Alam dan Suplemen Kesehatan, serta Notifikasi Kosmetika yang Diselesaikan Sesuai Ketentuan			055 - Penilaian Uji Praklinik / Klinik Obat Bahan Alam dan Suplemen Kesehatan			A - Penilaian Pelaksanaan Uji Praklinik dan Klinik Obat Bahan Alam dan Suplemen Kesehatan			59,690,000			59,690,000
		10.	DR.4128.PCA.001 - Keputusan Registrasi Obat Bahan Alam dan Suplemen Kesehatan, serta Notifikasi Kosmetika yang Diselesaikan Sesuai Ketentuan			051 - Registrasi Obat Bahan Alam			B - Representasi Pada Sidang Tingkat TMHS			122,400,000			122,400,000
		11.	DR.4128.PCA.001 - Keputusan Registrasi Obat Bahan Alam dan Suplemen Kesehatan, serta Notifikasi Kosmetika yang Diselesaikan Sesuai Ketentuan			055 - Penilaian Uji Praklinik / Klinik Obat Bahan Alam dan Suplemen Kesehatan			D - Pertemuan Pembahasan Percepatan Pengembangan dan Pemanfaatan Fitofarmaka			326,550,000			326,550,000
		12.	DR.4128.PCA.001 - Keputusan Registrasi Obat Bahan Alam dan Suplemen Kesehatan, serta Notifikasi Kosmetika yang Diselesaikan Sesuai Ketentuan			051 - Registrasi Obat Bahan Alam			C - Rapat Evaluasi Registrasi Iklan Obat Bahan Alam			217,200,000			217,200,000
		13.	DR.4128.PCA.001 - Keputusan Registrasi Obat Bahan Alam dan Suplemen Kesehatan, serta Notifikasi Kosmetika yang Diselesaikan Sesuai Ketentuan			055 - Penilaian Uji Praklinik / Klinik Obat Bahan Alam dan Suplemen Kesehatan			C - Pendampingan Dan Optimalisasi Uji Praklinik Dan Atau Uji Klinik Dalam Mendukung Hilirisasi Obat Bahan Alam Indonesia			142,390,000			142,390,000

NO.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
		NO	RO			KOMPONEN			SUB KOMPONEN			ANGGARAN			KONTRIBUSI
		14.	DR.4128.PCA.001 - Keputusan Registrasi Obat Bahan Alam dan Suplemen Kesehatan, serta Notifikasi Kosmetika yang Diselesaikan Sesuai Ketentuan			055 - Penilaian Uji Praklinik / Klinik Obat Bahan Alam dan Suplemen Kesehatan			F - Workshop Uji Praklinik/Klinik			50,990,000			50,990,000
		15.	DR.4128.PCA.001 - Keputusan Registrasi Obat Bahan Alam dan Suplemen Kesehatan, serta Notifikasi Kosmetika yang Diselesaikan Sesuai Ketentuan			055 - Penilaian Uji Praklinik / Klinik Obat Bahan Alam dan Suplemen Kesehatan			G - Diseminasi Riset Menuju Hilirisasi Produk Obat Herbal Terstandar dan Fitofarmaka			378,752,000			378,752,000
		16.	DR.4128.PCA.001 - Keputusan Registrasi Obat Bahan Alam dan Suplemen Kesehatan, serta Notifikasi Kosmetika yang Diselesaikan Sesuai Ketentuan			055 - Penilaian Uji Praklinik / Klinik Obat Bahan Alam dan Suplemen Kesehatan			E - Pengayaan Uji Praklinik/Klinik			94,937,000			94,937,000
		17.	DR.4128.PCA.001 - Keputusan Registrasi Obat Bahan Alam dan Suplemen Kesehatan, serta Notifikasi Kosmetika yang Diselesaikan Sesuai Ketentuan			051 - Registrasi Obat Bahan Alam			D - Pemantapan Koordinasi serta Peningkatan Kerja Sama Lintas Sektor dalam rangka Percepatan Izin Edar Obat Bahan Alam dan Suplemen Kesehatan			98,033,000			98,033,000
		19.	DR.4119.BIA.001 - Keputusan Hasil Pengawasan Sarana dan Produk Obat Bahan Alam dan Suplemen Kesehatan yang Diselesaikan Tepat Waktu			051 - Peningkatan Pemahaman Regulasi Terkini Terkait OBA OK SK Kepada Pelaku Usaha dan Masyarakat			A - Peningkatan Pemenuhan Ketentuan Iklan dan Penandaan Secara Konsisten oleh Pelaku Usaha OBA, OK dan SK			273,720,000			68,430,000
		20.	DR.4119.BIA.001 - Keputusan Hasil Pengawasan Sarana dan Produk Obat Bahan Alam dan Suplemen Kesehatan yang Diselesaikan Tepat Waktu			051 - Peningkatan Pemahaman Regulasi Terkini Terkait OBA OK SK Kepada Pelaku Usaha dan Masyarakat			B - Peningkatan Kewaspadaan Masyarakat Melalui Intensifikasi Informasi Hasil Pengawasan Keamanan dan Mutu OT dan SK			128,545,000			64,272,500
		21.	DR.4128.PCA.001 - Keputusan Registrasi Obat Bahan Alam dan Suplemen Kesehatan, serta Notifikasi Kosmetika yang Diselesaikan Sesuai Ketentuan			055 - Penilaian Uji Praklinik / Klinik Obat Bahan Alam dan Suplemen Kesehatan			B - Evaluasi Dokumen dan Data Uji Praklinik/Klinik Obat Bahan Alam dan Suplemen Kesehatan			259,503,000			259,503,000
		22.	DR.4119.BIA.001 - Keputusan Hasil Pengawasan Sarana dan Produk Obat Bahan Alam dan Suplemen Kesehatan yang Diselesaikan Tepat Waktu			052 - Pengawasan Penerapan Regulasi Terkini pada Pelaku Usaha OBA, OK, SK			A - Intensifikasi Pengawasan Keamanan dan Pembahasan Laporan Efek Samping OT dan SK			158,360,000			79,180,000

NO.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
		NO	RO		KOMPONEN			SUB KOMPONEN				ANGGARAN		KONTRIBUSI	
		23.	DR.4119.BIA.001 - Keputusan Hasil Pengawasan Sarana dan Produk Obat Bahan Alam dan Suplemen Kesehatan yang Diselesaikan Tepat Waktu		052 - Pengawasan Penerapan Regulasi Terkini pada Pelaku Usaha OBA, OK, SK			B - Klasterisasi Pelaku Usaha OBA, OK dan SK Untuk Tindak Lanjut Pelanggaran Penandaan				183,895,000		91,947,500	
		24.	DR.4119.BIA.001 - Keputusan Hasil Pengawasan Sarana dan Produk Obat Bahan Alam dan Suplemen Kesehatan yang Diselesaikan Tepat Waktu		052 - Pengawasan Penerapan Regulasi Terkini pada Pelaku Usaha OBA, OK, SK			D - Intensifikasi Pengawasan Keamanan dan Mutu Produk OT dan SK melalui Pendekatan Desain Baru Pengawasan				111,880,000		55,940,000	
		25.	DR.4119.BIA.001 - Keputusan Hasil Pengawasan Sarana dan Produk Obat Bahan Alam dan Suplemen Kesehatan yang Diselesaikan Tepat Waktu		052 - Pengawasan Penerapan Regulasi Terkini pada Pelaku Usaha OBA, OK, SK			E - Monitoring dan Evaluasi Implementasi Pedoman Sampling Obat Bahan Alam, Obat Kuasi dan Suplemen Kesehatan oleh UPT Badan POM				282,360,000		141,180,000	
		26.	DR.4119.BIA.001 - Keputusan Hasil Pengawasan Sarana dan Produk Obat Bahan Alam dan Suplemen Kesehatan yang Diselesaikan Tepat Waktu		052 - Pengawasan Penerapan Regulasi Terkini pada Pelaku Usaha OBA, OK, SK			F - Aksi Nasional Penanganan dan Pemberantasan Obat Tradisional mengandung Bahan Kimia Obat				218,375,000		218,375,000	
		02 - Persentase Suplemen Kesehatan yang aman dan bermutu	68	68	68	68	68	68	68	68	68	68	68	2,569,919,500	
		NO	RO		KOMPONEN			SUB KOMPONEN				ANGGARAN		KONTRIBUSI	
		1.	DR.4128.PCA.001 - Keputusan Registrasi Obat Bahan Alam dan Suplemen Kesehatan, serta Notifikasi Kosmetika yang Diselesaikan Sesuai Ketentuan		054 - Monitoring dan Evaluasi Kinerja Registrasi OT, SK dan KOS			D - Pengayaan Kompetensi SDM Bidang Registrasi OT, SK dan Kosmetik				168,000,000		168,000,000	
		2.	DR.4128.PCA.001 - Keputusan Registrasi Obat Bahan Alam dan Suplemen Kesehatan, serta Notifikasi Kosmetika yang Diselesaikan Sesuai Ketentuan		052 - Registrasi Suplemen Kesehatan			A - Intensifikasi dan Desk Registrasi Permasalahan Registrasi Produk dan Iklan Dalam Rangka Percepatan Izin Edar Suplemen Kesehatanan				427,650,000		427,650,000	
		3.	DR.4128.PCA.001 - Keputusan Registrasi Obat Bahan Alam dan Suplemen Kesehatan, serta Notifikasi Kosmetika yang Diselesaikan Sesuai Ketentuan		052 - Registrasi Suplemen Kesehatan			C - Review Hasil Penilaian Iklan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan				48,000,000		48,000,000	

NO.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
		NO	RO		KOMPONEN			SUB KOMPONEN			ANGGARAN			KONTRIBUSI	
		4.	DR.4128.PCA.001 - Keputusan Registrasi Obat Bahan Alam dan Suplemen Kesehatan, serta Notifikasi Kosmetika yang Diselesaikan Sesuai Ketentuan		054 - Monitoring dan Evaluasi Kinerja Registrasi OT, SK dan KOS			B - Penatalaksanaan Data Arsip			171,600,000			171,600,000	
		5.	DR.4128.PCA.001 - Keputusan Registrasi Obat Bahan Alam dan Suplemen Kesehatan, serta Notifikasi Kosmetika yang Diselesaikan Sesuai Ketentuan		052 - Registrasi Suplemen Kesehatan			D - Pembekalan Evaluator Obat Bahan Alam dan Suplemen Kesehatan Tematik			363,020,000			363,020,000	
		6.	DR.4128.PCA.001 - Keputusan Registrasi Obat Bahan Alam dan Suplemen Kesehatan, serta Notifikasi Kosmetika yang Diselesaikan Sesuai Ketentuan		052 - Registrasi Suplemen Kesehatan			B - Rapat Evaluasi Registrasi Iklan Suplemen Kesehatan			183,080,000			183,080,000	
		7.	DR.4128.PCA.001 - Keputusan Registrasi Obat Bahan Alam dan Suplemen Kesehatan, serta Notifikasi Kosmetika yang Diselesaikan Sesuai Ketentuan		054 - Monitoring dan Evaluasi Kinerja Registrasi OT, SK dan KOS			A - Penguatan Kolaborasi Antar Sektor untuk Peningkatan Kinerja di bidang Registrasi Obat Bahan Alam, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik			276,173,000			276,173,000	
		8.	DR.4128.PCA.001 - Keputusan Registrasi Obat Bahan Alam dan Suplemen Kesehatan, serta Notifikasi Kosmetika yang Diselesaikan Sesuai Ketentuan		054 - Monitoring dan Evaluasi Kinerja Registrasi OT, SK dan KOS			C - Pengelolaan dan Pelaporan Penerimaan PNPB di lingkup Direktorat Registrasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik			50,160,000			50,160,000	
		9.	DR.4119.BIA.001 - Keputusan Hasil Pengawasan Sarana dan Produk Obat Bahan Alam dan Suplemen Kesehatan yang Diselesaikan Tepat Waktu		051 - Peningkatan Pemahaman Regulasi Terkini Terkait OBA OK SK Kepada Pelaku Usaha dan Masyarakat			A - Peningkatan Pemenuhan Ketentuan Iklan dan Penandaan Secara Konsisten oleh Pelaku Usaha OBA, OK dan SK			273,720,000			68,430,000	
		10.	DR.4119.BIA.001 - Keputusan Hasil Pengawasan Sarana dan Produk Obat Bahan Alam dan Suplemen Kesehatan yang Diselesaikan Tepat Waktu		051 - Peningkatan Pemahaman Regulasi Terkini Terkait OBA OK SK Kepada Pelaku Usaha dan Masyarakat			B - Peningkatan Kewaspadaan Masyarakat Melalui Intensifikasi Informasi Hasil Pengawasan Keamanan dan Mutu OT dan SK			128,545,000			64,272,500	
		11.	DR.4119.BIA.001 - Keputusan Hasil Pengawasan Sarana dan Produk Obat Bahan Alam dan Suplemen Kesehatan yang Diselesaikan Tepat Waktu		052 - Pengawasan Penerapan Regulasi Terkini pada Pelaku Usaha OBA, OK, SK			A - Intensifikasi Pengawasan Keamanan dan Pembahasan Laporan Efek Samping OT dan SK			158,360,000			79,180,000	

NO.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM		TARGET												ANGGARAN
				B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
		NO	RO	KOMPONEN		SUB KOMPONEN		ANGGARAN		KONTRIBUSI						
		12.	DR.4119.BIA.001 - Keputusan Hasil Pengawasan Sarana dan Produk Obat Bahan Alam dan Suplemen Kesehatan yang Diselesaikan Tepat Waktu	052 - Pengawasan Penerapan Regulasi Terkini pada Pelaku Usaha OBA, OK, SK		B - Klasterisasi Pelaku Usaha OBA, OK dan SK Untuk Tindak Lanjut Pelanggaran Penandaan		183,895,000		91,947,500						
		13.	DR.4119.BIA.001 - Keputusan Hasil Pengawasan Sarana dan Produk Obat Bahan Alam dan Suplemen Kesehatan yang Diselesaikan Tepat Waktu	052 - Pengawasan Penerapan Regulasi Terkini pada Pelaku Usaha OBA, OK, SK		D - Intensifikasi Pengawasan Keamanan dan Mutu Produk OT dan SK melalui Pendekatan Desain Baru Pengawasan		111,880,000		55,940,000						
		14.	DR.4119.BIA.001 - Keputusan Hasil Pengawasan Sarana dan Produk Obat Bahan Alam dan Suplemen Kesehatan yang Diselesaikan Tepat Waktu	052 - Pengawasan Penerapan Regulasi Terkini pada Pelaku Usaha OBA, OK, SK		E - Monitoring dan Evaluasi Implementasi Pedoman Sampling Obat Bahan Alam, Obat Kuasi dan Suplemen Kesehatan oleh UPT Badan POM		282,360,000		141,180,000						
		15.	DR.4119.BIA.001 - Keputusan Hasil Pengawasan Sarana dan Produk Obat Bahan Alam dan Suplemen Kesehatan yang Diselesaikan Tepat Waktu	054 - Peningkatan Koordinasi dalam penguatan dan efektifitas pengawasan OBA OK SK		F - Peningkatan Kompetensi Petugas Badan POM dan UPT Badan POM Dalam Pendampingan Monitoring Efek Sampling OT dan SK serta Peningkatan Peran Tenaga Medis, Pelaku Usaha dan Masyarakat di Daerah		402,573,000		201,286,500						
		16.	DR.4119.BIC.001 - UPT yang dilakukan pendampingan untuk melakukan pengawasan obat bahan alam dan suplemen kesehatan sesuai standar	051 - Pendampingan, Supervisi kepada UPT		A - Supervisi UPT dalam rangka Pelaksanaan Pengawasan OT dan SK		330,000,000		66,000,000						
		17.	DR.4119.BIC.001 - UPT yang dilakukan pendampingan untuk melakukan pengawasan obat bahan alam dan suplemen kesehatan sesuai standar	052 - Peningkatan Kualitas Pengambilan Keputusan Hasil Pengawasan Obat Bahan Alam dan Suplemen Kesehatan oleh Petugas UPT Badan POM		A - Pelatihan Sampling Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan Tingkat Pusat dan Daerah		229,910,000		45,982,000						
		18.	DR.4119.BIC.001 - UPT yang dilakukan pendampingan untuk melakukan pengawasan obat bahan alam dan suplemen kesehatan sesuai standar	052 - Peningkatan Kualitas Pengambilan Keputusan Hasil Pengawasan Obat Bahan Alam dan Suplemen Kesehatan oleh Petugas UPT Badan POM		B - Peningkatan Kompetensi Petugas UPT Badan POM dalam Kesesuaian Evaluasi Hasil Pengawasan Iklan dan Penandaan		175,250,000		35,050,000						
		19.	DR.4119.BIC.001 - UPT yang dilakukan pendampingan untuk melakukan pengawasan obat bahan alam dan suplemen kesehatan sesuai standar	052 - Peningkatan Kualitas Pengambilan Keputusan Hasil Pengawasan Obat Bahan Alam dan Suplemen Kesehatan oleh Petugas UPT Badan POM		C - Training GMP Topik Khusus bagi Inspektur CPOTB		164,840,000		32,968,000						

NO.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
		03 - Persentase Kosmetik yang aman dan bermutu		62	62	62	62	62	62	62	62	62	62	62	3,552,695,000
			NO	RO		KOMPONEN		SUB KOMPONEN		ANGGARAN		KONTRIBUSI			
			1.	DR.4128.PCA.001 - Keputusan Registrasi Obat Bahan Alam dan Suplemen Kesehatan, serta Notifikasi Kosmetika yang Diselesaikan Sesuai Ketentuan		053 - Registrasi Notifikasi Kosmetik		A - Risk Analisis Data Produk Kosmetik		245,890,000		245,890,000			
			2.	DR.4128.PCA.001 - Keputusan Registrasi Obat Bahan Alam dan Suplemen Kesehatan, serta Notifikasi Kosmetika yang Diselesaikan Sesuai Ketentuan		053 - Registrasi Notifikasi Kosmetik		F - Peningkatan Kompetensi Evaluator Bidang Kosmetika		257,665,000		257,665,000			
			3.	DR.4128.PCA.001 - Keputusan Registrasi Obat Bahan Alam dan Suplemen Kesehatan, serta Notifikasi Kosmetika yang Diselesaikan Sesuai Ketentuan		053 - Registrasi Notifikasi Kosmetik		B - Pembahasan aspek keamanan dan klaim kosmetika		200,375,000		200,375,000			
			4.	DR.4121.BIA.001 - Keputusan Hasil Pengawasan Kosmetika yang diselesaikan Tepat Waktu		051 - Pelaksanaan Koordinasi dalam rangka tindak lanjut pengawasan keamanan dan mutu Kosmetik		A - Intensifikasi Penelusuran Bahan Berbahaya/ Dilarang dalam Kosmetik		223,980,000		223,980,000			
			5.	DR.4121.BIA.001 - Keputusan Hasil Pengawasan Kosmetika yang diselesaikan Tepat Waktu		051 - Pelaksanaan Koordinasi dalam rangka tindak lanjut pengawasan keamanan dan mutu Kosmetik		B - Public Awareness Bahaya Kosmetika Mengandung Bahan Berbahaya / Dilarang dan Penyelenggaraan Public Warning		242,450,000		242,450,000			
			6.	DR.4121.BIA.001 - Keputusan Hasil Pengawasan Kosmetika yang diselesaikan Tepat Waktu		051 - Pelaksanaan Koordinasi dalam rangka tindak lanjut pengawasan keamanan dan mutu Kosmetik		C - Rapat Pembahasan Aktual Direktorat Pengawasan Kosmetik		32,646,000		32,646,000			
			7.	DR.4121.BIA.001 - Keputusan Hasil Pengawasan Kosmetika yang diselesaikan Tepat Waktu		051 - Pelaksanaan Koordinasi dalam rangka tindak lanjut pengawasan keamanan dan mutu Kosmetik		D - Pemantapan Kerja Pengawasan Kosmetik serta Peningkatan Kerjasama Lintas Sektor		413,850,000		413,850,000			
			8.	DR.4121.BIA.001 - Keputusan Hasil Pengawasan Kosmetika yang diselesaikan Tepat Waktu		052 - Pelaksanaan Koordinasi dalam rangka tindak lanjut pengawasan informasi dan promosi kosmetik		A - Intensifikasi Pengawasan Post Market Penandaan Kosmetik		519,700,000		519,700,000			
			9.	DR.4121.BIA.001 - Keputusan Hasil Pengawasan Kosmetika yang diselesaikan Tepat Waktu		052 - Pelaksanaan Koordinasi dalam rangka tindak lanjut pengawasan informasi dan promosi kosmetik		C - Pencegahan Terjadinya Pelanggaran dan Kecurangan Dalam Penandaan Kosmetik		148,400,000		148,400,000			

[illegible]

NO.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
		Suplemen Kesehatan dan Kosmetik													
		NO	RO	KOMPONEN				SUB KOMPONEN		ANGGARAN	KONTRIBUSI				
		2.	DR.4129.PFA.001 - Standar Obat Bahan Alam, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang Disusun	051 - Penyusunan dan Pembahasan Standar Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik				B - Penyusunan dan Pembahasan Regulasi di bidang Obat Kuasi dan Suplemen Kesehatan		500,000,000	500,000,000				
		3.	DR.4129.PFA.001 - Standar Obat Bahan Alam, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang Disusun	051 - Penyusunan dan Pembahasan Standar Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik				C - Penyusunan dan Pembahasan Regulasi di bidang Kosmetik		750,000,000	750,000,000				
		4.	DR.4129.PFA.001 - Standar Obat Bahan Alam, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang Disusun	051 - Penyusunan dan Pembahasan Standar Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik				A - Penyusunan dan Pembahasan Regulasi di bidang Obat Bahan Alam		500,000,000	500,000,000				
		5.	DR.4129.PFA.001 - Standar Obat Bahan Alam, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang Disusun	054 - Perencanaan/Monitoring/Evaluasi pengelolaan dan kinerja di bidang OT, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik				A - Brainstorming / Perencanaan penyusunan standar dibidang OT, SK dan Kos		44,500,000	44,500,000				
		6.	DR.4129.PFA.001 - Standar Obat Bahan Alam, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang Disusun	054 - Perencanaan/Monitoring/Evaluasi pengelolaan dan kinerja di bidang OT, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik				B - Peningkatan Kompetensi Pegawai		256,350,000	256,350,000				
		7.	DR.4129.PFA.001 - Standar Obat Bahan Alam, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang Disusun	055 - Sosialisasi/Konsultasi/Koordinasi untuk penyusunan di bidang OT, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik				A - Sosialisasi Regulasi di bidang Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik		250,000,000	250,000,000				
		8.	DR.4129.PFA.001 - Standar Obat Bahan Alam, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang Disusun	055 - Sosialisasi/Konsultasi/Koordinasi untuk penyusunan di bidang OT, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik				B - Peningkatan Kerjasama Lintas Sektor		500,000,000	500,000,000				
		9.	DR.4129.PFA.001 - Standar Obat Bahan Alam, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang Disusun	056 - Monitoring dan evaluasi kinerja standardisasi OT, Suplemen Kesehatan, Kosmetik				A - Monitoring dan Evaluasi Capaian Kinerja		297,916,000	297,916,000				
		10.	DR.4129.PFA.002 - Standar obat bahan alam dan suplemen kesehatan yang disusun berkontribusi dalam penanganan stunting	051 - Penyusunan dan Pembahasan Standar OBA, SK, dan Kos				A - Penyusunan dan pembahasan regulasi Obat Bahan Alam		250,000,000	250,000,000				

NO.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET												ANGGARAN	
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12		
		NO	RO		KOMPONEN						SUB KOMPONEN			ANGGARAN		KONTRIBUSI
		11.	DR.4129.PFA.002 - Standar obat bahan alam dan suplemen kesehatan yang disusun berkontribusi dalam penanganan stunting		051 - Penyusunan dan Pembahasan Standar OBA, SK, dan Kos						B - Penyusunan dan Pembahasan regulasi Suplemen kesehatan			250,000,000		250,000,000
		05 - Persentase rekomendasi hasil pengawasan Obat Bahan Alam Suplemen Kesehatan, Obat Kuasi dan Kosmetik yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor			83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	902,584,000
		NO	RO		KOMPONEN			SUB KOMPONEN			ANGGARAN		KONTRIBUSI			
		1.	DR.4119.BIC.002 - keputusan/rekomendasi hasil pengawasan yang dikirimkan ke lintas sektor		051 - Peningkatan Koordinasi dalam Penguatan dan Efektifitas Pengawasan OBA OK SK			B - Intensifikasi Pengawasan Informasi dan Promosi di Media Online			217,680,000		217,680,000			
		2.	DR.4119.BIC.002 - keputusan/rekomendasi hasil pengawasan yang dikirimkan ke lintas sektor		052 - Peningkatan pemahaman Regulasi Terkini Terkait OBA OK SK			A - Perkuatan literasi masyarakat terkait informasi dan promosi melalui optimalisasi pemanfaatan media sosial bersinergi dengan pemangku kepentingan			188,860,000		188,860,000			
		3.	DR.4119.BIC.002 - keputusan/rekomendasi hasil pengawasan yang dikirimkan ke lintas sektor		051 - Peningkatan Koordinasi dalam Penguatan dan Efektifitas Pengawasan OBA OK SK			A - Perkuatan Jejaring Pengawasan Informasi dan Promosi Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan			93,460,000		93,460,000			
		5.	DR.4121.BIC.001 - Keputusan/Rekomendasi hasil pengawasan Kosmetik yang dikirimkan ke lintas sektor		051 - Koordinasi Lintas Sektor Pengawasan Kosmetik			B - Penguatan Koordinasi Lintas Sektor Pengawasan Promosi Kosmetik di Era Revolusi Industri 4.0			269,624,000		269,624,000			
		6.	DR.4121.BIC.001 - Keputusan/Rekomendasi hasil pengawasan Kosmetik yang dikirimkan ke lintas sektor		051 - Koordinasi Lintas Sektor Pengawasan Kosmetik			A - Implementasi Post Border Patrol Untuk Penguatan Pengawasan Kosmetik Impor Ilegal			132,960,000		132,960,000			
		06 - Persentase sarana produksi Obat Bahan Alam yang memenuhi ketentuan		86	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86	354,341,000	
		NO	RO		KOMPONEN			SUB KOMPONEN			ANGGARAN		KONTRIBUSI			
		1.	DR.4119.BIA.001 - Keputusan Hasil		052 - Pengawasan Penerapan Regulasi			C - Inspeksi Komprehensif dalam			659,550,000		164,887,500			

NO.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET												ANGGARAN	
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12		
		NO	RO		KOMPONEN				SUB KOMPONEN				ANGGARAN		KONTRIBUSI	
			Pengawasan Sarana dan Produk Obat Bahan Alam dan Suplemen Kesehatan yang Diselesaikan Tepat Waktu		Terkini pada Pelaku Usaha OBA, OK, SK				Rangka Tindak Lanjut Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan Berbasis Risiko							
		2.	DR.4119.BIA.001 - Keputusan Hasil Pengawasan Sarana dan Produk Obat Bahan Alam dan Suplemen Kesehatan yang Diselesaikan Tepat Waktu		054 - Peningkatan Koordinasi dalam penguatan dan efektifitas pengawasan OBA OK SK				B - Pertemuan Koordinasi Inspektur OT dan SK dalam Rangka Memaksimalkan Kinerja Pengawasan				173,150,000		43,287,500	
		3.	DR.4119.BIA.001 - Keputusan Hasil Pengawasan Sarana dan Produk Obat Bahan Alam dan Suplemen Kesehatan yang Diselesaikan Tepat Waktu		054 - Peningkatan Koordinasi dalam penguatan dan efektifitas pengawasan OBA OK SK				A - Pembentukan Inspektur Junior Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan				224,664,000		56,166,000	
		5.	DR.4119.BIC.001 - UPT yang dilakukan pendampingan untuk melakukan pengawasan obat bahan alam dan suplemen kesehatan sesuai standar		052 - Peningkatan Kualitas Pengambilan Keputusan Hasil Pengawasan Obat Bahan Alam dan Suplemen Kesehatan oleh Petugas UPT Badan POM				A - Pelatihan Sampling Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan Tingkat Pusat dan Daerah				229,910,000		22,991,000	
		6.	DR.4119.BIC.001 - UPT yang dilakukan pendampingan untuk melakukan pengawasan obat bahan alam dan suplemen kesehatan sesuai standar		052 - Peningkatan Kualitas Pengambilan Keputusan Hasil Pengawasan Obat Bahan Alam dan Suplemen Kesehatan oleh Petugas UPT Badan POM				B - Peningkatan Kompetensi Petugas UPT Badan POM dalam Kesesuaian Evaluasi Hasil Pengawasan Iklan dan Penandaan				175,250,000		17,525,000	
		7.	DR.4119.BIC.001 - UPT yang dilakukan pendampingan untuk melakukan pengawasan obat bahan alam dan suplemen kesehatan sesuai standar		052 - Peningkatan Kualitas Pengambilan Keputusan Hasil Pengawasan Obat Bahan Alam dan Suplemen Kesehatan oleh Petugas UPT Badan POM				C - Training GMP Topik Khusus bagi Inspektur CPOTB				164,840,000		16,484,000	
		8.	DR.4119.BIC.001 - UPT yang dilakukan pendampingan untuk melakukan pengawasan obat bahan alam dan suplemen kesehatan sesuai standar		051 - Pendampingan, Supervisi kepada UPT				A - Supervisi UPT dalam rangka Pelaksanaan Pengawasan OT dan SK				330,000,000		33,000,000	
		07 - Persentase sarana produksi Suplemen Kesehatan yang memenuhi ketentuan		85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	354,341,000
		NO	RO		KOMPONEN				SUB KOMPONEN				ANGGARAN		KONTRIBUSI	
		1.	DR.4119.BIC.001 - UPT yang dilakukan pendampingan untuk melakukan pengawasan obat bahan alam dan		052 - Peningkatan Kualitas Pengambilan Keputusan Hasil Pengawasan Obat Bahan Alam dan Suplemen				A - Pelatihan Sampling Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan Tingkat Pusat dan Daerah				229,910,000		22,991,000	

NO.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
		NO	RO		KOMPONEN				SUB KOMPONEN				ANGGARAN		KONTRIBUSI
			suplemen kesehatan sesuai standar		Kesehatan oleh Petugas UPT Badan POM										
		2.	DR.4119.BIC.001 - UPT yang dilakukan pendampingan untuk melakukan pengawasan obat bahan alam dan suplemen kesehatan sesuai standar		052 - Peningkatan Kualitas Pengambilan Keputusan Hasil Pengawasan Obat Bahan Alam dan Suplemen Kesehatan oleh Petugas UPT Badan POM				C - Training GMP Topik Khusus bagi Inspektur CPOTB				164,840,000		16,484,000
		3.	DR.4119.BIA.001 - Keputusan Hasil Pengawasan Sarana dan Produk Obat Bahan Alam dan Suplemen Kesehatan yang Diselesaikan Tepat Waktu		052 - Pengawasan Penerapan Regulasi Terkini pada Pelaku Usaha OBA, OK, SK				C - Inspeksi Komprehensif dalam Rangka Tindak Lanjut Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan Berbasis Risiko				659,550,000		164,887,500
		5.	DR.4119.BIA.001 - Keputusan Hasil Pengawasan Sarana dan Produk Obat Bahan Alam dan Suplemen Kesehatan yang Diselesaikan Tepat Waktu		054 - Peningkatan Koordinasi dalam penguatan dan efektifitas pengawasan OBA OK SK				A - Pembentukan Inspektur Junior Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan				224,664,000		56,166,000
		6.	DR.4119.BIC.001 - UPT yang dilakukan pendampingan untuk melakukan pengawasan obat bahan alam dan suplemen kesehatan sesuai standar		051 - Pendampingan, Supervisi kepada UPT				A - Supervisi UPT dalam rangka Pelaksanaan Pengawasan OT dan SK				330,000,000		33,000,000
		7.	DR.4119.BIA.001 - Keputusan Hasil Pengawasan Sarana dan Produk Obat Bahan Alam dan Suplemen Kesehatan yang Diselesaikan Tepat Waktu		054 - Peningkatan Koordinasi dalam penguatan dan efektifitas pengawasan OBA OK SK				B - Pertemuan Koordinasi Inspektur OT dan SK dalam Rangka Memaksimalkan Kinerja Pengawasan				173,150,000		43,287,500
		8.	DR.4119.BIC.001 - UPT yang dilakukan pendampingan untuk melakukan pengawasan obat bahan alam dan suplemen kesehatan sesuai standar		052 - Peningkatan Kualitas Pengambilan Keputusan Hasil Pengawasan Obat Bahan Alam dan Suplemen Kesehatan oleh Petugas UPT Badan POM				B - Peningkatan Kompetensi Petugas UPT Badan POM dalam Kesesuaian Evaluasi Hasil Pengawasan Iklan dan Penandaan				175,250,000		17,525,000
		08 - Persentase sarana produksi Kosmetik yang memenuhi ketentuan		81	81	81	81	81	81	81	81	81	81	81	1,694,533,000
		NO	RO		KOMPONEN				SUB KOMPONEN				ANGGARAN		KONTRIBUSI
		1.	DR.4128.BIA.001 - Keputusan penilaian Dokumen Informasi Produk (DIP) kosmetik yang diselesaikan sesuai standar		051 - Penilaian DIP				A - Penilaian DIP				187,991,000		187,991,000
		3.	DR.4121.BIA.001 - Keputusan Hasil Pengawasan Kosmetika		053 - Pelaksanaan Koordinasi dalam rangka tindak lanjut				A - Intensifikasi Pemeriksaan dan Penelusuran Sarana Produksi, Distribusi dan				415,440,000		207,720,000

[illegible]

NO.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
		NO	RO		KOMPONEN				SUB KOMPONEN				ANGGARAN		KONTRIBUSI
		1.	DR.4119.BIA.001 - Keputusan Hasil Pengawasan Sarana dan Produk Obat Bahan Alam dan Suplemen Kesehatan yang Diselesaikan Tepat Waktu		052 - Pengawasan Penerapan Regulasi Terkini pada Pelaku Usaha OBA, OK, SK				C - Inspeksi Komprehensif dalam Rangka Tindak Lanjut Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan Berbasis Risiko				659,550,000		164,887,500
		2.	DR.4119.BIC.001 - UPT yang dilakukan pendampingan untuk melakukan pengawasan obat bahan alam dan suplemen kesehatan sesuai standar		051 - Pendampingan, Supervisi kepada UPT				A - Supervisi UPT dalam rangka Pelaksanaan Pengawasan OT dan SK				330,000,000		33,000,000
		3.	DR.4119.BIC.001 - UPT yang dilakukan pendampingan untuk melakukan pengawasan obat bahan alam dan suplemen kesehatan sesuai standar		052 - Peningkatan Kualitas Pengambilan Keputusan Hasil Pengawasan Obat Bahan Alam dan Suplemen Kesehatan oleh Petugas UPT Badan POM				C - Training GMP Topik Khusus bagi Inspektur CPOTB				164,840,000		16,484,000
		4.	DR.4119.BIA.001 - Keputusan Hasil Pengawasan Sarana dan Produk Obat Bahan Alam dan Suplemen Kesehatan yang Diselesaikan Tepat Waktu		054 - Peningkatan Koordinasi dalam penguatan dan efektifitas pengawasan OBA OK SK				A - Pembentukan Inspektur Junior Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan				224,664,000		56,166,000
		5.	DR.4119.BIC.001 - UPT yang dilakukan pendampingan untuk melakukan pengawasan obat bahan alam dan suplemen kesehatan sesuai standar		052 - Peningkatan Kualitas Pengambilan Keputusan Hasil Pengawasan Obat Bahan Alam dan Suplemen Kesehatan oleh Petugas UPT Badan POM				A - Pelatihan Sampling Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan Tingkat Pusat dan Daerah				229,910,000		22,991,000
		7.	DR.4119.BIA.001 - Keputusan Hasil Pengawasan Sarana dan Produk Obat Bahan Alam dan Suplemen Kesehatan yang Diselesaikan Tepat Waktu		054 - Peningkatan Koordinasi dalam penguatan dan efektifitas pengawasan OBA OK SK				B - Pertemuan Koordinasi Inspektur OT dan SK dalam Rangka Memaksimalkan Kinerja Pengawasan				173,150,000		43,287,500
		8.	DR.4119.BIC.001 - UPT yang dilakukan pendampingan untuk melakukan pengawasan obat bahan alam dan suplemen kesehatan sesuai standar		052 - Peningkatan Kualitas Pengambilan Keputusan Hasil Pengawasan Obat Bahan Alam dan Suplemen Kesehatan oleh Petugas UPT Badan POM				B - Peningkatan Kompetensi Petugas UPT Badan POM dalam Kesesuaian Evaluasi Hasil Pengawasan Iklan dan Penandaan				175,250,000		17,525,000
		10 - Persentase fasilitas distribusi Suplemen Kesehatan yang memenuhi ketentuan		89	89	89	89	89	89	89	89	89	89	89	354,341,000
		NO	RO		KOMPONEN				SUB KOMPONEN				ANGGARAN		KONTRIBUSI
		1.	DR.4119.BIC.001 - UPT yang dilakukan		051 - Pendampingan, Supervisi kepada UPT				A - Supervisi UPT dalam rangka Pelaksanaan				330,000,000		33,000,000

NO.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
		NO	RO		KOMPONEN			SUB KOMPONEN			ANGGARAN			KONTRIBUSI	
			pendampingan untuk melakukan pengawasan obat bahan alam dan suplemen kesehatan sesuai standar					Pengawasan OT dan SK							
		2.	DR.4119.BIC.001 - UPT yang dilakukan pendampingan untuk melakukan pengawasan obat bahan alam dan suplemen kesehatan sesuai standar		052 - Peningkatan Kualitas Pengambilan Keputusan Hasil Pengawasan Obat Bahan Alam dan Suplemen Kesehatan oleh Petugas UPT Badan POM			C - Training GMP Topik Khusus bagi Inspektur CPOTB			164,840,000			16,484,000	
		3.	DR.4119.BIC.001 - UPT yang dilakukan pendampingan untuk melakukan pengawasan obat bahan alam dan suplemen kesehatan sesuai standar		052 - Peningkatan Kualitas Pengambilan Keputusan Hasil Pengawasan Obat Bahan Alam dan Suplemen Kesehatan oleh Petugas UPT Badan POM			A - Pelatihan Sampling Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan Tingkat Pusat dan Daerah			229,910,000			22,991,000	
		4.	DR.4119.BIA.001 - Keputusan Hasil Pengawasan Sarana dan Produk Obat Bahan Alam dan Suplemen Kesehatan yang Diselesaikan Tepat Waktu		054 - Peningkatan Koordinasi dalam penguatan dan efektifitas pengawasan OBA OK SK			A - Pembentukan Inspektur Junior Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan			224,664,000			56,166,000	
		5.	DR.4119.BIA.001 - Keputusan Hasil Pengawasan Sarana dan Produk Obat Bahan Alam dan Suplemen Kesehatan yang Diselesaikan Tepat Waktu		054 - Peningkatan Koordinasi dalam penguatan dan efektifitas pengawasan OBA OK SK			B - Pertemuan Koordinasi Inspektur OT dan SK dalam Rangka Memaksimalkan Kinerja Pengawasan			173,150,000			43,287,500	
		7.	DR.4119.BIA.001 - Keputusan Hasil Pengawasan Sarana dan Produk Obat Bahan Alam dan Suplemen Kesehatan yang Diselesaikan Tepat Waktu		052 - Pengawasan Penerapan Regulasi Terkini pada Pelaku Usaha OBA, OK, SK			C - Inspeksi Komprehensif dalam Rangka Tindak Lanjut Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan Berbasis Risiko			659,550,000			164,887,500	
		8.	DR.4119.BIC.001 - UPT yang dilakukan pendampingan untuk melakukan pengawasan obat bahan alam dan suplemen kesehatan sesuai standar		052 - Peningkatan Kualitas Pengambilan Keputusan Hasil Pengawasan Obat Bahan Alam dan Suplemen Kesehatan oleh Petugas UPT Badan POM			B - Peningkatan Kompetensi Petugas UPT Badan POM dalam Kesesuaian Evaluasi Hasil Pengawasan Iklan dan Penandaan			175,250,000			17,525,000	
		11 - Persentase fasilitas distribusi Kosmetik yang memenuhi ketentuan		78	78	78	78	78	78	78	78	78	78	78	957,720,000
		NO	RO		KOMPONEN			SUB KOMPONEN			ANGGARAN			KONTRIBUSI	
		1.	DR.4121.QDI.002 - BUPN kosmetik yang telah diintervensi dalam pemenuhan ketentuan		051 - Pelaksanaan Koordinasi Dalam Rangka Tindak Lanjut Pengawasan Sarana BUPN Kosmeti			C - Upaya kolaboratif dalam rangka pengembangan dan pengawasan usaha kontrak produksi kosmetik			419,800,000			419,800,000	

NO.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
		NO	RO		KOMPONEN			SUB KOMPONEN					ANGGARAN		KONTRIBUSI
		2.	DR.4121.BIA.001 - Keputusan Hasil Pengawasan Kosmetika yang diselesaikan Tepat Waktu		053 - Pelaksanaan Koordinasi dalam rangka tindak lanjut pengawasan sarana produksi dan distribusi kosmetik			A - Intensifikasi Pemeriksaan dan Penelusuran Sarana Produksi, Distribusi dan Importir yang Berdasarkan Hasil Pengawasan Diduga Memproduksi dan Mengedarkan Kosmetika Ilegal dan Tidak Memenuhi Syarat					415,440,000		207,720,000
		3.	DR.4121.QDI.002 - BUPN kosmetik yang telah diintervensi dalam pemenuhan ketentuan		051 - Pelaksanaan Koordinasi Dalam Rangka Tindak Lanjut Pengawasan Sarana BUPN Kosmeti			A - Intensifikasi Pemeriksaan Sarana BUPN					201,320,000		201,320,000
		4.	DR.4121.QDI.002 - BUPN kosmetik yang telah diintervensi dalam pemenuhan ketentuan		051 - Pelaksanaan Koordinasi Dalam Rangka Tindak Lanjut Pengawasan Sarana BUPN Kosmeti			B - Penyusunan Agenda Kolaborasi Pemangku Kepentingan dalam rangka Pengembangan dan Pengawasan Usaha Kontrak Produksi Kosmetik					128,880,000		128,880,000
		12 - Persentase iklan Obat Bahan Alam yang memenuhi ketentuan		78	78	78	78	78	78	78	78	78	78	78	500,130,000
		NO	RO		KOMPONEN			SUB KOMPONEN					ANGGARAN		KONTRIBUSI
		1.	DR.4119.BIA.001 - Keputusan Hasil Pengawasan Sarana dan Produk Obat Bahan Alam dan Suplemen Kesehatan yang Diselesaikan Tepat Waktu		054 - Peningkatan Koordinasi dalam penguatan dan efektifitas pengawasan OBA OK SK			E - Pengembangan Kompetensi Petugas Pengawas OT dan SK melalui partisipasi aktif dalam kegiatan Internasional					270,000,000		135,000,000
		3.	DR.4119.BIC.001 - UPT yang dilakukan pendampingan untuk melakukan pengawasan obat bahan alam dan suplemen kesehatan sesuai standar		051 - Pendampingan, Supervisi kepada UPT			A - Supervisi UPT dalam rangka Pelaksanaan Pengawasan OT dan SK					330,000,000		33,000,000
		4.	DR.4119.BIC.001 - UPT yang dilakukan pendampingan untuk melakukan pengawasan obat bahan alam dan suplemen kesehatan sesuai standar		052 - Peningkatan Kualitas Pengambilan Keputusan Hasil Pengawasan Obat Bahan Alam dan Suplemen Kesehatan oleh Petugas UPT Badan POM			B - Peningkatan Kompetensi Petugas UPT Badan POM dalam Kesesuaian Evaluasi Hasil Pengawasan Iklan dan Penandaan					175,250,000		17,525,000
		5.	DR.4119.BIC.001 - UPT yang dilakukan pendampingan untuk melakukan pengawasan obat bahan alam dan suplemen kesehatan sesuai standar		052 - Peningkatan Kualitas Pengambilan Keputusan Hasil Pengawasan Obat Bahan Alam dan Suplemen Kesehatan oleh Petugas UPT Badan POM			C - Training GMP Topik Khusus bagi Inspektur CPOTB					164,840,000		16,484,000

NO.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
		NO	RO		KOMPONEN			SUB KOMPONEN				ANGGARAN		KONTRIBUSI	
		6.	DR.4119.BIA.001 - Keputusan Hasil Pengawasan Sarana dan Produk Obat Bahan Alam dan Suplemen Kesehatan yang Diselesaikan Tepat Waktu		054 - Peningkatan Koordinasi dalam penguatan dan efektifitas pengawasan OBA OK SK			D - Capacity Building Direktorat Pengawasan OT dan SK				413,400,000		206,700,000	
		7.	DR.4119.BIC.001 - UPT yang dilakukan pendampingan untuk melakukan pengawasan obat bahan alam dan suplemen kesehatan sesuai standar		052 - Peningkatan Kualitas Pengambilan Keputusan Hasil Pengawasan Obat Bahan Alam dan Suplemen Kesehatan oleh Petugas UPT Badan POM			A - Pelatihan Sampling Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan Tingkat Pusat dan Daerah				229,910,000		22,991,000	
		8.	DR.4119.BIA.001 - Keputusan Hasil Pengawasan Sarana dan Produk Obat Bahan Alam dan Suplemen Kesehatan yang Diselesaikan Tepat Waktu		051 - Peningkatan Pemahaman Regulasi Terkini Terkait OBA OK SK Kepada Pelaku Usaha dan Masyarakat			A - Peningkatan Pemenuhan Ketentuan Iklan dan Penandaan Secara Konsisten oleh Pelaku Usaha OBA, OK dan SK				273,720,000		68,430,000	
		13 - Persentase iklan Suplemen Kesehatan yang memenuhi ketentuan		87	87	87	87	87	87	87	87	87	87	87	500,130,000
		NO	RO		KOMPONEN			SUB KOMPONEN				ANGGARAN		KONTRIBUSI	
		1.	DR.4119.BIC.001 - UPT yang dilakukan pendampingan untuk melakukan pengawasan obat bahan alam dan suplemen kesehatan sesuai standar		052 - Peningkatan Kualitas Pengambilan Keputusan Hasil Pengawasan Obat Bahan Alam dan Suplemen Kesehatan oleh Petugas UPT Badan POM			C - Training GMP Topik Khusus bagi Inspektur CPOTB				164,840,000		16,484,000	
		3.	DR.4119.BIA.001 - Keputusan Hasil Pengawasan Sarana dan Produk Obat Bahan Alam dan Suplemen Kesehatan yang Diselesaikan Tepat Waktu		051 - Peningkatan Pemahaman Regulasi Terkini Terkait OBA OK SK Kepada Pelaku Usaha dan Masyarakat			A - Peningkatan Pemenuhan Ketentuan Iklan dan Penandaan Secara Konsisten oleh Pelaku Usaha OBA, OK dan SK				273,720,000		68,430,000	
		4.	DR.4119.BIA.001 - Keputusan Hasil Pengawasan Sarana dan Produk Obat Bahan Alam dan Suplemen Kesehatan yang Diselesaikan Tepat Waktu		054 - Peningkatan Koordinasi dalam penguatan dan efektifitas pengawasan OBA OK SK			D - Capacity Building Direktorat Pengawasan OT dan SK				413,400,000		206,700,000	
		5.	DR.4119.BIA.001 - Keputusan Hasil Pengawasan Sarana dan Produk Obat Bahan Alam dan Suplemen Kesehatan yang Diselesaikan Tepat Waktu		054 - Peningkatan Koordinasi dalam penguatan dan efektifitas pengawasan OBA OK SK			E - Pengembangan Kompetensi Petugas Pengawas OT dan SK melalui partisipasi aktif dalam kegiatan Internasional				270,000,000		135,000,000	
6.	DR.4119.BIC.001 - UPT yang dilakukan pendampingan untuk melakukan pengawasan obat bahan alam dan		052 - Peningkatan Kualitas Pengambilan Keputusan Hasil Pengawasan Obat Bahan Alam dan Suplemen			B - Peningkatan Kompetensi Petugas UPT Badan POM dalam Kesesuaian Evaluasi				175,250,000		17,525,000			

NO.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET												ANGGARAN	
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12		
		NO	RO			KOMPONEN			SUB KOMPONEN			ANGGARAN			KONTRIBUSI	
			suplemen kesehatan sesuai standar			Kesehatan oleh Petugas UPT Badan POM			Hasil Pengawasan Iklan dan Penandaan							
		7.	DR.4119.BIC.001 - UPT yang dilakukan pendampingan untuk melakukan pengawasan obat bahan alam dan suplemen kesehatan sesuai standar			052 - Peningkatan Kualitas Pengambilan Keputusan Hasil Pengawasan Obat Bahan Alam dan Suplemen Kesehatan oleh Petugas UPT Badan POM			A - Pelatihan Sampling Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan Tingkat Pusat dan Daerah			229,910,000			22,991,000	
		8.	DR.4119.BIC.001 - UPT yang dilakukan pendampingan untuk melakukan pengawasan obat bahan alam dan suplemen kesehatan sesuai standar			051 - Pendampingan, Supervisi kepada UPT			A - Supervisi UPT dalam rangka Pelaksanaan Pengawasan OT dan SK			330,000,000			33,000,000	
		14 - Persentase iklan Kosmetik yang memenuhi ketentuan			71	71	71	71	71	71	71	71	71	71	71	931,538,000
		NO	RO			KOMPONEN			SUB KOMPONEN			ANGGARAN			KONTRIBUSI	
		2.	DR.4121.BIA.001 - Keputusan Hasil Pengawasan Kosmetika yang diselesaikan Tepat Waktu			052 - Pelaksanaan Koordinasi dalam rangka tindak lanjut pengawasan informasi dan promosi kosmetik			B - Intensifikasi Pengawasan Promosi Kosmetik di Era Digital			434,528,000			434,528,000	
		3.	DR.4121.BIA.001 - Keputusan Hasil Pengawasan Kosmetika yang diselesaikan Tepat Waktu			052 - Pelaksanaan Koordinasi dalam rangka tindak lanjut pengawasan informasi dan promosi kosmetik			D - Inspirasi (Intensifikasi Peningkatan Literasi Beauty Enthusiast)			497,010,000			497,010,000	
		2.	02 - Meningkatnya peran aktif lintas sektor dalam pengawasan OT, SK, Kos			01 - Persentase kabupaten/kota sadar Jamu Aman									2	1,000,000,000
		NO	RO			KOMPONEN			SUB KOMPONEN			ANGGARAN			KONTRIBUSI	
		2.	DR.6385.UBA.002 - Kabupaten / kota yang melaksanakan pemberdayaan masyarakat dan pelaku usaha			051 - Pelaksanaan Pemberdayaan pemberdayaan masyarakat dan pelaku usaha			A - Program Sadar Jamu Aman			1,000,000,000			1,000,000,000	
3.	05 - Meningkatnya Kesadaran Masyarakat atas Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu			01 - Indeks Kesadaran Masyarakat terhadap Obat Bahan Alam, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang aman dan bermutu									86.87	5,226,369,000		
NO	RO			KOMPONEN			SUB KOMPONEN			ANGGARAN			KONTRIBUSI			
1.	DR.3165.BDC.001 - Masvarakat yang			053 - Komunikasi, Informasi dan			A - KIE oleh Direktorat Pemberdayaan			2,804,570,000			2,804,570,000			

NO.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
		NO	RO			KOMPONEN			SUB KOMPONEN			ANGGARAN			KONTRIBUSI
			ditingkatkan pengetahuannya melalui KIE			Edukasi oleh Deputi II			Masyarakat dan Pelaku Usaha OT, SK, Kos						
		2.	DR.6385.BDC.001 - Fasilitator pemberdayaan masyarakat yang ditingkatkan peran sertanya dalam pengawasan OBA, SK, dan Kos			052 - Monitoring dan Evaluasi Kegiatan PMPU OT, SK dan Kos			E - Pengelolaan Sumber Daya Manusia			255,848,000			255,848,000
		3.	DR.6385.BDC.001 - Fasilitator pemberdayaan masyarakat yang ditingkatkan peran sertanya dalam pengawasan OBA, SK, dan Kos			052 - Monitoring dan Evaluasi Kegiatan PMPU OT, SK dan Kos			D - Honor Pramubakti Direktorat PMPU OT, SK, Kos			66,345,000			66,345,000
		4.	DR.6385.BDC.001 - Fasilitator pemberdayaan masyarakat yang ditingkatkan peran sertanya dalam pengawasan OBA, SK, dan Kos			052 - Monitoring dan Evaluasi Kegiatan PMPU OT, SK dan Kos			B - Layanan Perkantoran Direktorat PMPU OT, SK, Kos			107,474,000			107,474,000
		5.	DR.6385.BDC.001 - Fasilitator pemberdayaan masyarakat yang ditingkatkan peran sertanya dalam pengawasan OBA, SK, dan Kos			052 - Monitoring dan Evaluasi Kegiatan PMPU OT, SK dan Kos			A - Koordinasi Pemberdayaan OBA, SK dan Kos serta Peningkatan Kerjasama Lintas Sektor			537,365,000			537,365,000
		6.	DR.6385.BDC.001 - Fasilitator pemberdayaan masyarakat yang ditingkatkan peran sertanya dalam pengawasan OBA, SK, dan Kos			052 - Monitoring dan Evaluasi Kegiatan PMPU OT, SK dan Kos			C - Pemeriksaan Kesehatan			150,000,000			150,000,000
		7.	DR.6385.BDC.001 - Fasilitator pemberdayaan masyarakat yang ditingkatkan peran sertanya dalam pengawasan OBA, SK, dan Kos			051 - Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat terkait OBA, SK dan Kos			B - Pembentukan Penyuluh dan Kader Obat Bahan Alam, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik Aman melalui program BPOM Goes to Community			540,012,000			540,012,000
		8.	DR.6385.BDC.001 - Fasilitator pemberdayaan masyarakat yang ditingkatkan peran sertanya dalam pengawasan OBA, SK, dan Kos			051 - Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat terkait OBA, SK dan Kos			A - Pembentukan dan Pemberdayaan Duta Kosmetik /Jamu Aman dalam rangka BPOM Goes to School/Campus			764,755,000			764,755,000
4.	06 - Meningkatnya efektifitas regulatory assistance dan kemandirian industri dalam pengembangan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	01 - Persentase inovasi obat bahan alam yang didampingi sesuai standar	40	40	40	41.5	41.5	41.5	42.5	42.5	42.5	45	45	51	7,028,831,000

NO.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
		NO	RO		KOMPONEN			SUB KOMPONEN			ANGGARAN			KONTRIBUSI	
		1.	DR.4128.QDB.001 - Pelaku usaha dan peneliti yang diberikan pendampingan di bidang registrasi obat bahan alam, suplemen kesehatan, dan kosmetik		051 - Penyelenggaraan bimbingan teknis dan pendampingan pelaku usaha di bidang registrasi OT, SK dan KOS			H - Coaching Clinic Sistem dan Tata Cara Registrasi Produk dan Iklan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan			261,840,000			261,840,000	
		2.	DR.4128.QDB.001 - Pelaku usaha dan peneliti yang diberikan pendampingan di bidang registrasi obat bahan alam, suplemen kesehatan, dan kosmetik		051 - Penyelenggaraan bimbingan teknis dan pendampingan pelaku usaha di bidang registrasi OT, SK dan KOS			L - Pelayanan Prima Notifikasi Kosmetik			569,378,000			569,378,000	
		3.	DR.4119.QDG.002 - Pelaku Usaha yang Diintervensi Berkomitmen Untuk Memproduksi Produk Fitofarmaka		052 - Peningkatan Pemahaman Regulasi Terkini dalam rangka memproduksi fitofarmaka			C - Focus Group Discussion dalam rangka identifikasi dan penetapan fasilitas produksi Fitofarmaka bersama lintas sektor			63,680,000			63,680,000	
		4.	DR.4119.QDG.002 - Pelaku Usaha yang Diintervensi Berkomitmen Untuk Memproduksi Produk Fitofarmaka		052 - Peningkatan Pemahaman Regulasi Terkini dalam rangka memproduksi fitofarmaka			A - Bimbingan teknis dalam rangka percepatan pemenuhan CPOTB pada Industri dan Usaha di bidang OBA yang memproduksi OHT dan Fitofarmaka			79,120,000			79,120,000	
		5.	DR.4119.QDG.002 - Pelaku Usaha yang Diintervensi Berkomitmen Untuk Memproduksi Produk Fitofarmaka		051 - Pengawasan Penerapan Regulasi Terkini dalam rangka memproduksi fitofarmaka			A - Pemeriksaan dan Penilaian fasilitas produksi Fitofarmaka pada IEBA yang telah memenuhi CPOTB			57,200,000			57,200,000	
		6.	DR.4119.QDG.001 - Pelaku Usaha yang Diintervensi Berpeluang Ekspor		052 - Koordinasi Ekosistem Ekspor Obat Bahan Alam			B - Bussiness Matching perluasan akses pasar jamu			27,750,000			27,750,000	
		7.	DR.4119.QDG.001 - Pelaku Usaha yang Diintervensi Berpeluang Ekspor		052 - Koordinasi Ekosistem Ekspor Obat Bahan Alam			A - Penetrasi produk jamu berpotensi ekspor ke pasar luar negeri			297,560,000			297,560,000	
		8.	DR.4119.QDG.001 - Pelaku Usaha yang Diintervensi Berpeluang Ekspor		051 - Perluasan Akses Pasar Jamu Berpotensi Ekspor			B - Jamu Export Assistance			316,285,000			316,285,000	
		9.	DR.4128.QDB.001 - Pelaku usaha dan peneliti yang diberikan pendampingan di bidang registrasi obat bahan alam, suplemen kesehatan, dan kosmetik		051 - Penyelenggaraan bimbingan teknis dan pendampingan pelaku usaha di bidang registrasi OT, SK dan KOS			M - Clustering Registrasi Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan			106,420,000			106,420,000	
		10.	DR.4119.QDG.001 - Pelaku Usaha yang Diintervensi Berpeluang Ekspor		051 - Perluasan Akses Pasar Jamu Berpotensi Ekspor			A - Penyusunan Peta Potensi Pasar Jamu			158,405,000			158,405,000	
		12.	DR.4128.QDB.001 - Pelaku usaha dan peneliti yang diberikan pendampingan di bidang registrasi obat bahan		051 - Penyelenggaraan bimbingan teknis dan pendampingan pelaku usaha di bidang			A - Forum Komunikasi Tentang Tindak Lanjut Penilaian DIP			342,438,000			342,438,000	

NO.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
		NO	RO			KOMPONEN			SUB KOMPONEN			ANGGARAN			KONTRIBUSI
			alam, suplemen kesehatan, dan kosmetik			registrasi OT, SK dan KOS									
		13.	DR.4128.QDB.001 - Pelaku usaha dan peneliti yang diberikan pendampingan di bidang registrasi obat bahan alam, suplemen kesehatan, dan kosmetik			051 - Penyelenggaraan bimbingan teknis dan pendampingan pelaku usaha di bidang registrasi OT, SK dan KOS			B - Coaching clinic DIP			99,342,000			99,342,000
		14.	DR.4128.QDB.001 - Pelaku usaha dan peneliti yang diberikan pendampingan di bidang registrasi obat bahan alam, suplemen kesehatan, dan kosmetik			051 - Penyelenggaraan bimbingan teknis dan pendampingan pelaku usaha di bidang registrasi OT, SK dan KOS			C - Bimbingan Teknis CUKB di bidang OT dan SK kepada peneliti, komisi etik, sponsor, organisasi riset kontrak			162,591,000			162,591,000
		15.	DR.4128.QDB.001 - Pelaku usaha dan peneliti yang diberikan pendampingan di bidang registrasi obat bahan alam, suplemen kesehatan, dan kosmetik			051 - Penyelenggaraan bimbingan teknis dan pendampingan pelaku usaha di bidang registrasi OT, SK dan KOS			I - Komunikasi, Informasi dan Edukasi dalam rangka Percepatan Notifikasi Kosmetik			175,820,000			175,820,000
		16.	DR.4128.QDB.001 - Pelaku usaha dan peneliti yang diberikan pendampingan di bidang registrasi obat bahan alam, suplemen kesehatan, dan kosmetik			051 - Penyelenggaraan bimbingan teknis dan pendampingan pelaku usaha di bidang registrasi OT, SK dan KOS			K - Pelayanan Prima Registrasi OBA dan SK bagi UMKM di Daerah dalam Rangka Percepatan Izin Edar			1,001,110,000			1,001,110,000
		17.	DR.4128.QDB.001 - Pelaku usaha dan peneliti yang diberikan pendampingan di bidang registrasi obat bahan alam, suplemen kesehatan, dan kosmetik			051 - Penyelenggaraan bimbingan teknis dan pendampingan pelaku usaha di bidang registrasi OT, SK dan KOS			N - Clustering Notifikasi Kosmetik			24,300,000			24,300,000
		18.	DR.4128.QDB.001 - Pelaku usaha dan peneliti yang diberikan pendampingan di bidang registrasi obat bahan alam, suplemen kesehatan, dan kosmetik			051 - Penyelenggaraan bimbingan teknis dan pendampingan pelaku usaha di bidang registrasi OT, SK dan KOS			O - Pendampingan UMKM Jamu Berbasis Kearifan Lokal Dalam Rangka Pemberdayaan Ekonomi Rakyat dan Napak Tilas Jejak Empiris Penggunaan Bahan Alam di Indonesia			149,640,000			149,640,000
		19.	DR.4128.QDB.001 - Pelaku usaha dan peneliti yang diberikan pendampingan di bidang registrasi obat bahan alam, suplemen kesehatan, dan kosmetik			051 - Penyelenggaraan bimbingan teknis dan pendampingan pelaku usaha di bidang registrasi OT, SK dan KOS			Q - Implementasi Peraturan BPOM terkait bahan kosmetika terhadap produk kosmetika yang ternotifikasi			169,090,000			169,090,000
		20.	DR.4128.QDB.001 - Pelaku usaha dan peneliti yang diberikan pendampingan di bidang registrasi obat bahan alam, suplemen kesehatan, dan kosmetik			051 - Penyelenggaraan bimbingan teknis dan pendampingan pelaku usaha di bidang registrasi OT, SK dan KOS			R - Peningkatan Kompetensi UMKM dalam Pemenuhan Dosier Registrasi Obat Tradisional dan Obat Kuasi			164,600,000			164,600,000

NO.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET												ANGGARAN	
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12		
		NO	RO		KOMPONEN			SUB KOMPONEN			ANGGARAN			KONTRIBUSI		
		21.	DR.4128.QDB.001 - Pelaku usaha dan peneliti yang diberikan pendampingan di bidang registrasi obat bahan alam, suplemen kesehatan, dan kosmetik		051 - Penyelenggaraan bimbingan teknis dan pendampingan pelaku usaha di bidang registrasi OT, SK dan KOS			P - Focus Group Discussion (FGD) dalam rangka Peningkatan Pelayanan Notifikasi Kosmetik			107,880,000			107,880,000		
		22.	DR.4119.BDI.002 - Pelaku usaha IEBA yang diintervensi untuk menghasilkan bahan baku OBA yang bermutu		051 - Pengawasan Penerapan Regulasi Terkini dalam rangka kemandirian bahan baku			A - Pemeriksaan fasilitas produksi OBA pada IEBA yang telah memenuhi CPOTB			65,330,000			65,330,000		
		23.	DR.4119.BDI.002 - Pelaku usaha IEBA yang diintervensi untuk menghasilkan bahan baku OBA yang bermutu		052 - Peningkatan Pemahaman Regulasi Terkini dalam rangka kemandirian bahan baku			A - Focus Group Discussion dalam rangka Penyelarasan roadmap kemandirian bahan baku OBA Nasional			81,020,000			81,020,000		
		24.	DR.4119.BDI.002 - Pelaku usaha IEBA yang diintervensi untuk menghasilkan bahan baku OBA yang bermutu		052 - Peningkatan Pemahaman Regulasi Terkini dalam rangka kemandirian bahan baku			B - Dialog Interaktif dalam rangka penilaian pemenuhan CPOTB pada IEBA untuk menjamin keberlangsungan mutu Bahan Baku OBA			203,650,000			203,650,000		
		25.	DR.4128.QDB.001 - Pelaku usaha dan peneliti yang diberikan pendampingan di bidang registrasi obat bahan alam, suplemen kesehatan, dan kosmetik		051 - Penyelenggaraan bimbingan teknis dan pendampingan pelaku usaha di bidang registrasi OT, SK dan KOS			D - Desk dan Percepatan Notifikasi khusus UMKM Kosmetik			190,220,000			190,220,000		
		26.	DR.4128.QDB.001 - Pelaku usaha dan peneliti yang diberikan pendampingan di bidang registrasi obat bahan alam, suplemen kesehatan, dan kosmetik		051 - Penyelenggaraan bimbingan teknis dan pendampingan pelaku usaha di bidang registrasi OT, SK dan KOS			F - Bimbingan Teknis dan Edukasi Pelaku Usaha di Bidang Kosmetika			454,492,000			454,492,000		
		27.	DR.4128.QDB.001 - Pelaku usaha dan peneliti yang diberikan pendampingan di bidang registrasi obat bahan alam, suplemen kesehatan, dan kosmetik		051 - Penyelenggaraan bimbingan teknis dan pendampingan pelaku usaha di bidang registrasi OT, SK dan KOS			G - OSS Jemput Bola dalam rangka percepatan penyelesaian registrasi OT, SK dan Kosmetik di Daerah			1,699,670,000			1,699,670,000		
		02 - Persentase UMKM yang menerapkan standar keamanan dan mutu produksi OBA dan Kos							3	10	15	20	35	45	60	4,964,569,000
		NO	RO		KOMPONEN			SUB KOMPONEN			ANGGARAN			KONTRIBUSI		
		1.	DR.4119.QDG.003 - Keputusan Hasil Penilaian Sarana dalam Rangka Peningkatan Kapasitas UMKM OBA yang Diselesaikan		051 - Akselerasi peningkatan kapasitas UMK melalui program naik kelas umk OBA Indonesia (NUANSA)			A - DESK CAPA kepada UMK di bidang Obat Bahan Alam dalam rangka Pemenuhan Program NUANSA			370,810,000			370,810,000		
		2.	DR.4119.QDG.003 - Keputusan Hasil Penilaian		052 - Peningkatan Pemahaman Regulasi			A - Bimbingan teknis kepada UMK di bidang			289,190,000			289,190,000		

NO.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM		TARGET												ANGGARAN
				B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
		NO	RO		KOMPONEN			SUB KOMPONEN			ANGGARAN			KONTRIBUSI		
			Sarana dalam Rangka Peningkatan Kapasitas UMKM OBA yang Diselesaikan		Terkini dalam rangka kemandirian bahan baku			Obat Bahan Alam dalam rangka program NUANSA								
		3.	DR.6385.QDC.001 - Fasilitator pemberdayaan pelaku UMKM OBA, SK dan Kos yang sesuai standar		051 - Fasilitator pemberdayaan pelaku UMKM OBA dan SK yang sesuai standar			A - Penguatan Pembinaan UMKM OBA melalui Fasilitator			806,043,000			806,043,000		
		4.	DR.6385.QDC.001 - Fasilitator pemberdayaan pelaku UMKM OBA, SK dan Kos yang sesuai standar		051 - Fasilitator pemberdayaan pelaku UMKM OBA dan SK yang sesuai standar			B - Penguatan Olahan Jamu berdasarkan Kearifan Lokal			262,080,000			262,080,000		
		5.	DR.6385.QDC.001 - Fasilitator pemberdayaan pelaku UMKM OBA, SK dan Kos yang sesuai standar		051 - Fasilitator pemberdayaan pelaku UMKM OBA dan SK yang sesuai standar			C - Peningkatan Pangsa Pasar melalui Program UMKM Meet Market			558,660,000			558,660,000		
		6.	DR.6385.QDC.001 - Fasilitator pemberdayaan pelaku UMKM OBA, SK dan Kos yang sesuai standar		051 - Fasilitator pemberdayaan pelaku UMKM OBA dan SK yang sesuai standar			D - Pengembangan dan Inovasi untuk Mendukung Daya Saing UMKM Obat Bahan Alam			169,450,000			169,450,000		
		7.	DR.6385.QDC.001 - Fasilitator pemberdayaan pelaku UMKM OBA, SK dan Kos yang sesuai standar		051 - Fasilitator pemberdayaan pelaku UMKM OBA dan SK yang sesuai standar			F - Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM			113,267,000			113,267,000		
		8.	DR.6385.QDC.001 - Fasilitator pemberdayaan pelaku UMKM OBA, SK dan Kos yang sesuai standar		052 - Fasilitator pemberdayaan pelaku UMKM Kosmetik yang sesuai standar			B - Penguatan Kapasitas Fasilitator UMKM Kosmetik			343,595,000			343,595,000		
		9.	DR.6385.QDC.001 - Fasilitator pemberdayaan pelaku UMKM OBA, SK dan Kos yang sesuai standar		052 - Fasilitator pemberdayaan pelaku UMKM Kosmetik yang sesuai standar			C - Expo Kosmetik Indonesia			309,625,000			309,625,000		
		10.	DR.6385.QDC.001 - Fasilitator pemberdayaan pelaku UMKM OBA, SK dan Kos yang sesuai standar		052 - Fasilitator pemberdayaan pelaku UMKM Kosmetik yang sesuai standar			D - Implementasi Program Orang Tua Angkat UMKM			264,740,000			264,740,000		
		11.	DR.6385.QDC.001 - Fasilitator pemberdayaan pelaku UMKM OBA, SK dan Kos yang sesuai standar		052 - Fasilitator pemberdayaan pelaku UMKM Kosmetik yang sesuai standar			E - Peningkatan Kapasitas dan Daya Saing UMKM Kosmetik			300,000,000			300,000,000		
		12.	DR.6385.QDC.001 - Fasilitator pemberdayaan pelaku UMKM OBA, SK dan Kos yang sesuai standar		052 - Fasilitator pemberdayaan pelaku UMKM Kosmetik yang sesuai standar			F - Sinergitas Bersama Lintas Sektor dalam Pemberdayaan Pelaku Usaha Kosmetik			205,045,000			205,045,000		
		13.	DR.6385.QDC.001 - Fasilitator pemberdayaan pelaku UMKM OBA, SK dan Kos yang sesuai standar		052 - Fasilitator pemberdayaan pelaku UMKM Kosmetik yang sesuai standar			G - Pengembangan dan Inovasi Kosmetik Berbahan Alam Indonesia			105,345,000			105,345,000		
		14.	DR.6385.QDC.001 - Fasilitator pemberdayaan pelaku UMKM OBA, SK dan Kos yang sesuai standar		052 - Fasilitator pemberdayaan pelaku UMKM Kosmetik yang sesuai standar			H - Pengelolaan Arsip dan BMN			177,669,000			177,669,000		
		15.	DR.6385.QDC.001 - Fasilitator pemberdayaan pelaku UMKM OBA, SK dan Kos yang sesuai standar		051 - Fasilitator pemberdayaan pelaku UMKM OBA dan SK yang sesuai standar			E - Sinergitas Lintas Sektor dalam Mendukung Wellness Tourism			287,500,000			287,500,000		

NO.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
		NO	RO			KOMPONEN			SUB KOMPONEN			ANGGARAN		KONTRIBUSI	
		16.	DR.6385.QDC.001 - Fasilitator pemberdayaan pelaku UMKM OBA, SK dan Kos yang sesuai standar			052 - Fasilitator pemberdayaan pelaku UMKM Kosmetik yang sesuai standar			A - Intensifikasi Pendampingan Start Up dan UMKM Kosmetik			401,550,000		401,550,000	
		03 - Persentase Industri Kosmetik yang mengikuti Program maturitas yang dapat Menerapkan CPKB secara penuh												56	1,100,000,000
		NO	RO			KOMPONEN			SUB KOMPONEN			ANGGARAN		KONTRIBUSI	
		1.	DR.4121.QDI.001 - Industri Kosmetik yang Mengikuti Program maturitas yg Dapat Menerapkan CPKB secara penuh			051 - Pelaksanaan Program Maturitas Industri Kosmetik Terhadap Pemenuhan Aspek CPKB			A - Akselerasi Maturitas Industri Kosmetik terhadap Pemenuhan Aspek CPKB			1,100,000,000		1,100,000,000	
		04 - Persentase Industri Obat bahan Alam yang ditetapkan maturitasnya dalam penerapan CPOTB terkini												12	400,000,000
		NO	RO			KOMPONEN			SUB KOMPONEN			ANGGARAN		KONTRIBUSI	
		1.	DR.4119.BDI.001 - Industri OBA yang diintervensi dalam peningkatan maturitas CPOTB			052 - Penyempurnaan prosedur penilaian maturitas industri OBA			A - Penyusunan Database Pengawasan dalam Rangka Penilaian Maturitas Industri Obat Bahan Alam (OBA)			122,980,000		122,980,000	
		3.	DR.4119.BDI.001 - Industri OBA yang diintervensi dalam peningkatan maturitas CPOTB			051 - Pengawasan penerapan regulasi maturitas industri OBA			A - Penilaian Tingkat Maturitas Industri Obat Bahan Alam sesuai Tools Maturitas yang Ditetapkan			277,020,000		277,020,000	
		5.	09 - Layanan Publik BPOM yang Prima	01 - Indeks Pelayanan Publik di Bidang Pengawasan Obat Bahan Alam, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan											
NO	RO			KOMPONEN			SUB KOMPONEN			ANGGARAN		KONTRIBUSI			
		1.	DR.4129.ABG.001 - Rekomendasi Kebijakan Keamanan, Mutu, dan Manfaat/ Khasiat Obat Bahan Alam, Obat Kuasi, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik yang diselesaikan			057 - Kajian Obat Bahan Alam, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang diselesaikan			C - Kajian Keamanan, Mutu dan Manfaat di bidang Kosmetik			73,463,000		73,463,000	

NO.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
		NO	RO			KOMPONEN			SUB KOMPONEN			ANGGARAN			KONTRIBUSI
		2.	DR.4129.ABG.001 - Rekomendasi Kebijakan Keamanan, Mutu, dan Manfaat/ Khasiat Obat Bahan Alam, Obat Kuasi, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik yang diselesaikan			057 - Kajian Obat Bahan Alam, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang diselesaikan			B - Kajian Keamanan, Mutu dan Manfaat Suplemen Kesehatan			220,000,000			220,000,000
		3.	DR.4129.ABG.001 - Rekomendasi Kebijakan Keamanan, Mutu, dan Manfaat/ Khasiat Obat Bahan Alam, Obat Kuasi, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik yang diselesaikan			057 - Kajian Obat Bahan Alam, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang diselesaikan			A - Kajian Keamanan, Mutu dan Manfaat dibidang Obat Bahan Alam			170,000,000			170,000,000
		4.	DR.4129.ABG.001 - Rekomendasi Kebijakan Keamanan, Mutu, dan Manfaat/ Khasiat Obat Bahan Alam, Obat Kuasi, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik yang diselesaikan			057 - Kajian Obat Bahan Alam, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang diselesaikan			D - Peningkatan Kualitas Layanan Publik			67,778,000			67,778,000
		5.	DR.4128.BAH.001 - Layanan Publik Direktorat Registrasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik yang Prima			051 - Koordinasi Pengelolaan Kinerja Registrasi			B - Survei Kepuasan Pelanggan			329,100,000			329,100,000
		6.	DR.4128.BAH.001 - Layanan Publik Direktorat Registrasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik yang Prima			051 - Koordinasi Pengelolaan Kinerja Registrasi			D - Pemetaan Konten dan Database Aplikasi Pelayanan Publik			420,480,000			420,480,000
		7.	DR.4128.BAH.001 - Layanan Publik Direktorat Registrasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik yang Prima			051 - Koordinasi Pengelolaan Kinerja Registrasi			E - Penguatan Pelayanan Publik Prima Direktorat registrasi OT, SK dan Kos			1,086,055,000			1,086,055,000
		8.	DR.4128.BAH.001 - Layanan Publik Direktorat Registrasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik yang Prima			051 - Koordinasi Pengelolaan Kinerja Registrasi			G - Pembekalan staff dalam rangka Peningkatan Kompetensi Petugas Pelayanan Publik			270,300,000			270,300,000
		9.	DR.4128.BAH.001 - Layanan Publik Direktorat Registrasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik yang Prima			051 - Koordinasi Pengelolaan Kinerja Registrasi			H - Monev Pelayanan Pengaduan			10,200,000			10,200,000
		11.	DR.4119.BAH.001 - Layanan Publik Direktorat Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan yang prima			052 - Pelaksanaan penilaian sarana dan ekspor impor OBA, OK dan SK			D - Intensifikasi Pengawasan Importir OBA dan SK dalam rangka Pengetatan Arus Impor Barang Tertentu			173,990,000			173,990,000
		12.	DR.4128.BAH.001 - Layanan Publik Direktorat Registrasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik yang Prima			051 - Koordinasi Pengelolaan Kinerja Registrasi			A - Peningkatan Kualitas Layanan Publik			932,700,000			932,700,000
		13.	DR.4128.BAH.001 - Layanan Publik Direktorat Registrasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik yang Prima			051 - Koordinasi Pengelolaan Kinerja Registrasi			C - Publikasi Layanan Publik			92,436,000			92,436,000

NO.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
		NO	RO			KOMPONEN			SUB KOMPONEN			ANGGARAN			KONTRIBUSI
		14.	DR.4128.BAH.001 - Layanan Publik Direktorat Registrasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik yang Prima			051 - Koordinasi Pengelolaan Kinerja Registrasi			F - Development Dialogue dalam rangka Penguatan Tim Kerja Direktorat Registrasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik			176,700,000			176,700,000
		15.	DR.4119.BAH.001 - Layanan Publik Direktorat Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan yang prima			051 - Peningkatan pemahaman regulasi terkini terkait penilaian sarana dan ekspor/impor kepada pelaku usaha dan masyarakat			A - Bimbingan Teknis Persetujuan Penggunaan Bersama Fasilitas Obat Tradisional dengan non-Obat Tradisional bagi UKOT			116,662,000			116,662,000
		16.	DR.4119.BAH.001 - Layanan Publik Direktorat Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan yang prima			051 - Peningkatan pemahaman regulasi terkini terkait penilaian sarana dan ekspor/impor kepada pelaku usaha dan masyarakat			B - Upgrading Pemahaman Penerapan CPOTB pada Personil Kunci Industri di Bidang Obat Bahan Alam, Obat Kuasi, dan Suplemen Kesehatan			133,320,000			133,320,000
		17.	DR.4119.BAH.001 - Layanan Publik Direktorat Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan yang prima			051 - Peningkatan pemahaman regulasi terkini terkait penilaian sarana dan ekspor/impor kepada pelaku usaha dan masyarakat			C - Pembekalan Kepada Pelaku Usaha Distribusi terkait Pelayanan Publik Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan			45,100,000			45,100,000
		18.	DR.4119.BAH.001 - Layanan Publik Direktorat Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan yang prima			052 - Pelaksanaan penilaian sarana dan ekspor impor OBA, OK dan SK			B - Percepatan Pelayanan Publik melalui Desk CAPA Sertifikasi Sarana Produksi dan Distribusi Obat Tradisional, Obat Kuasi dan Suplemen kesehatan			174,040,000			174,040,000
		19.	DR.4119.BAH.001 - Layanan Publik Direktorat Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan yang prima			052 - Pelaksanaan penilaian sarana dan ekspor impor OBA, OK dan SK			A - Pemeriksaan Sarana Obat Bahan Alam, Obat Kuasi dan Suplemen Kesehatan dalam rangka Perizinan dan Pemenuhan CPOTB			375,980,000			375,980,000
		20.	DR.4119.BAH.001 - Layanan Publik Direktorat Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan yang prima			052 - Pelaksanaan penilaian sarana dan ekspor impor OBA, OK dan SK			C - Verifikasi Teknis Permohonan Ekspor dan Impor OT dan SK			61,150,000			61,150,000
		21.	DR.4119.BAH.001 - Layanan Publik Direktorat Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan yang prima			053 - Peningkatan Koordinasi dalam Penguatan dan Efektifitas Penilaian Sarana dan Produk OBA OK SK			A - Perkuatan Kooordinasi Lintas Sektor dalam Rangka Optimalisasi Pelayanan Publik dan Pengawasan Terhadap Eksportasi dan Importasi Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan			154,500,000			154,500,000
		22.	DR.4119.BAH.001 - Layanan Publik Direktorat			053 - Peningkatan Koordinasi dalam			B - Optimalisasi Dukungan Ekspor dan			97,125,000			97,125,000

NO.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM		TARGET												ANGGARAN
				B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
		NO	RO		KOMPONEN			SUB KOMPONEN			ANGGARAN			KONTRIBUSI		
			Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan yang prima		Penguatan dan Efektifitas Penilaian Sarana dan Produk OBA OK SK			Perlindungan Daya Saing Produk Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan Nasional Melalui Peningkatan Koordinasi Lintas Sektor								
		23.	DR.4119.BAH.001 - Layanan Publik Direktorat Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan yang prima		053 - Peningkatan Koordinasi dalam Penguatan dan Efektifitas Penilaian Sarana dan Produk OBA OK SK			C - Peningkatan Peran UPT dalam rangka Intensifikasi Pengawasan Pemasukan OT SK melalui mekanisme SAS Barang Kiriman Peruntukan Pribadi			106,120,000			106,120,000		
		24.	DR.4119.BAH.001 - Layanan Publik Direktorat Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan yang prima		053 - Peningkatan Koordinasi dalam Penguatan dan Efektifitas Penilaian Sarana dan Produk OBA OK SK			D - Evaluasi Program Kerja dan Pembahasan Aktual			144,776,000			144,776,000		
		25.	DR.4119.BAH.001 - Layanan Publik Direktorat Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan yang prima		053 - Peningkatan Koordinasi dalam Penguatan dan Efektifitas Penilaian Sarana dan Produk OBA OK SK			E - Monitoring dan Koordinasi Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan			211,822,000			211,822,000		
		26.	DR.4119.BAH.001 - Layanan Publik Direktorat Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan yang prima		053 - Peningkatan Koordinasi dalam Penguatan dan Efektifitas Penilaian Sarana dan Produk OBA OK SK			F - Peningkatan Kompetensi Pejabat Fungsional Direktorat Pengawasan OT dan SK			100,925,000			100,925,000		
		27.	DR.4119.BAH.001 - Layanan Publik Direktorat Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan yang prima		054 - Layanan Publik Direktorat Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan			A - Administrasi pelaksanaan pelayanan publik			306,720,000			306,720,000		
		28.	DR.4119.BAH.001 - Layanan Publik Direktorat Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan yang prima		054 - Layanan Publik Direktorat Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan			B - Forum Konsultasi Publik			79,310,000			79,310,000		
		29.	DR.4119.BAH.001 - Layanan Publik Direktorat Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan yang prima		054 - Layanan Publik Direktorat Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan			C - Peningkatan Kompetensi Petugas Layanan Publik			92,060,000			92,060,000		
		30.	DR.4119.BAH.001 - Layanan Publik Direktorat Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan yang prima		054 - Layanan Publik Direktorat Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan			D - Bimbingan Teknis kepada Petugas UPT dalam rangka Peningkayan pelayanan Publik Sertifikasi CPOTB Bertahap			85,840,000			85,840,000		
		31.	DR.4119.BAH.001 - Layanan Publik Direktorat Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan yang prima		054 - Layanan Publik Direktorat Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan			E - Bimbingan teknis Bagi Petugas Dalam Rangka Peningkatan pelayanan publik SKI/SKE/SAS OT dan SK			40,560,000			40,560,000		

NO.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM		TARGET												ANGGARAN
				B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
		NO	RO			KOMPONEN			SUB KOMPONEN			ANGGARAN			KONTRIBUSI	
		32.	DR.6385.BAH.001 - Layanan Publik Dit. PMPU OT, SK, dan Kos yang Prima			051 - Layanan Publik Dit PMPU OTSKK yang Prima			B - Workshop Pelayanan Prima			263,900,000			263,900,000	
		33.	DR.6385.BAH.001 - Layanan Publik Dit. PMPU OT, SK, dan Kos yang Prima			051 - Layanan Publik Dit PMPU OTSKK yang Prima			A - Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik			236,100,000			236,100,000	
		34.	DR.4121.BAH.001 - Keputusan Penilaian Sarana dan Produk Kosmetika yang Diselesaikan Tepat Waktu			052 - Pelaksanaan sertifikasi SKI / SKE kosmetik			B - Evaluasi Pelayanan Publik Pengawasan Keamanan dan Mutu Kosmetik			457,974,000			457,974,000	
		35.	DR.4121.BAH.001 - Keputusan Penilaian Sarana dan Produk Kosmetika yang Diselesaikan Tepat Waktu			052 - Pelaksanaan sertifikasi SKI / SKE kosmetik			A - Verifikasi Teknis Permohonan SKI pada Sarana Importir Produk Jadi dan Bahan Baku Kosmetika			443,311,000			443,311,000	
		36.	DR.4121.BAH.001 - Keputusan Penilaian Sarana dan Produk Kosmetika yang Diselesaikan Tepat Waktu			051 - Pelaksanaan sertifikasi sarana produksi kosmetik			C - Percepatan Pelayanan Publik dalam Upaya Peningkatan Daya Saing melalui Peningkatan Pengetahuan Petugas dan Pelaku Usaha			92,929,000			92,929,000	
		37.	DR.4121.BAH.001 - Keputusan Penilaian Sarana dan Produk Kosmetika yang Diselesaikan Tepat Waktu			051 - Pelaksanaan sertifikasi sarana produksi kosmetik			B - Percepatan Pelayanan Publik melalui Desk Konsultasi Pelayanan Persetujuan Denah Bangunan Industri Kosmetik dan/atau CAPA Sertifikasi CPKB			369,510,000			369,510,000	
		38.	DR.4121.BAH.001 - Keputusan Penilaian Sarana dan Produk Kosmetika yang Diselesaikan Tepat Waktu			051 - Pelaksanaan sertifikasi sarana produksi kosmetik			A - Penilaian Penerapan CPKB pada Industri Kosmetik dalam rangka Sertifikasi			547,100,000			547,100,000	
6.	10 - Terwujudnya Tata Kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	01 - Nilai Pembangunan ZI Deputi Bidang Pengawasan OT, SK, dan Kos												89.96	1,538,957,950	
		NO	RO			KOMPONEN			SUB KOMPONEN			ANGGARAN			KONTRIBUSI	
		2.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan			058 - Pelaksanaan Koordinasi Pengawasan OT dan SK			E - Sewa Rumah Dinas Jabatan Direktorat Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan			144,000,000			144,000,000	
		3.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan			058 - Pelaksanaan Koordinasi Pengawasan OT dan SK			G - Pemantapan Zona Integritas dalam rangka Peningkatan Indeks Reformasi Birokrasi			370,028,000			370,028,000	
		4.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan			058 - Pelaksanaan Koordinasi Pengawasan OT dan SK			F - Medical Check Up Pegawai Direktorat Pengawasan OT dan SK			180,140,000			180,140,000	

NO.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
		NO	RO		KOMPONEN			SUB KOMPONEN			ANGGARAN			KONTRIBUSI	
		5.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan		062 - Pelaksanaan Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha OT,SK, dan Kos			A - Evaluasi Program Kerja			394,810,000			98,702,500	
		6.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan		061 - Pelaksanaan Koordinasi Standardisasi OT, SK dan Kos			A - Pemantapan dan Internalisasi Reformasi Birokrasi			82,690,000			82,690,000	
		7.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan		059 - Pelaksanaan Koordinasi Pengawasan Kometik			D - Penyusunan dan Internalisasi Kebijakan Kedeputian II			40,080,000			14,028,000	
		8.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan		060 - Pelaksanaan Koordinasi Registrasi OT, SK dan Kos			B - Monitoring pelaksanaan SPIP dan Pembangunan Zona Integritas			111,480,000			111,480,000	
		9.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan		059 - Pelaksanaan Koordinasi Pengawasan Kometik			G - Peningkatan Kompetensi Direktorat Pengawasan Kosmetik			114,545,000			40,090,750	
		10.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan		059 - Pelaksanaan Koordinasi Pengawasan Kometik			E - Penataan Arsip Direktorat Pengawasan Kosmetik			20,730,000			7,255,500	
		11.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan		059 - Pelaksanaan Koordinasi Pengawasan Kometik			B - Pemantapan Sistem Manajemen Mutu Direktorat Pengawasan Kosmetik			57,270,000			20,044,500	
		12.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan		059 - Pelaksanaan Koordinasi Pengawasan Kometik			A - Pemenuhan Keperluan Perkantoran			244,282,000			85,498,700	
		13.	DR.4129.CAN.001 - Perangkat pengolah data dan komunikasi		051 - Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi			A - Pengadaan Alat Pengolah Data Deputi II BPOM			600,000,000			300,000,000	
		14.	DR.4129.CAB.001 - Sarana Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik		053 - Pengadaan peralatan fasilitas perkantoran			A - Pengadaan Fasilitas Kantor			170,000,000			85,000,000	
		02 - Nlai AKIP Deputi Bidang Pengawasan OT, SK, dan Kos												81.66	304,760,600
		NO	RO		KOMPONEN			SUB KOMPONEN			ANGGARAN			KONTRIBUSI	
		1.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan		060 - Pelaksanaan Koordinasi Registrasi OT, SK dan Kos			E - Monitoring dan Evaluasi Capaian Kinerja			8,400,000			8,400,000	
		2.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan		060 - Pelaksanaan Koordinasi Registrasi OT, SK dan Kos			D - Penyusunan Laporan Tahunan Direktorat Registrasi OT, SK dan Kos			9,276,000			9,276,000	

NO.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
		NO	RO		KOMPONEN			SUB KOMPONEN			ANGGARAN			KONTRIBUSI	
		3.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan		059 - Pelaksanaan Koordinasi Pengawasan Kometik			A - Pemenuhan Keperluan Perkantoran			244,282,000			73,284,600	
		4.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan		059 - Pelaksanaan Koordinasi Pengawasan Kometik			B - Pemantapan Sistem Manajemen Mutu Direktorat Pengawasan Kosmetik			57,270,000			17,181,000	
		5.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan		059 - Pelaksanaan Koordinasi Pengawasan Kometik			E - Penataan Arsip Direktorat Pengawasan Kosmetik			20,730,000			6,219,000	
		6.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan		059 - Pelaksanaan Koordinasi Pengawasan Kometik			G - Peningkatan Kompetensi Direktorat Pengawasan Kosmetik			114,545,000			34,363,500	
		7.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan		059 - Pelaksanaan Koordinasi Pengawasan Kometik			D - Penyusunan dan Internalisasi Kebijakan Kedeputian II			40,080,000			12,024,000	
		8.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan		061 - Pelaksanaan Koordinasi Standardisasi OT, SK dan Kos			B - Penyusunan LAKIP dan LAPTAH			12,310,000			12,310,000	
		9.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan		062 - Pelaksanaan Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha OT,SK, dan Kos			A - Evaluasi Program Kerja			394,810,000			98,702,500	
		10.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan		058 - Pelaksanaan Koordinasi Pengawasan OT dan SK			C - Pemeliharaan Operasional Direktorat Pengawasan OT dan SK			33,000,000			33,000,000	
		03 - Nilai Kinerja Anggaran Deputi Bidang Pengawasan OT, SK, dan Kos												5	960,170,500
		NO	RO		KOMPONEN			SUB KOMPONEN			ANGGARAN			KONTRIBUSI	
		2.	DR.4129.CAB.001 - Sarana Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik		053 - Pengadaan peralatan fasilitas perkantoran			A - Pengadaan Fasilitas Kantor			170,000,000			85,000,000	
		3.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan		058 - Pelaksanaan Koordinasi Pengawasan OT dan SK			B - Layanan Perkantoran Direktorat Pengawasan OT dan SK			262,950,000			262,950,000	
		4.	DR.4129.CAN.001 - Perangkat pengolah data dan komunikasi		051 - Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi			A - Pengadaan Alat Pengolah Data Deputi II BPOM			600,000,000			300,000,000	
5.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan		058 - Pelaksanaan Koordinasi Pengawasan OT dan SK			A - Honor Pengelola Keuangan Dit Pengawasan OT dan SK dan Satker Deputi II			5,880,000			5,880,000			

NO.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
			NO	RO	KOMPONEN			SUB KOMPONEN			ANGGARAN			KONTRIBUSI	
			6.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	062 - Pelaksanaan Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha OT,SK, dan Kos			A - Evaluasi Program Kerja			394,810,000			98,702,500	
			7.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	060 - Pelaksanaan Koordinasi Registrasi OT, SK dan Kos			A - Pemenuhan Keperluan perkantoran			166,720,000			166,720,000	
			8.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	060 - Pelaksanaan Koordinasi Registrasi OT, SK dan Kos			F - Evaluasi Pertanggungjawaban Keuangan			8,400,000			8,400,000	
			9.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	060 - Pelaksanaan Koordinasi Registrasi OT, SK dan Kos			G - Penataan dan Pengelolaan BMN			25,750,000			25,750,000	
			10.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	059 - Pelaksanaan Koordinasi Pengawasan Kometik			F - Honorarium Pengelola PNBPD Direktorat Pengawasan Kosmetik			6,768,000			6,768,000	
			04 - Indeks Manajemen Risiko Deputy Bidang Pengawasan OT, SK, dan Kos											2.95	425,419,950
			NO	RO	KOMPONEN			SUB KOMPONEN			ANGGARAN			KONTRIBUSI	
			1.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	062 - Pelaksanaan Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha OT,SK, dan Kos			A - Evaluasi Program Kerja			394,810,000			98,702,500	
			3.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	059 - Pelaksanaan Koordinasi Pengawasan Kometik			B - Pemantapan Sistem Manajemen Mutu Direktorat Pengawasan Kosmetik			57,270,000			20,044,500	
			4.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	061 - Pelaksanaan Koordinasi Standardisasi OT, SK dan Kos			C - Pemeriksaan Kesehatan Pegawai			105,000,000			105,000,000	
			5.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	059 - Pelaksanaan Koordinasi Pengawasan Kometik			D - Penyusunan dan Internalisasi Kebijakan Kedeputian II			40,080,000			14,028,000	
			6.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	060 - Pelaksanaan Koordinasi Registrasi OT, SK dan Kos			C - Pengelolaan Sistem Manajemen Terintegrasi 9001:2015			10,500,000			10,500,000	
			7.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	059 - Pelaksanaan Koordinasi Pengawasan Kometik			G - Peningkatan Kompetensi Direktorat Pengawasan Kosmetik			114,545,000			40,090,750	

NO.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
		NO	RO		KOMPONEN			SUB KOMPONEN			ANGGARAN		KONTRIBUSI		
		8.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan		059 - Pelaksanaan Koordinasi Pengawasan Kometik			E - Penataan Arsip Direktorat Pengawasan Kosmetik			20,730,000		7,255,500		
		9.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan		059 - Pelaksanaan Koordinasi Pengawasan Kometik			A - Pemenuhan Keperluan Perkantoran			244,282,000		85,498,700		
		10.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan		058 - Pelaksanaan Koordinasi Pengawasan OT dan SK			D - Pengelolaan Manajemen Risiko Direktorat Pengawasan OT dan SK			44,300,000		44,300,000		
												Total	51,916,739,000		



RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DEPUTI BIDANG PENGAWASAN OBAT TRADISIONAL, SUPLEMEN KESEHATAN, DAN KOSMETIK
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

NO.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
1.	01 - Meningkatnya efektivitas pengawasan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	01 - Persentase Obat bahan alam yang aman dan bermutu	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	4,716,203,300
			NO	RO	KOMPONEN		SUB KOMPONEN		ANGGARAN		KONTRIBUSI				
			1.	DR.4128.PCA.001 - Keputusan Registrasi Obat Bahan Alam dan Suplemen Kesehatan, serta Notifikasi Kosmetika yang Diselesaikan Sesuai Ketentuan	051 - Registrasi Obat Bahan Alam		B - Representasi Pada Sidang Tingkat TMHS		215,856,000		215,856,000				
			2.	DR.4128.PCA.001 - Keputusan Registrasi Obat Bahan Alam dan Suplemen Kesehatan, serta Notifikasi Kosmetika yang Diselesaikan Sesuai Ketentuan	051 - Registrasi Obat Bahan Alam		C - Rapat Evaluasi Registrasi Produk dan Iklan Obat Bahan Alam, Obat Kuasi dan Suplemen Kesehatan		328,949,000		328,949,000				
			3.	DR.4128.PCA.001 - Keputusan Registrasi Obat Bahan Alam dan Suplemen Kesehatan, serta Notifikasi Kosmetika yang Diselesaikan Sesuai Ketentuan	055 - Penilaian Uji Praklinik / Klinik Obat Bahan Alam dan Suplemen Kesehatan		A - Penilaian Pelaksanaan Uji Praklinik dan Klinik Obat Bahan Alam dan Suplemen Kesehatan		59,580,000		59,580,000				
			4.	DR.4128.PCA.001 - Keputusan Registrasi Obat Bahan Alam dan Suplemen Kesehatan, serta Notifikasi Kosmetika yang Diselesaikan Sesuai Ketentuan	055 - Penilaian Uji Praklinik / Klinik Obat Bahan Alam dan Suplemen Kesehatan		C - Pertemuan Pembahasan Percepatan Pengembangan dan Pemanfaatan Fitofarmaka		130,155,000		130,155,000				
			5.	DR.4128.PCA.001 - Keputusan Registrasi Obat Bahan Alam dan Suplemen Kesehatan, serta Notifikasi Kosmetika yang	055 - Penilaian Uji Praklinik / Klinik Obat Bahan Alam dan Suplemen Kesehatan		D - Pengayaan Uji Praklinik/Klinik		9,090,000		9,090,000				

NO.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
		NO RO	KOMPONEN				SUB KOMPONEN				ANGGARAN				KONTRIBUSI
			Diselesaikan Sesuai Ketentuan												
		6.	DR.4119.BIA.001 - Keputusan Hasil Pengawasan Sarana dan Produk Obat Bahan Alam dan Suplemen Kesehatan yang Diselesaikan Tepat Waktu				052 - Pengawasan Penerapan Regulasi Terkini pada Pelaku Usaha OBA, OK, SK				G - Penelusuran Temuan Pelanggaran Produk dan Promosi Obat Bahan Alam, Obat Kuasi dan Suplemen Kesehatan				39,857,000 39,857,000
		7.	DR.4119.BIA.001 - Keputusan Hasil Pengawasan Sarana dan Produk Obat Bahan Alam dan Suplemen Kesehatan yang Diselesaikan Tepat Waktu				051 - Peningkatan Pemahaman Regulasi Terkini Terkait OBA OK SK Kepada Pelaku Usaha dan Masyarakat				C - Kumpulan blokir				243,944,000 243,944,000
		8.	DR.4119.BIA.001 - Keputusan Hasil Pengawasan Sarana dan Produk Obat Bahan Alam dan Suplemen Kesehatan yang Diselesaikan Tepat Waktu				052 - Pengawasan Penerapan Regulasi Terkini pada Pelaku Usaha OBA, OK, SK				H - Penelusuran Kasus terhadap pengawasan produk yang tidak memenuhi persyaratan Keamanan dan Mutu				111,811,000 111,811,000
		9.	DR.4119.BIA.001 - Keputusan Hasil Pengawasan Sarana dan Produk Obat Bahan Alam dan Suplemen Kesehatan yang Diselesaikan Tepat Waktu				052 - Pengawasan Penerapan Regulasi Terkini pada Pelaku Usaha OBA, OK, SK				I - Penguatan Sistem Mutu CPOTB di UPT				23,992,000 23,992,000
		10.	DR.4119.BIA.001 - Keputusan Hasil Pengawasan Sarana dan Produk Obat Bahan Alam dan Suplemen Kesehatan yang Diselesaikan Tepat Waktu				052 - Pengawasan Penerapan Regulasi Terkini pada Pelaku Usaha OBA, OK, SK				J - Peningkatan Kompetensi Pengawas OBA dan SK Melalui Partisipasi Dalam Kegiatan Internasional				41,787,000 41,787,000
		11.	DR.4119.BIA.001 - Keputusan Hasil Pengawasan Sarana dan Produk Obat Bahan Alam dan Suplemen Kesehatan yang Diselesaikan Tepat Waktu				054 - Peningkatan Koordinasi dalam penguatan dan efektifitas pengawasan OBA OK SK				G - Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Keamanan dan Mutu				48,610,000 48,610,000
		12.	DR.4119.BIA.001 - Keputusan Hasil Pengawasan Sarana dan Produk Obat Bahan Alam dan Suplemen				054 - Peningkatan Koordinasi dalam penguatan dan efektifitas				H - BLOKIR				1,530,716,000 1,530,716,000

NO.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
		NO RO	KOMPONEN			SUB KOMPONEN			ANGGARAN			KONTRIBUSI			
			Kesehatan yang Diselesaikan Tepat Waktu			pengawasan OBA OK SK									
13.		DR.4119.BIA.001 - Keputusan Hasil Pengawasan Sarana dan Produk Obat Bahan Alam dan Suplemen Kesehatan yang Diselesaikan Tepat Waktu	054 - Peningkatan Koordinasi dalam penguatan dan efektifitas pengawasan OBA OK SK			I - Integrasi dan Penguatan Sistem Mutu CPOTB untuk Pengawasan Obat Bahan Alam, Suplemen Kesehatan dan Obat Kuasi yang Efektif dan Efisien			104,409,000			104,409,000			
14.		DR.4128.PCA.001 - Keputusan Registrasi Obat Bahan Alam dan Suplemen Kesehatan, serta Notifikasi Kosmetika yang Diselesaikan Sesuai Ketentuan	051 - Registrasi Obat Bahan Alam			E - Pemetaan Bahan Baku Obat Bahan Alam, Suplemen Kesehatan Dan Obat Kuasi			57,680,000			57,680,000			
15.		DR.4119.BIC.001 - UPT yang dilakukan pendampingan untuk melakukan pengawasan obat bahan alam dan suplemen kesehatan sesuai standar	052 - Peningkatan Kualitas Pengambilan Keputusan Hasil Pengawasan Obat Bahan Alam dan Suplemen Kesehatan oleh Petugas UPT Badan POM			E - Pembahasan Hasil Pengawasan Iklan dan Penandaan OBA, OK SK			8,022,000			8,022,000			
16.		DR.4128.PCA.001 - Keputusan Registrasi Obat Bahan Alam dan Suplemen Kesehatan, serta Notifikasi Kosmetika yang Diselesaikan Sesuai Ketentuan	051 - Registrasi Obat Bahan Alam			D - Pemantapan Koordinasi serta Peningkatan Kerja Sama Lintas Sektor dalam rangka Percepatan Izin Edar Obat Bahan Alam dan Suplemen Kesehatan			152,270,000			152,270,000			
17.		DR.4128.PCA.001 - Keputusan Registrasi Obat Bahan Alam dan Suplemen Kesehatan, serta Notifikasi Kosmetika yang Diselesaikan Sesuai Ketentuan	055 - Penilaian Uji Praliniik / Klinik Obat Bahan Alam dan Suplemen Kesehatan			B - Evaluasi Dokumen dan Data Uji Praliniik/Klinik Obat Bahan Alam dan Suplemen Kesehatan			217,040,000			217,040,000			
18.		DR.4128.PCA.001 - Keputusan Registrasi Obat Bahan Alam dan Suplemen Kesehatan, serta Notifikasi Kosmetika yang Diselesaikan Sesuai Ketentuan	055 - Penilaian Uji Praliniik / Klinik Obat Bahan Alam dan Suplemen Kesehatan			E - Diseminasi Riset Menuju Hilirisasi Produk Obat Herbal Terstandar dan Fitofarmaka			132,002,000			132,002,000			
19.		DR.4119.BIA.001 - Keputusan Hasil Pengawasan Sarana dan Produk Obat Bahan	051 - Peningkatan Pemahaman Regulasi Terkini Terkait OBA OK SK Kepada Pelaku			A - Peningkatan Pemenuhan Ketentuan Iklan dan Penandaan Secara Konsisten oleh			91,560,000			22,890,000			

NO.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
		NO RO	KOMPONEN				SUB KOMPONEN				ANGGARAN				KONTRIBUSI
			Alam dan Suplemen Kesehatan yang Diselesaikan Tepat Waktu				Usaha dan Masyarakat				Pelaku Usaha OBA, OK dan SK				
		20.	DR.4119.BIA.001 - Keputusan Hasil Pengawasan Sarana dan Produk Obat Bahan Alam dan Suplemen Kesehatan yang Diselesaikan Tepat Waktu				051 - Peningkatan Pemahaman Regulasi Terkini Terkait OBA OK SK Kepada Pelaku Usaha dan Masyarakat				B - Peningkatan Kewaspadaan Masyarakat Melalui Intensifikasi Informasi Hasil Pengawasan Keamanan dan Mutu OT dan SK				8,335,000 4,167,500
		21.	DR.4119.BIA.001 - Keputusan Hasil Pengawasan Sarana dan Produk Obat Bahan Alam dan Suplemen Kesehatan yang Diselesaikan Tepat Waktu				052 - Pengawasan Penerapan Regulasi Terkini pada Pelaku Usaha OBA, OK, SK				A - Intensifikasi Pengawasan Keamanan dan Pembahasan Laporan Efek Samping OT dan SK				203,273,000 101,636,500
		22.	DR.4119.BIA.001 - Keputusan Hasil Pengawasan Sarana dan Produk Obat Bahan Alam dan Suplemen Kesehatan yang Diselesaikan Tepat Waktu				052 - Pengawasan Penerapan Regulasi Terkini pada Pelaku Usaha OBA, OK, SK				B - Perkuatan Pengawasan Iklan Bersama Lintas Sektor				15,810,000 7,905,000
		23.	DR.4119.BIA.001 - Keputusan Hasil Pengawasan Sarana dan Produk Obat Bahan Alam dan Suplemen Kesehatan yang Diselesaikan Tepat Waktu				052 - Pengawasan Penerapan Regulasi Terkini pada Pelaku Usaha OBA, OK, SK				D - Intensifikasi Pengawasan Keamanan dan Mutu Produk OT dan SK melalui Pendekatan Desain Baru Pengawasan				60,628,000 30,314,000
		24.	DR.4119.BIA.001 - Keputusan Hasil Pengawasan Sarana dan Produk Obat Bahan Alam dan Suplemen Kesehatan yang Diselesaikan Tepat Waktu				052 - Pengawasan Penerapan Regulasi Terkini pada Pelaku Usaha OBA, OK, SK				E - Monitoring dan Evaluasi Implementasi Pedoman Sampling Obat Bahan Alam, Obat Kuasi dan Suplemen Kesehatan oleh UPT Badan POM				139,488,000 69,744,000
		25.	DR.4119.BIA.001 - Keputusan Hasil Pengawasan Sarana dan Produk Obat Bahan Alam dan Suplemen Kesehatan yang Diselesaikan Tepat Waktu				052 - Pengawasan Penerapan Regulasi Terkini pada Pelaku Usaha OBA, OK, SK				F - Aksi Nasional Penanganan dan Pemberantasan Obat Tradisional mengandung Bahan Kimia Obat				34,188,000 34,188,000
		26.	DR.4119.BIA.001 - Keputusan Hasil Pengawasan Sarana				054 - Peningkatan Koordinasi dalam penguatan dan				F - Peningkatan Kompetensi Petugas Badan POM dan UPT				214,987,000 107,493,500

NO.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR	TARGET												ANGGARAN
		KINERJA PROGRAM	B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
		PROGRAM													
		NO	RO		KOMPONEN		SUB KOMPONEN					ANGGARAN		KONTRIBUSI	
			dan Produk Obat Bahan Alam dan Suplemen Kesehatan yang Diselesaikan Tepat Waktu		efektifitas pengawasan OBA OK SK		Badan POM Dalam Pendampingan Monitoring Efek Samping OT dan SK serta Peningkatan Peran Tenaga Medis, Pelaku Usaha dan Masyarakat di Daerah								
		27.	DR.4119.BIC.001 - UPT yang dilakukan pendampingan untuk melakukan pengawasan obat bahan alam dan suplemen kesehatan sesuai standar		051 - Pendampingan, Supervisi kepada UPT		A - Supervisi UPT dalam rangka Pelaksanaan Pengawasan OT dan SK					22,800,000		4,560,000	
		28.	DR.4119.BIC.001 - UPT yang dilakukan pendampingan untuk melakukan pengawasan obat bahan alam dan suplemen kesehatan sesuai standar		052 - Peningkatan Kualitas Pengambilan Keputusan Hasil Pengawasan Obat Bahan Alam dan Suplemen Kesehatan oleh Petugas UPT Badan POM		A - Pelatihan Sampling Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan Tingkat Pusat dan Daerah					57,100,000		11,420,000	
		29.	DR.4119.BIC.001 - UPT yang dilakukan pendampingan untuk melakukan pengawasan obat bahan alam dan suplemen kesehatan sesuai standar		052 - Peningkatan Kualitas Pengambilan Keputusan Hasil Pengawasan Obat Bahan Alam dan Suplemen Kesehatan oleh Petugas UPT Badan POM		B - Peningkatan Kompetensi Petugas UPT Badan POM dalam Kesesuaian Evaluasi Hasil Pengawasan Iklan dan Penandaan					19,258,000		3,851,600	
		30.	DR.4119.BIC.001 - UPT yang dilakukan pendampingan untuk melakukan pengawasan obat bahan alam dan suplemen kesehatan sesuai standar		052 - Peningkatan Kualitas Pengambilan Keputusan Hasil Pengawasan Obat Bahan Alam dan Suplemen Kesehatan oleh Petugas UPT Badan POM		C - Training GMP Bagi Inspektur					45,701,000		9,140,200	
		31.	DR.4119.BIA.001 - Keputusan Hasil Pengawasan Sarana dan Produk Obat Bahan Alam dan Suplemen Kesehatan yang Diselesaikan Tepat Waktu		054 - Peningkatan Koordinasi dalam penguatan dan efektifitas pengawasan OBA OK SK		K - Perkuatan Pengawasan Peredaran OBA mengandung BKO					72,540,000		72,540,000	
		32.	DR.4128.PCA.001 - Keputusan Registrasi Obat Bahan Alam dan Suplemen Kesehatan, serta Notifikasi Kosmetika yang Diselesaikan Sesuai Ketentuan		051 - Registrasi Obat Bahan Alam		A - Desk dan intensifikasi Registrasi Obat Bahan Alam					775,462,000		775,462,000	

NO.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
		NO RO	KOMPONEN			SUB KOMPONEN			ANGGARAN			KONTRIBUSI			
		33. DR.4119.BIA.001 - Keputusan Hasil Pengawasan Sarana dan Produk Obat Bahan Alam dan Suplemen Kesehatan yang Diselesaikan Tepat Waktu	054 - Peningkatan Koordinasi dalam penguatan dan efektifitas pengawasan OBA OK SK			J - Monitoring dan Evaluasi Sampling dan Pengujian Onsite			5,121,000			5,121,000			
		02 - Persentase Suplemen Kesehatan yang aman dan bermutu	68	68	68	68	68	68	68	68	68	68	68	68	2,732,177,300
		NO RO	KOMPONEN			SUB KOMPONEN			ANGGARAN			KONTRIBUSI			
		1. DR.4128.PCA.001 - Keputusan Registrasi Obat Bahan Alam dan Suplemen Kesehatan, serta Notifikasi Kosmetika yang Diselesaikan Sesuai Ketentuan	052 - Registrasi Suplemen Kesehatan			B - Review Hasil Penilaian Iklan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan			19,601,000			19,601,000			
		2. DR.4128.PCA.001 - Keputusan Registrasi Obat Bahan Alam dan Suplemen Kesehatan, serta Notifikasi Kosmetika yang Diselesaikan Sesuai Ketentuan	054 - Monitoring dan Evaluasi Kinerja Registrasi OT, SK dan KOS			B - Penatalaksanaan Data Arsip			171,700,000			171,700,000			
		3. DR.4119.BIC.001 - UPT yang dilakukan pendampingan untuk melakukan pengawasan obat bahan alam dan suplemen kesehatan sesuai standar	052 - Peningkatan Kualitas Pengambilan Keputusan Hasil Pengawasan Obat Bahan Alam dan Suplemen Kesehatan oleh Petugas UPT Badan POM			A - Pelatihan Sampling Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan Tingkat Pusat dan Daerah			57,100,000			11,420,000			
		4. DR.4128.PCA.001 - Keputusan Registrasi Obat Bahan Alam dan Suplemen Kesehatan, serta Notifikasi Kosmetika yang Diselesaikan Sesuai Ketentuan	054 - Monitoring dan Evaluasi Kinerja Registrasi OT, SK dan KOS			D - Pengayaan Kompetensi SDM Bidang Registrasi OT, SK dan Kosmetik			395,775,000			395,775,000			
		5. DR.4128.PCA.001 - Keputusan Registrasi Obat Bahan Alam dan Suplemen Kesehatan, serta Notifikasi Kosmetika yang	054 - Monitoring dan Evaluasi Kinerja Registrasi OT, SK dan KOS			C - Honor Pengelola Keuangan			25,920,000			25,920,000			

NO.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
			NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI							
			Diselesaikan Sesuai Ketentuan												
		6.	DR.4128.PCA.001 - Keputusan Registrasi Obat Bahan Alam dan Suplemen Kesehatan, serta Notifikasi Kosmetika yang Diselesaikan Sesuai Ketentuan		054 - Monitoring dan Evaluasi Kinerja Registrasi OT, SK dan KOS		A - Penguatan Kolaborasi Antar Sektor untuk Peningkatan Kinerja di bidang Registrasi Obat Bahan Alam, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik					1,353,091,000		1,353,091,000	
		7.	DR.4119.BIC.001 - UPT yang dilakukan pendampingan untuk melakukan pengawasan obat bahan alam dan suplemen kesehatan sesuai standar		052 - Peningkatan Kualitas Pengambilan Keputusan Hasil Pengawasan Obat Bahan Alam dan Suplemen Kesehatan oleh Petugas UPT Badan POM		B - Peningkatan Kompetensi Petugas UPT Badan POM dalam Kesesuaian Evaluasi Hasil Pengawasan Iklan dan Penandaan					19,258,000		3,851,600	
		9.	DR.4119.BIC.001 - UPT yang dilakukan pendampingan untuk melakukan pengawasan obat bahan alam dan suplemen kesehatan sesuai standar		052 - Peningkatan Kualitas Pengambilan Keputusan Hasil Pengawasan Obat Bahan Alam dan Suplemen Kesehatan oleh Petugas UPT Badan POM		C - Training GMP Bagi Inspektur					45,701,000		9,140,200	
		10.	DR.4128.PCA.001 - Keputusan Registrasi Obat Bahan Alam dan Suplemen Kesehatan, serta Notifikasi Kosmetika yang Diselesaikan Sesuai Ketentuan		052 - Registrasi Suplemen Kesehatan		C - Pembekalan Evaluator Obat Bahan Alam dan Suplemen Kesehatan Tematik					161,346,000		161,346,000	
		12.	DR.4119.BIA.001 - Keputusan Hasil Pengawasan Sarana dan Produk Obat Bahan Alam dan Suplemen Kesehatan yang Diselesaikan Tepat Waktu		052 - Pengawasan Penerapan Regulasi Terkini pada Pelaku Usaha OBA, OK, SK		A - Intensifikasi Pengawasan Keamanan dan Pembahasan Laporan Efek Samping OT dan SK					203,273,000		101,636,500	
		13.	DR.4119.BIA.001 - Keputusan Hasil Pengawasan Sarana dan Produk Obat Bahan Alam dan Suplemen Kesehatan yang Diselesaikan Tepat Waktu		052 - Pengawasan Penerapan Regulasi Terkini pada Pelaku Usaha OBA, OK, SK		B - Perkuatan Pengawasan Iklan Bersama Lintas Sektor					15,810,000		7,905,000	
		14.	DR.4119.BIA.001 - Keputusan Hasil Pengawasan Sarana dan Produk Obat Bahan Alam dan Suplemen		051 - Peningkatan Pemahaman Regulasi Terkini Terkait OBA OK SK Kepada Pelaku		B - Peningkatan Kewaspadaan Masyarakat Melalui Intensifikasi Informasi Hasil					8,335,000		4,167,500	

NO.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM		TARGET												ANGGARAN
		B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12			
		NO	RO	KOMPONEN			SUB KOMPONEN			ANGGARAN			KONTRIBUSI			
			Kesehatan yang Diselesaikan Tepat Waktu	Usaha dan Masyarakat			Pengawasan Keamanan dan Mutu OT dan SK									
		15.	DR.4119.BIA.001 - Keputusan Hasil Pengawasan Sarana dan Produk Obat Bahan Alam dan Suplemen Kesehatan yang Diselesaikan Tepat Waktu	051 - Peningkatan Pemahaman Regulasi Terkini Terkait OBA OK SK Kepada Pelaku Usaha dan Masyarakat			A - Peningkatan Pemenuhan Ketentuan Iklan dan Penandaan Secara Konsisten oleh Pelaku Usaha OBA, OK dan SK			91,560,000			22,890,000			
		16.	DR.4119.BIA.001 - Keputusan Hasil Pengawasan Sarana dan Produk Obat Bahan Alam dan Suplemen Kesehatan yang Diselesaikan Tepat Waktu	052 - Pengawasan Penerapan Regulasi Terkini pada Pelaku Usaha OBA, OK, SK			D - Intensifikasi Pengawasan Keamanan dan Mutu Produk OT dan SK melalui Pendekatan Desain Baru Pengawasan			60,628,000			30,314,000			
		17.	DR.4128.PCA.001 - Keputusan Registrasi Obat Bahan Alam dan Suplemen Kesehatan, serta Notifikasi Kosmetika yang Diselesaikan Sesuai Ketentuan	052 - Registrasi Suplemen Kesehatan			A - Desk dan intensifikasi Registrasi Suplemen Kesehatan			231,622,000			231,622,000			
		18.	DR.4119.BIA.001 - Keputusan Hasil Pengawasan Sarana dan Produk Obat Bahan Alam dan Suplemen Kesehatan yang Diselesaikan Tepat Waktu	052 - Pengawasan Penerapan Regulasi Terkini pada Pelaku Usaha OBA, OK, SK			E - Monitoring dan Evaluasi Implementasi Pedoman Sampling Obat Bahan Alam, Obat Kuasi dan Suplemen Kesehatan oleh UPT Badan POM			139,488,000			69,744,000			
		19.	DR.4119.BIA.001 - Keputusan Hasil Pengawasan Sarana dan Produk Obat Bahan Alam dan Suplemen Kesehatan yang Diselesaikan Tepat Waktu	054 - Peningkatan Koordinasi dalam penguatan dan efektifitas pengawasan OBA OK SK			F - Peningkatan Kompetensi Petugas Badan POM dan UPT Badan POM Dalam Pendampingan Monitoring Efek Samping OT dan SK serta Peningkatan Peran Tenaga Medis, Pelaku Usaha dan Masyarakat di Daerah			214,987,000			107,493,500			
		20.	DR.4119.BIC.001 - UPT yang dilakukan pendampingan untuk melakukan pengawasan obat bahan alam dan suplemen kesehatan sesuai standar	051 - Pendampingan, Supervisi kepada UPT			A - Supervisi UPT dalam rangka Pelaksanaan Pengawasan OT dan SK			22,800,000			4,560,000			

NO.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
		03 - Persentase Kosmetik yang aman dan bermutu		62	62	62	62	62	62	62	62	62	62	62	2,966,252,000
NO	RO		KOMPONEN		SUB KOMPONEN		ANGGARAN		KONTRIBUSI						
1.	DR.4121.BIA.001 - Keputusan Hasil Pengawasan Kosmetika yang diselesaikan Tepat Waktu		051 - Pelaksanaan Koordinasi dalam rangka tindak lanjut pengawasan keamanan dan mutu Kosmetik		A - Intensifikasi Penelusuran Bahan Berbahaya/ Dilarang dalam Kosmetik		98,107,000		98,107,000						
2.	DR.4121.BIA.001 - Keputusan Hasil Pengawasan Kosmetika yang diselesaikan Tepat Waktu		051 - Pelaksanaan Koordinasi dalam rangka tindak lanjut pengawasan keamanan dan mutu Kosmetik		B - Public Awareness Bahaya Kosmetika Mengandung Bahan Berbahaya / Dilarang dan Penyelenggaraan Public Warning		119,040,000		119,040,000						
3.	DR.4121.BIA.001 - Keputusan Hasil Pengawasan Kosmetika yang diselesaikan Tepat Waktu		051 - Pelaksanaan Koordinasi dalam rangka tindak lanjut pengawasan keamanan dan mutu Kosmetik		C - Rapat Pembahasan Aktual Direktorat Pengawasan Kosmetik		146,174,000		146,174,000						
4.	DR.4121.BIA.001 - Keputusan Hasil Pengawasan Kosmetika yang diselesaikan Tepat Waktu		051 - Pelaksanaan Koordinasi dalam rangka tindak lanjut pengawasan keamanan dan mutu Kosmetik		D - Pemantapan Kerja Pengawasan Kosmetik serta Peningkatan Kerjasama Lintas Sektor		163,771,000		163,771,000						
5.	DR.4121.BIA.001 - Keputusan Hasil Pengawasan Kosmetika yang diselesaikan Tepat Waktu		055 - Pelaksanaan monitoring dan evaluasi efek samping kosmetik		A - Peningkatan pengawasan terhadap sumber perolehan kosmetik mengandung bahan berbahaya/bahan dilarang		152,490,000		152,490,000						
6.	DR.4121.BIA.001 - Keputusan Hasil Pengawasan Kosmetika yang diselesaikan Tepat Waktu		051 - Pelaksanaan Koordinasi dalam rangka tindak lanjut pengawasan keamanan dan mutu Kosmetik		E - Akselerasi Kemandirian Penyediaan Bahan Baku Natural Cosmetics Nasional		84,141,000		84,141,000						
7.	DR.4121.BIA.001 - Keputusan Hasil Pengawasan Kosmetika yang diselesaikan Tepat Waktu		052 - Pelaksanaan Koordinasi dalam rangka tindak lanjut pengawasan informasi dan promosi kosmetik		A - Intensifikasi Pengawasan Post Market Penandaan Kosmetik		558,532,000		558,532,000						
8.	DR.4121.BIA.001 - Keputusan Hasil Pengawasan Kosmetika yang diselesaikan Tepat Waktu		052 - Pelaksanaan Koordinasi dalam rangka tindak lanjut pengawasan		C - Pencegahan Terjadinya Pelanggaran dan Kecurangan Dalam Penandaan Kosmetik		150,183,000		150,183,000						

NO.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
		NO RO	KOMPONEN			SUB KOMPONEN			ANGGARAN			KONTRIBUSI			
			informasi dan promosi kosmetik												
		10. DR.4121.BIC.002 - Pendampingan dan Pembinaan UPT Dalam Melakukan Pengawasan Kosmetik Sesuai Standar	051 - Peningkatan Kualitas Pengambilan Keputusan Pengawasan Kosmetik oleh UPT BPOM			B - Coaching Clinic Pengawasan Mutu dan Keamanan Kosmetik bagi Petugas			171,330,000			171,330,000			
		11. DR.4128.PCA.001 - Keputusan Registrasi Obat Bahan Alam dan Suplemen Kesehatan, serta Notifikasi Kosmetika yang Diselesaikan Sesuai Ketentuan	053 - Registrasi Notifikasi Kosmetik			B - Representasi di Sidang Harmonisasi ASEAN di Bidang Kosmetika			294,280,000			294,280,000			
		12. DR.4121.BIC.002 - Pendampingan dan Pembinaan UPT Dalam Melakukan Pengawasan Kosmetik Sesuai Standar	051 - Peningkatan Kualitas Pengambilan Keputusan Pengawasan Kosmetik oleh UPT BPOM			A - Pelatihan Sampling Kosmetik untuk Pusat dan Daerah			149,750,000			149,750,000			
		13. DR.4121.BIA.001 - Keputusan Hasil Pengawasan Kosmetika yang diselesaikan Tepat Waktu	055 - Pelaksanaan monitoring dan evaluasi efek samping kosmetik			B - Farmakovigilans bagi Pelaku Usaha			88,479,000			88,479,000			
		14. DR.4121.BAH.001 - Keputusan Penilaian Sarana dan Produk Kosmetika yang Diselesaikan Tepat Waktu	051 - Pelaksanaan sertifikasi sarana produksi kosmetik			C - Dialog Interaktif Risiko Penggunaan Kosmetik yang Diaplikasikan Selayaknya Obat			49,000,000			49,000,000			
		15. DR.4121.BIA.001 - Keputusan Hasil Pengawasan Kosmetika yang diselesaikan Tepat Waktu	055 - Pelaksanaan monitoring dan evaluasi efek samping kosmetik			C - Sampling dan pengujian kosmetik yang dibuat berdasarkan lisensi merek			62,165,000			62,165,000			
		18. DR.4128.PCA.001 - Keputusan Registrasi Obat Bahan Alam dan Suplemen Kesehatan, serta Notifikasi Kosmetika yang Diselesaikan Sesuai Ketentuan	053 - Registrasi Notifikasi Kosmetik			C - Desk dan Intensifikasi Notifikasi Kosmetik			266,110,000			266,110,000			
		19. DR.4128.PCA.001 - Keputusan Registrasi Obat Bahan Alam dan Suplemen Kesehatan, serta Notifikasi Kosmetika yang Diselesaikan Sesuai Ketentuan	053 - Registrasi Notifikasi Kosmetik			D - Penyiapan Master Data Pengawasan Pre-Market Notifikasi Kosmetik			55,150,000			55,150,000			

NO.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
		NO	RO	KOMPONEN			SUB KOMPONEN			ANGGARAN			KONTRIBUSI		
		21.	DR.4128.PCA.001 - Keputusan Registrasi Obat Bahan Alam dan Suplemen Kesehatan, serta Notifikasi Kosmetika yang Diselesaikan Sesuai Ketentuan	053 - Registrasi Notifikasi Kosmetik			A - Pembahasan aspek keamanan dan klaim kosmetika			39,550,000			39,550,000		
		22.	DR.4121.BIC.002 - Pendampingan dan Pembinaan UPT Dalam Melakukan Pengawasan Kosmetik Sesuai Standar	052 - Pendampingan Kepada UPT di Bidang Kosmetik			A - Pembinaan UPT dalam rangka pengawasan kosmetik			318,000,000			318,000,000		
		04 - Indeks Kualitas Kebijakan Pengawasan Obat Bahan Alam, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik											79	3,257,766,000	
		NO	RO	KOMPONEN			SUB KOMPONEN			ANGGARAN			KONTRIBUSI		
		1.	DR.4129.PFA.001 - Standar Obat Bahan Alam, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang Disusun	051 - Penyusunan dan Pembahasan Standar Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik			A - Penyusunan dan Pembahasan Regulasi di bidang Obat Bahan Alam			299,432,000			299,432,000		
		2.	DR.4129.PFA.001 - Standar Obat Bahan Alam, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang Disusun	051 - Penyusunan dan Pembahasan Standar Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik			B - Penyusunan dan Pembahasan Regulasi di bidang Obat Kuasi dan Suplemen Kesehatan			335,045,000			335,045,000		
		3.	DR.4129.PFA.001 - Standar Obat Bahan Alam, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang Disusun	051 - Penyusunan dan Pembahasan Standar Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik			C - Penyusunan dan Pembahasan Regulasi di bidang Kosmetik			344,838,000			344,838,000		
		4.	DR.4129.PFA.001 - Standar Obat Bahan Alam, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang Disusun	054 - Perencanaan/Monitoring/Evaluasi pengelolaan dan kinerja di bidang OT, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik			A - Brainstorming / Perencanaan penyusunan standar dibidang OT, SK dan Kos			16,973,000			16,973,000		
		5.	DR.4129.PFA.001 - Standar Obat	054 - Perencanaan/Monitoring/Evaluasi			B - Peningkatan Kompetensi			160,758,000			160,758,000		

NO.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
			NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI							
			Bahan Alam, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang Disusun		pengelolaan dan kinerja di bidang OT, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik		Pegawai								
		6.	DR.4129.PFA.001 - Standar Obat Bahan Alam, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang Disusun		055 - Sosialisasi/Konsultasi/Koordinasi untuk penyusunan di bidang OT, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik		B - Peningkatan Kerjasama Lintas Sektor		121,167,000		121,167,000				
		7.	DR.4129.PFA.001 - Standar Obat Bahan Alam, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang Disusun		056 - Monitoring dan evaluasi kinerja standarisasi OT, Suplemen Kesehatan, Kosmetik		A - Monitoring dan Evaluasi Capaian Kinerja		210,584,000		210,584,000				
		8.	DR.4129.PFA.002 - Standar obat bahan alam dan suplemen kesehatan yang disusun berkontribusi dalam penanganan stunting		051 - Penyusunan dan Pembahasan Standar OBA, SK, dan Kos		A - Penyusunan dan pembahasan regulasi Obat Bahan Alam		250,000,000		250,000,000				
		9.	DR.4129.PFA.002 - Standar obat bahan alam dan suplemen kesehatan yang disusun berkontribusi dalam penanganan stunting		051 - Penyusunan dan Pembahasan Standar OBA, SK, dan Kos		B - Penyusunan dan Pembahasan regulasi Suplemen kesehatan		250,000,000		250,000,000				
		10.	DR.4129.PFA.001 - Standar Obat Bahan Alam, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang Disusun		055 - Sosialisasi/Konsultasi/Koordinasi untuk penyusunan di bidang OT, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik		A - Sosialisasi Regulasi di bidang Obat Bahan Alam		30,000,000		30,000,000				
		11.	DR.4129.PFA.001 - Standar Obat Bahan Alam, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang Disusun		055 - Sosialisasi/Konsultasi/Koordinasi untuk penyusunan di bidang OT, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik		C - Penyelenggaraan Sidang IRCH ke 16		979,385,000		979,385,000				
		12.	DR.4129.PFA.001 - Standar Obat Bahan Alam, Suplemen Kesehatan dan		055 - Sosialisasi/Konsultasi/Koordinasi untuk penyusunan di bidang OT, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik		D - Sosialisasi Regulasi di bidang Suplemen Kesehatan		30,000,000		30,000,000				

NO.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN			ANGGARAN			KONTRIBUSI						
	Kosmetik yang Disusun														
13.	DR.4129.PFA.001 - Standar Obat Bahan Alam, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang Disusun	055 - Sosialisasi/Konsultasi/Koordinasi untuk penyusunan di bidang OT, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik								E - Sosialisasi Regulasi di bidang Kosmetik			94,857,000		94,857,000
14.	DR.4129.PFA.001 - Standar Obat Bahan Alam, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang Disusun	055 - Sosialisasi/Konsultasi/Koordinasi untuk penyusunan di bidang OT, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik								G - Konsultasi Publik Regulasi di bidang Obat Bahan Alam, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik			28,117,000		28,117,000
15.	DR.4129.PFA.001 - Standar Obat Bahan Alam, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang Disusun	056 - Monitoring dan evaluasi kinerja standardisasi OT, Suplemen Kesehatan, Kosmetik								B - Pemeriksaan Kesehatan Pegawai			106,610,000		106,610,000
	05 - Persentase rekomendasi hasil pengawasan Obat Bahan Alam, Suplemen Kesehatan, Obat Kuasi dan Kosmetik yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor		83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	902,584,000
NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN			ANGGARAN			KONTRIBUSI						
1.	DR.4119.BIC.002 - keputusan/rekomendasi hasil pengawasan yang dikirimkan ke lintas sektor	051 - Peningkatan Koordinasi dalam Penguatan dan Efektifitas Pengawasan OBA OK SK								B - Intensifikasi Pengawasan Informasi dan Promosi di Media Online			36,755,000		36,755,000
3.	DR.4119.BIC.002 - keputusan/rekomendasi hasil pengawasan yang dikirimkan ke lintas sektor	052 - Peningkatan pemahaman Regulasi Terkini Terkait OBA OK SK								A - Perkuatan literasi masyarakat terkait informasi dan promosi melalui optimalisasi pemanfaatan media sosial bersinergi dengan pemangku kepentingan			152,910,000		152,910,000
4.	DR.4121.BIC.001 - Keputusan/Rekomendasi hasil	051 - Koordinasi Lintas Sektor								B - Penguatan Koordinasi Lintas Sektor			269,624,000		269,624,000

NO.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET												ANGGARAN	
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12		
		NO	RO				KOMPONEN				SUB KOMPONEN				ANGGARAN	KONTRIBUSI
			pengawasan Kosmetik yang dikirimkan ke lintas sektor				Pengawasan Kosmetik				Pengawasan Promosi Kosmetik di Era Revolusi Industri 4.0					
		5.	DR.4121.BIC.001 - Keputusan/Rekomendasi hasil pengawasan Kosmetik yang dikirimkan ke lintas sektor				051 - Koordinasi Lintas Sektor Pengawasan Kosmetik				A - Implementasi Post Border Patrol Untuk Penguatan Pengawasan Kosmetik Impor Ilegal				132,960,000	132,960,000
		6.	DR.4119.BIC.002 - keputusan/rekomendasi hasil pengawasan yang dikirimkan ke lintas sektor				051 - Peningkatan Koordinasi dalam Penguatan dan Efektifitas Pengawasan OBA OK SK				A - Perkuatan Jejaring Pengawasan Informasi dan Promosi Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan				73,460,000	73,460,000
		7.	DR.4119.BIC.002 - keputusan/rekomendasi hasil pengawasan yang dikirimkan ke lintas sektor				051 - Peningkatan Koordinasi dalam Penguatan dan Efektifitas Pengawasan OBA OK SK				C - Intensifikasi Pengawasan Peredaran OBA, OK dan SK di Media Online				236,875,000	236,875,000
		06 -	Persentase sarana produksi Obat Bahan Alam yang memenuhi ketentuan	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86	58,701,900
		NO	RO				KOMPONEN				SUB KOMPONEN				ANGGARAN	KONTRIBUSI
		1.	DR.4119.BIC.001 - UPT yang dilakukan pendampingan untuk melakukan pengawasan obat bahan alam dan suplemen kesehatan sesuai standar				051 - Pendampingan, Supervisi kepada UPT				A - Supervisi UPT dalam rangka Pelaksanaan Pengawasan OT dan SK				22,800,000	2,280,000
		2.	DR.4119.BIC.001 - UPT yang dilakukan pendampingan untuk melakukan pengawasan obat bahan alam dan suplemen kesehatan sesuai standar				052 - Peningkatan Kualitas Pengambilan Keputusan Hasil Pengawasan Obat Bahan Alam dan Suplemen Kesehatan oleh Petugas UPT Badan POM				C - Training GMP Bagi Inspektur				45,701,000	4,570,100
		3.	DR.4119.BIC.001 - UPT yang dilakukan pendampingan untuk melakukan pengawasan obat bahan alam dan suplemen kesehatan sesuai standar				052 - Peningkatan Kualitas Pengambilan Keputusan Hasil Pengawasan Obat Bahan Alam dan Suplemen Kesehatan oleh Petugas UPT Badan POM				B - Peningkatan Kompetensi Petugas UPT Badan POM dalam Kesesuaian Evaluasi Hasil Pengawasan Iklan dan Penandaan				19,258,000	1,925,800
		4.	DR.4119.BIA.001 - Keputusan Hasil Pengawasan Sarana dan				054 - Peningkatan Koordinasi dalam penquatan dan				A - Pembentukan Inspektur Junior Obat				15,164,000	3,791,000

NO.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
		NO	RO	KOMPONEN			SUB KOMPONEN			ANGGARAN			KONTRIBUSI		
			Produk Obat Bahan Alam dan Suplemen Kesehatan yang Diselesaikan Tepat Waktu	efektifitas pengawasan OBA OK SK			Tradisional dan Suplemen Kesehatan								
		5.	DR.4119.BIC.001 - UPT yang dilakukan pendampingan untuk melakukan pengawasan obat bahan alam dan suplemen kesehatan sesuai standar	052 - Peningkatan Kualitas Pengambilan Keputusan Hasil Pengawasan Obat Bahan Alam dan Suplemen Kesehatan oleh Petugas UPT Badan POM			A - Pelatihan Sampling Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan Tingkat Pusat dan Daerah			57,100,000			5,710,000		
		6.	DR.4119.BIA.001 - Keputusan Hasil Pengawasan Sarana dan Produk Obat Bahan Alam dan Suplemen Kesehatan yang Diselesaikan Tepat Waktu	054 - Peningkatan Koordinasi dalam penguatan dan efektifitas pengawasan OBA OK SK			B - Pertemuan Koordinasi Inspektur OT dan SK dalam Rangka Memaksimalkan Kinerja Pengawasan			16,344,000			4,086,000		
		7.	DR.4119.BIA.001 - Keputusan Hasil Pengawasan Sarana dan Produk Obat Bahan Alam dan Suplemen Kesehatan yang Diselesaikan Tepat Waktu	052 - Pengawasan Penerapan Regulasi Terkini pada Pelaku Usaha OBA, OK, SK			C - Inspeksi Komprehensif dalam Rangka Tindak Lanjut Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan Berbasis Risiko			145,356,000			36,339,000		
		07 -	Persentase sarana produksi Suplemen Kesehatan yang memenuhi ketentuan	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	58,701,900
		NO	RO	KOMPONEN			SUB KOMPONEN			ANGGARAN			KONTRIBUSI		
		1.	DR.4119.BIA.001 - Keputusan Hasil Pengawasan Sarana dan Produk Obat Bahan Alam dan Suplemen Kesehatan yang Diselesaikan Tepat Waktu	054 - Peningkatan Koordinasi dalam penguatan dan efektifitas pengawasan OBA OK SK			B - Pertemuan Koordinasi Inspektur OT dan SK dalam Rangka Memaksimalkan Kinerja Pengawasan			16,344,000			4,086,000		
		2.	DR.4119.BIC.001 - UPT yang dilakukan pendampingan untuk melakukan pengawasan obat bahan alam dan suplemen kesehatan sesuai standar	052 - Peningkatan Kualitas Pengambilan Keputusan Hasil Pengawasan Obat Bahan Alam dan Suplemen Kesehatan oleh Petugas UPT Badan POM			B - Peningkatan Kompetensi Petugas UPT Badan POM dalam Kesesuaian Evaluasi Hasil Pengawasan Iklan dan Penandaan			19,258,000			1,925,800		

NO.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
		NO	RO	KOMPONEN			SUB KOMPONEN			ANGGARAN			KONTRIBUSI		
		3.	DR.4119.BIA.001 - Keputusan Hasil Pengawasan Sarana dan Produk Obat Bahan Alam dan Suplemen Kesehatan yang Diselesaikan Tepat Waktu	052 - Pengawasan Penerapan Regulasi Terkini pada Pelaku Usaha OBA, OK, SK			C - Inspeksi Komprehensif dalam Rangka Tindak Lanjut Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan Berbasis Risiko			145,356,000			36,339,000		
		4.	DR.4119.BIC.001 - UPT yang dilakukan pendampingan untuk melakukan pengawasan obat bahan alam dan suplemen kesehatan sesuai standar	052 - Peningkatan Kualitas Pengambilan Keputusan Hasil Pengawasan Obat Bahan Alam dan Suplemen Kesehatan oleh Petugas UPT Badan POM			A - Pelatihan Sampling Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan Tingkat Pusat dan Daerah			57,100,000			5,710,000		
		5.	DR.4119.BIC.001 - UPT yang dilakukan pendampingan untuk melakukan pengawasan obat bahan alam dan suplemen kesehatan sesuai standar	051 - Pendampingan, Supervisi kepada UPT			A - Supervisi UPT dalam rangka Pelaksanaan Pengawasan OT dan SK			22,800,000			2,280,000		
		6.	DR.4119.BIC.001 - UPT yang dilakukan pendampingan untuk melakukan pengawasan obat bahan alam dan suplemen kesehatan sesuai standar	052 - Peningkatan Kualitas Pengambilan Keputusan Hasil Pengawasan Obat Bahan Alam dan Suplemen Kesehatan oleh Petugas UPT Badan POM			C - Training GMP Bagi Inspektur			45,701,000			4,570,100		
		8.	DR.4119.BIA.001 - Keputusan Hasil Pengawasan Sarana dan Produk Obat Bahan Alam dan Suplemen Kesehatan yang Diselesaikan Tepat Waktu	054 - Peningkatan Koordinasi dalam penguatan dan efektifitas pengawasan OBA OK SK			A - Pembentukan Inspektur Junior Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan			15,164,000			3,791,000		
		08 -	Persentase sarana produksi Kosmetik yang memenuhi ketentuan	81	81	81	81	81	81	81	81	81	81	81	1,915,196,500
		NO	RO	KOMPONEN			SUB KOMPONEN			ANGGARAN			KONTRIBUSI		
		1.	DR.4128.BIA.001 - Keputusan penilaian Dokumen Informasi Produk (DIP) kosmetik yang diselesaikan sesuai standar	051 - Penilaian DIP			G - Forum Komunikasi Notifikasi Terkait Bahan Kosmetika			222,658,000			222,658,000		
		2.	DR.4128.BIA.001 - Keputusan penilaian Dokumen Informasi	051 - Penilaian DIP			F - Supervisi Penilaian DIP UPT			69,935,000			69,935,000		

NO.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
			NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI							
			Produk (DIP) kosmetik yang diselesaikan sesuai standar												
		3.	DR.4128.BIA.001 - Keputusan penilaian Dokumen Informasi Produk (DIP) kosmetik yang diselesaikan sesuai standar			051 - Penilaian DIP		H - Intensifikasi Penilaian DIP dan Tindak Lanjut Hasil Penilaian DIP					48,657,000		48,657,000
		4.	DR.4128.BIA.001 - Keputusan penilaian Dokumen Informasi Produk (DIP) kosmetik yang diselesaikan sesuai standar			051 - Penilaian DIP		C - Pembahasan Dan Penyusunan Pedoman Petunjuk Teknis Pola Tindak Lanjut Hasil Audit DIP					67,870,000		67,870,000
		5.	DR.4128.BIA.001 - Keputusan penilaian Dokumen Informasi Produk (DIP) kosmetik yang diselesaikan sesuai standar			051 - Penilaian DIP		A - Penilaian DIP					238,301,000		238,301,000
		6.	DR.4128.BIA.001 - Keputusan penilaian Dokumen Informasi Produk (DIP) kosmetik yang diselesaikan sesuai standar			051 - Penilaian DIP		B - Evaluasi Hasil Penilaian DIP					213,455,000		213,455,000
		7.	DR.4128.BIA.001 - Keputusan penilaian Dokumen Informasi Produk (DIP) kosmetik yang diselesaikan sesuai standar			051 - Penilaian DIP		D - Penguatan Kapasitas Auditor DIP Kosmetik					413,734,000		413,734,000
		8.	DR.4128.BIA.001 - Keputusan penilaian Dokumen Informasi Produk (DIP) kosmetik yang diselesaikan sesuai standar			051 - Penilaian DIP		E - Penentuan Produk Prioritas berdasarkan tingkat resiko					21,125,000		21,125,000
		9.	DR.4128.BIA.001 - Keputusan penilaian Dokumen Informasi Produk (DIP) kosmetik yang diselesaikan sesuai standar			051 - Penilaian DIP		I - Pembahasan Pedoman Pola Tindak Hasil Penilaian DIP					191,078,000		191,078,000

NO.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM		TARGET												ANGGARAN
		B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12			
		NO	RO	KOMPONEN			SUB KOMPONEN			ANGGARAN			KONTRIBUSI			
		10.	DR.4121.BIA.001 - Keputusan Hasil Pengawasan Kosmetika yang diselesaikan Tepat Waktu	053 - Pelaksanaan Koordinasi dalam rangka tindak lanjut pengawasan sarana produksi dan distribusi kosmetik			A - Intensifikasi Pemeriksaan dan Penelusuran Sarana Produksi, Distribusi dan Importir yang Berdasarkan Hasil Pengawasan Diduga Memproduksi dan Mengedarkan Kosmetika Ilegal dan Tidak Memenuhi Syarat			571,178,000			428,383,500			
		09 -	Persentase fasilitas distribusi Obat Bahan Alam yang memenuhi ketentuan	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	58,701,900	
		NO	RO	KOMPONEN			SUB KOMPONEN			ANGGARAN			KONTRIBUSI			
		1.	DR.4119.BIC.001 - UPT yang dilakukan pendampingan untuk melakukan pengawasan obat bahan alam dan suplemen kesehatan sesuai standar	052 - Peningkatan Kualitas Pengambilan Keputusan Hasil Pengawasan Obat Bahan Alam dan Suplemen Kesehatan oleh Petugas UPT Badan POM			C - Training GMP Bagi Inspektur			45,701,000			4,570,100			
		2.	DR.4119.BIC.001 - UPT yang dilakukan pendampingan untuk melakukan pengawasan obat bahan alam dan suplemen kesehatan sesuai standar	051 - Pendampingan, Supervisi kepada UPT			A - Supervisi UPT dalam rangka Pelaksanaan Pengawasan OT dan SK			22,800,000			2,280,000			
		3.	DR.4119.BIC.001 - UPT yang dilakukan pendampingan untuk melakukan pengawasan obat bahan alam dan suplemen kesehatan sesuai standar	052 - Peningkatan Kualitas Pengambilan Keputusan Hasil Pengawasan Obat Bahan Alam dan Suplemen Kesehatan oleh Petugas UPT Badan POM			A - Pelatihan Sampling Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan Tingkat Pusat dan Daerah			57,100,000			5,710,000			
		4.	DR.4119.BIA.001 - Keputusan Hasil Pengawasan Sarana dan Produk Obat Bahan Alam dan Suplemen Kesehatan yang Diselesaikan Tepat Waktu	052 - Pengawasan Penerapan Regulasi Terkini pada Pelaku Usaha OBA, OK, SK			C - Inspeksi Komprehensif dalam Rangka Tindak Lanjut Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan Berbasis Risiko			145,356,000			36,339,000			
		5.	DR.4119.BIA.001 - Keputusan Hasil Pengawasan Sarana dan Produk Obat Bahan Alam dan Suplemen Kesehatan yang Diselesaikan Tepat Waktu	054 - Peningkatan Koordinasi dalam penguatan dan efektifitas pengawasan OBA OK SK			B - Pertemuan Koordinasi Inspektur OT dan SK dalam Rangka Memaksimalkan Kinerja Pengawasan			16,344,000			4,086,000			

NO.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
		NO	RO	KOMPONEN		SUB KOMPONEN		ANGGARAN		KONTRIBUSI					
		6.	DR.4119.BIC.001 - UPT yang dilakukan pendampingan untuk melakukan pengawasan obat bahan alam dan suplemen kesehatan sesuai standar	052 - Peningkatan Kualitas Pengambilan Keputusan Hasil Pengawasan Obat Bahan Alam dan Suplemen Kesehatan oleh Petugas UPT Badan POM		B - Peningkatan Kompetensi Petugas UPT Badan POM dalam Kesesuaian Evaluasi Hasil Pengawasan Iklan dan Penandaan		19,258,000		1,925,800					
		7.	DR.4119.BIA.001 - Keputusan Hasil Pengawasan Sarana dan Produk Obat Bahan Alam dan Suplemen Kesehatan yang Diselesaikan Tepat Waktu	054 - Peningkatan Koordinasi dalam penguatan dan efektifitas pengawasan OBA OK SK		A - Pembentukan Inspektur Junior Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan		15,164,000		3,791,000					
		10 -	Persentase fasilitas distribusi Suplemen Kesehatan yang memenuhi ketentuan	89	89	89	89	89	89	89	90	90	90	90	58,701,900
		NO	RO	KOMPONEN		SUB KOMPONEN		ANGGARAN		KONTRIBUSI					
		1.	DR.4119.BIC.001 - UPT yang dilakukan pendampingan untuk melakukan pengawasan obat bahan alam dan suplemen kesehatan sesuai standar	052 - Peningkatan Kualitas Pengambilan Keputusan Hasil Pengawasan Obat Bahan Alam dan Suplemen Kesehatan oleh Petugas UPT Badan POM		B - Peningkatan Kompetensi Petugas UPT Badan POM dalam Kesesuaian Evaluasi Hasil Pengawasan Iklan dan Penandaan		19,258,000		1,925,800					
		2.	DR.4119.BIA.001 - Keputusan Hasil Pengawasan Sarana dan Produk Obat Bahan Alam dan Suplemen Kesehatan yang Diselesaikan Tepat Waktu	054 - Peningkatan Koordinasi dalam penguatan dan efektifitas pengawasan OBA OK SK		A - Pembentukan Inspektur Junior Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan		15,164,000		3,791,000					
		3.	DR.4119.BIC.001 - UPT yang dilakukan pendampingan untuk melakukan pengawasan obat bahan alam dan suplemen kesehatan sesuai standar	052 - Peningkatan Kualitas Pengambilan Keputusan Hasil Pengawasan Obat Bahan Alam dan Suplemen Kesehatan oleh Petugas UPT Badan POM		A - Pelatihan Sampling Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan Tingkat Pusat dan Daerah		57,100,000		5,710,000					
		5.	DR.4119.BIC.001 - UPT yang dilakukan pendampingan untuk melakukan pengawasan obat bahan alam dan suplemen kesehatan sesuai standar	051 - Pendampingan, Supervisi kepada UPT		A - Supervisi UPT dalam rangka Pelaksanaan Pengawasan OT dan SK		22,800,000		2,280,000					

NO.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
		NO	RO	KOMPONEN			SUB KOMPONEN			ANGGARAN			KONTRIBUSI		
		6.	DR.4119.BIC.001 - UPT yang dilakukan pendampingan untuk melakukan pengawasan obat bahan alam dan suplemen kesehatan sesuai standar	052 - Peningkatan Kualitas Pengambilan Keputusan Hasil Pengawasan Obat Bahan Alam dan Suplemen Kesehatan oleh Petugas UPT Badan POM			C - Training GMP Bagi Inspektur			45,701,000			4,570,100		
		7.	DR.4119.BIA.001 - Keputusan Hasil Pengawasan Sarana dan Produk Obat Bahan Alam dan Suplemen Kesehatan yang Diselesaikan Tepat Waktu	054 - Peningkatan Koordinasi dalam penguatan dan efektifitas pengawasan OBA OK SK			B - Pertemuan Koordinasi Inspektur OT dan SK dalam Rangka Memaksimalkan Kinerja Pengawasan			16,344,000			4,086,000		
		8.	DR.4119.BIA.001 - Keputusan Hasil Pengawasan Sarana dan Produk Obat Bahan Alam dan Suplemen Kesehatan yang Diselesaikan Tepat Waktu	052 - Pengawasan Penerapan Regulasi Terkini pada Pelaku Usaha OBA, OK, SK			C - Inspeksi Komprehensif dalam Rangka Tindak Lanjut Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan Berbasis Risiko			145,356,000			36,339,000		
		11 - Persentase fasilitas distribusi Kosmetik yang memenuhi ketentuan	78	78	78	78	78	78	78	78	78	78	78	892,794,500	
		NO	RO	KOMPONEN			SUB KOMPONEN			ANGGARAN			KONTRIBUSI		
		1.	DR.4121.QDI.002 - BUPN kosmetik yang telah diintervensi dalam pemenuhan ketentuan	051 - Pelaksanaan Koordinasi Dalam Rangka Tindak Lanjut Pengawasan Sarana BUPN Kosmeti			C - Upaya kolaboratif dalam rangka pengembangan dan pengawasan usaha kontrak produksi kosmetik			419,800,000			419,800,000		
		2.	DR.4121.BIA.001 - Keputusan Hasil Pengawasan Kosmetika yang diselesaikan Tepat Waktu	053 - Pelaksanaan Koordinasi dalam rangka tindak lanjut pengawasan sarana produksi dan distribusi kosmetik			A - Intensifikasi Pemeriksaan dan Penelusuran Sarana Produksi, Distribusi dan Importir yang Berdasarkan Hasil Pengawasan Diduga Memproduksi dan Mengedarkan Kosmetika Ilegal dan Tidak Memenuhi Syarat			571,178,000			142,794,500		
		3.	DR.4121.QDI.002 - BUPN kosmetik yang telah diintervensi dalam pemenuhan ketentuan	051 - Pelaksanaan Koordinasi Dalam Rangka Tindak Lanjut Pengawasan Sarana BUPN Kosmeti			A - Intensifikasi Pemeriksaan Sarana BUPN			201,320,000			201,320,000		
		4.	DR.4121.QDI.002 - BUPN kosmetik yang telah diintervensi	051 - Pelaksanaan Koordinasi Dalam Rangka Tindak Lanjut Pengawasan			B - Penyusunan Agenda Kolaborasi Pemangku Kepentingan dalam rangka Pengembangan dan			128,880,000			128,880,000		

NO.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET												ANGGARAN
		B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12		
		NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI								
			dalam pemenuhan ketentuan			Sarana BUPN Kosmeti			Pengawasan Usaha Kontrak Produksi Kosmetik						
		12 - Persentase iklan Obat Bahan Alam yang memenuhi ketentuan	78	78	78	78	78	78	78	66	66	66	66	66	909,591,900
			NO	RO		KOMPONEN		SUB KOMPONEN		ANGGARAN		KONTRIBUSI			
			1.	DR.4119.BIC.001 - UPT yang dilakukan pendampingan untuk melakukan pengawasan obat bahan alam dan suplemen kesehatan sesuai standar		052 - Peningkatan Kualitas Pengambilan Keputusan Hasil Pengawasan Obat Bahan Alam dan Suplemen Kesehatan oleh Petugas UPT Badan POM		C - Training GMP Bagi Inspektur		45,701,000		4,570,100			
			3.	DR.4119.BIC.001 - UPT yang dilakukan pendampingan untuk melakukan pengawasan obat bahan alam dan suplemen kesehatan sesuai standar		052 - Peningkatan Kualitas Pengambilan Keputusan Hasil Pengawasan Obat Bahan Alam dan Suplemen Kesehatan oleh Petugas UPT Badan POM		B - Peningkatan Kompetensi Petugas UPT Badan POM dalam Kesesuaian Evaluasi Hasil Pengawasan Iklan dan Penandaan		19,258,000		1,925,800			
			4.	DR.4119.BIA.001 - Keputusan Hasil Pengawasan Sarana dan Produk Obat Bahan Alam dan Suplemen Kesehatan yang Diselesaikan Tepat Waktu		054 - Peningkatan Koordinasi dalam penguatan dan efektifitas pengawasan OBA OK SK		D - Capacity Building Direktorat Pengawasan OT dan SK		144,392,000		72,196,000			
			5.	DR.4119.BIC.001 - UPT yang dilakukan pendampingan untuk melakukan pengawasan obat bahan alam dan suplemen kesehatan sesuai standar		052 - Peningkatan Kualitas Pengambilan Keputusan Hasil Pengawasan Obat Bahan Alam dan Suplemen Kesehatan oleh Petugas UPT Badan POM		A - Pelatihan Sampling Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan Tingkat Pusat dan Daerah		57,100,000		5,710,000			
			6.	DR.4119.BIC.001 - UPT yang dilakukan pendampingan untuk melakukan pengawasan obat bahan alam dan suplemen kesehatan sesuai standar		051 - Pendampingan, Supervisi kepada UPT		A - Supervisi UPT dalam rangka Pelaksanaan Pengawasan OT dan SK		22,800,000		2,280,000			
			7.	DR.4119.BIA.001 - Keputusan Hasil Pengawasan Sarana dan Produk Obat Bahan Alam dan Suplemen Kesehatan yang Diselesaikan Tepat Waktu		054 - Peningkatan Koordinasi dalam penguatan dan efektifitas pengawasan OBA OK SK		E - Pengembangan Kompetensi Petugas Pengawas OT dan SK melalui partisipasi aktif dalam kegiatan Internasional		135,000,000		67,500,000			

NO.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET												ANGGARAN	
		B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12			
		NO	RO	KOMPONEN				SUB KOMPONEN				ANGGARAN	KONTRIBUSI			
		8.	DR.4119.BIA.001 - Keputusan Hasil Pengawasan Sarana dan Produk Obat Bahan Alam dan Suplemen Kesehatan yang Diselesaikan Tepat Waktu	051 - Peningkatan Pemahaman Regulasi Terkini Terkait OBA OK SK Kepada Pelaku Usaha dan Masyarakat				A - Peningkatan Pemenuhan Ketentuan Iklan dan Penandaan Secara Konsisten oleh Pelaku Usaha OBA, OK dan SK				91,560,000	22,890,000			
		9.	DR.4119.BIC.001 - UPT yang dilakukan pendampingan untuk melakukan pengawasan obat bahan alam dan suplemen kesehatan sesuai standar	051 - Pendampingan, Supervisi kepada UPT				B - kumpulan blokir				330,000,000	330,000,000			
		10.	DR.4119.BIC.001 - UPT yang dilakukan pendampingan untuk melakukan pengawasan obat bahan alam dan suplemen kesehatan sesuai standar	052 - Peningkatan Kualitas Pengambilan Keputusan Hasil Pengawasan Obat Bahan Alam dan Suplemen Kesehatan oleh Petugas UPT Badan POM				D - Self Blokir				402,520,000	402,520,000			
		13 -	Persentase iklan Suplemen Kesehatan yang memenuhi ketentuan	87	87	87	87	87	87	87	82	82	82	82	82	177,071,900
		NO	RO	KOMPONEN				SUB KOMPONEN				ANGGARAN	KONTRIBUSI			
		1.	DR.4119.BIC.001 - UPT yang dilakukan pendampingan untuk melakukan pengawasan obat bahan alam dan suplemen kesehatan sesuai standar	052 - Peningkatan Kualitas Pengambilan Keputusan Hasil Pengawasan Obat Bahan Alam dan Suplemen Kesehatan oleh Petugas UPT Badan POM				B - Peningkatan Kompetensi Petugas UPT Badan POM dalam Kesesuaian Evaluasi Hasil Pengawasan Iklan dan Penandaan				19,258,000	1,925,800			
		2.	DR.4119.BIC.001 - UPT yang dilakukan pendampingan untuk melakukan pengawasan obat bahan alam dan suplemen kesehatan sesuai standar	052 - Peningkatan Kualitas Pengambilan Keputusan Hasil Pengawasan Obat Bahan Alam dan Suplemen Kesehatan oleh Petugas UPT Badan POM				A - Pelatihan Sampling Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan Tingkat Pusat dan Daerah				57,100,000	5,710,000			
		3.	DR.4119.BIA.001 - Keputusan Hasil Pengawasan Sarana dan Produk Obat Bahan Alam dan Suplemen Kesehatan yang Diselesaikan Tepat Waktu	051 - Peningkatan Pemahaman Regulasi Terkini Terkait OBA OK SK Kepada Pelaku Usaha dan Masyarakat				A - Peningkatan Pemenuhan Ketentuan Iklan dan Penandaan Secara Konsisten oleh Pelaku Usaha OBA, OK dan SK				91,560,000	22,890,000			
		5.	DR.4119.BIC.001 - UPT yang dilakukan	051 - Pendampingan, Supervisi kepada UPT				A - Supervisi UPT dalam rangka				22,800,000	2,280,000			

NO.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
			NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI							
			pendampingan untuk melakukan pengawasan obat bahan alam dan suplemen kesehatan sesuai standar							Pelaksanaan Pengawasan OT dan SK					
		6.	DR.4119.BIC.001 - UPT yang dilakukan pendampingan untuk melakukan pengawasan obat bahan alam dan suplemen kesehatan sesuai standar		052 - Peningkatan Kualitas Pengambilan Keputusan Hasil Pengawasan Obat Bahan Alam dan Suplemen Kesehatan oleh Petugas UPT Badan POM		C - Training GMP Bagi Inspektur					45,701,000		4,570,100	
		7.	DR.4119.BIA.001 - Keputusan Hasil Pengawasan Sarana dan Produk Obat Bahan Alam dan Suplemen Kesehatan yang Diselesaikan Tepat Waktu		054 - Peningkatan Koordinasi dalam penguatan dan efektifitas pengawasan OBA OK SK		E - Pengembangan Kompetensi Petugas Pengawas OT dan SK melalui partisipasi aktif dalam kegiatan Internasional					135,000,000		67,500,000	
		8.	DR.4119.BIA.001 - Keputusan Hasil Pengawasan Sarana dan Produk Obat Bahan Alam dan Suplemen Kesehatan yang Diselesaikan Tepat Waktu		054 - Peningkatan Koordinasi dalam penguatan dan efektifitas pengawasan OBA OK SK		D - Capacity Building Direktorat Pengawasan OT dan SK					144,392,000		72,196,000	
		14 -	Persentase iklan Kosmetik yang memenuhi ketentuan	71	71	71	71	71	71	60	60	60	60	60	932,933,000
			NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI							
		1.	DR.4121.BIA.001 - Keputusan Hasil Pengawasan Kosmetika yang diselesaikan Tepat Waktu		052 - Pelaksanaan Koordinasi dalam rangka tindak lanjut pengawasan informasi dan promosi kosmetik		D - Inspirasi (Intensifikasi Peningkatan Literasi Beauty Enthusiast)					497,010,000		497,010,000	
		2.	DR.4121.BIA.001 - Keputusan Hasil Pengawasan Kosmetika yang diselesaikan Tepat Waktu		052 - Pelaksanaan Koordinasi dalam rangka tindak lanjut pengawasan informasi dan promosi kosmetik		B - Intensifikasi Pengawasan Promosi Kosmetik di Era Digital					435,923,000		435,923,000	
2.	02 - Meningkatnya peran aktif lintas sektor dalam pengawasan OBA, SK, Kos	01 - Persentase kabupaten/kota yang melaksanakan Program Sadar Jamu Aman											2	1,000,000,000	

NO.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
			NO	RO	KOMPONEN			SUB KOMPONEN			ANGGARAN			KONTRIBUSI	
		1.	DR.6385.UBA.002 - Kabupaten / kota yang melaksanakan pemberdayaan masyarakat dan pelaku usaha	051 - Pelaksanaan Pemberdayaan pemberdayaan masyarakat dan pelaku usaha			A - Program Sadar Jamu Aman			1,000,000,000			1,000,000,000		
3.	05 - Meningkatkan Kesadaran Masyarakat atas Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu	01 - Indeks Kesadaran Masyarakat terhadap Obat Bahan Alam, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang aman dan bermutu											86.87	5,226,369,000	
			NO	RO	KOMPONEN			SUB KOMPONEN			ANGGARAN			KONTRIBUSI	
			1.	DR.6385.BDC.001 - Fasilitator pemberdayaan masyarakat yang ditingkatkan peran sertanya dalam pengawasan OBA, SK, dan Kos	051 - Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat terkait OBA, SK dan Kos			C - Pemberdayaan Masyarakat di Bidang OBA, SK, Kos			103,171,000			103,171,000	
			2.	DR.6385.BDC.001 - Fasilitator pemberdayaan masyarakat yang ditingkatkan peran sertanya dalam pengawasan OBA, SK, dan Kos	051 - Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat terkait OBA, SK dan Kos			A - Pembentukan dan Pemberdayaan Duta Kosmetik /Jamu Aman dalam rangka BPOM Goes to School/Campus			835,012,000			835,012,000	
			3.	DR.6385.BDC.001 - Fasilitator pemberdayaan masyarakat yang ditingkatkan peran sertanya dalam pengawasan OBA, SK, dan Kos	051 - Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat terkait OBA, SK dan Kos			B - Pembentukan Penyuluh dan Kader Obat Bahan Alam, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik Aman melalui program BPOM Goes to Community			373,584,000			373,584,000	
			4.	DR.6385.BDC.001 - Fasilitator pemberdayaan masyarakat yang ditingkatkan peran sertanya dalam pengawasan OBA, SK, dan Kos	052 - Monitoring dan Evaluasi Kegiatan PMPU OT, SK dan Kos			A - Koordinasi Pemberdayaan OBA, SK dan Kos serta Peningkatan Kerjasama Lintas Sektor			719,615,000			719,615,000	
			5.	DR.6385.BDC.001 - Fasilitator pemberdayaan masyarakat yang ditingkatkan peran sertanya dalam pengawasan OBA, SK, dan Kos	052 - Monitoring dan Evaluasi Kegiatan PMPU OT, SK dan Kos			B - Layanan Perkantoran Direktorat PMPU OT, SK, Kos			105,784,000			105,784,000	

NO.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM		TARGET												ANGGARAN
		B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12			
		NO	RO	KOMPONEN			SUB KOMPONEN			ANGGARAN			KONTRIBUSI			
4.	06 - Meningkatnya efektifitas regulatory assistance dan kemandirian industri dalam pengembangan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	6.	DR.6385.BDC.001 - Fasilitator pemberdayaan masyarakat yang ditingkatkan peran sertanya dalam pengawasan OBA, SK, dan Kos	052 - Monitoring dan Evaluasi Kegiatan PMPU OT, SK dan Kos			D - Evaluasi Kegiatan Dit PMPU OTSKK			86,345,000			86,345,000			
		7.	DR.6385.BDC.001 - Fasilitator pemberdayaan masyarakat yang ditingkatkan peran sertanya dalam pengawasan OBA, SK, dan Kos	052 - Monitoring dan Evaluasi Kegiatan PMPU OT, SK dan Kos			E - Pengelolaan Sumber Daya Manusia			198,288,000			198,288,000			
		8.	DR.3165.BDC.001 - Masyarakat yang ditingkatkan pengetahuannya melalui KIE	053 - Komunikasi, Informasi dan Edukasi oleh Deputi II			A - KIE oleh Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha OT, SK, Kos			2,804,570,000			2,804,570,000			
		01 -	Persentase inovasi obat bahan alam yang didampingi sesuai standar	40	40	40	41.5	41.5	41.5	42.5	81	81	81	81	82.1	7,114,319,000
		NO	RO	KOMPONEN			SUB KOMPONEN			ANGGARAN			KONTRIBUSI			
		1.	DR.4128.QDB.001 - Pelaku usaha dan peneliti yang diberikan pendampingan di bidang registrasi obat bahan alam, suplemen kesehatan, dan kosmetik	051 - Penyelenggaraan bimbingan teknis dan pendampingan pelaku usaha di bidang registrasi OT, SK dan KOS			L - Workshop Uji Pralini/Klinik OT dan SK			68,610,000			68,610,000			
		2.	DR.4128.QDB.001 - Pelaku usaha dan peneliti yang diberikan pendampingan di bidang registrasi obat bahan alam, suplemen kesehatan, dan kosmetik	051 - Penyelenggaraan bimbingan teknis dan pendampingan pelaku usaha di bidang registrasi OT, SK dan KOS			D - Bimbingan Teknis Petugas Registrasi (Regulatory Officer) dalam rangka pemenuhan persyaratan notifikasi kosmetik			222,270,000			222,270,000			
		3.	DR.4128.QDB.001 - Pelaku usaha dan peneliti yang diberikan pendampingan di bidang registrasi obat bahan alam,	051 - Penyelenggaraan bimbingan teknis dan pendampingan pelaku usaha di bidang registrasi OT, SK dan KOS			E - OSS Jemput Bola dalam rangka percepatan penyelesaian registrasi OT, SK dan Kosmetik di Daerah			2,490,595,000			2,490,595,000			

NO.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
		NO RO	KOMPONEN			SUB KOMPONEN			ANGGARAN			KONTRIBUSI			
			suplemen kesehatan, dan kosmetik												
		4.	DR.4128.QDB.001 - Pelaku usaha dan peneliti yang diberikan pendampingan di bidang registrasi obat bahan alam, suplemen kesehatan, dan kosmetik			051 - Penyelenggaraan bimbingan teknis dan pendampingan pelaku usaha di bidang registrasi OT, SK dan KOS			F - Coaching Clinic Sistem dan Tata Cara Registrasi Produk dan Iklan Obat Bahan Alam dan Suplemen Kesehatan			115,352,000			115,352,000
		5.	DR.4128.QDB.001 - Pelaku usaha dan peneliti yang diberikan pendampingan di bidang registrasi obat bahan alam, suplemen kesehatan, dan kosmetik			051 - Penyelenggaraan bimbingan teknis dan pendampingan pelaku usaha di bidang registrasi OT, SK dan KOS			G - Pendampingan/Inspeksi Uji Praliniik Dan Atau Uji Klinik Obat Bahan Alam, OK, SK			401,466,000			401,466,000
		6.	DR.4128.QDB.001 - Pelaku usaha dan peneliti yang diberikan pendampingan di bidang registrasi obat bahan alam, suplemen kesehatan, dan kosmetik			051 - Penyelenggaraan bimbingan teknis dan pendampingan pelaku usaha di bidang registrasi OT, SK dan KOS			J - Pendampingan UMKM Jamu Berbasis Kearifan Lokal Dalam Rangka Pemenuhan persyaratan registrasi			121,969,000			121,969,000
		7.	DR.4128.QDB.001 - Pelaku usaha dan peneliti yang diberikan pendampingan di bidang registrasi obat bahan alam, suplemen kesehatan, dan kosmetik			051 - Penyelenggaraan bimbingan teknis dan pendampingan pelaku usaha di bidang registrasi OT, SK dan KOS			K - Forum Komunikasi Fasilitator Registrasi dalam Rangka Perkuatan Pendampingan UMKM Start Up Obat Tradisional, Obat Kuasi dan Kosmetik			269,090,000			269,090,000
		8.	DR.4128.QDB.001 - Pelaku usaha dan peneliti yang diberikan pendampingan di bidang registrasi obat bahan alam, suplemen kesehatan, dan kosmetik			051 - Penyelenggaraan bimbingan teknis dan pendampingan pelaku usaha di bidang registrasi OT, SK dan KOS			A - Coaching Clinic dan Bimbingan Teknis Petugas Registrasi (Regulatory Officer) dalam rangka pemenuhan persyaratan notifikasi kosmetik			120,109,000			120,109,000

NO.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM		TARGET												ANGGARAN
		B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12			
		NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN			ANGGARAN			KONTRIBUSI					
		9.	DR.4128.QDB.001 - Pelaku usaha dan peneliti yang diberikan pendampingan di bidang registrasi obat bahan alam, suplemen kesehatan, dan kosmetik	051 - Penyelenggaraan bimbingan teknis dan pendampingan pelaku usaha di bidang registrasi OT, SK dan KOS	B - Coaching Clinic dan Bimbingan Teknis Petugas Registrasi (Regulatory Officer) dan Pelaku Usaha UMKM dalam rangka Pemenuhan Dossier Registrasi Obat Bahan Alam, Obat Kuasi dan Suplemen Kesehatan			256,577,000			256,577,000					
		10.	DR.4128.QDB.001 - Pelaku usaha dan peneliti yang diberikan pendampingan di bidang registrasi obat bahan alam, suplemen kesehatan, dan kosmetik	051 - Penyelenggaraan bimbingan teknis dan pendampingan pelaku usaha di bidang registrasi OT, SK dan KOS	C - Bimbingan Teknis CUKB di bidang OT dan SK kepada peneliti, komisi etik, sponsor, organisasi riset kontrak			112,046,000			112,046,000					
		11.	DR.4128.QDB.001 - Pelaku usaha dan peneliti yang diberikan pendampingan di bidang registrasi obat bahan alam, suplemen kesehatan, dan kosmetik	051 - Penyelenggaraan bimbingan teknis dan pendampingan pelaku usaha di bidang registrasi OT, SK dan KOS	H - Pelayanan Prima Registrasi OBA, SK dan Kosmetik di Daerah dalam Rangka Percepatan Izin Edar			1,402,336,000			1,402,336,000					
		12.	DR.4128.QDB.001 - Pelaku usaha dan peneliti yang diberikan pendampingan di bidang registrasi obat bahan alam, suplemen kesehatan, dan kosmetik	051 - Penyelenggaraan bimbingan teknis dan pendampingan pelaku usaha di bidang registrasi OT, SK dan KOS	I - Clustering Registrasi Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan			108,180,000			108,180,000					
		13.	DR.4128.QDB.001 - Pelaku usaha dan peneliti yang diberikan pendampingan di bidang registrasi obat bahan alam, suplemen kesehatan, dan kosmetik	051 - Penyelenggaraan bimbingan teknis dan pendampingan pelaku usaha di bidang registrasi OT, SK dan KOS	M - Coaching Clinic Auditor DIP			75,719,000			75,719,000					
		14.	DR.4119.BDI.002 - Pelaku usaha IEBA yang diintervensi untuk menghasilkan bahan baku OBA yang bermutu	051 - Pengawasan Penerapan Regulasi Terkini dalam rangka kemandirian bahan baku	A - Pemeriksaan fasilitas produksi OBA pada IEBA yang telah memenuhi CPOTB			65,330,000			65,330,000					
		15.	DR.4119.BDI.002 - Pelaku usaha IEBA yang diintervensi untuk menghasilkan	052 - Peningkatan Pemahaman Regulasi Terkini dalam rangka	A - Focus Group Discussion dalam rangka Penyelarasan roadmap kemandirian bahan baku OBA Nasional			81,020,000			81,020,000					

NO.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN			ANGGARAN			KONTRIBUSI						
	bahan baku OBA yang bermutu	kemandirian bahan baku													
16.	DR.4119.BDI.002 - Pelaku usaha IEBA yang diintervensi untuk menghasilkan bahan baku OBA yang bermutu	052 - Peningkatan Pemahaman Regulasi Terkini dalam rangka kemandirian bahan baku	B - Dialog Interaktif dalam rangka penilaian pemenuhan CPOTB pada IEBA untuk menjamin keberlangsungan mutu Bahan Baku OBA			203,650,000			203,650,000						
17.	DR.4119.QDG.001 - Pelaku Usaha yang Diintervensi Berpeluang Ekspor	051 - Perluasan Akses Pasar Jamu Berpotensi Ekspor	A - Penyusunan Peta Potensi Pasar Jamu			158,405,000			158,405,000						
18.	DR.4119.QDG.001 - Pelaku Usaha yang Diintervensi Berpeluang Ekspor	051 - Perluasan Akses Pasar Jamu Berpotensi Ekspor	B - Jamu Export Assistance			316,285,000			316,285,000						
19.	DR.4119.QDG.001 - Pelaku Usaha yang Diintervensi Berpeluang Ekspor	052 - Koordinasi Ekosistem Ekspor Obat Bahan Alam	A - Penetrasi produk jamu berpotensi ekspor ke pasar luar negeri			297,560,000			297,560,000						
20.	DR.4119.QDG.001 - Pelaku Usaha yang Diintervensi Berpeluang Ekspor	052 - Koordinasi Ekosistem Ekspor Obat Bahan Alam	B - Bussiness Matching perluasan akses pasar jamu			27,750,000			27,750,000						
21.	DR.4119.QDG.002 - Pelaku Usaha yang Diintervensi Berkomitmen Untuk Memproduksi Produk Fitofarmaka	051 - Pengawasan Penerapan Regulasi Terkini dalam rangka memproduksi fitofarmaka	A - Pemeriksaan dan Penilaian fasilitas produksi Fitofarmaka pada IEBA yang telah memenuhi CPOTB			57,200,000			57,200,000						
22.	DR.4119.QDG.002 - Pelaku Usaha yang Diintervensi Berkomitmen Untuk Memproduksi Produk Fitofarmaka	052 - Peningkatan Pemahaman Regulasi Terkini dalam rangka memproduksi fitofarmaka	A - Bimbingan teknis dalam rangka percepatan pemenuhan CPOTB pada Industri dan Usaha di bidang OBA yang memproduksi OHT dan Fitofarmaka			79,120,000			79,120,000						
23.	DR.4119.QDG.002 - Pelaku Usaha yang Diintervensi Berkomitmen Untuk Memproduksi Produk Fitofarmaka	052 - Peningkatan Pemahaman Regulasi Terkini dalam rangka memproduksi fitofarmaka	C - Focus Group Discussion dalam rangka identifikasi dan penetapan fasilitas produksi Fitofarmaka bersama lintas sektor			63,680,000			63,680,000						
	02 - Persentase UMKM yang menerapkan standar keamanan dan mutu produksi OBA dan Kos		3	10	15	20	35	45	60	4,964,569,000					

NO.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
		NO	RO	KOMPONEN			SUB KOMPONEN			ANGGARAN			KONTRIBUSI		
		2.	DR.6385.QDC.001 - Fasilitator pemberdayaan pelaku UMKM OBA, SK dan Kos yang sesuai standar	052 - Fasilitator pemberdayaan pelaku UMKM Kosmetik yang sesuai standar			B - Penguatan Kapasitas Fasilitator UMKM Kosmetik			187,129,000			187,129,000		
		3.	DR.6385.QDC.001 - Fasilitator pemberdayaan pelaku UMKM OBA, SK dan Kos yang sesuai standar	051 - Fasilitator pemberdayaan pelaku UMKM OBA dan SK yang sesuai standar			F - Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM, Penyusunan Manajemen Risiko serta Monitoring Pelaksanaan SPIP			275,194,000			275,194,000		
		4.	DR.6385.QDC.001 - Fasilitator pemberdayaan pelaku UMKM OBA, SK dan Kos yang sesuai standar	051 - Fasilitator pemberdayaan pelaku UMKM OBA dan SK yang sesuai standar			D - Pengembangan dan Inovasi untuk Mendukung Daya Saing UMKM Obat Bahan Alam			183,350,000			183,350,000		
		5.	DR.6385.QDC.001 - Fasilitator pemberdayaan pelaku UMKM OBA, SK dan Kos yang sesuai standar	051 - Fasilitator pemberdayaan pelaku UMKM OBA dan SK yang sesuai standar			C - Peningkatan Pangsa Pasar melalui Program UMKM Meet Market			341,200,000			341,200,000		
		6.	DR.6385.QDC.001 - Fasilitator pemberdayaan pelaku UMKM OBA, SK dan Kos yang sesuai standar	051 - Fasilitator pemberdayaan pelaku UMKM OBA dan SK yang sesuai standar			A - Penguatan Pembinaan UMKM OBA melalui Fasilitator			568,502,000			568,502,000		
		8.	DR.4119.QDG.003 - Keputusan Hasil Penilaian Sarana dalam Rangka Peningkatan Kapasitas UMKM OBA yang Diselesaikan	052 - Peningkatan Pemahaman Regulasi Terkini dalam rangka kemandirian bahan baku			B - Blokir			124,110,000			124,110,000		
		9.	DR.4119.QDG.003 - Keputusan Hasil Penilaian Sarana dalam Rangka Peningkatan Kapasitas UMKM OBA yang Diselesaikan	051 - Akselerasi peningkatan kapasitas UMK melalui program naik kelas umk OBA Indonesia (NUANSA)			A - DESK CAPA kepada UMK di bidang Obat Bahan Alam dalam rangka Pemenuhan Program NUANSA			370,810,000			370,810,000		
		10.	DR.4119.QDG.003 - Keputusan Hasil Penilaian Sarana dalam Rangka Peningkatan Kapasitas UMKM OBA yang Diselesaikan	052 - Peningkatan Pemahaman Regulasi Terkini dalam rangka kemandirian bahan baku			A - Bimbingan teknis kepada UMK di bidang Obat Bahan Alam dalam rangka program NUANSA			165,080,000			165,080,000		
		11.	DR.6385.QDC.001 - Fasilitator pemberdayaan pelaku UMKM OBA, SK dan Kos yang sesuai standar	052 - Fasilitator pemberdayaan pelaku UMKM Kosmetik yang sesuai standar			H - Pengelolaan Arsip dan BMN			176,769,000			176,769,000		
		12.	DR.6385.QDC.001 - Fasilitator pemberdayaan	051 - Fasilitator pemberdayaan pelaku			E - Sinergitas Lintas Sektor dalam			396,445,000			396,445,000		

NO.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
		NO	RO				KOMPONEN		SUB KOMPONEN					ANGGARAN	KONTRIBUSI
			pelaku UMKM OBA, SK dan Kos yang sesuai standar				UMKM OBA dan SK yang sesuai standar		Mendukung Wellness Tourism						
		13.	DR.6385.QDC.001 - Fasilitator pemberdayaan pelaku UMKM OBA, SK dan Kos yang sesuai standar				052 - Fasilitator pemberdayaan pelaku UMKM Kosmetik yang sesuai standar		A - Intensifikasi Pendampingan Start Up dan UMKM Kosmetik					449,190,000	449,190,000
		14.	DR.6385.QDC.001 - Fasilitator pemberdayaan pelaku UMKM OBA, SK dan Kos yang sesuai standar				052 - Fasilitator pemberdayaan pelaku UMKM Kosmetik yang sesuai standar		G - Pengembangan dan Inovasi Kosmetik Berbahan Alam Indonesia					34,235,000	34,235,000
		15.	DR.6385.QDC.001 - Fasilitator pemberdayaan pelaku UMKM OBA, SK dan Kos yang sesuai standar				052 - Fasilitator pemberdayaan pelaku UMKM Kosmetik yang sesuai standar		F - Sinergitas Bersama Lintas Sektor dalam Pemberdayaan Pelaku Usaha Kosmetik					224,480,000	224,480,000
		16.	DR.6385.QDC.001 - Fasilitator pemberdayaan pelaku UMKM OBA, SK dan Kos yang sesuai standar				052 - Fasilitator pemberdayaan pelaku UMKM Kosmetik yang sesuai standar		E - Peningkatan Kapasitas dan Daya Saing UMKM Kosmetik					387,490,000	387,490,000
		17.	DR.6385.QDC.001 - Fasilitator pemberdayaan pelaku UMKM OBA, SK dan Kos yang sesuai standar				052 - Fasilitator pemberdayaan pelaku UMKM Kosmetik yang sesuai standar		D - Implementasi Program Orang Tua Angkat UMKM					368,494,000	368,494,000
		18.	DR.6385.QDC.001 - Fasilitator pemberdayaan pelaku UMKM OBA, SK dan Kos yang sesuai standar				052 - Fasilitator pemberdayaan pelaku UMKM Kosmetik yang sesuai standar		C - Expo Kosmetik Indonesia					712,091,000	712,091,000
			03 - Persentase Industri Obat Bahan alam dan Kosmetik yang Mencapai Tingkat Maturitas											34	1,500,000,000
		NO	RO				KOMPONEN		SUB KOMPONEN					ANGGARAN	KONTRIBUSI
		1.	DR.4119.BDI.001 - Industri OBA yang diintervensi dalam peningkatan maturitas CPOTB				052 - Penyempurnaan prosedur penilaian maturitas industri OBA		A - Penyusunan Database Pengawasan dalam Rangka Penilaian Maturitas Industri Obat Bahan Alam (OBA)					122,980,000	122,980,000

NO.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET												ANGGARAN
		B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12		
		NO	RO	KOMPONEN			SUB KOMPONEN			ANGGARAN			KONTRIBUSI		
5.	10 - Terwujudnya Tata Kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	2.	DR.4119.BDI.001 - Industri OBA yang diintervensi dalam peningkatan maturitas CPOTB	051 - Pengawasan penerapan regulasi maturitas industri OBA			A - Penilaian Tingkat Maturitas Industri Obat Bahan Alam sesuai Tools Maturitas yang Ditetapkan			277,020,000			277,020,000		
		4.	DR.4121.QDI.001 - Industri Kosmetik yang Mengikuti Program maturitas yg Dapat Menerapkan CPKB secara penuh	051 - Pelaksanaan Program Maturitas Industri Kosmetik Terhadap Pemenuhan Aspek CPKB			A - Akselerasi Maturitas Industri Kosmetik terhadap Pemenuhan Aspek CPKB			1,100,000,000			1,100,000,000		
		01 - Indeks Pelayanan Publik di Bidang Pengawasan Obat Bahan Alam, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan							4.7			8,453,795,000			
		NO	RO	KOMPONEN			SUB KOMPONEN			ANGGARAN			KONTRIBUSI		
		1.	DR.4121.BAH.001 - Keputusan Penilaian Sarana dan Produk Kosmetika yang Diselesaikan Tepat Waktu	051 - Pelaksanaan sertifikasi sarana produksi kosmetik			A - Penilaian Penerapan CPKB pada Industri Kosmetik dalam rangka Sertifikasi			933,365,000			933,365,000		
		2.	DR.4121.BAH.001 - Keputusan Penilaian Sarana dan Produk Kosmetika yang Diselesaikan Tepat Waktu	052 - Pelaksanaan sertifikasi SKI / SKE kosmetik			A - Verifikasi Teknis Permohonan SKI pada Sarana Importir Produk Jadi dan Bahan Baku Kosmetika			157,267,000			157,267,000		
		3.	DR.4121.BAH.001 - Keputusan Penilaian Sarana dan Produk Kosmetika yang Diselesaikan Tepat Waktu	052 - Pelaksanaan sertifikasi SKI / SKE kosmetik			C - Evaluasi Pelayanan Publik Pengawasan Keamanan dan Mutu Kosmetik			3,850,000			3,850,000		
		4.	DR.4119.BAH.001 - Layanan Publik Direktorat Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan yang prima	053 - Peningkatan Koordinasi dalam Penguatan dan Efektifitas Penilaian Sarana dan Produk OBA OK SK			G - Operasional pengelolaan kegiatan pada satker kedeputian 2			7,019,000			7,019,000		
		5.	DR.4119.BAH.001 - Layanan Publik Direktorat Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan yang prima	053 - Peningkatan Koordinasi dalam Penguatan dan Efektifitas Penilaian Sarana dan Produk OBA OK SK			H - Kumpulan blokir			102,562,000			102,562,000		

NO.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
			NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI							
		6.	DR.4119.BAH.001 - Layanan Publik Direktorat Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan yang prima	053 - Peningkatan Koordinasi dalam Penguatan dan Efektifitas Penilaian Sarana dan Produk OBA OK SK	I - Acara Puncak Hari Jamu 2025		227,117,000	227,117,000							
		7.	DR.4119.BAH.001 - Layanan Publik Direktorat Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan yang prima	054 - Layanan Publik Direktorat Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan	F - Kumpulan blokir		353,280,000	353,280,000							
		8.	DR.4128.BAH.001 - Layanan Publik Direktorat Registrasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik yang Prima	051 - Koordinasi Pengelolaan Kinerja Registrasi	B - Survei Kepuasan Pelanggan		58,274,000	58,274,000							
		9.	DR.4128.BAH.001 - Layanan Publik Direktorat Registrasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik yang Prima	051 - Koordinasi Pengelolaan Kinerja Registrasi	D - Pemetaan Konten dan Database Aplikasi Pelayanan Publik		460,896,000	460,896,000							
		10.	DR.4128.BAH.001 - Layanan Publik Direktorat Registrasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik yang Prima	051 - Koordinasi Pengelolaan Kinerja Registrasi	E - Penguatan Pelayanan Publik Prima Direktorat registrasi OT, SK dan Kos		1,685,121,000	1,685,121,000							
		11.	DR.4128.BAH.001 - Layanan Publik Direktorat Registrasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik yang Prima	051 - Koordinasi Pengelolaan Kinerja Registrasi	G - Pembekalan staff dalam rangka Peningkatan Kompetensi Petugas Pelayanan Publik		304,725,000	304,725,000							
		12.	DR.4128.BAH.001 - Layanan Publik Direktorat Registrasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik yang Prima	051 - Koordinasi Pengelolaan Kinerja Registrasi	H - Monev Pelayanan Pengaduan		10,200,000	10,200,000							
		13.	DR.4119.BAH.001 - Layanan Publik Direktorat Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan yang prima	051 - Peningkatan pemahaman regulasi terkini terkait penilaian sarana dan ekspor/impor kepada pelaku usaha dan masyarakat	D - Kumpulan blokir		59,375,000	59,375,000							
		14.	DR.4128.BAH.001 - Layanan Publik Direktorat Registrasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik yang Prima	051 - Koordinasi Pengelolaan Kinerja Registrasi	A - Peningkatan Kualitas Layanan Publik		383,930,000	383,930,000							

NO.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
		NO RO	KOMPONEN			SUB KOMPONEN			ANGGARAN			KONTRIBUSI			
		15.	DR.4128.BAH.001 - Layanan Publik Direktorat Registrasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik yang Prima			051 - Koordinasi Pengelolaan Kinerja Registrasi			C - Publikasi Layanan Publik			125,000,000			125,000,000
		16.	DR.4128.BAH.001 - Layanan Publik Direktorat Registrasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik yang Prima			051 - Koordinasi Pengelolaan Kinerja Registrasi			F - Development Dialogue dalam rangka Penguatan Tim Kerja Direktorat Registrasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik			189,825,000			189,825,000
		17.	DR.4119.BAH.001 - Layanan Publik Direktorat Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan yang prima			051 - Peningkatan pemahaman regulasi terkini terkait penilaian sarana dan ekspor/impor kepada pelaku usaha dan masyarakat			A - Bimbingan Teknis Persetujuan Penggunaan Bersama Fasilitas Obat Tradisional dengan non-Obat Tradisional bagi UKOT			116,662,000			116,662,000
		18.	DR.4119.BAH.001 - Layanan Publik Direktorat Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan yang prima			051 - Peningkatan pemahaman regulasi terkini terkait penilaian sarana dan ekspor/impor kepada pelaku usaha dan masyarakat			B - Upgrading Pemahaman Penerapan CPOTB pada Personil Kunci Industri di Bidang Obat Bahan Alam, Obat Kuasi, dan Suplemen Kesehatan			39,000,000			39,000,000
		19.	DR.4119.BAH.001 - Layanan Publik Direktorat Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan yang prima			051 - Peningkatan pemahaman regulasi terkini terkait penilaian sarana dan ekspor/impor kepada pelaku usaha dan masyarakat			C - Pembekalan Kepada Pelaku Usaha Distribusi terkait Pelayanan Publik Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan			45,100,000			45,100,000
		20.	DR.4119.BAH.001 - Layanan Publik Direktorat Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan yang prima			052 - Pelaksanaan penilaian sarana dan ekspor impor OBA, OK dan SK			B - Percepatan Pelayanan Publik melalui Desk CAPA Sertifikasi Sarana Produksi dan Distribusi Obat Tradisional, Obat Kuasi dan Suplemen kesehatan			222,040,000			222,040,000
		21.	DR.4119.BAH.001 - Layanan Publik Direktorat Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan yang prima			052 - Pelaksanaan penilaian sarana dan ekspor impor OBA, OK dan SK			A - Pemeriksaan Sarana Obat Bahan Alam, Obat Kuasi dan Suplemen Kesehatan dalam rangka Perizinan dan Pemenuhan CPOTB			331,727,000			331,727,000
		22.	DR.4119.BAH.001 - Layanan Publik Direktorat Pengawasan Obat			052 - Pelaksanaan penilaian sarana dan ekspor impor OBA, OK dan SK			C - Verifikasi Teknis Permohonan Ekspor dan Impor OT dan SK			205,724,000			205,724,000

NO.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
			NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI							
			Tradisional dan Suplemen Kesehatan yang prima												
		23.	DR.4119.BAH.001 - Layanan Publik Direktorat Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan yang prima		053 - Peningkatan Koordinasi dalam Penguatan dan Efektifitas Penilaian Sarana dan Produk OBA OK SK		B - Optimalisasi Dukungan Ekspor dan Perlindungan Daya Saing Produk Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan Nasional Melalui Peningkatan Koordinasi Lintas Sektor					97,125,000		97,125,000	
		24.	DR.4119.BAH.001 - Layanan Publik Direktorat Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan yang prima		053 - Peningkatan Koordinasi dalam Penguatan dan Efektifitas Penilaian Sarana dan Produk OBA OK SK		A - Penguatan Koordinasi bersama Lintas Sektor dan Stake holder terkait optimalisasi pengawasan Impor serta dukungan terhadap ekspor OT SK yang berdaya saing					56,344,000		56,344,000	
		25.	DR.4119.BAH.001 - Layanan Publik Direktorat Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan yang prima		053 - Peningkatan Koordinasi dalam Penguatan dan Efektifitas Penilaian Sarana dan Produk OBA OK SK		C - Peningkatan Peran UPT dalam rangka Intensifikasi Pengawasan Pemasukan OT SK melalui mekanisme SAS Barang Kiriman Peruntukan Pribadi					106,120,000		106,120,000	
		26.	DR.4119.BAH.001 - Layanan Publik Direktorat Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan yang prima		053 - Peningkatan Koordinasi dalam Penguatan dan Efektifitas Penilaian Sarana dan Produk OBA OK SK		D - Evaluasi Program Kerja dan Pembahasan Aktual					65,931,000		65,931,000	
		27.	DR.4119.BAH.001 - Layanan Publik Direktorat Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan yang prima		053 - Peningkatan Koordinasi dalam Penguatan dan Efektifitas Penilaian Sarana dan Produk OBA OK SK		E - Monitoring dan Koordinasi Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan					58,544,000		58,544,000	
		28.	DR.4119.BAH.001 - Layanan Publik Direktorat Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan yang prima		053 - Peningkatan Koordinasi dalam Penguatan dan Efektifitas Penilaian Sarana dan Produk OBA OK SK		F - Peningkatan Kompetensi Pejabat Fungsional Direktorat Pengawasan OT dan SK					102,361,000		102,361,000	
		29.	DR.4119.BAH.001 - Layanan Publik Direktorat Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan yang prima		054 - Layanan Publik Direktorat Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan		A - Administrasi pelaksanaan pelayanan publik					113,216,000		113,216,000	

NO.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
			NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI							
		30.	DR.4119.BAH.001 - Layanan Publik Direktorat Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan yang prima	054 - Layanan Publik Direktorat Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan	B - Forum Konsultasi Publik	12,326,000	12,326,000								
		31.	DR.4119.BAH.001 - Layanan Publik Direktorat Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan yang prima	054 - Layanan Publik Direktorat Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan	C - Peningkatan Kompetensi Petugas Layanan Publik	23,390,000	23,390,000								
		32.	DR.4119.BAH.001 - Layanan Publik Direktorat Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan yang prima	054 - Layanan Publik Direktorat Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan	E - Peningkatan Kompetensi Petugas Layanan publik SKI/SKE/SAS produk OT, Kuasi dan SK berdasarkan kendala dan permasalahan di lapangan	31,895,000	31,895,000								
		33.	DR.4119.BAH.001 - Layanan Publik Direktorat Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan yang prima	054 - Layanan Publik Direktorat Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan	D - Bimbingan Teknis kepada Petugas UPT dalam rangka peningkatan kompetensi di bidang pelayanan publik sertifikasi	27,400,000	27,400,000								
		34.	DR.4129.ABG.001 - Rekomendasi Kebijakan Keamanan, Mutu, dan Manfaat/ Khasiat Obat Bahan Alam, Obat Kuasi, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik yang diselesaikan	057 - Kajian Obat Bahan Alam, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang diselesaikan	D - Peningkatan Kualitas Layanan Publik	193,963,000	193,963,000								
		35.	DR.4129.ABG.001 - Rekomendasi Kebijakan Keamanan, Mutu, dan Manfaat/ Khasiat Obat Bahan Alam, Obat Kuasi, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik yang diselesaikan	057 - Kajian Obat Bahan Alam, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang diselesaikan	A - Kajian Keamanan, Mutu dan Manfaat dibidang Obat Bahan Alam	73,828,000	73,828,000								
		36.	DR.4129.ABG.001 - Rekomendasi Kebijakan Keamanan, Mutu, dan Manfaat/ Khasiat Obat Bahan Alam, Obat Kuasi, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik yang diselesaikan	057 - Kajian Obat Bahan Alam, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang diselesaikan	B - Kajian Keamanan, Mutu dan Manfaat Suplemen Kesehatan	81,350,000	81,350,000								
		37.	DR.4129.ABG.001 - Rekomendasi Kebijakan Keamanan, Mutu, dan Manfaat/ Khasiat Obat Bahan Alam, Obat Kuasi, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik yang diselesaikan	057 - Kajian Obat Bahan Alam, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang diselesaikan	C - Kajian Keamanan, Mutu dan Manfaat di bidang Kosmetik	82,100,000	82,100,000								

NO.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
		NO	RO	KOMPONEN			SUB KOMPONEN			ANGGARAN			KONTRIBUSI		
		38.	DR.4121.BAH.001 - Keputusan Penilaian Sarana dan Produk Kosmetika yang Diselesaikan Tepat Waktu	051 - Pelaksanaan sertifikasi sarana produksi kosmetik			B - Percepatan Pelayanan Publik melalui Desk Konsultasi Pelayanan Persetujuan Denah Bangunan Industri Kosmetik dan/atau CAPA Sertifikasi CPKB			363,001,000			363,001,000		
		39.	DR.4121.BAH.001 - Keputusan Penilaian Sarana dan Produk Kosmetika yang Diselesaikan Tepat Waktu	052 - Pelaksanaan sertifikasi SKI / SKE kosmetik			B - Evaluasi Pelayanan Publik Pengawasan Keamanan dan Mutu Kosmetik			375,016,000			375,016,000		
		40.	DR.6385.BAH.001 - Layanan Publik Dit. PMPU OT, SK, dan Kos yang Prima	051 - Layanan Publik Dit PMPU OTSKK yang Prima			B - Workshop Pelayanan Prima			378,530,000			378,530,000		
		41.	DR.6385.BAH.001 - Layanan Publik Dit. PMPU OT, SK, dan Kos yang Prima	051 - Layanan Publik Dit PMPU OTSKK yang Prima			A - Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik			121,470,000			121,470,000		
		42.	DR.4119.BAH.001 - Layanan Publik Direktorat Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan yang prima	052 - Pelaksanaan penilaian sarana dan ekspor impor OBA, OK dan SK			D - Intensifikasi Pengawasan Importir OBA dan SK dalam rangka Pengetatan Arus Impor Barang Tertentu			38,501,000			38,501,000		
		43.	DR.4121.BAH.001 - Keputusan Penilaian Sarana dan Produk Kosmetika yang Diselesaikan Tepat Waktu	051 - Pelaksanaan sertifikasi sarana produksi kosmetik			D - Forum Komunikasi Peningkatan Pelayanan Publik			29,325,000			29,325,000		
		02 - Nilai Pembangunan ZI Deputi Bidang Pengawasan OT, SK, dan Kos											89.96	1,403,806,950	
		NO	RO	KOMPONEN			SUB KOMPONEN			ANGGARAN			KONTRIBUSI		
		1.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	059 - Pelaksanaan Koordinasi Pengawasan Kometik			G - Peningkatan Kompetensi Direktorat Pengawasan Kosmetik			161,189,000			56,416,150		
		2.	DR.4129.CAN.001 - Perangkat pengolah data dan komunikasi	051 - Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi			B - Pengadaan Sarana Pendukung			29,300,000			29,300,000		
		3.	DR.4129.CAB.001 - Sarana Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	053 - Pengadaan peralatan fasilitas perkantoran			B - Pengadaan Fasilitas Kantor			20,500,000			20,500,000		

NO.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
			NO	RO	KOMPONEN		SUB KOMPONEN		ANGGARAN	KONTRIBUSI					
		4.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	059 - Pelaksanaan Koordinasi Pengawasan Kometik		E - Penataan Arsip Direktorat Pengawasan Kosmetik		46,611,000	16,313,850						
		5.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	059 - Pelaksanaan Koordinasi Pengawasan Kometik		B - Pemantapan Sistem Manajemen Mutu Direktorat Pengawasan Kosmetik		42,371,000	14,829,850						
		7.	DR.4129.CAN.001 - Perangkat pengolah data dan komunikasi	051 - Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi		A - Pengadaan Alat Pengolah Data Deputi II BPOM		975,200,000	487,600,000						
		8.	DR.4129.CAB.001 - Sarana Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	053 - Pengadaan peralatan fasilitas perkantoran		A - Pengadaan Meubelair		86,000,000	86,000,000						
		9.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	058 - Pelaksanaan Koordinasi Pengawasan OT dan SK		E - Sewa Rumah Dinas Jabatan Direktorat Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan		144,000,000	144,000,000						
		10.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	058 - Pelaksanaan Koordinasi Pengawasan OT dan SK		G - Pemantapan Zona Integritas dalam rangka Peningkatan Indeks Reformasi Birokrasi		97,532,000	97,532,000						
		11.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	059 - Pelaksanaan Koordinasi Pengawasan Kometik		D - Agent of Change dalam rangka Peningkatan Reformasi Birokrasi Direktorat Pengawasan Kosmetik		64,405,000	22,541,750						
		12.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	060 - Pelaksanaan Koordinasi Registrasi OT, SK dan Kos		B - Monitoring pelaksanaan SPIP dan Pembangunan Zona Integritas		29,095,000	29,095,000						
		13.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	058 - Pelaksanaan Koordinasi Pengawasan OT dan SK		F - Medical Check Up Pegawai Direktorat Pengawasan OT dan SK		174,870,000	174,870,000						
		14.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	062 - Pelaksanaan Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha OT,SK, dan Kos		A - Evaluasi Program Kerja		394,810,000	98,702,500						
		15.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	061 - Pelaksanaan Koordinasi Standardisasi OT, SK dan Kos		A - Pemantapan dan Internalisasi Reformasi Birokrasi		56,050,000	56,050,000						

NO.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
		NO	RO	KOMPONEN			SUB KOMPONEN			ANGGARAN			KONTRIBUSI		
		16.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	061 - Pelaksanaan Koordinasi Standardisasi OT, SK dan Kos			C - Pemeliharaan Subsite			13,590,000			13,590,000		
		17.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	059 - Pelaksanaan Koordinasi Pengawasan Kometik			A - Pemenuhan Keperluan Perkantoran			161,331,000			56,465,850		
		03 - Nilai AKIP Deputy Bidang Pengawasan OT, SK, dan Kos											81.66	704,550,600	
		NO	RO	KOMPONEN			SUB KOMPONEN			ANGGARAN			KONTRIBUSI		
		1.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	059 - Pelaksanaan Koordinasi Pengawasan Kometik			D - Agent of Change dalam rangka Peningkatan Reformasi Birokrasi Direktorat Pengawasan Kosmetik			64,405,000			19,321,500		
		2.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	059 - Pelaksanaan Koordinasi Pengawasan Kometik			A - Pemenuhan Keperluan Perkantoran			161,331,000			48,399,300		
		3.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	060 - Pelaksanaan Koordinasi Registrasi OT, SK dan Kos			D - Penyusunan Laporan Tahunan Direktorat Registrasi OT, SK dan Kos			9,276,000			9,276,000		
		4.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	062 - Pelaksanaan Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha OT,SK, dan Kos			A - Evaluasi Program Kerja			394,810,000			98,702,500		
		5.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	060 - Pelaksanaan Koordinasi Registrasi OT, SK dan Kos			E - Monitoring dan Evaluasi Capaian Kinerja			8,400,000			8,400,000		
		6.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	061 - Pelaksanaan Koordinasi Standardisasi OT, SK dan Kos			B - Penyusunan LAKIP dan LAPTAH			22,320,000			22,320,000		
		7.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	059 - Pelaksanaan Koordinasi Pengawasan Kometik			G - Peningkatan Kompetensi Direktorat Pengawasan Kosmetik			161,189,000			48,356,700		
		8.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	059 - Pelaksanaan Koordinasi Pengawasan Kometik			E - Penataan Arsip Direktorat Pengawasan Kosmetik			46,611,000			13,983,300		

NO.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
			NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI							
		9.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	059 - Pelaksanaan Koordinasi Pengawasan Kometik	B - Pemantapan Sistem Manajemen Mutu Direktorat Pengawasan Kosmetik	42,371,000	12,711,300								
		11.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	058 - Pelaksanaan Koordinasi Pengawasan OT dan SK	C - Pemeliharaan Operasional Direktorat Pengawasan OT dan SK	9,000,000	9,000,000								
		12.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	058 - Pelaksanaan Koordinasi Pengawasan OT dan SK	H - Pemblokiran Mandiri Dalam Rangka Efisiensi Belanja Pelaksanaan APBN TA 2025	414,080,000	414,080,000								
		04 - Nilai Kinerja Anggaran Deputi Bidang Pengawasan OT, SK, dan Kos												5	1,138,083,500
		2.	DR.4129.CAN.001 - Perangkat pengolah data dan komunikasi	051 - Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi	A - Pengadaan Alat Pengolah Data Deputi II BPOM	975,200,000	487,600,000								
		3.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	061 - Pelaksanaan Koordinasi Standardisasi OT, SK dan Kos	D - Monitoring Capaian Kinerja	75,800,000	75,800,000								
		4.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	059 - Pelaksanaan Koordinasi Pengawasan Kometik	F - Honorarium Pengelola PNBPD Direktorat Pengawasan Kosmetik	6,768,000	6,768,000								
		5.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	060 - Pelaksanaan Koordinasi Registrasi OT, SK dan Kos	A - Pemenuhan Keperluan perkantoran	247,807,000	247,807,000								
		6.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	060 - Pelaksanaan Koordinasi Registrasi OT, SK dan Kos	F - Evaluasi Pertanggungjawaban Keuangan	8,400,000	8,400,000								
		7.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	062 - Pelaksanaan Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha OT,SK, dan Kos	A - Evaluasi Program Kerja	394,810,000	98,702,500								
		8.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	060 - Pelaksanaan Koordinasi Registrasi OT, SK dan Kos	G - Penataan dan Pengelolaan BMN	22,690,000	22,690,000								

NO.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET											
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12
		NO	RO	KOMPONEN		SUB KOMPONEN		ANGGARAN		KONTRIBUSI				
		9.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	058 - Pelaksanaan Koordinasi Pengawasan OT dan SK		A - Honor Pengelola Keuangan Dit Pengawasan OT dan SK dan Satker Deputi II		5,760,000		5,760,000				
		10.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	058 - Pelaksanaan Koordinasi Pengawasan OT dan SK		B - Layanan Perkantoran Direktorat Pengawasan OT dan SK		184,556,000		184,556,000				
		05 - Indeks Manajemen Risiko Deputy Bidang Pengawasan OT, SK, dan Kos										2.95	323,867,950	
		NO	RO	KOMPONEN		SUB KOMPONEN		ANGGARAN		KONTRIBUSI				
		1.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	059 - Pelaksanaan Koordinasi Pengawasan Kometik		G - Peningkatan Kompetensi Direktorat Pengawasan Kosmetik		161,189,000		56,416,150				
		3.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	059 - Pelaksanaan Koordinasi Pengawasan Kometik		D - Agent of Change dalam rangka Peningkatan Reformasi Birokrasi Direktorat Pengawasan Kosmetik		64,405,000		22,541,750				
		4.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	059 - Pelaksanaan Koordinasi Pengawasan Kometik		B - Pemantapan Sistem Manajemen Mutu Direktorat Pengawasan Kosmetik		42,371,000		14,829,850				
		5.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	060 - Pelaksanaan Koordinasi Registrasi OT, SK dan Kos		C - Pengelolaan Sistem Manajemen Terintegrasi 9001:2015		14,858,000		14,858,000				
		6.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	058 - Pelaksanaan Koordinasi Pengawasan OT dan SK		D - Pengelolaan Manajemen Risiko Direktorat Pengawasan OT dan SK		10,500,000		10,500,000				
		7.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	062 - Pelaksanaan Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha OT,SK, dan Kos		A - Evaluasi Program Kerja		394,810,000		98,702,500				
		8.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	061 - Pelaksanaan Koordinasi Standardisasi OT, SK dan Kos		E - Penyelenggaraan Mitigasi Risiko		33,240,000		33,240,000				

NO.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM		TARGET												ANGGARAN
		B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12			
		NO	RO	KOMPONEN			SUB KOMPONEN			ANGGARAN			KONTRIBUSI			
		9.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	059 - Pelaksanaan Koordinasi Pengawasan Kometik			E - Penataan Arsip Direktorat Pengawasan Kosmetik			46,611,000			16,313,850			
		10.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	059 - Pelaksanaan Koordinasi Pengawasan Kometik			A - Pemenuhan Keperluan Perkantoran			161,331,000			56,465,850			
												Total	51,466,739,000			

Perencanaan target B1 hingga B7 mengacu pada Manual IKU Rancangan Awal Renstra 2025-2029. Perhitungan terhadap realisasi berdasarkan Manual IKU Rancangan Renstra 2025-2029 dituangkan pada Dokumen Laporan Kinerja (Interim dan Tahunan).

Jakarta, 28 Agustus 2025

Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional,
Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik



MOHAMAD KASHURI

PENGUKURAN KINERJA

Pengukuran Kinerja Deputi II BPOM tahun 2025 dapat dilihat melalui tautan

<https://docs.google.com/spreadsheets/d/1eMGQW6RUaDy0IDNdFUVZ54w2mBajqzw8/edit?gid=50002700#gid=50002700>

Capaian Kerja Direktorat Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan
Tahun 2025

No	Sasaran Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	Capaian	Proyeksi Ketercapaian Target akhir Periode renstra	Permasalahan	Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Meningkatnya efektifitas pengawasan obat bahan alam dan suplemen kesehatan	Nilai tata kelola pengawasan sarana dan produk obat bahan alam oleh UPT	89.5	94.74	105.85%	103.54	capaian kinerja sudah tercapai namun masih perlu peningkatan pada kepatuhan upt dalam melakukan pengawasan	Melaksanakan monev kinerja UPT dalam pengawasan OBA, OK, dan SK guna mengidentifikasi dan menindaklanjuti permasalahan capaian indikator kinerja. capaian telah melebihi target yang ditetapkan, namun masih perlu peningkatan pada kepatuhan dan kompetensi SDM dalam melakukan tindak lanjut hasil pengawasan Peningkatan kompetensi SDM Target telah terpenuhi namun masih terdapat UPT yang belum sepenuhnya mematuhi standar pengawasanMelaksanakan monev kinerja UPT dalam pengawasan OBA, OK, dan SK guna mengidentifikasi dan menindaklanjuti permasalahan capaian indikator kinerja "
2		Persentase keputusan hasil pengawasan produk obat bahan alam yang diselesaikan tepat waktu	96	98.34	102.44%	100.35	capaian telah melebihi target yang ditetapkan, namun masih perlu peningkatan pada kepatuhan dan kompetensi SDM dalam melakukan tindak lanjut hasil pengawasan	Peningkatan kompetensi SDM
3		Nilai tata kelola pengawasan sarana dan produk suplemen kesehatan oleh UPT	91.5	92.64	101.25%	99.08	Target telah terpenuhi namun masih terdapat upt yang belum sepenuhnya mematuhi standar pengawasan	Melaksanakan monev kinerja UPT dalam pengawasan OBA, OK, dan SK guna mengidentifikasi dan menindaklanjuti permasalahan capaian indikator kinerja.
4		Persentase keputusan hasil pengawasan produk suplemen kesehatan yang diselesaikan tepat waktu	92	96.79	105.21%	102.97	capaian telah melebihi target yang ditetapkan, namun masih perlu peningkatan pada kepatuhan dan kompetensi SDM dalam melakukan tindak lanjut hasil pengawasan	Peningkatan kompetensi sdm
5		Persentase keputusan hasil pengawasan sarana produksi obat bahan alam yang diselesaikan tepat waktu	80	84.85	106.06%	101.01	target telah tercapain, namun Sistem monitoring dan evaluasi CAPA tidak update sehingga berpotensi menyebabkan petugas salah menghitung rekapitulasi surat yang diterbitkan	Penetapan PIC dalam melakukan monitoring dan evaluasi laporan sarana produksi OBA
6		Persentase keputusan hasil pengawasan sarana produksi suplemen kesehatan yang diselesaikan tepat waktu	85	86.96	102.31%	97.71	target telah tercapai namun "Sistem monitoring dan evaluasi CAPA tidak update sehingga berpotensi menyebabkan petugas salah menghitung timeline surat yang diterbitkan "	Penetapan PIC dalam melakukan monitoring dan evaluasi laporan sarana produksi OBA

No	Sasaran Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	Capaian	Proyeksi Ketercapaian Target akhir Periode renstra	Permasalahan	Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7		Persentase keputusan hasil pengawasan sarana distribusi obat bahan alam yang diselesaikan tepat waktu	70	83.33	119.04%	112.61	target tercapai dengan meningkatnya kompetensi petugas dalam menindaklanjuti temuan tmk yang diproses tepat waktu dan sesuai standar	Melakukan penyesuaian target di tahun 2026
8		Persentase keputusan hasil pengawasan sarana distribusi suplemen kesehatan yang diselesaikan tepat waktu	75	100	133.33%	126.58	target tercapai dengan semakin meningkatnya kemampuan SDM dalam menindaklanjuti temuan TMK	Melakukan penyesuaian target di tahun 2026
9		Persentase keputusan hasil pengawasan iklan obat bahan alam yang diselesaikan tepat waktu	98.5	98.72	100.22%	99.82	target tercapai dengan semakin meningkatnya kemampuan SDM dalam menindaklanjuti temuan TMK	Pembuatan sistem monitoring
10		Persentase keputusan hasil pengawasan iklan suplemen kesehatan yang diselesaikan tepat waktu	76	84.87	111.67%	108.81	target tercapai dengan semakin meningkatnya kemampuan sdm dalam menindaklanjuti temuan TMK	Melakukan penyesuaian target di tahun 2026
11	Meningkatkan peran aktif lintas sektor dalam pengawasan obat bahan alam, obat kuasi dan suplemen kesehatan	Persentase Rekomendasi hasil pengawasan Obat Bahan Alam, obat kuasi dan suplemen kesehatan yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor	83	83.37	100.45%	98.08	target tercapai dengan semakin meningkatnya kemampuan sdm dalam menindaklanjuti temuan TMK	1. Forum koordinasi dengan pemangku kepentingan untuk dapat membahas tantangan pengawasan dilakukan pada tanggal 6 November 2025 bersama lintas sektor 2. Pembuatan tools untuk memverifikasi secara otomatis terkait rekomendasi yang sudah ditindaklanjuti oleh lintas sektor sehingga monitoring tindak lanjut dapat lebih efisien sudah dikick off bulan November 2025, namun baru dapat diimplementasikan tahun 2026
12	Meningkatnya kemandirian pelaku usaha dalam memproduksi obat bahan alam Indonesia aman dan bermutu	Jumlah pelaku usaha yang berkomitmen dalam pengembangan produk Fitofarmaka yang berdaya saing	9	0	0.00%	0.00	target tercapai dengan semakin meningkatnya kemampuan sdm dalam menindaklanjuti temuan TMK	Indikator akan diberhentikan dalam pelaksanaan kegiatan karena indikator bukan merupakan kendali atau tupoksi dari Dep2 dan sangat bergantung pada satgas fitofarmakan
13		Persentase Industri Ekstrak Bahan Alam (IEBA) yang menghasilkan bahan baku OBA yang bermutu	11	0	0.00%	0.00	target tercapai dengan semakin meningkatnya kemampuan sdm dalam menindaklanjuti temuan TMK	Indikator akan diberhentikan dalam pelaksanaan kegiatan karena indikator bukan merupakan kendali atau tupoksi dari Dep2
14	Meningkatnya Penerapan CPOTB pada UMK OBA untuk Peningkatan Keamanan dan Mutu	Persentase UMKM OBA yang meningkat kapasitasnya untuk menghasilkan produk berdaya saing	60	0	0.00%	100.00	target tercapai dengan semakin meningkatnya kemampuan sdm dalam menindaklanjuti temuan TMK	dapat dipertimbangkan jika alokasi anggaran memenuhi untuk kegiatan inovasi
15	Meningkatnya maturitas industri Obat Bahan Alam	Persentase Industri Obat bahan Alam yang ditetapkan maturitasnya dalam penerapan CPOTB terkini	12	0	0.00%	100.00	target tercapai dengan semakin meningkatnya kemampuan sdm dalam menindaklanjuti temuan TMK	dapat dipertimbangkan jika alokasi anggaran memenuhi untuk kegiatan inovasi

No	Sasaran Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	Capaian	Proyeksi Ketercapaian Target akhir Periode renstra	Permasalahan	Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
16	Layanan Publik Direktorat Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan yang prima	Persentase Keputusan Penilaian Sarana dan Produk Obat Bahan Alam dan Suplemen Kesehatan yang diselesaikan tepat waktu	93	93.1	100.11%	98.00	target tercapai dengan semakin meningkatnya kemampuan sdm dalam menindaklanjuti temuan TMK	target telah terpenuhi namun dapat dilakukan Peningkatan pemahaman pelaku usaha
17		Indeks pelayanan publik (IPP) dit Pengawasan OT dan SK	4.7	4.93	104.89%	100.61	target tercapai dengan semakin meningkatnya kemampuan sdm dalam menindaklanjuti temuan TMK	penyusunan proposal untuk ikut serta dalam kompetensi KOIN
18	Terwujudnya Tata Kelola pemerintah Direktorat Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan yang optimal	Nilai Pembangunan ZI Direktorat Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan	90.01	90.09	100.09%	98.57	target tercapai dengan semakin meningkatnya kemampuan sdm dalam menindaklanjuti temuan TMK	Untuk peningkatan capaian kinerja agar lebih baik dari tahun sebelumnya
19		Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Direktorat Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan	100	100	100.00%	100.00	target tercapai dengan semakin meningkatnya kemampuan sdm dalam menindaklanjuti temuan TMK	Meningkatkan kedisiplinan pelaksanaan anggaran sesuai RPD dan melakukan pertanggungjawaban keuangan secara tepat waktu
20		Persentase pemenuhan dokumen SAKIP Direktorat Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan	100	100	100.00%	100.00	target tercapai dengan semakin meningkatnya kemampuan sdm dalam menindaklanjuti temuan TMK	Meningkatkan kedisiplinan penyusunan dokumen SAKIP yang sesuai standar dan tepat waktu
21		Indeks Manajemen Risiko Direktorat Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan	3.01	2.97	98.64%	95.16	target tercapai dengan semakin meningkatnya kemampuan sdm dalam menindaklanjuti temuan TMK	1. Benchmarking ke Unit Kerja Pusat dengan nilai maturitas lebih dari 3,00 2. Menugaskan anggota tim kerja untuk mengikuti sertifikasi QRMA 3. Reviu risk register 4. Pelatihan manajemen risiko

Capaian Kerja Direktorat Pengawasan Kosmetik
Tahun 2025

No	Sasaran Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	Capaian	Proyeksi Ketercapaian Terget akhir Periode renstra	Permasalahan	Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Meningkatnya efektivitas pengawasan di bidang Kosmetik	Persentase keputusan hasil pengawasan produk kosmetik yang diselesaikan tepat waktu	90	92,83	103,15%	98,76	Capaian kinerja telah melebihi target yang ditetapkan namun masih terdapat kompetensi pelaku usaha dalam memahami regulasi penandaan belum memadai. Terdapat peningkatan TMS pengujian dari tahun sebelum nya dimana TMS terbanyak adalah mengandung bahan dilarang dan cemaran mikroba	1. Melakukan penajaman sampling kosmetik berbasis risiko, dengan prioritas pada produk berisiko tinggi, sampel kasus khusus, kosmetik impor, produk dengan riwayat hasil pengujian TMS, serta kosmetik yang diproduksi melalui kontrak produksi dan kausa merek. Hal ini dikarenakan pada kategori tersebut banyak ditemukan pelanggaran dan produk TMS. 2. Melakukan monitoring dan bimtek kepada pelaku usaha termasuk desk dalam penyelesaian TMK Penandaan
2		Persentase keputusan hasil pengawasan sarana dan produk kosmetik oleh UPT sesuai ketentuan	92	93,95	102,12%	97,86	Capaian kinerja telah melebihi target namun masih terdapat UPT yang belum sepenuhnya memenuhi ketentuan dalam hal kesesuaian sampling, ketepatan waktu dan kelengkapan pelaporan hasil pengawasan	Melakukan movev rutin kepada UPT terkait hasil pengawasan kosmetik
3		Persentase keputusan hasil pengawasan sarana produksi kosmetik yang diselesaikan tepat waktu	84	86	102,38%	97,73	Capaian kinerja telah tercapai namun masih terdapat beberapa kendala antara lain Jumlah industri kosmetik semakin meningkat dan kurang diimbangi dengan pemahaman dan konsistensi pelaku usaha terhadap regulasi, terutama penerapan CPKB. Adanya kegiatan intensifikasi pengawasan kosmetik dan Penajaman analisis risiko dari UP	•Melakukan reviu terhadap pengkategorian temuan ketidaksesuaian CPKB (mayor dan minor).
4		Persentase keputusan hasil pengawasan sarana distribusi kosmetik yang diselesaikan tepat waktu	84	84,55	100,66%	96,08	Realisasi IKU keputusan hasil pengawasan sarana distribusi kosmetik yang diselesaikan tepat waktu mencapai target karena: 1. Perkuatan monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh pimpinan terhadap capaian IKU (setiap 2 minggu sekali) namun masih terdapat kendala antara lain TMK terbesar Mayoritas pengecer kosmetik adalah pelaku usaha UMK dengan tingkat kepatuhan terhadap regulasi masih rendah dan aktivitas yang dilakukan dengan motif untuk memenuhi kebutuhan dasar perekonomian keluarga	1. Perkuatan movev tindak lanjut hasil pemeriksaan oleh pelaku usaha agar tindak lanjut yang diberikan efektif. 2. Desk tindak lanjut hasil pemeriksaan secara berkala untuk memantau lapora CAPA dari pelaku usaha terhadap tindak lanjut hasil pemeriksaan yang diterbitkan. 3. Sosialisasi yang lebih intensif terkait panduan penyusunan CAPA oleh pelaku usaha

No	Sasaran Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	Capaian	Proyeksi Ketercapaian Target akhir Periode renstra	Permasalahan	Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5		Persentase pemenuhan ketentuan oleh BUPN kosmetik yang telah diintervensi.	70	0	0	0,00	Anggaran Full terblokir	
6		Persentase keputusan hasil pengawasan iklan kosmetik yang diselesaikan tepat waktu	90	95,9	106,55%	102,02	Persentase keputusan hasil pengawasan iklan kosmetik yang diselesaikan tepat waktu telah melampaui target. Hal tersebut karena efektivitas pelaksanaan tindak lanjut dan optimalisasi pengelolaan proses penyelesaian keputusan secara tepat waktu.	malakukan tindak lanjut terhadap hasil pemeriksaan iklan yang TMK
7		Persentase hasil pengawasan kosmetik yang ditindaklanjuti oleh Lintas Sektor	83,85	84,71	101,02%	99,08	Capaian telah melebihi target namun masih di perlukan peningkatan koordinasi kepada lintas sektor untuk meningkatkan efektifitas hasil pengawasan kosmetik	Melakukan pertemuan dengan lintas sektor membahas isu-isu terkait kosmetik
8	Meningkatnya Maturitas Industri Kosmetik	Persentase Industri Kosmetik yang mengikuti Program maturitas yang dapat Menerapkan CPKB secara penuh	56	0	0	0,00	efisiensi/pemotongan anggaran sehingga kegiatan tidak dapat terlaksana dengan optimal	1. pengoptimalan anggaran yang tersedia 2. penggunaan media online untuk tahapan kegiatan yang memungkinkan dilakukan secara online
9	Meningkatnya efektifitas pelayanan publik di bidang pengawasan kosmetik	Indeks Pelayanan Publik di bidang Pengawasan Kosmetik	4,70	4,83	102,77%	98,57	telah memenuhi target namun masih perlu dilakukan upaya perbaikan	menindaklanjuti rekomendasi hasil penilaian IPP dari unit pengampu
10	Terwujudnya tatakelola pemerintah Direktorat Pengawasan Kosmetik yang optimal	Persentase permohonan penilaian sarana dan produk kosmetik yang di selesaikan tepat waktu	94,2	94,29	100,09%	99,25	- Peningkatan pengajuan sertifikat oleh pelaku usaha industri dibanding tahun sebelumnya - keterbatasan sumber daya inspektur dalam hal kuantitas (jumlah) industri yang mampu untuk diperiksa	- pengoptimalan peran inspektur untuk melakukan audit dalam rangka sertifikasi - peningkatan frekuensi pemeriksaan sarana - peningkatan kompetensi SDM di unit sehingga kompeten menjadi inspektur yang dapat memeriksa penerapan aspek CPKB full aspect
11		Nilai Pembangunan ZI Dit. Pengawasan Kosmetik	92,19	92,49	100,33%	99,81	Target telah terpenuhi namun masih perlu peningkatan dalam pemenuhan lke pada penilaian zona integritas	Melakukan perbaikan atas rekomendasi hasil penilaian ZI oleh tim penilai
12		Tingkat efisiensi penggunaan anggaran Direktorat Pengawasan Kosmetik	100	100	100,00%	100,00	Tercapainya indikator kinerja menunjukkan terpenuhinya perencanaan dan pelaksanaan kegiatan secara optimal.	Meningkatkan kedisiplinan pelaksanaan anggaran sesuai RPD dan melakukan pertanggungjawaban keuangan secara tepat waktu

No	Sasaran Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	Capaian	Proyeksi Ketercapaian Target akhir Periode renstra	Permasalahan	Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
13		Persentase pemenuhan dokumen SAKIP Dit. Pengawasan Kosmetik sesuai standar	100	100	100,00%	100,00	Tercapainya indikator kinerja menunjukkan terpenuhinya dokumen perencanaan, pengukuran, monitoring dan evaluasi sesuai standar dan tepat waktu.	Meningkatkan kedisiplinan penyusunan dokumen SAKIP yang sesuai standar dan tepat waktu
14		Indeks Manajemen Risiko Dit. Pengawasan Kosmetik	3,00	2,938	97,93%	90,12	Peningkatan pemahaman tim SPIP terkait manajemen risiko	1. Melakukan reuiu risk register 2. Melakukan sosialisasi manajemen risiko kepada seluruh pegawai 3. menindaklanjuti rekomendasi hasil penilaian manrisk 4. menugaskan pegawai yang ditunjuk untuk mengikuti pelatihan QRMO

Capaian Kerja Direktorat Registrasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik
Tahun 2025

No	Sasaran Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	Capaian	Proyeksi Ketercapaian Target akhir Periode renstra	Permasalahan	Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Meningkatnya obat bahan alam, suplemen kesehatan, dan kosmetik yang memenuhi persyaratan keamanan dan mutu sebelum diedarkan	Persentase obat bahan alam yang aman dan bermutu sebelum diedarkan	72,5	75,33	103,90	99,12	Tercapainya indikator kinerja meskipun adanya kenaikan jumlah berkas dibandingkan tahun sebelumnya dan masih terdapat berkas yang membutuhkan tambahan data didorong oleh pelaksanaan intensifikasi evaluasi berkas, desk registrasi, zero stock/stock opname/crash program secara berkala.	1. Melanjutkan desk dan intensifikasi penyelesaian berkas registrasi produk dan iklan OBA 2. Melanjutkan penyelesaian berkas permohonan registrasi dan notifikasi melalui program zero stock/ stock opname/ crash program satu kali dalam seminggu
		Persentase Suplemen Kesehatan yang aman dan bermutu sebelum diedarkan	65	80,29	123,50	116,36	Capaian kinerja melampaui 110% didorong oleh penyelesaian berkas carry over. Tercapainya indikator kinerja meskipun adanya kenaikan jumlah berkas dibandingkan tahun sebelumnya dan masih terdapat berkas yang membutuhkan tambahan data didorong oleh pelaksanaan intensifikasi evaluasi berkas, desk registrasi, zero stock/stock opname/crash program secara berkala.	1. Melanjutkan desk dan intensifikasi penyelesaian berkas registrasi produk dan iklan Obat Kuasi dan Suplemen Kesehatan 2. Melanjutkan penyelesaian berkas permohonan registrasi dan notifikasi melalui program zero stock/ stock opname/ crash program satu kali dalam seminggu
		Persentase Kosmetik yang aman dan bermutu sebelum diedarkan	94	95,84	101,96	99,84	Tercapainya indikator kinerja meskipun adanya kenaikan jumlah berkas dibandingkan tahun sebelumnya dan masih terdapat berkas yang membutuhkan tambahan data didorong oleh pelaksanaan intensifikasi evaluasi berkas, desk registrasi, zero stock/stock opname/crash program secara berkala.	1. Melanjutkan desk dan intensifikasi penyelesaian berkas registrasi produk kosmetik 2. Melanjutkan penyelesaian berkas permohonan notifikasi melalui program zero stock/ stock opname/ crash program satu kali dalam seminggu
2	Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha kosmetik terhadap Dokumen Informasi Produk (DIP)	Persentase keputusan penilaian Dokumen Informasi Produk (DIP) yang diselesaikan sesuai standar	50	52,87	105,74	96,13	Meskipun indikator kinerja telah tercapai, terdapat kendala seperti belum adanya peraturan yang mengatur pembatasan CAPA, sehingga CAPA bisa berkali-kali dan menyebabkan terhambatnya pelaksanaan audit DIP	1. Melaksanakan bimbingan teknis penyusunan DIP kepada pelaku usaha 2. Intensifikasi Penilaian DIP secara luring dan daring
3	Meningkatnya regulatory assistance di bidang registrasi obat bahan alam, suplemen kesehatan, dan notifikasi kosmetik	Persentase inovasi obat bahan alam yang didampingi sesuai standar di lingkup registrasi obat bahan alam	90,08	90,93	100,94	96,73	Meskipun indikator kinerja telah tercapai pada periode pelaporan, terdapat potensi risiko capaian kinerja yang perlu diantisipasi, yaitu adanya penelitian baru yang masih berada pada tahap awal sehingga memerlukan waktu penyelesaian menuju terbitnya persetujuan, dan berpotensi memengaruhi capaian kinerja pada periode berikutnya	Melanjutkan intensifikasi pendampingan penyusunan protokol dan evaluasi hasil uji praklinik/klinik dan menyelenggarakan webinar uji praklinik/klinik
		Persentase pendampingan di bidang registrasi obat bahan alam, suplemen kesehatan, notifikasi kosmetik, penilaian uji praklinik/klinik OBA, SK, dan Kosmetik serta	90	91,28	101,42	97,11	Meskipun indikator kinerja telah tercapai, terdapat kendala dalam pemenuhan registrasi obat bahan alam, suplemen kesehatan, dan notifikasi kosmetik akibat beragamnya latar belakang pelaku usaha dan peneliti di bidang obat bahan alam, suplemen kesehatan, dan kosmetik.	Melaksanakan kegiatan pendampingan melalui kolaborasi dengan organisasi eksternal, misalnya asosiasi pelaku usaha dan melanjutkan kegiatan OSS Registrasi OBA, SK, dan Kos secara luring dan daring

No	Sasaran Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	Capaian	Proyeksi Ketercapaian Target akhir Periode renstra	Permasalahan	Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4	Layanan publik Direktorat Registrasi OT, SK, dan Kos yang prima	Indeks pelayanan publik (IPP) Direktorat Registrasi OT, SK, dan Kos	4,70	4,95	105,32	101,02	Meskipun indikator kinerja telah tercapai, masih terdapat kendala dalam pencapaian indikator kinerja di antaranya dipengaruhi oleh fluktuasi jumlah responden, perbedaan tingkat pemahaman responden dalam pengisian survei, serta variasi waktu dan kondisi responden saat mengisi survei karena ada responden yang mengisi di loket, ada juga yang mengisi setelah kegiatan desk di daerah. Pencapaian indikator kinerja mencerminkan komitmen unit kerja dalam mewujudkan pelayanan publik yang prima.	Menindaklanjuti rekomendasi perbaikan sebagaimana Berita Acara Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik Dit. Registrasi OT, SK, dan Kos di antaranya pada aspek Kebijakan Pelayanan, Profesionalisme SDM, dan Inovasi
5	Terwujudnya tata kelola pemerintah Direktorat Registrasi OT, SK, dan Kos yang optimal	Nilai Pembangunan ZI Dit. Registrasi OT, SK, dan Kos	91,50	91,59	100,10	99,23	Tercapainya indikator kinerja menunjukkan komitmen unit kerja dalam membangun zona integritas menuju WBBM. Namun meskipun demikian, terdapat beberapa kendala yang dihadapi di antaranya pada monitoring dan evaluasi penanganan benturan kepentingan, monitoring dan evaluasi inovasi pelayanan, dan monitoring dan evaluasi SKM periode sebelumnya, serta monitoring dan evaluasi capaian kinerja.	1. Melakukan monitoring dan evaluasi pembangunan ZI secara berkala 2. Melakukan internalisasi budaya kerja dan pola pikir, serta nilai BERAHLAK kepada seluruh pegawai 3. Melakukan tindak lanjut dan evaluasi yang relevan terhadap pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik 4. Menetapkan dan mengimplementasikan kebijakan terkait aturan disiplin/kode etik/kode perilaku 5. Mengimplementasikan pemberian reward and punishment berdasarkan capaian kinerja 6. Melakukan monitoring dan evaluasi penanganan benturan kepentingan secara berkala 7. Melakukan review SOP Mikro penanganan pengaduan konsumen dengan menambahkan mutu baku pada setiap proses 8. Melaksanakan monev inovasi pelayanan sesuai peta jalan inovasi 9. Melakukan monev SKM dan menyajikan hasil tindak lanjut periode sebelumnya 10. Melakukan evaluasi faktor penyebab tidak tercapainya target, rencana perbaikan, dan pemantauan realisasinya 11. Melakukan continuous improvement dalam meningkatkan kualitas pembangunan ZI
		Tingkat efisiensi penggunaan anggaran Dit. Registrasi OT, SK, dan Kos	100	100	100	100	Tercapainya indikator kinerja menunjukkan terpenuhinya perencanaan dan pelaksanaan kegiatan secara optimal.	Meningkatkan kedisiplinan pelaksanaan anggaran sesuai RPD dan melakukan pertanggungjawaban keuangan secara tepat waktu
		Persentase pemenuhan dokumen SAKIP Dit. Registrasi OT, SK, dan Kos	100	100	100	100	Tercapainya indikator kinerja menunjukkan terpenuhinya dokumen perencanaan, pengukuran, monitoring dan evaluasi sesuai standar dan tepat waktu.	Meningkatkan kedisiplinan penyusunan dokumen SAKIP yang sesuai standar dan tepat waktu

No	Sasaran Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	Capaian	Proyeksi Ketercapaian Target akhir Periode renstra	Permasalahan	Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Indeks Manajemen Resiko Dit. Registrasi OT, SK, dan Kos	3,02	2,938	97,61	91,81	1. Pemahaman mengenai manajemen risiko sesuai Petunjuk Pelaksanaan Manajemen Risiko di Badan POM masih belum komprehensif, khususnya terkait pengujian aktivitas pengendalian. 2. Kompetensi anggota tim manajemen risiko belum seragam karena terdapat anggota yang belum mengikuti pelatihan manrisk dari lembaga tersertifikasi. 3. Belum terdapat penyusunan roadmap rencana pengembangan kompetensi manajemen risiko untuk tahun selanjutnya. 4. Penyusunan kertas kerja penentuan risiko dilakukan setelah penyusunan risk register dan belum optimal hingga penentuan risiko residual. 5. Fokus anggota tim terbagi saat pelaksanaan desk manajemen risiko dikarenakan juga terdapat audit internal yang bersamaan dengan pelaksanaan desk manrisk. 6. Beberapa program baru belum dilakukan mitigasi risiko misal untuk inovasi I-CON belum terdapat identifikasi risikonya yang dapat terjadi sebagai contoh risiko jika terdapat perubahan peraturan terkait AKG atau kesalahan programming 7. Terdapat kesalahan penginputan simpulan efektivitas pengendalian daftar risiko di SAPA APIP. 8. Cascading untuk indikator indeks manajemen risiko hanya untuk anggota tim Manrisk dan belum dilakukan kepada seluruh Tim Manajemen Representatif sebagai pengelola risiko yang tercantum pada SK Tim Penyelenggara Sistem Pengendalian Intern (SPI). 9. Pelaksanaan deskripsi tindakan mitigasi pada menu pemantauan/reviu di aplikasi SAPAAPIP pada Semester I 2025 belum diisi.	1. Menyusun roadmap perencanaan pelatihan manajemen risiko berkesinambungan untuk meningkatkan kompetensi tim manrisk dan risk awareness pegawai. 2. Menyusun perbaikan kertas kerja dengan mencantumkan dasar/justikasi penetapan level kemungkinan dan dampak inheren dan residual. 3. Mengusulkan 2 anggota tim manrisk mengikuti pelatihan manajemen risiko dari lembaga tersertifikasi. 4. Melakukan reviu dan pembaruan dokumen manajemen risiko agar selaras dengan pedoman Petunjuk Pelaksanaan Manajemen Risiko di Badan POM. 5. Melakukan koordinasi intensif manrisk secara berkala dengan pimpinan, auditor internal, MR dan ketua tim kerja dan dibuktikan dalam dokumen notulen rapat. 6. Setiap perencanaan program baru perlu diidentifikasi risiko dan dilakukan pengukuran efektifitas pengendalian berdasarkan data serta menyusun mitigasi risiko apabila capaian tidak sesuai target. 7. Penyusunan daftar risiko selanjutnya menggunakan template excel pada SAPA APIP untuk meminimalisir kesalahan. 8. Menyertakan uraian tugas manajemen risiko pada SKP pegawai yang terlibat dalam Tim Manajemen Representatif sebagai pengelola risiko yang tercantum pada SK Tim SPI. 9. Melakukan pengisian progres atas pelaksanaan deskripsi tindakan mitigasi pada menu pemantauan/reviu secara lengkap di aplikasi SAPAAPIP secara berkala.

Capaian Kerja Direktorat Standardisasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik
Tahun 2025

No	Sasaran Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	Capaian	Proyeksi Ketercapaian Target akhir	Permasalahan	Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Tersusunnya Standar Obat Bahan Alam, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik yang efektif	Persentase standar Obat Bahan, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik yang disusun sesuai timeline tahapan penyusunan	100	100	100.00%	100%	Persentase standar Obat Bahan Alam, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik yang disusun sesuai timeline mencapai 100%, selaras dengan target yang ditetapkan. Capaian ini menunjukkan bahwa seluruh tahapan penyusunan—mulai dari perencanaan, harmonisasi, konsultasi publik, hingga finalisasi—dilaksanakan tepat waktu sesuai jadwal.	Mempertahankan kinerja saat ini agar seluruh regulasi yang disusun dapat terselesaikan sesuai rencana
2	Layanan Publik Direktorat Standardisasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang Prima	Indeks Pelayanan Publik (IPP) Direktorat Standardisasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik	4.7	4.95	105.32%	100%	Realisasi IPP mencapai 4,95, melampaui target 4,70. Hal ini dipengaruhi oleh tingginya kepuasan pengguna layanan. Namun, capaian yang jauh di atas target menunjukkan bahwa penetapan target awal belum sepenuhnya mencerminkan kondisi layanan aktual yang telah berkembang, sehingga perlu penyesuaian target pada periode berikutnya.	Mempertahankan kinerja saat ini agar nilai IPP dapat terus terjaga dan bila memungkinkan ditingkatkan mendekati nilai sempurna (5,00)
3	Terwujudnya Tatakelola Pemerintah Direktorat Standardisasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik yang optimal	Nilai Pembangunan ZI Dit. Standardisasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	89	89.21	100.24%	100%	Capaian nilai Pembangunan Zona Integritas mencapai 89,21, sedikit melampaui target 89. Pencapaian ini menunjukkan komitmen dan konsistensi pelaksanaan program pembangunan integritas, termasuk penguatan pengendalian gratifikasi, peningkatan kualitas layanan publik, dan perbaikan tata kelola.	Meningkatkan pembangunan Zona Integritas di Dit. Standardisasi dengan mengoptimalkan kinerja seluruh pokja perubahan, melakukan berbagai inovasi untuk peningkatan kualitas layanan publik
4	Terwujudnya Tatakelola Pemerintah Direktorat Standardisasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik yang optimal	Persentase pemenuhan dokumen SAKIP Dit. Standardisasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	100	100	100.00%	100%	Persentase pemenuhan dokumen SAKIP Direktorat Standardisasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik mencapai 100% sesuai dengan target yang ditetapkan. Capaian ini menunjukkan bahwa seluruh dokumen perencanaan, pengukuran, evaluasi, dan pelaporan kinerja telah disusun dan dipenuhi tepat waktu sesuai ketentuan SAKIP.	Mempertahankan kinerja saat ini
5		Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Dit. Standardisasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	100	100	100.00%	100%	Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Direktorat Standardisasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik mencapai 100%, sesuai dengan target yang ditetapkan. Capaian ini menunjukkan bahwa seluruh kegiatan telah dilaksanakan secara optimal dengan pemanfaatan anggaran yang efisien, tanpa terjadi kelebihan belanja maupun sisa anggaran yang signifikan	Mempertahankan kinerja saat ini

No	Sasaran Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	Capaian	Proyeksi Ketercapaian Target akhir	Permasalahan	Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
6		Indeks Manajemen Risiko Dit. Standardisasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	2.9	2.906	100.21%	100%	Indeks Manajemen Risiko Direktorat Standardisasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik mencapai 2,91, sedikit melampaui target 2,90. Capaian ini menunjukkan bahwa proses identifikasi, mitigasi, dan pemantauan risiko telah berjalan efektif dan konsisten sesuai pedoman manajemen risiko. Kenaikan nilai ini juga mencerminkan peningkatan kedisiplinan unit kerja dalam memperbarui register risiko, melaksanakan rencana mitigasi, serta memastikan risiko strategis dikelola secara berkelanjutan.	Meningkatkan pemahaman risiko dan pengetahuan pegawai terkait pengelolaan risiko melalui training Melakukan benchmarking pengelolaan risiko ke unit lain yang memiliki pengelolaan risiko yang lebih baik

Capaian Kerja Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik
Tahun 2025

No	Sasaran Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	Capaian	Proyeksi Ketercapaian Target akhir Periode Renstra	Permasalahan	Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Meningkatnya pengetahuan dan pemberdayaan masyarakat di Bidang Obat Bahan Alam, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	Persentase Penyuluh/Kader/Duta OBA, SK dan Kos yang aman yang berperan aktif dalam pemberdayaan masyarakat	92	100%	108.70%	108.70%	Tidak adanya kendala pada indikator yang telah dilaksanakan	1. akan dilaksanakannya bimbingan teknis dalam rangka pembentukan 2. adanya Monitoring dan evaluasi pada kegiatan
		Persentase Pemberdayaan Pelaku Usaha dan Masyarakat di Bidang OBA,SK, Kos yang dilakukan oleh UPT sesuai Pedoman	65	70,45%	108.38%	108.38%	IKK Pemberdayaan Masyarakat di bidang OBASKK yang dilakukan oleh UPT tidak dilaksanakan pada tahun ini karena di UPT tidak ada tuisi terkait pemberdayaan Masyarakat di bidang OBASKK	Telah dilakukan : - Penyusunan kajian kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di UPT - Menyusun new initiative terkait kegiatan Pemberdayaan Masyarakat - Monev penilaian UPT terkait pemberdayaan pelaku usaha di bidang OBASKK
2	Meningkatnya efektivitas regulatory assistance dalam penerapan CPOTB dan CPKB oleh UMKM	Persentase fasilitator yang dibina untuk melakukan pendampingan kepada UMKM OBA dan Kos	70	76.43%	109,19%	109,19%	Tidak adanya kendala pada indikator yang telah dilaksanakan	akan tetap dilaksanakan : - Pendampingan UMKM OBAKos - Monev fasilitator UMKM OBA dan Kos - Monev Program Orang Tua Angkat OBA Kos
3	Layanan Publik Dit.PMPU OTSKK yang Prima	Indeks Pelayanan Publik Direktorat PMPU OT,SK, Kos	4.7	4.88	103.83%	103.83%	Tidak adanya kendala pada indikator yang telah dilaksanakan	akan tetap dilaksakannya - Penyediaan Pojok Jamu - Persiapan Audit IPP/PEKPPP - - Pendampingan jemput bola obat bahan alam dan kosmetik
4	Meningkatnya peran serta pemerintah daerah dalam melaksanakan pemberdayaan keamanan jamu secara aktif	Persentase kabupaten/kota yang melaksanakan program sadar jamu aman	2	0	0	0	Pemblokiran anggaran seluruh kegiatan sehingga tidak dilaksanakan	Kegiatan ini belum dapat tercapai karena Pemblokiran anggaran seluruh kegiatan sehingga tidak dilaksanakan namun telah melakukan kegiatan: - Pembahasan pedoman teknis program sadar jamu aman. - Pemantauan ke Sumba Timur (NTT) dalam pendampingan kapasitas pemerintah terkait pengembangan usaha obat bahan alam serta pemberdayaan masyarakat dengan menghasilkan - draft pedoman teknis program sadar jamu aman - laporan kesiapan kabupaten/kota di Sumba Timur (NTT) yang akan melaksanakan Program Sadar Jamu Aman di tahun 2026

No	Sasaran Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	Capaian	Proyeksi Ketercapaian Target akhir Periode Renstra	Permasalahan	Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5	Terwujudnya tata kelola pemerintah Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan pelaku usaha, OT, SK, Kos yang Optimal	Nilai Pembangunan ZI Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha OT,SK dan Kos	87.1	87.92	100.94%	100.94%	Tidak adanya kendala pada indikator yang telah dilaksanakan	meskipun Nilai Pembangunan ZI Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha OT,SK dan Kos adalah 87,92 dan meraih wbbk tetap akan : 1. Melakukan monitoring dan evaluasi pembangunan ZI secara berkala 2. Melakukan internalisasi budaya kerja dan pola pikir, serta nilai BERAKHLAK kepada seluruh pegawai
		Tingkat efisiensi penggunaan anggaran Direktorat PMPU OT,SK, Kos	100	100	100%	100%	Tidak adanya kendala pada indikator yang telah dilaksanakan	- Pelaksanaan dan pemantauan kegiatan sesuai RPD dan POA - Percepatan pemberkasan Laporan Pertanggungjawaban - Koordinasi dengan Tim pelaksana serta Tim Keuangan di unit dan satker
		Persentase pemenuhan dokumen SAKIP Direktorat PMPU OT, SK , Kos	100	100%	100%	100%	Tidak adanya kendala pada indikator yang telah dilaksanakan	Telah dilakukan 11 pemenuhan dokumen SAKIP
		Indeks Manajemen Resiko Direktorat PMPU OT,SK, Kos	2.85	2.844	99.79%	99.79%	Tidak adanya kendala pada indikator yang telah dilaksanakan	Telah dilakukan audit manajemen resiko dan mendapatkan 2,844
6	Meningkatnya efektivitas KIE	Tingkat efektifitas KIE Obat Bahan Alam, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	89,34	90.63	101.44%	101.44%	adanya beberapa kendala antaralain : 1. adanya Perubahan sistem pembayaran melalui KKP dan transfer langsung ke perorangan 2. Penjadwalan pelaksanaan KIE berikutnya bergantung Tomas dan tim	Tingkat Efektifitas KIE diukur berdasarkan output kegiatan Masyarakat yang ditingkatkan pengetahuannya melalui Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE), dengan kegiatan yang dilakukan adalah KIE bersama tokoh masyarakat. Sehingga indeks KIE yang diukur hanya Indeks Survei TATAP MUKA sedangkan indeks Survei MEDIA tidak diukur. Pelaksanaan KIE telah dilaksanakan

Capaian Rincian Output (RO) Direktorat Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan
Tahun 2025

No	Rincian Output	Anggaran			Volume			Ket
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	
1	Keputusan Hasil Penilaian Sarana dan Produk Obat Bahan Alam dan Suplemen Kesehatan yang diselesaikan	1,908,045,000	1,908,025,114	100%	5,210	5,557	106.66%	1. RO ini dihitung dari jumlah permohonan penerbitan: Sertifikat CPOTB full aspek, CPOTB bertahap, fasber, Rekomendasi importir, pengajuan SK dan rekomendasi BUP serta SKI/SKE/SAS 2. Capaian melebihi target karena permohonan diselesaikan berdasarkan jumlah yang masuk
2	Industri OBA yang diintervensi dalam peningkatan maturitas CPOTB	0	0	0%	16	0	0.00%	Seluruh anggaran diblokir
3	Pelaku usaha IEBA yang diintervensi untuk menghasilkan bahan baku OBA yang bermutu	0	0	0%	16	0	0.00%	Seluruh anggaran diblokir
4	Keputusan Hasil Pengawasan Sarana dan Produk Obat Bahan Alam dan Suplemen Kesehatan yang Diselesaikan Tepat Waktu	879,153,000	879,139,716	100%	1,743	1,983	113.77%	1. Keputusan hasil pengawasan sarana dan produk terdiri dari tindak lanjut hasil pengawasan sarana produksi sarana distribusi, iklan, penandaan dan produk yang tidak memenuhi ketentuan/tidak memenuhi syarat. 2. Pada pelaksanaan renstra tahun 2025-2029 terdapat penajaman analisis resiko agar hasil pengawasan ditemukan tidak memenuhi ketentuan/tidak memenuhi syarat yang lebih sesuai dengan kondisi dipasaran 3. Dengan penajaman analisis resiko tersebut terjadi peningkatan jumlah hasil pengawasan yang tidak memenuhi syarat/tidak memenuhi ketentuan meningkat dari periode renstra 2020-2024
5	UPT yang dilakukan pendampingan untuk melakukan pengawasan obat bahan alam dan suplemen kesehatan sesuai standar	95,781,000	95,779,020	100%	12	12	100.00%	Dikarenakan keterbatasan anggaran sehingga pelaksanaan supervisi dilakukan melalui metode online
6	Keputusan/rekomendasi hasil pengawasan yang dikirimkan ke lintas sektor	240,040,000	240,038,012	100%	350	578	165.14%	1. keputusan/rekomendasi hasil pengawasan yang dikirimkan ke lintas sektor merupakan hasil iklan TMK yang ditindaklanjuti lintas sektor 2. Berdasarkan ketajaman analisis resiko maka meningkatkan jumlah iklan yang TMK untuk ditindaklanjuti oleh lintas sektor
7	Pelaku Usaha yang Diintervensi Berpeluang Ekspor	0	0	0%	7	0	0.00%	Seluruh anggaran diblokir
8	Pelaku Usaha yang Diintervensi Berkomitmen Untuk Memproduksi Produk Fitofarma	0	0	0%	4	0	0.00%	Seluruh anggaran diblokir
9	Keputusan Hasil Penilaian Sarana dalam Rangka Peningkatan Kapasitas UMKM OBA yang Diselesaikan	0	0	0%	149	0	0.00%	Seluruh anggaran diblokir

Capaian Realisasi Output Direktorat Pengawasan Kosmetik
Tahun 2025

No	Rincian Output	Anggaran			Volume			Ket
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	
1	Keputusan Penilaian Sarana dan Produk Kosmetika yang Diselesaikan Tepat Waktu	1,075,294,000	1,075,291,376	100%	11,114	26,843	241.52%	Realisasi kinerja melebihi target karena Jumlah pelayanan publik permohonan penerbitan sertifikat tidak dapat di kendalikan jumlah nya dan tidak dapat di lakukan penolakan terhadap pengajuan yang diterima sehingga realisasi output melebihi dari target yang ditetapkan.
2	Keputusan Hasil Pengawasan Kosmetika yang diselesaikan Tepat Waktu	1,197,950,000	1,197,938,360	100%	1,166	1,711	146.74%	Realisasi kinerja melebihi target karena adanya pelaksanaan kegiatan intensifikasi pengawasan kosmetik yang dilakukan pada bulan februari dan november secara serentak untuk seluruh UPT sehingga realisasi output keputusan hasil pengawasan melebihi dari target yang di tetapkan.
3	Pendampingan dan Pembinaan UPT Dalam Melakukan Pengawasan Kosmetik Sesuai Standar	-	-	0%	15	-	0.00%	Seluruh anggaran diblokir
4	Keputusan/Rekomendasi hasil pengawasan Kosmetik yang dikirimkan ke lintas sektor	-	-	0%	100	-	0.00%	Seluruh anggaran diblokir
5	Industri kosmetik yang dibina dalam rangka peningkatan maturitas	-	-	0%	35	-	0.00%	Seluruh anggaran diblokir
6	BUPN kosmetik yang telah diintervensi dalam pemenuhan ketentuan	-	-	0%	75	-	0.00%	Seluruh anggaran diblokir

Capaian Realisasi Output Direktorat Registrasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik
Tahun 2025

No	Rincian Output	Anggaran			Volume			Ket
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	
1	Keputusan Registrasi OBA, SK, dan Kos yang Diselesaikan sesuai Ketentuan	1,161,163,000	1,161,150,299	100.00%	81,000	124,945	154.25%	Realisasi mencapai 124.945 keputusan atau 154,25% dari target, yang dipengaruhi oleh tingginya jumlah permohonan registrasi serta intensifikasi proses evaluasi melalui desk registrasi, program zero stock/ stock opname/ crash program secara daring dan luring.
2	Keputusan penilaian Dokumen Informasi Produk (DIP) kosmetik yang diselesaikan sesuai standar	214,848,000	214,841,989	100.00%	1,200	1,203	100.25%	Capaian volume sebesar 1.203 dokumen atau 100,25% dari target mencerminkan konsistensi pelaksanaan audit DIP secara <i>on site</i> , desk konsultasi penilaian DIP, dan bimbingan teknis penyusunan DIP melalui program INCHARGE
3	Pelaku usaha dan peneliti yang diberikan pendampingan di bidang registrasi obat bahan alam, suplemen kesehatan, dan kosmetik	1,561,965,000	1,561,948,995	100.00%	3,340	4,052	121.32%	Realisasi volume mencapai 4.052 peserta atau 121,32% dari target, yang didorong oleh meningkatnya kebutuhan pendampingan registrasi melalui PROAKSI BERPADU (Program Akselerasi Registrasi Bersama dan Pendampingan Terpadu) di berbagai daerah, bimbingan teknis, dan webinar baik secara langsung maupun <i>online</i> .
4	Layanan Publik Dit. Registrasi OT, SK, Kos yang Prima	324,615,000	324,613,542	100.00%	6	6	100.00%	Target dan realisasi volume layanan masing-masing sebesar 6 layanan atau 100%, menunjukkan bahwa seluruh layanan publik yang direncanakan dapat dilaksanakan sesuai standar pelayanan dan jadwal yang telah ditetapkan.

Capaian Rincian Output (RO) Direktorat Standardisasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik
Tahun 2025

No	Rincian Output	Anggaran			Volume			Ket
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	
1	4129.PFA.001 Standar Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik yang Disusun	2,825,617,000.00	2,825,612,763.00	100.00%	7 dokumen	7 dokumen	100%	Penyelesaian standar/regulasi dilakukan secara paralel untuk beberapa rancangan sekaligus, sehingga setiap tahapan memerlukan koordinasi lintas unit dan penyesuaian substansi yang berulang. Pola kerja paralel ini menyebabkan penyelesaian dokumen baru dapat dituntaskan secara kumulatif pada triwulan akhir. Akibatnya, capaian output penyusunan regulasi terlihat terkonsentrasi di akhir tahun meskipun proses penyusunannya telah berlangsung sepanjang tahun.
2	4129.ABG.001 Kajian Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang Diselesaikan	407,091,000.00	407,091,000.00	100.00%	170 dokumen	201 dokumen	118,23%	Realisasi kajian mencapai 201, melampaui target 170, karena mekanisme permohonan bersifat open submission melalui aplikasi. Seluruh permohonan yang masuk wajib diproses, sehingga peningkatan volume permohonan menyebabkan output yang dihasilkan melebihi target yang ditetapkan.
3	4129.CAB.001 Sarana Bidang Kesehatan	96,500,000.00	96,500,000.00	100.00%	18 unit	31 unit	172%	Realisasi pengadaan sarana dan prasarana mencapai 31 unit, melebihi target 18 unit. Hal ini disebabkan harga rata-rata pembelian barang lebih rendah dari estimasi perencanaan, sehingga alokasi anggaran yang tersedia memungkinkan penambahan jumlah unit yang dapat diadakan tanpa melampaui pagu anggaran.
4	4129.CAN.001 Sarana Bidang TIK	1,004,500,000.00	1,004,499,498.00	100.00%	69 unit	69 unit	100%	Realisasi Sarana Bidang TIK telah diselesaikan sesuai target yang ditetapkan
5	4129.BKB.001 Laporan Koordinasi Obat dan Makanan	194,100,000.00	194,097,963.00	100.00%	5 Laporan	5 Laporan	100%	Realisasi laporan Koordinasi Obat dan Makanan telah diselesaikan sesuai target yang ditetapkan

Capaian Realisasi Output Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik
Tahun 2025

No	Rincian Output	Anggaran			Volume			Ket
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	
1	3165.BDC.001.053 Masyarakat yang ditingkatkan pengetahuannya melalui KIE	1,525,900,000	1,525,899,045	100.00%	500	500	100.00%	Telah dilaksanakan KIE 20 titik pada tahun 2025
2	3165.BKB.001.062 Pelaksanaan Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha OT,SK, dan Kos	109,850,000	109,848,000	100.00%	1	1	100.00%	
3	6385.BAH.001 Layanan Publik Dit. PMPU OT, SK, dan Kos yang Prima	110,268,000	110,263,793	100.00%	1	1	100.00%	
4	6385.BDC.001 Fasilitator pemberdayaan masyarakat yang ditingkatkan peran sertanya dalam pengawasan OT, SK, dan Kos	1,163,817,000	1,163,807,140	100.00%	200	200	100.00%	Adanya IKK Pemberdayaan Masyarakat di bidang OBASKK yang dilakukan oleh UPT tidak dilaksanakan pada tahun ini karena di UPT tidak ada tuisi terkait pemberdayaan Masyarakat di bidang OBASKK
5	6385.QDC.001 Fasilitator pemberdayaan pelaku UMKM OT dan Kos yang sesuai standar	1,973,079,000	1,973,066,795	100.00%	97	107	110.31%	
6	6385.BDC.002 Layanan Sosialisasi	45,000,000	44,999,900	100.00%	150	150	100.00%	

Matriks Rekomendasi Triwulan III tahun 2025

No	Indikator	Kendala / Permasalahan	Rekomendasi	RTL	Timeline	Apakah Sudah dikelola sebagai Risiko	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Persentase Obat bahan alam yang aman dan bermutu	1. Capaian Sampling (82,62%) Capaian Uji sebesar (71,08%), capaian ini secara nasional sudah terpenuhi 2. Berikut temuan TMS OBA: Cemaran Mikroba (5,01%), Farmasetik (3,37%), Mengandung BKO (1,85%), TIE (1,44%) 3. TMK Penandaan mengalami peningkatan karena adanya TMK minor dan penambahan kategori sampling	1. Monitoring dan evaluasi berkelanjutan terhadap UPT dalam pemenuhan kesesuaian sampling terhadap Pedoman Sampling serta pengawasan penandaan 2. Tindak lanjut kepada pelaku usaha temuan produk OBA tidak aman dan bermutu	Penandaan: 1. Pemantauan terhadap pelaku usaha yang masih ditemukan pelanggaran penandaan berulang secara berkala 2. Kelanjutan kegiatan Progresif untuk percepatan tindak lanjut kepada pelaku usaha yang penandaannya TMK 1. Penyusunan juknis penanganan cemaran mikrobiologi pada OBA	Penandaan: s/d TW 4	Ya	OP-01	Masih maraknya peredaran Obat Bahan Alam mengandung Bahan Kimia Obat (BKO), terutama yang dipasarkan melalui distribusi daring.
2	Persentase Suplemen Kesehatan yang aman dan bermutu	1. Capaian Sampling (83,03%) Capaian Uji sebesar (75,84%) capaian ini secara nasional sudah terpenuhi 2. Rincian temuan TMS SK: TMS kadar Vitamin (5,33%), TIE (1,12%), Farmasetik (1,12%), Cemaran Mikroba (0,28%), BKO (0,28%) 3. Capaian kinerja tidak dapat disimpulkan karena UPT belum sepenuhnya melakukan sampling pada sampel SK yang beresiko dikarenakan: -SK risiko tinggi biasanya SK impor ilegal yg harganya mahal (melebihi harga sampel pd RAB) -SK impor ilegal kebanyakan beredar di sarana online sehingga perlu penambahan alokasi sampel online utk - SK loka dgn Riwayat TMS biasanya diproduksi oleh IF/IOT kecil dan tidak beredar di seluruh wilayah	1. Monitoring dan evaluasi berkelanjutan terhadap UPT dalam pemenuhan kesesuaian sampling terhadap Pedoman Sampling serta pengawasan penandaan 2. Tindak lanjut kepada pelaku usaha temuan produk SK tidak aman dan bermutu	1. Desk dengan UPT yang belum menemukan produk TMS di wilayahnya untuk penajaman teknis metode sampling targeted Penandaan: 1. Pemantauan terhadap pelaku usaha yang masih ditemukan pelanggaran penandaan berulang secara berkala 2. Kelanjutan kegiatan Progresif untuk percepatan tindak lanjut kepada pelaku usaha yang penandaannya TMK	Penandaan: s/d TW 4	Ya	OP-02	Pengawasan mutu kadar senyawa zat aktif tertentu dalam produk suplemen kesehatan masih terbatas pada pengawasan mutu kadar vitamin dan beberapa zat aktif.
3	Persentase Kosmetik yang aman dan bermutu	Capaian Sampling : 13.994 (80,87%) Capaian Pengujian : 11.695 (67,59%) MS : 11.428 produk (97,72%) TMS : 267 produk (2,28%) TMS terbanyak bahan berbahaya/dilarang : 125 produk (1,07%), kemudian TMS kedua terbanyak cemaran mikroba 100 produk (0,86%). TMS terbanyak bahan berbahaya/dilarang adalah kosmetik dengan sistem kontrak produksi, dimana ditemukan pelanggaran pihak yang tidak memiliki kewenangan melakukan produksi kosmetik yang ditambahkan bahan berbahaya/dilarang. Terdapat keterlibatan pihak pemilik merek dalam produksi kosmetik mengandung bahan berbahaya/dilarang. TMS kedua terbanyak (cemaran mikroba) disebabkan antara lain karena industri kosmetik menggunakan bahan baku adalah bahan alam; tidak menerapkan aspek CPKB secara konsisten, terutama terkait aspek sanitasi higiene; serta penyimpanan produk ruahan dengan masa tunggu yang lama TMK Penandaan terbanyak yaitu pencantuman klaim perlu data dukung (8.97%) dan klaim dilarang (5.85%) 3. TMK Penandaan dengan temuan klaim perlu data dukung dan klaim dilarang disebabkan oleh banyaknya inovasi yang dilakukan oleh perusahaan terutama dalam rangka marketing/penjualan. 4. TMK Penandaan dengan temuan klaim dilarang banyak ditemukan untuk produk yang mencantumkan klaim yang tidak diperbolehkan pada kosmetik dan mencantumkan klaim tidak mengandung nama bahan (ingredient) yang diperbolehkan dalam kosmetik, contoh: Paraben.	Melakukan tindak lanjut atas hasil pengawasan yang TMK	Pembinaan industri kosmetik oleh UPT setempat dan Ditwaskos untuk produk2 dengan hasil uji cemaran mikroba Monev UPT TW III untuk mempercepat sampling pengujian, terutama pengujian kosmetik Bimtek kepada pelaku usaha secara berkala terkait penandaan kosmetik	TW 4	Ya	OP-03	Masih beredarnya produk Kosmetik yang mengandung bahan berbahaya

No	Indikator	Kendala / Permasalahan	Rekomendasi	RTL	Timeline	Apakah Sudah dikelola sebagai Risiko	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
4	Indeks Kualitas Kebijakan Pengawasan Obat Bahan Alam, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	Tidak ada kendala, sedang dalam proses penilaian / asesmen oleh LAN	Menunggu hasil penilaian dari LAN		TW 4	Tidak		
5	Persentase rekomendasi hasil pengawasan Obat Bahan Alam, Suplemen Kesehatan, Obat Kuasi dan Kosmetik yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor	Penggunaan free tool bulk opener sebagai solusi untuk membuka seluruh link sekaligus cukup membantu mempercepat proses membuka link temuan iklan, namun tetap membutuhkan pengecekan manual untuk memastikan apakah takedown iklan telah dilakukan	Peningkatan koordinasi dengan stake holder	1. Forum koordinasi dengan pemangku kepentingan untuk dapat membahas tantangan pengawasan 2. Pembuatan tools untuk memverifikasi secara otomatis terkait rekomendasi yang sudah ditindaklanjuti oleh lintas sektor sehingga monitoring tindak lanjut dapat lebih efisien 3. Melakukan koordinasi dengan Kementerian Komunikasi dan Digital, IdEA, platform e-commerce dan lintas sektor lainnya agar dapat menindaklanjuti rekomendasi iklan yang tidak memenuhi ketentuan 4. Monitoring rekoemndasi lintas sektor yang sudah ditindaklanjuti	TW 4	Ya	S-02	Tidak semua lintas sektor/ stakeholder menindaklanjuti hasil pengawasan iklan dari Badan POM
6	Persentase sarana produksi Obat Bahan Alam yang memenuhi ketentuan	1. Dari target pemeriksaan 313 Sarana, terdapat 212 yang telah selesai diinspeksi atau setara 67%. 2. Temuan Hasil Pemeriksaan Sarana Produksi OBA periode Januari s/d September 2025 yaitu: -Sertifikat CPOBAB tidak berlaku (43,55%) -Sanitasi dan Higiene (19,35%) -Penerapan CPOBAB (16,13%) 3. Penyebab tingginya TMK CPOTB adalah (1) tingginya sertifikat CPOTB yang tidak diperpanjang, (2) UPT BPOM belum optimal dalam mengelompokkan hasil temuan inspeksi menjadi kategori mayor, minor, dan kritikal secara sistematis, sehingga berpengaruh terhadap penetapan kesimpulan hasil pengawasan MK/TMK. terdapat 29 UPT dengan capaian hasil pengawasan sarana produksi OBA dibawah 70%. UPT BPOM dengan capaian 0%	1. Monev kinerja UPT Triwulan III difokuskan pada pengawasan sarana produksi OBA untuk menindaklanjuti permasalahan capaian kinerja. 2. Intervensi terhadap tindak lanjut temuan pengawasan sarana produksi OBA	1. Berkordinasi dengan UPT BPOM di wilayah setempat untuk melakukan pendampingan kepada sarana produksi agar proses sertifikasi CPOTB dapat segera diselesaikan. 2. Melaksanakan pelatihan bagi inspektur terkait penyusunan laporan hasil inspeksi, termasuk pengelompokan dan pengkategorian temuan (Critical, Major, dan Minor). 3. Melakukan koordinasi dengan UPT BPOM untuk mempercepat realisasi pengawasan sarana produksi OBA dan SK. 4. Forum koordinasi kepada pelaku usaha	TW 4	Ya	SDM-01	Proses penyelesaian CAPA hasil inspeksi fasilitas produksi obat bahan alam lama/berlarut-larut
7	Persentase sarana produksi Suplemen Kesehatan yang memenuhi ketentuan	1. Dari target pemeriksaan 55 Sarana, terdapat 28 yang telah selesai diinspeksi atau setara 50%. 2. Temuan Hasi Pemeriksaan Sarana Produksi SK periode Januari s/d September 2025 yaitu Penerapan CPOBAB yang tidak sesuai ketentuan. 3. Penyebab tingginya TMK CPOTB adalah UPT BPOM belum optimal dalam mengelompokkan hasil temuan inspeksi menjadi kategori mayor, minor, dan kritikal secara sistematis, sehingga berpengaruh terhadap penetapan kesimpulan hasil pengawasan MK/TMK. 4. Terdapat 29 UPT dengan capaian hasil pengawasan sarana produksi SK dibawah 70%. UPT BPOM dengan capaian 0%	1. Monev kinerja UPT Triwulan III difokuskan pada pengawasan sarana produksi SK untuk menindaklanjuti permasalahan capaian kinerja. 2. Intervensi terhadap tindak lanjut temuan pengawasan sarana produksi OBA	1. Melaksanakan pelatihan bagi inspektur terkait penyusunan laporan hasil inspeksi, termasuk pengelompokan dan pengkategorian temuan (Critical, Major, dan Minor). 2. Melakukan koordinasi dengan UPT BPOM untuk mempercepat realisasi pengawasan sarana produksi OBA dan SK. 3. Forum koordinasi kepada pelaku usaha	TW 4	Ya	SDM-02	Proses penyelesaian CAPA hasil inspeksi fasilitas produksi suplemen kesehatan lama/berlarut-larut

No	Indikator	Kendala / Permasalahan	Rekomendasi	RTL	Timeline	Apakah Sudah dikelola sebagai Risiko	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
8	Persentase sarana produksi Kosmetik yang memenuhi ketentuan	1. Dari target pemeriksaan 266 sarana, terdapat 260 sarana telah diperiksa (97,7%). 2. Sarana TMK didominasi oleh temuan ketidaksesuaian CPKB (59,5%), kosmetik TIE (36,5%), dan kosmetik mengandung BB (4,0%). 3. Jumlah sarana yang MK tidak mencapai target 81% dikarenakan: - Jumlah industri kosmetik semakin meningkat dan kurang diimbangi dengan pemahaman dan konsistensi pelaku usaha terhadap regulasi, terutama penerapan CPKB. - Adanya kegiatan intensifikasi pengawasan kosmetik pada bulan Februari 2025, sehingga cakupan pemeriksaan sarana menjadi lebih luas dan menyasar sarana yang beresiko tinggi. - Penajaman analisis risiko dari UPT yang belum diimbangi dengan intensifikasi pembinaan (efisiensi anggaran). - Perlu dilakukan reviu terhadap pengkategorian temuan ketidaksesuaian CPKB (mayor dan minor).	•Perlu dilakukan reviu terhadap pengkategorian temuan ketidaksesuaian CPKB (mayor dan minor).	Melakukan movev UPT terkait pelaksanaan tindak lanjut Melakukan reviu terhadap pengkategorian temuan ketidaksesuaian CPKB (mayor dan minor) pada hasil pemeriksaan yang telah dilaporkan dan sosialisasi kepada petugas UPT untuk persamaan persepsi dalam penerapan pengkategorian temuan.	TW 4	Ya	S-03	Masih ditemukan industri kosmetik tidak menerapkan CPKB (Cara Pembuatan Kosmetik yang Baik)
9	Persentase fasilitas distribusi Obat Bahan Alam yang memenuhi ketentuan	Dari target 1834 sarana, terdapat 1021 sarana telah diperiksa (55,67%) 2. Sarana TMK didominasi oleh temuan OBA TIE (15,38%), OBA BKO (5,92%), OBA Kedaluwarsa (1,70%), TMK Penandaan (0,52%), Cara Penyimpanan tidak sesuai ketentuan dan Mutu (0,22%), Tidak memiliki catatan pembelian/penjualan/kartu stok dan Tanpa SKI (0,07%) 3. Jumlah sarana yang MK sebesar 75,74% melebihi target yang ditetapkan	Intensifikasi pengawasan Obat Bahan Alam dan Suplemen Kesehatan yang mengandung BKO dan Ilegal di sarana distribusi	Intensifikasi pengawasan Obat Bahan Alam dan Suplemen Kesehatan yang mengandung BKO dan Ilegal di sarana distribusi	TW IV	Ya	OP-04	Tidak dilaksanakan pemeriksaan terhadap fasilitas distribusi yang berisiko tinggi
10	Persentase fasilitas distribusi Suplemen Kesehatan yang memenuhi ketentuan	Dari target 949 sarana, terdapat 718 sarana telah diperiksa (75,66%) 2. Sarana TMK didominasi oleh temuan SK TIE (2,23%), SK Kedaluwarsa (1,67%), Cara Penyimpanan tidak sesuai ketentuan (1,39%) dan TMK Penandaan (0,28%) 3. Jumlah sarana yang MK sebesar 94,43% melebihi target yang ditetapkan	Intensifikasi pengawasan Obat Bahan Alam dan Suplemen Kesehatan yang mengandung BKO dan Ilegal di sarana distribusi	Intensifikasi pengawasan Obat Bahan Alam dan Suplemen Kesehatan yang mengandung BKO dan Ilegal di sarana distribusi	TW IV	Ya	OP-05	Penurunan mutu Suplemen kesehatan saat disimpan di fasilitas distribusi
11	Persentase fasilitas distribusi Kosmetik yang memenuhi ketentuan	1. Dari target pemeriksaan 4.660 Sarana, terdapat 3.732 yang telah selesai diinspeksi atau setara 80%. 2. Sarana TMK didominasi oleh adanya temuan kosmetik TIE sebanyak 73%. Temuan yang lainnya yaitu mengandung bahan dilarang (16%) dan kosmetik kedaluwarsa (11%). 3. Jumlah sarana yang MK tidak mencapai target 78% dikarenakan: -Berdasarkan data hasil pengawasan hingga bulan September 2025, jenis sarana dengan jumlah TMK terbesar adalah pengecer (73%). - Mayoritas pengecer kosmetik adalah pelaku usaha UMK dengan tingkat kepatuhan terhadap regulasi masih rendah dan aktivitas yang dilakukan dengan motif untuk memenuhi kebutuhan dasar perekonomian keluarga. - Di samping itu, pelaku usaha kosmetik semakin meningkat karena usaha kosmetik merupakan usaha yang menjanjikan bagi masyarakat namun banyak pelaku usaha yang belum paham regulasi. - Adanya kegiatan intensifikasi pengawasan kosmetik pada bulan Februari 2025, yang menargetkan pemeriksaan dilakukan terhadap sarana yang diduga beresiko tinggi melakukan pelanggaran, termasuk target tim penindakan. Penajaman analisis risiko dari UPT yang belum diimbangi dengan intensifikasi pembinaan (efisiensi anggaran).	Tindak lanjut terhadap hasil pemeriksaan yang belum mencapai target	Melakukan pembinaan terhadap sarana yang menjadi target pemeriksaan (jika anggaran tersedia), atau Melakukan pemilihan target sarana berdasarkan hasil pemeriksaan sebelumnya yang pernah dilakukan supervisi regulasi/ pembinaan. Melakukan pemeriksaan pada bulan November/ Desember untuk memenuhi target terhadap sarana yang telah diintervensi sebagaimana di atas.	TW IV	Ya	S-04	Masih ditemukan importir dan BUPN tidak memenuhi ketentuan PerBadan 12/2023 tentang Pengawasan Pembuatan dan Peredaran Kosmetik

No	Indikator	Kendala / Permasalahan	Rekomendasi	RTL	Timeline	Apakah Sudah dikelola sebagai Risiko	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
12	Persentase iklan Obat Bahan Alam yang memenuhi ketentuan	1. Pelaku usaha UMKM lebih sering melakukan klaim berlebihan karena dianggap dapat meningkatkan penjualan, meski melanggar aturan. Mereka cenderung beranggapan lebih baik meminta maaf daripada izin, yang menyulitkan pengawasan dan penerapan regulasi. 2. Penyiaran lokal sangat bergantung pada pendapatan iklan, khususnya iklan obat bahan alam. Larangan ketat terhadap iklan ini dapat mengancam pendapatan radio, dimana saat ini dalam kondisi sulit, sehingga mereka cenderung mengabaikan regulasi demi menjaga pendapatan.	malakukan tindak lanjut terhadap hasil pemeriksaan iklan yang TMK	1. Bimbingan Teknis kepada pelaku usaha 2. Desk Progresif untuk percepatan tindak lanjut pelanggaran iklan oleh pelaku usaha	TW 4	Ya	OP-06	Tingginya jumlah iklan OBA tidak memenuhi ketentuan dengan klaim berlebihan dan menyesatkan serta tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku
13	Persentase iklan Suplemen Kesehatan yang memenuhi ketentuan	Industri besar seperti produsen suplemen kesehatan, biasa sering menggunakan jasa eksternal seperti influencer untuk mengiklankan produknya. Namun influencer kerap beriklan dengan klaim berlebihan, karena kurangnya literasi terkait regulasi iklan OBAOKSK. Industri besar juga cenderung beriklan secara intens dan kreatif, sehingga sering kali tidak mendaftarkan persetujuan iklan produknya sebelum dipublikasi, mengingat proses pendaftaran yang memakan waktu. Hal ini menyebabkan iklan yang sudah beredar tidak sesuai ketentuan.	malakukan tindak lanjut terhadap hasil pemeriksaan iklan yang TMK	1. Bimbingan Teknis kepada pelaku usaha 2. Desk Progresif untuk percepatan tindak lanjut pelanggaran iklan oleh pelaku usaha	TW 4	Ya	OP-07	Masih tingginya iklan SK yang tidak sesuai ketentuan di media internet oleh perseorangan
14	Persentase iklan Kosmetik yang memenuhi ketentuan	Pelaku usaha masih banyak membuat iklan dengan mencantumkan klaim klaim dilarang yang disebabkan oleh banyaknya inovasi yang dilakukan oleh perusahaan terutama dalam rangka marketing/penjualan.	malakukan tindak lanjut terhadap hasil pemeriksaan iklan yang TMK	Melakukan monitoring realisasi pencapaian target sampling iklan per jenis media Melakukan pembinaan kepada pelaku usaha terkait iklan kosmetik	TW 4	Ya	OP-08	Maraknya iklan/promosi kosmetik di media online baik media sosial maupun marketplace yang tidak memenuhi ketentuan
15	Persentase kabupaten/kota yang melaksanakan Program Sadar Jamu Aman	Seluruh anggaran kegiatan yang mendukung pelaksanaan Program Sadar Jamu Aman diblokir	Melakukan usulan pembukaan blokir atau realokasi anggaran pada kegiatan prioritas yang mendukung program Sadar Jamu Aman.	Penyampaian usulan pembukaan blokir anggaran melalui mekanisme revisi DIPA.	TW 4	Ya	S-05	Program sadar jamu aman belum dapat dilaksanakan
16	Indeks Kesadaran Masyarakat terhadap Obat Bahan Alam, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang aman dan bermutu					Ya		
17	Persentase inovasi obat bahan alam yang didampingi sesuai standar	Tidak ada kendala	Meningkatkan kegiatan pendampingan penelitian uji praklinik/klinik OBA dan SK kepada peneliti	1. Pelaksanaan webinar uji praklinik/klinik 2. Desk konsultasi dan pendampingan penyusunan protokol uji praklinik dan klinik lebih intensif	TW IV	Ya	S-07	Ketidaklengkapan pemenuhan tambahan data protokol dan dokumen uji praklinik/klinik
18	Persentase UMKM yang menerapkan standar keamanan dan mutu produksi Obat Bahan Alam dan Kosmetik	Tidak ada kendala	Monev fasilitator dalam pendampingan kepada UMKM OBA dan Kosmetik	Pelaksanaan monev fasilitator TW IV di bulan Npvmber	TW IV	Ya	S-08	Penerapan Cara Produksi yang baik tidak dilaksanakan secara konsisten dan sesuai ketentuan di UMKM OBA, Kosmetik, dan UMK Pangan Olahan
19	Persentase Industri Obat bahan alam dan kosmetik yang mencapai tingkat maturitas	Seluruh anggaran diblokir				Ya	S-09	Kegiatan akselerasi tidak dapat terlaksana
20	Indeks Pelayanan Publik di Bidang Pengawasan Obat Bahan Alam, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan	Capaian kinerja mencapai target	Tidak ada rekomendasi untuk triwulan 3 karena rekomendasi telah selesai dilaksanakan triwulan 2			Tidak		

No	Indikator	Kendala / Permasalahan	Rekomendasi	RTL	Timeline	Apakah Sudah dikelola sebagai Risiko	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
21	Nilai Pembangunan ZI Deputy Bidang Pengawasan OT, SK, dan Kos	Tidak ada kendala	Peningkatan implementasi kebijakan reformasi birokrasi pada beberapa area, seperti efektivitas tata kelola, perbaikan sistem layanan publik, serta optimalisasi peran sumber daya manusia.	1. Melaksanakan survei SPKP dan SPAK setiap bulan 2. Melakukan pemantauan terhadap WBS setiap bulan 3. Melaksanakan pengelolaan pengaduan setiap bulan 4. Melakukan pemantauan disiplin pegawai setiap bulan 5. Hasil LHE Dit. Registrasi OTSKK dan Dit. Pengawasan OTSK sudah keluar, selanjutnya akan dilakukan desk konsultasi oleh masing-masing unit	TW IV	Ya	OP-12	Pengajuan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) tidak lolos
22	Nilai AKIP Deputy Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	Tidak ada kendala	Monitoring pelaksanaan SAKIP sesuai dengan pedoman	Melakukan simulasi perbandingan Capaian tahun berjalan 2025 dengan capaian tahun 2024		Ya	OP-13	Data dukung penilaian AKIP
23	Nilai Kinerja Anggaran Deputy Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	melesetnya pelaksanaan kegiatan dari rencana menyebabkan rendahnya nilai IKPA pada sisi Rencana Penarikan Dana	Menyesuaikan RPD pada DIPA Hal III	Melakukan Revisi DIPA Hal III	TW IV	Ya	KU-01	Realisasi Keuangan tidak sesuai dengan Rencana Penarikan Dana (RPD) Halaman 3 DIPA
24	Indeks Manajemen Risiko Deputy Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	Penentuan risiko yang diangkat di level BPOM	1. Pembahasan risiko dengan Deputy 2. Pembahasan risiko dengan internal tim SPI	Persiapan Audit Manajemen Risiko	TW IV	Ya	SDM-05	Penyusunan daftar risiko tingkat deputy belum komprehensif

Matriks Status Tindak Lanjut Rekomendasi Triwulan III tahun 2025

No	Indikator	Kendala / Permasalahan TW sebelumnya	Rekomendasi TW Sebelumnya	RTL TW Sebelumnya	Status	Progres Rekomendasi	Timeline	Apakah Sudah dikelola sebagai Risiko	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Persentase Obat bahan alam yang aman dan bermutu	1. Capaian Sampling (82,62%) Capaian Uji sebesar (71,08%), capaian ini secara nasional sudah terpenuhi 2. Berikut temuan TMS OBA: Cemaran Mikroba (5,01%), Farmasetik (3,37%), Mengandung BKO (1,85%), TIE (1,44%) 3. TMK Penandaan mengalami peningkatan karena adanya TMK minor dan penambahan kategori sampling	1. Monitoring dan evaluasi berkelanjutan terhadap UPT dalam pemenuhan kesesuaian sampling terhadap Pedoman Sampling serta pengawasan penandaan 2. Tindak lanjut kepada pelaku usaha temuan produk OBA tidak aman dan bermutu	Penandaan: 1. Pemantauan terhadap pelaku usaha yang masih ditemukan pelanggaran penandaan berulang secara berkala 2. Kelanjutan kegiatan Progresif untuk percepatan tindak lanjut kepada pelaku usaha yang penandaannya TMK 1. Penyusunan juknis penanganan cemaran mikrobiologi pada OBA	Selesai	-	-	Ya	OP-01	Masih maraknya peredaran Obat Bahan Alam mengandung Bahan Kimia Obat (BKO), terutama yang dipasarkan melalui distribusi daring.
2	Persentase Suplemen Kesehatan yang aman dan bermutu	1. Capaian Sampling (83,03%) Capaian Uji sebesar (75,84%) capaian ini secara nasional sudah terpenuhi 2. Rincian temuan TMS SK: TMS kadar Vitamin (5,33%), TIE (1,12%), Farmasetik (1,12%), Cemaran Mikroba (0,28%), BKO (0,28%) 3. Capaian kinerja tidak dapat disimpulkan karena UPT belum sepenuhnya melakukan sampling pada sampel SK yang beresiko dikarenakan: -SK risiko tinggi biasanya SK impor ilegal yg harganya mahal (melebihi harga sampel pd RAB) -SK impor ilegal kebanyakan beredar di sarana online sehingga perlu penambahan alokasi sampel online utk - SK loka dgn Riwayat TMS biasanya diproduksi oleh IF/IOT kecil dan tidak beredar di seluruh wilayah	1. Monitoring dan evaluasi berkelanjutan terhadap UPT dalam pemenuhan kesesuaian sampling terhadap Pedoman Sampling serta pengawasan penandaan 2. Tindak lanjut kepada pelaku usaha temuan produk SK tidak aman dan bermutu	1. Desk dengan UPT yang belum menemukan produk TMS di wilayahnya untuk penajaman teknis metode sampling targeted Penandaan: 1. Pemantauan terhadap pelaku usaha yang masih ditemukan pelanggaran penandaan berulang secara berkala 2. Kelanjutan kegiatan Progresif untuk percepatan tindak lanjut kepada pelaku usaha yang penandaannya TMK	Selesai	-	-	Ya	OP-02	Pengawasan mutu kadar senyawa zat aktif tertentu dalam produk suplemen kesehatan masih terbatas pada pengawasan mutu kadar vitamin dan beberapa zat aktif.
3	Persentase Kosmetik yang aman dan bermutu	Capaian Sampling : 13.994 (80,87%) Capaian Pengujian : 11.695 (67,59%) MS : 11.428 produk (97,72%) TMS : 267 produk (2,28%) TMS terbanyak bahan berbahaya/dilarang : 125 produk (1,07%), kemudian TMS kedua terbanyak cemaran mikroba 100 produk (0,86%). TMS terbanyak bahan berbahaya/dilarang adalah kosmetik dengan sistem kontrak produksi, dimana ditemukan pelanggaran pihak yang tidak memiliki kewenangan melakukan produksi kosmetik yang ditambahkan bahan berbahaya/dilarang. Terdapat keterlibatan pihak pemilik merek dalam produksi kosmetik mengandung bahan berbahaya/dilarang. TMS kedua terbanyak (cemaran mikroba) disebabkan antara lain karena industri kosmetik menggunakan bahan baku adalah bahan alam; tidak menerapkan aspek CPKB secara konsisten, terutama terkait aspek sanitasi higiene; serta penyimpanan produk ruahan dengan masa tunggu yang lama TMK Penandaan terbanyak yaitu pencantuman klaim perlu data dukung (8,97%) dan klaim dilarang (5,85%) 3. TMK Penandaan dengan temuan klaim perlu data dukung dan klaim dilarang disebabkan oleh banyaknya inovasi yang dilakukan oleh perusahaan terutama dalam rangka marketing/penjualan. 4. TMK Penandaan dengan temuan klaim dilarang banyak ditemukan untuk produk yang mencantumkan klaim yang tidak diperbolehkan pada kosmetik dan mencantumkan klaim tidak mengandung nama bahan (ingredient) yang	Melakukan tindak lanjut atas hasil pengawasan yang TMK	Pembinaan industri kosmetik oleh UPT setempat dan Ditwasos untuk produk2 dengan hasil uji cemaran mikroba Monev UPT TW III untuk mempercepat sampling pengujian, terutama pengujian kosmetik Bimtek kepada pelaku usaha secara berkala terkait penandaan kosmetik	Selesai	-	-	Ya	OP-03	Masih beredarnya produk Kosmetik yang mengandung bahan berbahaya

Matriks Status Tindak Lanjut Rekomendasi Triwulan III tahun 2025

No	Indikator	Kendala / Permasalahan TW sebelumnya	Rekomendasi TW Sebelumnya	RTL TW Sebelumnya	Status	Progres Rekomendasi	Timeline	Apakah Sudah dikelola sebagai Risiko	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
4	Indeks Kualitas Kebijakan Pengawasan Obat Bahan Alam, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	Tidak ada kendala, sedang dalam proses penilaian / asesment oleh LAN	Menunggu hasil penilaian dari LAN	Sudah ada penilaian dari LAN dengan hasil sangat baik	Selesai	-	-	Tidak		
5	Persentase rekomendasi hasil pengawasan Obat Bahan Alam, Suplemen Kesehatan, Obat Kuasi dan Kosmetik yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor	Penggunaan free tool bulk opener sebagai solusi untuk membuka seluruh link sekaligus cukup membantu mempercepat proses membuka link temuan iklan, namun tetap membutuhkan pengecekan manual untuk memastikan apakah takedown iklan telah dilakukan	Peningkatan koordinasi dengan stake holder	1. Forum koordinasi dengan pemangku kepentingan untuk dapat membahas tantangan pengawasan 2. Pembuatan tools untuk memverifikasi secara otomatis terkait rekomendasi yang sudah ditindaklanjuti oleh lintas sektor sehingga monitoring tindak lanjut dapat lebih efisien 3. Melakukan koordinasi dengan Kementerian Komunikasi dan Digital, IdEA, platform e-commerce dan lintas sektor lainnya agar dapat menindaklanjuti rekomendasi iklan yang tidak memenuhi ketentuan 4. Monitoring rekoemndasi lintas sektor yang sudah ditindaklanjuti	Selesai	-	-	Ya	S-02	Tidak semua lintas sektor/ stakeholder menindaklanjuti hasil pengawasan iklan dari Badan POM
6	Persentase sarana produksi Obat Bahan Alam yang memenuhi ketentuan	1. Dari target pemeriksaan 313 Sarana, terdapat 212 yang telah selesai diinspeksi atau setara 67%. 2. Temuan Hasil Pemeriksaan Sarana Produksi OBA periode Januari s/d September 2025 yaitu: -Sertifikat CPOBAB tidak berlaku (43,55%) -Sanitasi dan Higiene (19,35%) -Penerapan CPOBAB (16,13%) 3. Penyebab tingginya TMK CPOTB adalah (1) tingginya sertifikat CPOTB yang tidak diperpanjang, (2) UPT BPOM belum optimal dalam mengelompokkan hasil temuan inspeksi menjadi kategori mayor, minor, dan kritikal secara sistematis, sehingga berpengaruh terhadap penetapan kesimpulan hasil pengawasan MK/TMK. terdapat 29 UPT dengan capaian hasil pengawasan sarana produksi OBA dibawah 70%. UPT BPOM dengan capaian 0%	1. Movev kinerja UPT Triwulan III difokuskan pada pengawasan sarana produksi OBA untuk menindaklanjuti permasalahan capaian kinerja. 2. Intervensi terhadap tindak lanjut temuan pengawasan sarana produksi OBA	1. Berkoordinasi dengan UPT BPOM di wilayah setempat untuk melakukan pendampingan kepada sarana produksi agar proses sertifikasi CPOTB dapat segera diselesaikan. 2. Melaksanakan pelatihan bagi inspektur terkait penyusunan laporan hasil inspeksi, termasuk pengelompokan dan pengkategorian temuan (Critical, Major, dan Minor). 3. Melakukan koordinasi dengan UPT BPOM untuk mempercepat realisasi pengawasan sarana produksi OBA dan SK. 4. Forum koordinasi kepada pelaku usaha	Selesai	-	-	Ya	SDM-01	Proses penyelesaian CAPA hasil inspeksi fasilitas produksi obat bahan alam lama/berlarut-larut
7	Persentase sarana produksi Suplemen Kesehatan yang memenuhi ketentuan	1.Dari target pemeriksaan 55 Sarana, terdapat 28 yang telah selesai diinspeksi atau setara 50%. 2. Temuan Hasi Pemeriksaan Sarana Produksi SK periode Januari s/d September 2025 yaitu Penerapan CPOBAB yang tidak sesuai ketentuan. 3. Penyebab tingginya TMK CPOTB adalah UPT BPOM belum optimal dalam mengelompokkan hasil temuan inspeksi menjadi kategori mayor, minor, dan kritikal secara sistematis, sehingga berpengaruh terhadap penetapan kesimpulan hasil pengawasan MK/TMK. 4. Terdapat 29 UPT dengan capaian hasil pengawasan sarana produksi SK dibawah 70%. UPT BPOM dengan capaian 0%	1. Movev kinerja UPT Triwulan III difokuskan pada pengawasan sarana produksi SK untuk menindaklanjuti permasalahan capaian kinerja. 2. Intervensi terhadap tindak lanjut temuan pengawasan sarana produksi OBA	1. Melaksanakan pelatihan bagi inspektur terkait penyusunan laporan hasil inspeksi, termasuk pengelompokan dan pengkategorian temuan (Critical, Major, dan Minor). 2. Melakukan koordinasi dengan UPT BPOM untuk mempercepat realisasi pengawasan sarana produksi OBA dan SK. 3. Forum koordinasi kepada pelaku usaha	Selesai	-	-	Ya	SDM-02	Proses penyelesaian CAPA hasil inspeksi fasilitas produksi suplemen kesehatan lama/berlarut-larut

Matriks Status Tindak Lanjut Rekomendasi Triwulan III tahun 2025

No	Indikator	Kendala / Permasalahan TW sebelumnya	Rekomendasi TW Sebelumnya	RTL TW Sebelumnya	Status	Progres Rekomendasi	Timeline	Apakah Sudah dikelola sebagai Risiko	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
8	Persentase sarana produksi Kosmetik yang memenuhi ketentuan	1. Dari target pemeriksaan 266 sarana, terdapat 260 sarana telah diperiksa (97,7%). 2. Sarana TMK didominasi oleh temuan ketidaksesuaian CPKB (59,5%), kosmetik TIE (36,5%), dan kosmetik mengandung BB (4,0%). 3. Jumlah sarana yang MK tidak mencapai target 81% dikarenakan: - Jumlah industri kosmetik semakin meningkat dan kurang diimbangi dengan pemahaman dan konsistensi pelaku usaha terhadap regulasi, terutama penerapan CPKB. - Adanya kegiatan intensifikasi pengawasan kosmetik pada bulan Februari 2025, sehingga cakupan pemeriksaan sarana menjadi lebih luas dan menyasar sarana yang beresiko tinggi. - Penajaman analisis risiko dari UPT yang belum diimbangi dengan intensifikasi pembinaan (efisiensi anggaran). - Perlu dilakukan reviu terhadap pengkategorian temuan ketidaksesuaian CPKB (mayor dan minor).	•Perlu dilakukan reviu terhadap pengkategorian temuan ketidaksesuaian CPKB (mayor dan minor).	Melakukan monev UPT terkait pelaksanaan tindak lanjut Melakukan reviu terhadap pengkategorian temuan ketidaksesuaian CPKB (mayor dan minor) pada hasil pemeriksaan yang telah dilaporkan dan sosialisasi kepada petugas UPT untuk persamaan persepsi dalam penerapan pengkategorian temuan.	Selesai	-	-	Ya	S-03	Masih ditemukan industri kosmetik tidak menerapkan CPKB (Cara Pembuatan Kosmetik yang Baik)
9	Persentase fasilitas distribusi Obat Bahan Alam yang memenuhi ketentuan	Dari target 1834 sarana, terdapat 1021 sarana telah diperiksa (55,67%) 2. Sarana TMK didominasi oleh temuan OBA TIE (15,38%), OBA BKO (5,92%), OBA Kedaluwarsa (1,70%), TMK Penandaan (0,52%), Cara Penyimpanan tidak sesuai ketentuan dan Mutu (0,22%), Tidak memiliki catatan pembelian/penjualan/kartu stok dan Tanpa SKI (0,07%) 3. Jumlah sarana yang MK sebesar 75,74% melebihi target yang ditetapkan	Intensifikasi pengawasan Obat Bahan Alam dan Suplemen Kesehatan yang mengandung BKO dan llegal di sarana distribusi	Intensifikasi pengawasan Obat Bahan Alam dan Suplemen Kesehatan yang mengandung BKO dan llegal di sarana distribusi	Selesai	-	-	Ya	OP-04	Tidak dilaksanakan pemeriksaan terhadap fasilitas distribusi yang berisiko tinggi
10	Persentase fasilitas distribusi Suplemen Kesehatan yang memenuhi ketentuan	Dari target 949 sarana, terdapat 718 sarana telah diperiksa (75,66%) 2. Sarana TMK didominasi oleh temuan SK TIE (2,23%), SK Kedaluwarsa (1,67%), Cara Penyimpanan tidak sesuai ketentuan (1,39%) dan TMK Penandaan (0,28%) 3. Jumlah sarana yang MK sebesar 94,43% melebihi target yang ditetapkan	Intensifikasi pengawasan Obat Bahan Alam dan Suplemen Kesehatan yang mengandung BKO dan llegal di sarana distribusi	Intensifikasi pengawasan Obat Bahan Alam dan Suplemen Kesehatan yang mengandung BKO dan llegal di sarana distribusi	Selesai	-	-	Ya	OP-05	Penurunan mutu Suplemen kesehatan saat disimpan di fasilitas distribusi

Matriks Status Tindak Lanjut Rekomendasi Triwulan III tahun 2025

No	Indikator	Kendala / Permasalahan TW sebelumnya	Rekomendasi TW Sebelumnya	RTL TW Sebelumnya	Status	Progres Rekomendasi	Timeline	Apakah Sudah dikelola sebagai Risiko	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
11	Persentase fasilitas distribusi Kosmetik yang memenuhi ketentuan	1. Dari target pemeriksaan 4.660 Sarana, terdapat 3.732 yang telah selesai diinspeksi atau setara 80%. 2. Sarana TMK didominasi oleh adanya temuan kosmetik TIE sebanyak 73%. Temuan yang lainnya yaitu mengandung bahan dilarang (16%) dan kosmetik kedaluwarsa (11%). 3. Jumlah sarana yang MK tidak mencapai target 78% dikarenakan: -Berdasarkan data hasil pengawasan hingga bulan September 2025, jenis sarana dengan jumlah TMK terbesar adalah pengecer (73%). - Mayoritas pengecer kosmetik adalah pelaku usaha UMK dengan tingkat kepatuhan terhadap regulasi masih rendah dan aktivitas yang dilakukan dengan motif untuk memenuhi kebutuhan dasar perekonomian keluarga. - Di samping itu, pelaku usaha kosmetik semakin meningkat karena usaha kosmetik merupakan usaha yang menjanjikan bagi masyarakat namun banyak pelaku usaha yang belum paham regulasi. - Adanya kegiatan intensifikasi pengawasan kosmetik pada bulan Februari 2025, yang menargetkan pemeriksaan dilakukan terhadap sarana yang diduga beresiko tinggi melakukan pelanggaran, termasuk target tim penindakan. Penajaman analisis risiko dari UPT yang belum diimbangi dengan intensifikasi pembinaan (efisiensi anggaran).	Tincak lanjut terhadap hasil pemeriksaan yang belum mencapai target	Melakukan pembinaan terhadap sarana yang menjadi target pemeriksaan (jika anggaran tersedia), atau Melakukan pemilihan target sarana berdasarkan hasil pemeriksaan sebelumnya yang pernah dilakukan supervisi regulasi/ pembinaan. Melakukan pemeriksaan pada bulan November/ Desember untuk memenuhi target terhadap sarana yang telah diintervensi sebagaimana di atas.	Selesai	-	-	Ya	S-04	Masih ditemukan importir dan BUPN tidak memenuhi ketentuan PerBadan 12/2023 tentang Pengawasan Pembuatan dan Peredaran Kosmetik
12	Persentase iklan Obat Bahan Alam yang memenuhi ketentuan	1. Pelaku usaha UMKM lebih sering melakukan klaim berlebihan karena dianggap dapat meningkatkan penjualan, meski melanggar aturan. Mereka cenderung beranggapan lebih baik meminta maaf daripada izin, yang menyulitkan pengawasan dan penerapan regulasi. 2. Penyiaran lokal sangat bergantung pada pendapatan iklan, khususnya iklan obat bahan alam. Larangan ketat terhadap iklan ini dapat mengancam pendapatan radio, dimana saat ini dalam kondisi sulit, sehingga mereka cenderung mengabaikan regulasi demi menjaga pendapatan.	malakukan tindak lanjut terhadap hasil pemeriksaan iklan yang TMK	1. Bimbingan Teknis kepada pelaku usaha 2. Desk Progresif untuk percepatan tindak lanjut pelanggaran iklan oleh pelaku usaha	Selesai	-	-	Ya	OP-06	Tingginya jumlah iklan OBA tidak memenuhi ketentuan dengan klaim berlebihan dan menyesatkan serta tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku
13	Persentase iklan Suplemen Kesehatan yang memenuhi ketentuan	Industri besar seperti produsen suplemen kesehatan, biasa sering menggunakan jasa eksternal seperti influencer untuk mengiklankan produknya. Namun influencer kerap beriklan dengan klaim berlebihan, karena kurangnya literasi terkait regulasi iklan OBAOKSK. Industri besar juga cenderung beriklan secara intens dan kreatif, sehingga sering kali tidak mendaftarkan persetujuan iklan produknya sebelum dipublikasi, mengingat proses pendaftaran yang memakan waktu. Hal ini menyebabkan iklan yang sudah beredar tidak sesuai ketentuan.	malakukan tindak lanjut terhadap hasil pemeriksaan iklan yang TMK	1. Bimbingan Teknis kepada pelaku usaha 2. Desk Progresif untuk percepatan tindak lanjut pelanggaran iklan oleh pelaku usaha	Selesai	-	-	Ya	OP-07	Masih tingginya iklan SK yang tidak sesuai ketentuan di media internet oleh perseorangan

Matriks Status Tindak Lanjut Rekomendasi Triwulan III tahun 2025

No	Indikator	Kendala / Permasalahan TW sebelumnya	Rekomendasi TW Sebelumnya	RTL TW Sebelumnya	Status	Progres Rekomendasi	Timeline	Apakah Sudah dikelola sebagai Risiko	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
14	Persentase iklan Kosmetik yang memenuhi ketentuan	Pelaku usaha masih banyak membuat iklan dengan mencantumkan klaim klaim dilarang yang disebabkan oleh banyaknya inovasi yang dilakukan oleh perusahaan terutama dalam rangka marketing/penjualan.	malakukan tindak lanjut terhadap hasil pemeriksaan iklan yang TMK	Melakukan monitoring realisasi pencapaian target sampling iklan per jenis media Melakukan pembinaan kepada pelaku usaha terkait iklan kosmetik	Selesai	-	-	Ya	OP-08	Maraknya iklan/promosi kosmetik di media online baik media sosial maupun marketplace yang tidak memenuhi ketentuan
15	Persentase kabupaten/kota yang melaksanakan Program Sadar Jamu Aman	Seluruh anggaran kegiatan yang mendukung pelaksanaan Program Sadar Jamu Aman diblokir	Melakukan usulan pembukaan blokir atau realokasi anggaran pada kegiatan prioritas yang mendukung program Sadar Jamu Aman.	Penyampaian usulan pembukaan blokir anggaran melalui mekanisme revisi DIPA.	Selesai	-	-	Ya	S-05	Program sadar jamu aman belum dapat dilaksanakan
16	Indeks Kesadaran Masyarakat terhadap Obat Bahan Alam, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang aman dan bermutu	-	-	-	Selesai	-	-	Ya		
17	Persentase inovasi obat bahan alam yang didampingi sesuai standar	Tidak ada kendala	Meningkatkan kegiatan pendampingan penelitian uji praklinik/klinik OBA dan SK kepada peneliti	1. Pelaksanaan webinar uji praklinik/klinik 2. Desk konsultasi dan pendampingan penyusunan protokol uji praklinik dan klinik lebih intensif	Selesai	-	-	Ya	S-07	Ketidaklengkapan pemenuhan tambahan data protokol dan dokumen uji praklinik/klinik
18	Persentase UMKM yang menerapkan standar keamanan dan mutu produksi Obat Bahan Alam dan Kosmetik	Tidak ada kendala	Monev fasilitator dalam pendampingan kepada UMKM OBA dan Kosmetik	Pelaksanaan monev fasilitator TW IV di bulan Npvenber	Selesai	-	-	Ya	S-08	Penerapan Cara Produksi yang baik tidak dilaksanakan secara konsisten dan sesuai ketentuan di UMKM OBA, Kosmetik, dan UMK Pangan Olahan
19	Persentase Industri Obat bahan alam dan kosmetik yang mencapai tingkat maturitas	Seluruh anggaran diblokir	-	-	Selesai	-	-	Ya	S-09	Kegiatan akselerasi tidak dapat terlaksana
20	Indeks Pelayanan Publik di Bidang Pengawasan Obat Bahan Alam, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan	Capaian kinerja mencapai target	Tidak ada rekomendasi untuk triwulan 3 karena rekomendasi telah selesai dilaksanakan triwulan 2	-	Selesai	-	-	Tidak		

Matriks Status Tindak Lanjut Rekomendasi Triwulan III tahun 2025

No	Indikator	Kendala / Permasalahan TW sebelumnya	Rekomendasi TW Sebelumnya	RTL TW Sebelumnya	Status	Progres Rekomendasi	Timeline	Apakah Sudah dikelola sebagai Risiko	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
21	Nilai Pembangunan ZI Deputy Bidang Pengawasan OT, SK, dan Kos	Tidak ada kendala	Peningkatan implementasi kebijakan reformasi birokrasi pada beberapa area, seperti efektivitas tata kelola, perbaikan sistem layanan publik, serta optimalisasi peran sumber daya manusia.	1. Melaksanakan survei SPKP dan SPAK setiap bulan 2. Melakukan pemantauan terhadap WBS setiap bulan 3. Melaksanakan pengelolaan pengaduan setiap bulan 4. Melakukan pemantauan disiplin pegawai setiap bulan 5. Hasil LHE Dit. Registrasi OTSKK dan Dit. Pengawasan OTSK sudah keluar, selanjutnya akan dilakukan desk konsultasi oleh masing-masing unit	Selesai	-	-	Ya	OP-12	Pengajuan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) tidak lolos
22	Nilai AKIP Deputy Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	Tidak ada kendala	Monitoring pelaksanaan SAKIP sesuai dengan pedoman	Melakukan simulasi perbandingan Capaian tahun berjalan 2025 dengan capaian tahun 2024	Selesai	-	-	Ya	OP-13	Data dukung penilaian AKIP
23	Nilai Kinerja Anggaran Deputy Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	melesetnya pelaksanaan kegiatan dari rencana menyebabkan rendahnya nilai IKPA pada sisi Rencana Penarikan Dana	Menyesuaikan RPD pada DIPA Hal III	Melakukan Revisi DIPA Hal III	Selesai	-	-	Ya	KU-01	Realisasi Keuangan tidak sesuai dengan Rencana Penarikan Dana (RPD) Halaman 3 DIPA
24	Indeks Manajemen Risiko Deputy Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	Penentuan risiko yang diangkat di level BPOM	1. Pembahasan risiko dengan Deputy 2. Pembahasan risiko dengan internal tim SPI	Persiapan Audit Manajemen Risiko	Selesai	-	-	Ya	SDM-05	Penyusunan daftar risiko tingkat deputy belum komprehensif

